



Lampiran VII :

Nomor :
Tanggal : _____ 2024

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN 2023**

**BAB I
PENDAHULUAN**

Puji syukur kehadirat Allah SWT, berkat rahmat-Nya Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una dapat menyusun dan menyajikan laporan keuangan sebagai wujud pertanggungjawaban Pemerintah Daerah guna mendukung terlaksananya tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Laporan Keuangan merupakan bentuk tanggungjawab moral maupun teknis oleh penyelenggara keuangan daerah yang telah mendapatkan amanat untuk melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan, serta digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang ditetapkan, menilai kondisi neraca keuangan, menilai efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan Keuangan yang disusun bertujuan menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una atas sumber daya yang dikelolanya, disamping itu menjadi dasar pengambilan keputusan bagi pemerintah daerah seperti keputusan investasi, pembiayaan maupun optimalisasi pendapatan dari aset produktif. Laporan Keuangan yang disusun meliputi:

- 1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA), menyajikan ikhtisar sumber alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.
- 2) Neraca, menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una mengenai Aset, Kewajiban dan Ekuitas dana per 31 Desember 2023.
- 3) Laporan Arus Kas (LAK), menyajikan informasi sehubungan dengan aktivitas operasional, investasi, pembiayaan yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas yang dikelola selama Tahun Anggaran 2023.
- 4) Laporan Operasional (LO), menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas akuntansi dan entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.



- 5) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL), menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos Saldo Anggaran Lebih awal, Penggunaan SAL, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan, Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun sebelumnya, Lain-Lain dan Saldo Anggaran Lebih Akhir.
- 6) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos ekuitas awal, Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya, perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap, serta ekuitas akhir.
- 7) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), untuk memberikan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam LRA, LP-SAL, Neraca, LO, LAK dan LPE, sehingga memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pelaporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan daerah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya bagian yang mengatur keuangan Negara;
- 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);
- 5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 6) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 7) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



- 8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
- 16) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 605);



- 17) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
- 18) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 19) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
- 20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
- 21) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 22) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 173);
- 23) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 24) Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2022 Nomor 1);
- 25) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun Anggaran 2023;
- 26) Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una;
- 27) Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 25 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una (Berita Daerah Kabupaten Tojo Una Tahun 2022 Nomor 6);
- 28) Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 36 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun Anggaran 2023; dan
- 29) Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 44 Tahun 2023 tentang Bagan Akun Standar Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2023 Nomor 44).



1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Sistematika Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun Anggaran 2023 disusun sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan, yang menjelaskan tentang maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, landasan hukum penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah dan sistematika penulisan laporan catatan atas laporan keuangan pemerintah daerah.
- Bab II Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD, yang menjelaskan tentang ekonomi makro, serta kebijakan keuangan.
- Bab III Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan pemerintah daerah, yang menjelaskan ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan pemerintah daerah dan hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.
- Bab IV Kebijakan akuntansi, yang menjelaskan entitas akuntansi/entitas pelaporan keuangan daerah, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah dan penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP pemerintah daerah.
- Bab V Penjelasan pos-pos laporan keuangan, yang menjelaskan pos-pos laporan keuangan pemerintah daerah yang terdiri dari (1) rincian dari penjelasan dari masing-masing pos-pos pelaporan keuangan pemerintah daerah yaitu Pendapatan-LRA, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, Beban, Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana serta (2) pengungkapan atas pos-pos dan aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada pemerintah daerah.
- Bab VI Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan pemerintah daerah.
- Bab VII Penutup.



BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu. Untuk menyusun PDRB digunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu lapangan usaha dan pengeluaran. Keduanya menyajikan komposisi data nilai tambah dirinci menurut sumber kegiatan ekonomi (lapangan usaha) dan menurut komponen penggunaannya. PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh sektor-sektor ekonomi atas berbagai aktivitas produksinya. Sedangkan dari sisi pengeluaran menjelaskan tentang penggunaan dari nilai tambah tersebut.

Pertumbuhan ekonomi secara nasional maupun regional mengalami perubahan akibat berbagai perubahan skala ekonomi, teknologi, dan SDM dalam memproduksi barang dan jasa. Adanya Pandemi Covid 19 juga sangat berpengaruh terhadap perekonomian suatu daerah. Namun di tahun 2022 ini perekonomian membaik dibanding 2021 yang mengalami penurunan.

PDRB atas dasar harga berlaku pada tahun 2022 sebesar 6 376,49 miliar rupiah. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan (harga tahun 2010) sebesar 4 012,69 miliar rupiah. Wabah corona turut memengaruhi perekonomian Kabupaten Tojo Una-Una. Pada tahun 2020 Kabupaten Tojo Una-Una mengalami pertumbuhan minus 3,17 persen dan di tahun 2022 sudah mengalami peningkatan kembali sebesar 3,46 persen.

Tabel 2.1 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Tojo Una-Una (juta rupiah), 2019–2023

Jenis Pengeluaran Type of Expenditure	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pengeluaran Konsumsi RumahTangga <i>Household Consumption Expenditure</i>	3.226.197,00	317.427.025	3.300.887,23	3.564.536,74	3.951.365,41
Pengeluaran Konsumsi LNPR <i>NPISH Consumption Expenditure</i>	88.697,40	87.206,62	92.037,96	103.082,52	117.528,87
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah <i>Government Consumption Expenditure</i>	1.181.615,60	1.239.541,28	1.338.438,45	1.347.759,14	1.385.795,97
Pembentukan Modal Tetap Bruto <i>Gross Fixed Capital Formation</i>	1.452.504,03	1.359.840,91	1.562.523,32	1.778.819,61	1.828.362,09
Perubahan Inventori <i>Changes in Inventories</i>	-48.195,68	21.132,04	22.884,14	27.516,05	34.480,65
Net Ekspor Barang dan Jasa <i>Net Exports of Goods and Services</i>	(208.971,53)	(295.365,81)	(377.780,66)	(445.223,49)	(505.117,03)
Produk Domestik Regional Bruto Gross Regional Domestic Product	5.691.846,82	5.586.625,29	5.938.990,44	6.376.490,57	6.812.415,96

Sumber/Source: BPS, berbagai sensus, survei dan sumber lain/BPS-Statistics Indonesia, various census, survey, and other sources



2.2 Kebijakan Keuangan

Dalam penyusunan APBD Kabupaten Tojo Una-Una, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah Tahun Anggaran 2022 landasan hukumnya mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tersebut, maka Struktur APBD Kabupaten Tojo Una-Una Tahun Anggaran 2023 terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan.

- 1) Pendapatan yang meliputi :
 - a. Pendapatan Asli Daerah;
 - b. Pendapatan Transfer; dan
 - c. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah.
- 2) Belanja terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Tak Terduga, meliputi:
 - a. Belanja Operasi merupakan belanja yang dianggarkan, terdiri dari belanja pegawai, Belanja barang, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan;
 - b. Belanja Modal terdiri dari belanja Tanah, belanja Peralatan dan Mesin, belanja Gedung dan Bangunan, belanja Jalan Irigasi dan Jaringan, dan belanja Aset Tetap Lainnya; dan
 - c. Belanja Tak Terduga.
- 3) Transfer terdiri dari Transfer Bagi Hasil Pendapatan dan Transfer Bantuan Keuangan, meliputi:
 - a. Transfer Bagi Hasil Pendapatan merupakan Transfer yang dianggarkan, meliputi Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah; dan
 - b. Transfer Bantuan Keuangan terdiri Transfer Bantuan Keuangan ke Desa dan Transfer Bantuan Keuangan Lainnya.
- 4) Pembiayaan, meliputi;
 - a. Penerimaan pembiayaan; dan
 - b. Pengeluaran pembiayaan.

Selisih antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan merupakan pembiayaan netto untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus.

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una pada Tahun Anggaran 2023 adalah:

- a. Tingginya tingkat kemiskinan berbasis pulau dan KAT;
- b. Aksesibilitas wilayah sulit dan ketimpangan infrastruktur antara wilayah kecamatan;
- c. Kualitas dan kapasitas SDM masih rendah;



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

- d. Belum optimal pemanfaatan trisula pembangunan (pertanian, perikanan-kelautan dan sektor pariwisata daerah;
- e. Kemampuan fiskal yang rendah dalam membiayai percepatan pembangunan daerah;
- f. Menurunnya daya tampung dan daya dukung lingkungan hidup serta meningkatnya resiko bencana alam dan non alam;
- g. Belum optimalnya kinerja pemerintah daerah dan pelayanan publik.

Berdasarkan permasalahan di atas dan Permendagri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023, maka secara garis besar rencana target dan realisasi dari struktur APBD Kabupaten Tojo Una-Una Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi dari Struktur APBD Kabupaten Tojo Una-Una TA 2023

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	%
I	Pendapatan	1.190.444.793.872,00	1.213.864.205.577,91	101,97
II	Belanja	1.255.139.625.253,00	1.210.992.536.548,70	96,48
III	Surplus (Defisit)	(64.694.831.381,00)	2.871.669.029,21	(4,44)
IV	Pembiayaan Netto	64.694.831.381,00	64.694.772.289,50	100,00
	SILPA	-	67.566.441.318,71	

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2023

Dalam penyusunan Laporan Realisasi Anggaran didasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, menggunakan struktur APBD yang sama terdiri atas Anggaran Pendapatan, Anggaran Belanja dan Anggaran Pembiayaan. Struktur anggaran belanja SAP mengatur penyajian Laporan Realisasi Anggaran pada lembar depan berdasarkan karakter belanja dan jenis belanja, sedangkan Permendagri No 77 Tahun 2020 mengklasifikasikan belanja ke dalam Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer.

Kebijakan atas pendapatan, belanja dan pembiayaan dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Pengelolaan Pendapatan Daerah

- a. Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Desentralisasi fiskal telah memberikan peluang kepada daerah untuk menyusun dan menentukan sendiri program kerja dan anggaran daerah sesuai kebutuhan dan kemampuan dana serta kewenangan yang telah diserahkan. Tuntutan kebutuhan yang besar dan sangat mendesak, baik untuk pembiayaan pelayanan kepada masyarakat dan urusan pemerintahan maupun kegiatan pembangunan yang merupakan prioritas utama, mengharuskan pemerintah daerah untuk terus berupaya menggali dan meningkatkan penerimaan daerah, baik melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi pendapatan daerah. Dalam usaha mengetahui tingkat pendapatan penduduk dan mengukur tingkat konsumsi masyarakat dibutuhkan data-data di sektor ekonomi yaitu data perkembangan tingkat harga. Fluktuasi harga di pasar merupakan salah satu indikator utama dalam menggambarkan stabilitas



perekonomian suatu daerah. Berdasarkan data tersebut dapat dilihat keseimbangan antara penawaran (*supply*) dengan permintaan (*demand*) barang dan jasa pada saat tertentu. Kegiatan intensifikasi pendapatan daerah dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una dengan cara:

1. Mengoptimalkan kegiatan pemungutan serta pengenaan pajak dan retribusi daerah;
2. Meningkatkan kualitas aparat pemungut pajak dan retribusi serta pengawasan pemungutan pajak dan retribusi;
3. Meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak/retribusi;
4. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk setiap peraturan daerah yang berkaitan dengan pemungutan pendapatan, dan memperbaiki berbagai kelemahan dalam sistem perpajakan dan retribusi daerah; dan
5. Menyusun regulasi dalam bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang dijadikan dasar untuk melakukan pemungutan pajak dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kegiatan ekstensifikasi pendapatan daerah dilakukan dengan menggali sumber-sumber pendapatan sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepada daerah melalui pemetaan potensi pajak dan retribusi daerah secara berkesinambungan. Struktur pendapatan yang digunakan dalam SAP dan Permendagri No 77 Tahun 2020 pada prinsipnya sama. SAP mengatur klasifikasi pendapatan berdasarkan sumbernya, yaitu Pendapatan Asli Daerah, Transfer yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemda lain, serta Lain-lain Pendapatan yang Sah. Sedangkan Permendagri No 77 Tahun 2020 mengatur klasifikasi pendapatan menjadi tiga, yaitu Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah.

b. Target dan Realisasi Pendapatan

Dengan diterapkannya kebijakan pengelolaan pendapatan daerah tersebut diperoleh hasil pendapatan daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar **Rp1.190.444.793.872,00** dan realisasi sebesar **Rp1.213.864.205.577,91** sehingga terdapat capaian target sebesar **101,97%**. Anggaran dan realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tersaji pada tabel berikut ini.

Tabel 2.3 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023

Kode Rekening	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	%
4.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	85.249.568.078,00	107.675.677.114,91	126,31
4.2	Pendapatan Transfer	1.102.475.225.794,00	1.103.495.196.621,00	100,09
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	2.720.000.000,00	2.693.331.842,00	99,02
	Jumlah	1.190.444.793.872,00	1.213.864.205.577,91	101,97

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2023



2) Pengelolaan Belanja

a. Kebijakan Pengelolaan Belanja Daerah

Secara umum, belanja daerah merupakan semua pengeluaran Kas Daerah yang menjadi beban atau kewajiban daerah yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pengeluaran belanja daerah diarahkan untuk membiayai berbagai pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan umum serta kegiatan pemerintah daerah lainnya. Kebijakan umum belanja daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una dititikberatkan pada pencapaian sasaran pokok terselenggaranya kegiatan pemerintahan dan pelayanan umum, terpeliharanya berbagai aset kekayaan daerah dan hasil-hasil pembangunan, serta terlaksananya berbagai kegiatan pemerintah daerah berdasarkan skala prioritas yang ditetapkan. Selain itu, belanja daerah diarahkan pada upaya menunjang pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan, mendorong berkembangnya kegiatan ekonomi masyarakat, dan peningkatan pelayanan umum dengan titik berat pada pengembangan sarana dan prasarana ekonomi, penyediaan fasilitas pelayanan dasar, dan pengembangan sumber daya manusia. Untuk mewujudkan hal tersebut kebijakan belanja daerah difokuskan pada :

1. Mewujudkan masyarakat yang terentaskan dari kemiskinan, tangguh bencana, dan lingkungan berkelanjutan;
2. Mewujudkan pembangunan infrastruktur wilayah yang maju dan keluar dari daerah tertinggal;
3. Memantapkan trisula pembangunan ekonomi bertumpu pada sektor pertanian, perikanan, kelautan dan pariwisata yang berkelanjutan;
4. Meningkatkan sumber daya manusia berdaya saing bertumpu pada peningkatan kualitas Pendidikan dan Kesehatan yang berkeadilan; dan
5. Mewujudkan aparatur dan sistem pemerintahan daerah yang profesional untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis *smart governance*.

SAP mengklasifikasikan belanja menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi. Penyajian belanja dalam lembar muka Laporan Realisasi Anggaran dilakukan berdasarkan klasifikasi ekonomi (jenis belanja).

b. Target dan Realisasi Belanja

Struktur APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una mengklasifikasikan belanja sesuai dengan klasifikasi belanja Permendagri No 77 Tahun 2020 menjadi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Realisasi belanja Tahun Anggaran 2023 sebesar **Rp1.210.992.536.548,70** target dan realisasi jenis-jenis belanja Tahun Anggaran 2023 menurut Permendagri No 77 Tahun 2020 adalah sebagai berikut:



1. Belanja Operasi
Belanja Operasi dianggarkan sebesar **Rp819.182.101.291,00** dan direalisasikan sebesar **Rp775.133.396.504,70** atau **94,62%** dari anggarannya.
2. Belanja Modal
Belanja Modal dianggarkan sebesar **Rp254.049.216.596,00** dan direalisasikan sebesar **Rp251.332.245.844,00** atau **98,93%** dari anggarannya.
3. Belanja Tidak Terduga
Belanja Tak Terduga dianggarkan sebesar **Rp1.174.747.166,00** dan direalisasikan sebesar **Rp23.000.000,00** atau **1,96%** dari anggarannya.
4. Belanja Transfer
Belanja Transfer dianggarkan sebesar **Rp180.733.560.200,00** dan direalisasikan sebesar **Rp184.503.894.200,00** atau **102,09%** dari anggarannya.

3) Pengelolaan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah adalah seluruh transaksi keuangan baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali dan dimaksudkan untuk menutup defisit/kekurangan dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Transaksi keuangan daerah untuk menutup selisih antara pendapatan dan belanja daerah. Pengertiannya adalah bahwa apabila terjadi surplus maka transaksi keuangan dalam bentuk pemanfaatan surplus, sedangkan apabila terjadi defisit anggaran maka transaksi keuangan daerah untuk menutup defisit daerah. Selanjutnya secara lengkap dan lebih terperinci akan tercantum dalam Rincian Laporan realisasi APBD. Klasifikasi pembiayaan antara Permendagri No 77 Tahun 2020 dengan SAP adalah sama, dengan demikian tidak perlu ada proses konversi. Pembiayaan *netto* Tahun Anggaran 2023 sebesar **Rp64.694.831.381,00** dengan realisasi sebesar **Rp64.694.772.289,50** atau **100,00%**. Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah menurut APBD Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Penerimaan Pembiayaan Daerah
Penerimaan Pembiayaan Daerah dianggarkan sebesar **Rp67.994.831.381,00** dan direalisasikan sebesar **Rp67.994.772.289,50** atau **100,00%** dari anggarannya.
- b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah
Penerimaan Pembiayaan Daerah dianggarkan sebesar **Rp3.300.000.000,00** dan direalisasikan sebesar **Rp3.300.000.000,00** atau **100,00%** dari anggarannya.

2.3 Indikator pencapaian target kinerja APBD

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota terdiri dari: 1) Urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar; 2) Urusan pemerintahan wajib yang tidak



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

terkait dengan pelayanan dasar; 3) Urusan pemerintahan pilihan; dan 4) Fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una diarahkan untuk mewujudkan tercapainya visi Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2021-2026 yaitu “**Terwujudnya Kabupaten Tojo Una-Una Tangguh, Maju, dan Sejahtera (Tamara)**”, dengan senantiasa mendukung tercapainya visi pemerintah dan visi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Salah satu aspek terpenting dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah aspek keuangan yang menjadi salah satu indikator terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Masih tingginya tingkat ketergantungan daerah terhadap pusat dalam hal pembiayaan pembangunan tercermin dari proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Dana Perimbangan (DAU dan DAK). Hal tersebut merupakan tantangan bagi pemerintah daerah untuk selalu memacu berbagai upaya peningkatan penerimaan keuangan daerah dengan tetap memperhatikan kemampuan masyarakat.

Pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2023 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan dalam RKPD Tahun 2023, dituangkan ke dalam APBD Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2023. Pelaksanaan APBD Tahun 2022 tersebut dilakukan melalui organisasi perangkat daerah. Capaian menurut urusan pemerintahan daerah dalam APBD Tahun 2023 disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.4 Anggaran dan Realisasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	%
1	Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar	742.024.575.787,00	709.164.670.561,70	95,57
2	Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar	83.140.312.975,00	81.088.652.083,00	97,53
3	Urusan Pemerintahan Pilihan	40.508.120.871,00	39.263.624.002,00	96,93
4	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	98.348.848.580,00	92.354.897.717,00	93,91
5	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	219.363.255.017,00	220.387.588.158,00	100,47
6	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	7.857.763.837,00	7.661.160.670,00	97,50
7	Unsur Kewilayahan	40.805.667.926,00	39.662.757.286,00	97,20
8	Unsur Pemerintahan Umum	23.091.080.260,00	21.409.186.071,00	92,72
Jumlah		1.255.139.625.253,00	1.210.992.536.548,70	96,48

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2023



BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan menurut urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Tojo Una-Una diklasifikasikan dalam beberapa bidang sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun Anggaran 2023. Untuk memudahkan dalam penelusuran antara realisasi dan target anggaran, ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan disajikan berdasarkan urusan wajib dan pilihan. Ikhtisar realisasi dimaksud adalah sebagaimana disajikan secara ringkas pada tabel realisasi APBD berikut ini.

3.1.1 Klasifikasi Berdasarkan Organisasi

Klasifikasi berdasarkan organisasi artinya anggaran diklasifikasikan menurut pengguna anggaran organisasi perangkat daerah.

Tabel 3.1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah per Organisasi Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023

Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Anggaran 2023 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	%
I. PENDAPATAN			
1. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.500.000.008,00	3.247.162.400,00	129,89
2. Rumah Sakit Umum Daerah Ampana	48.000.000.000,00	67.280.179.423,85	140,17
3. Rumah Sakit Umum Daerah Wakai	1.350.000.000,00	1.477.575.500,00	109,45
4. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan	131.637.000,00	256.205.000,00	194,63
5. Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup	364.400.000,00	419.936.470,00	115,24
6. Dinas Perikanan	250.001.000,00	391.602.250,00	156,64
7. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	175.000.000,00	172.040.000,00	98,31
8. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	192.350.000,00	35.190.000,00	18,29
9. Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	201.396.000,00	118.672.500,00	58,92
10. Sekretariat Daerah	45.000.000,00	46.377.000,00	103,06
11. Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	1.124.954.934.864,00	1.126.783.112.355,06	100,16
12. Badan Pendapatan Daerah	12.280.075.000,00	13.636.152.679,00	111,04
Jumlah Pendapatan	1.190.444.793.872,00	1.213.864.205.577,91	101,97
II. BELANJA			
1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	320.665.277.991,00	299.431.801.246,00	93,38
2. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	132.770.478.411,00	116.623.070.730,70	87,84
3. Rumah Sakit Umum Daerah Ampana	81.672.569.474,00	89.868.405.480,00	110,03
4. Rumah Sakit Umum Daerah Wakai	10.454.924.051,00	9.626.635.150,00	92,08
5. Rumah Sakit Pratama Togean	1.350.816.936,00	1.342.554.486,00	99,39
6. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan	182.632.783.058,00	180.203.166.554,00	98,67
7. Satuan Polisi Pamong Praja	10.109.347.417,00	9.922.163.582,00	98,15
8. Badan Penanggulangan Bencana	3.630.176.117,00	3.473.807.287,00	95,69



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Anggaran 2023 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	%
Daerah			
9. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	9.742.950.132,00	9.333.966.666,00	95,80
10. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	4.720.009.189,00	4.594.167.802,00	97,33
11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.569.922.552,00	3.491.789.663,00	97,81
12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	6.163.798.979,00	6.038.110.447,00	97,96
13. Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup	33.892.452.802,00	33.279.159.700,00	98,19
14. Dinas Komunikasi dan Informatika	5.836.587.710,00	5.816.346.752,00	99,65
15. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.676.994.345,00	4.549.136.960,00	97,27
16. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3.830.648.757,00	3.570.161.555,00	93,20
17. Dinas Perikanan	9.571.254.287,00	9.056.075.183,00	94,62
18. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	6.051.893.804,00	6.012.365.606,00	99,35
19. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	27.714.552.482,00	26.889.460.278,00	97,02
20. Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	6.615.571.139,00	6.394.601.519,00	96,66
21. Sekretariat Daerah	57.250.317.629,00	51.698.905.015,00	90,30
22. Sekretariat DPRD	41.098.530.951,00	40.655.992.702,00	98,92
23. Inspektorat Daerah	7.857.763.837,00	7.661.160.670,00	97,50
24. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	9.357.330.842,00	9.133.326.376,00	97,61
25. Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	196.327.121.814,00	198.053.947.104,00	100,88
26. Badan Pendapatan Daerah	6.780.523.716,00	6.599.729.259,00	97,33
27. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	6.898.278.645,00	6.600.585.419,00	95,68
28. Kecamatan Tojo	3.104.740.989,00	3.022.334.283,00	97,35
29. Kecamatan Tojo Barat	2.684.946.299,00	2.614.592.432,00	97,38
30. Kecamatan Ulubongka	2.427.304.726,00	2.391.263.695,00	98,52
31. Kecamatan Ampana Kota	8.815.791.978,00	8.625.460.848,00	97,84
32. Kecamatan Ampana Tete	2.861.427.155,00	2.735.245.652,00	95,59
33. Kecamatan Una-Una	2.894.175.807,00	2.687.532.483,00	92,86
34. Kecamatan Togean	2.186.876.053,00	2.141.857.340,00	97,94
35. Kecamatan Walea Kepulauan	2.074.068.001,00	2.020.343.864,00	97,41
36. Kecamatan Walea Besar	1.537.163.951,00	1.512.928.324,00	98,42
37. Kecamatan Ratolindo	8.439.814.396,00	8.249.980.231,00	97,75
38. Kecamatan Talatako	1.725.989.091,00	1.679.171.165,00	97,29
39. Kecamatan Batudaka	2.053.369.480,00	1.982.046.969,00	96,53
40. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	23.091.080.260,00	21.409.186.071,00	92,72
Jumlah Belanja	1.255.139.625.253,00	1.210.992.536.548,70	96,48
Surplus/Defisit	(64.694.831.381,00)	2.871.669.029,21	(4,44)
PEMBIAYAAN NETTO			
Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah			
Penerimaan Pembiayaan	67.994.831.381,00	67.994.772.289,50	100,00
Pengeluaran Pembiayaan	3.300.000.000,00	3.300.000.000,00	100,00
Jumlah Pembiayaan Netto	64.694.831.381,00	64.694.772.289,50	100,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	00,00	67.566.441.318,71	

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2023



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

3.1.2 Klasifikasi berdasarkan Fungsi

Terdapat delapan fungsi pengelolaan keuangan daerah disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.2 Realisasi Belanja Daerah Berdasarkan Fungsi Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2023

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)
I. PELAYANAN UMUM	744.673.015.192,00
1. Kesatuan Bangsa dan Politik	21.409.186.071,00
2. Sekretariat Daerah	51.698.905.015,00
3. Inspektorat Daerah	7.661.160.670,00
4. Perencanaan	8.943.413.148,00
5. Keuangan	204.653.676.363,00
6. Kepegawaian	6.266.122.345,00
7. Pendidikan dan Pelatihan	334.463.074,00
8. Penelitian dan Pengembangan	189.913.228,00
9. Sekretariat DPRD	40.655.992.702,00
10. Kecamatan	39.662.757.286,00
11. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	3.491.789.663,00
12. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	30.880.000,00
13. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan	5.704.491.543,00
14. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	73.136.518.058,00
15. Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	11.847.862.089,00
16. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika	3.821.211.472,00
17. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	9.071.566.384,00
18. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	6.012.365.606,00
19. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	20.288.270.594,00
20. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	6.038.110.447,00
21. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	3.993.089.180,00
22. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	190.357.324.299,00
23. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	8.375.122.385,00
24. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	4.522.335.859,00
25. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	3.527.841.555,00
26. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	3.796.050.113,00
27. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	4.991.930.041,00
28. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	4.190.666.002,00
II. KETERTIBAN DAN KEAMANAN	1.561.628.780,00
1. Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	1.548.108.780,00
2. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	13.520.000,00
III. EKONOMI	166.520.330.725,00
1. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan	3.351.583.640,00
2. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika	1.995.135.280,00
3. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	34.542.000,00
4. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	136.515.200,00
5. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	123.501.750.469,00
6. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	556.047.780,00
7. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	1.560.933.460,00
8. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	20.971.947.315,00
9. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	276.790.200,00
10. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	13.885.328.581,00
11. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	249.756.800,00
IV. PERLINGGUNGAN LINGKUNGAN HIDUP	26.031.489.823,00
1. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	3.932.090.000,00
2. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	21.243.093.434,00



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

Uraian		31 Desember 2023 (Rp)
3.	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan	856.306.389,00
V. PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM		14.313.745.668,00
1.	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	6.692.438.243,00
2.	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	7.621.307.425,00
VI. KESEHATAN		144.324.147.788,70
1.	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	140.192.898.572,70
2.	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	4.131.249.216,00
VII. PENDIDIKAN		109.085.916.947,00
1.	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga	5.134.608.890,00
2.	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	103.939.868.057,00
3.	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	11.440.000,00
VIII. PERLINDUNGAN SOSIAL		4.482.261.625,00
1.	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	538.736.125,00
2.	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	3.789.780.500,00
3.	Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi	153.745.000,00
JUMLAH		1.210.992.536.548,70

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2023

Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan beserta keluaran tahun 2023 sebesar Rp1.210.992.536.548,70 disajikan pada *Lampiran 41*.

3.1.3 Mandatory Spending

Mandatory spending Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun Anggaran 2023 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.3 Mandatory Spending Tahun Anggaran 2023

No	Uraian	Regulasi	(%)
1	Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBD Rp. 324.465.006.748,- dan telah memenuhi batas minimal.	UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1)	26,23%
2	Besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji Rp. 252.015.773.123,- dan telah memenuhi batas minimal.	UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan	30,2%
3	Dana Transfer Umum (DTU) diarahkan penggunaannya, yaitu paling sedikit 25% untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antardaerah Rp. 293.464.785.770,- dan telah memenuhi batas minimal.	UU APBN	42,76%
4	Alokasi dana Desa (ADD) paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus Rp. 68.293.644.200,- dan telah memenuhi batas minimal.	UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa	9,52%



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

No	Uraian	Regulasi	(%)
5	Transfer Desa paling sedikit 10% dari realisasi Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diterima Kabupaten Rp. 110.939.916.000,- dan telah memenuhi batas minimal.	UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa	
6	<p>Kegiatan pengawasan dialokasikan berdasarkan besaran dari total belanja daerah dengan klasifikasi:</p> <ul style="list-style-type: none">- pemerintah provinsi: sampai dengan Rp4.000.000.000.000,00 (empat triliun rupiah) paling sedikit sebesar 0,90% (nol koma sembilan puluh persen) dari total belanja daerah; diatas Rp4.000.000.000.000,00 (empat triliun rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah) paling sedikit sebesar 0,60% (nol koma enam puluh persen) dari total belanja daerah dan diatas Rp36.000.000.000,00 (tiga puluh enam miliar rupiah); dan diatas Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah) paling sedikit sebesar 0,30% (nol koma tiga puluh persen) dari total belanja daerah dan diatas Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar).- pemerintah kabupaten/kota: sampai dengan Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) paling sedikit sebesar 1,00% (satu persen) dari total belanja daerah; diatas Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) paling sedikit sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari total belanja daerah dan diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); dan diatas Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) paling sedikit sebesar 0,50% (nol koma lima puluh persen) dari total belanja daerah dan diatas Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) Rp. 8.276.180.585,- tidak memenuhi batas minimal.	Permendagri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022	0,64%
7	<ul style="list-style-type: none">- Dalam rangka mendukung program penanganan dampak inflasi, Daerah menganggarkan belanja wajib perlindungan sosial untuk periode bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan Desember 2022.- Belanja wajib perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain digunakan untuk:<ul style="list-style-type: none">a. pemberian bantuan sosial, termasuk kepada ojek, usaha mikro, kecil, dan menengah, dan nelayan;b. penciptaan lapangan kerja; dan/ atauc. pemberian subsidi sektor transportasi angkutan umum di daerah.- Bantuan sosial sebagaimana dimaksud	Pasal 2 PMK No. 134 Tahun 2022	

No	Uraian	Regulasi	(%)
	<p>pada ayat (2) huruf a termasuk di dalamnya bantuan sosial tambahan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Belanja wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan sebesar 2% (dua persen) yang bersumber dari DTU sebagaimana ditetapkan dalam peraturan presiden mengenai rincian anggaran pendapatan dan belanja negara Tahun Anggaran 2022. - DTU sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak termasuk DBH yang ditentukan penggunaannya. - Besaran DTU sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan sebesar penyaluran DAU bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan Desember 2022 dan penyaluran DBH triwulan IV Tahun Anggaran 2022. - Belanja wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk belanja wajib 25% (dua puluh lima persen) dari DTU yang telah dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2022. Rp. 3.329.133.500,- telah memenuhi batas minimal. 		

Sumber : BPKAD

3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Permasalahan pembangunan daerah pada intinya merupakan berbagai kendala dan hambatan yang dihadapi dalam mewujudkan visi dan misi yang akan dicapai di daerah tersebut. Potensi permasalahan pembangunan daerah akan muncul jika kekuatan yang dimiliki daerah tersebut, belum dapat dikelola secara optimal, kelemahan tidak dapat diatasi dan tidak diminimalisir, peluang tidak dapat dimanfaatkan, dan ancaman tidak dapat diantisipasi dengan baik.

Berdasarkan capaian kinerja pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una selama kurun 5 (lima) tahun terakhir maka permasalahan pokok pembangunan Kabupaten Tojo Una-Una dapat diidentifikasi sebagai berikut:



Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Gambar 3.1 Permasalahan Pokok Pembangunan Kabupaten Tojo Una-Una



BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas akuntansi merupakan unit pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya. Entitas akuntansi terdiri dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Bendahara Umum Daerah (BUD). Entitas pelaporan merupakan Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban, berupa laporan keuangan yang bertujuan umum.

Entitas pelaporan adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una yang terdiri dari 40 OPD selaku entitas akuntansi, yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa Laporan Keuangan. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran, laporan finansial, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Laporan pelaksanaan anggaran terdiri dari LRA dan LP-SAL. Laporan finansial terdiri dari Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Laporan Arus Kas (LAK). CaLK merupakan laporan yang merinci atau menjelaskan lebih lanjut atas pos-pos laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial dan merupakan laporan yang tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una terdiri dari:

- a. Laporan Keuangan yang dihasilkan oleh OPD sebagai entitas akuntansi yang menghasilkan :
 - 1) Laporan Realisasi Anggaran;
 - 2) Neraca;
 - 3) Laporan Operasional;
 - 4) Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - 5) Catatan atas Laporan Keuangan.
- b. Laporan Keuangan yang dihasilkan oleh BUD/SKPKD sebagai entitas akuntansi yang menghasilkan:
 - 1) Laporan Realisasi Anggaran;
 - 2) Neraca;
 - 3) Laporan Arus Kas;



- 4) Laporan Operasional;
 - 5) Laporan Perubahan Ekuitas;
 - 6) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; dan
 - 7) Catatan atas Laporan Keuangan.
- c. Laporan keuangan gabungan yang mencerminkan laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una secara utuh yang menghasilkan:
- 1) Laporan Realisasi Anggaran;
 - 2) Neraca;
 - 3) Laporan Arus Kas
 - 4) Laporan Operasional;
 - 5) Laporan Perubahan Ekuitas;
 - 6) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; dan
 - 7) Catatan atas Laporan Keuangan.

a. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran OPD, BUD, dan pemerintahan Kabupaten Tojo Una-Una menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh OPD, BUD, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una, yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggarannya dalam satu periode pelaporan. Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran OPD, BUD, Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una secara tersanding. Penyandingan antara anggaran dengan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dengan eksekutif sesuai peraturan perundang-undangan.

Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan-LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan. Masing-masing unsur dapat didefinisikan sebagai berikut:

- 1) Pendapatan adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Daerah atau OPD yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.
- 2) Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah atau OPD yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.
- 3) Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- 4) Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.



- 5) Penerimaan pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

c. Neraca

Neraca OPD, BUD, dan Pemerintahan Kabupaten Tojo Una-Una merupakan Laporan yang menggambarkan posisi keuangan OPD, BUD, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas, Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
- 2) Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.
- 3) Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una, berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una. Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan nonlancar. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset nonlancar.

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Aset nonlancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang, dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una atau yang digunakan masyarakat umum. Aset nonlancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya. Investasi jangka



panjang merupakan investasi yang diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Investasi jangka panjang meliputi investasi nonpermanen dan permanen. Investasi nonpermanen antara lain investasi dalam Surat Utang Negara, penyertaan modal dalam proyek pembangunan, dan investasi nonpermanen lainnya. Investasi permanen antara lain penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una dan investasi permanen lainnya. Aset tetap meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan. Aset non lancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud dan aset kerja sama (kemitraan).

Karakteristik esensial kewajiban adalah bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una mempunyai kewajiban masa kini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una lain, atau lembaga internasional. Kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una atau dengan pemberi jasa lainnya.

Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan. Kewajiban dikelompokkan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang adalah kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

d. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una untuk kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una dalam satu periode pelaporan.

Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.



- 2) Beban adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
- 3) Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- 4) Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

e. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una selama periode tertentu. Tujuan pelaporan Arus Kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi dan saldo kas pada tanggal pelaporan.

Unsur yang dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas, yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Daerah.
- 2) Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Daerah.

f. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

g. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintah Daerah serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan/menyajikan/menyediakan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Mengungkapkan informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
- 2) Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
- 3) Menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;



- 4) Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi - transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- 5) Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
- 6) Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan
- 7) Menyediakan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una sejak tahun 2015 adalah basis akrual. Pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas, maka entitas wajib menyajikan laporan demikian. Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas, maka Laporan Realisasi Anggaran LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una, serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una. Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una tidak menggunakan istilah laba, melainkan sisa pembiayaan anggaran lebih/(kurang) untuk setiap Tahun Anggaran. Penentuan sisa pembayaran anggaran baik lebih ataupun kurang untuk setiap periode tergantung pada selisih realisasi penerimaan dan pengeluaran. Namun demikian, bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis akrual. Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una, tanpa memperhatikan kas atau setara kas diterima atau dibayar.

4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan



keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO, dan beban, sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan. Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang terhadap pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait. Kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian atau peristiwa untuk diakui yaitu:

- a. Terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan kejadian atau peristiwa tersebut akan mengalir keluar dari atau masuk ke dalam entitas pelaporan yang bersangkutan;
- b. Kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur atau dapat diestimasi dengan andal.

Dalam menentukan apakah suatu kejadian/peristiwa memenuhi kriteria pengakuan, perlu dipertimbangkan aspek materialitas.

a. Pengakuan Aset

Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Sejalan dengan penerapan basis akrual, aset dalam bentuk piutang atau beban dibayar di muka diakui ketika hak klaim untuk mendapatkan arus kas masuk atau manfaat ekonomi lainnya dari entitas lain telah atau tetap masih terpenuhi, dan nilai klaim tersebut dapat diukur atau diestimasi. Aset dalam bentuk kas yang diperoleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una antara lain bersumber dari pajak, retribusi, pungutan hasil pemanfaatan kekayaan negara, transfer, dan setoran lain-lain, serta penerimaan pembiayaan, seperti hasil pinjaman. Proses pemungutan setiap unsur penerimaan tersebut sangat beragam dan melibatkan banyak pihak atau instansi. Dengan demikian, titik pengakuan penerimaan kas oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una untuk mendapatkan pengakuan akuntansi memerlukan pengaturan yang lebih rinci, termasuk pengaturan mengenai batasan waktu sejak uang diterima sampai penyeterannya ke Rekening Kas Umum Daerah. Aset tidak diakui jika pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin diperoleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una setelah periode akuntansi berjalan.

Aset berupa piutang di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Agar nilai piutang tetap menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan maka piutang-piutang (sebagian atau seluruhnya) yang diperkirakan tidak tertagih perlu dikeluarkan/disisihkan dari akun piutang. Besarnya penyisihan piutang tidak tertagih pada setiap akhir tahun ditentukan sebagai berikut:



Tabel 4.1 Tarif Penyisihan Piutang Tak Tertagih

No	Kualitas Piutang	Tarif Penyisihan Piutang Tak Tertagih	Keterangan
1.	Lancar	0,5%	
2.	Kurang Lancar	10%	(Nilai Piutang dikurangi jika ada Nilai Agunan atau Nilai Barang Sitaan)
3.	Diragukan	50%	
4.	Macet	100%	

Sumber : Kebijakan Akuntansi Kabupaten Tojo Una-Una

Dana bergulir di neraca harus disajikan berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Alat untuk menyesuaikan adalah dengan mengurangi dana bergulir dengan dana bergulir diragukan tertagih. Dana bergulir diragukan tertagih bukan merupakan penghapusan dana bergulir. Dengan demikian nilai dana bergulir diragukan tertagih akan selalu dimunculkan dalam laporan keuangan, paling tidak dalam CaLK, selama dana bergulir masih tercantum atau belum dihapuskan untuk menentukan besarnya dana bergulir yang diragukan tertagih terlebih dahulu harus dilakukan pengelompokkan dana bergulir berdasarkan umur dana bergulir (*aging schedule*) sebagai dasar perhitungan. Besarnya dana bergulir yang diragukan tertagih pada setiap akhir tahun ditentukan sebagai berikut:

1. Kualitas lancar, sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari dana bergulir dengan kualitas lancar;
2. Kualitas kurang lancar, sebesar 10% (sepuluh persen) dari dana bergulir dengan kualitas kurang lancar;
3. Kualitas diragukan, sebesar 50% (lima puluh persen) dari dana bergulir dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
4. Kualitas macet, sebesar 100% (seratus persen) dari dana bergulir dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Berwujud;
- b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
- e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
- f. Merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara; dan
- g. Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan. Memenuhi kriteria material/batasan minimal kapitalisasi aset tetap sebagai berikut:



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

Tabel 4.2 Batasan Minimum Kapitalisasi

Uraian	Batasan Minimum Kapitalisasi
PERALATAN DAN MESIN	
ALAT BESAR	
Alat Besar Darat	10.000.000,00
Alat Besar Apung	10.000.000,00
Alat Bantu	10.000.000,00
ALAT ANGKUTAN	
Alat Angkutan Darat Bermotor	5.000.000,00
Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	1.000.000,00
Alat Angkutan Apung Bermotor	5.000.000,00
Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	1.000.000,00
Alat Angkutan Bermotor Udara	10.000.000,00
ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	
Alat Bengkel Bermesin	300.000,00
Alat Bengkel Tak Bermesin	300.000,00
Alat Ukur	300.000,00
ALAT PERTANIAN	
Alat Pengolahan	5.000.000,00
ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	
Alat Kantor	300.000,00
Alat Rumah Tangga	300.000,00
Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	300.000,00
ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	
Alat Studio	300.000,00
Alat Komunikasi	500.000,00
Peralatan Pemancar	500.000,00
Peralatan Komunikasi Navigasi	500.000,00
ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	
Alat Kedokteran	300.000,00
Alat Kesehatan Umum	300.000,00
ALAT LABORATORIUM	
Unit Alat Laboratorium	300.000,00
Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	300.000,00
Alat Peraga Praktek Sekolah	300.000,00
Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	300.000,00
Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	300.000,00
Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya	300.000,00
Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	300.000,00
Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	300.000,00
Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	300.000,00
ALAT PERSENJATAAN	
Senjata Api	500.000,00
Persenjataan Non Senjata Api	500.000,00
Senjata Sinar	500.000,00
Alat Khusus Kepolisian	500.000,00
KOMPUTER	
Komputer Unit	300.000,00
Peralatan Komputer	300.000,00
ALAT EKSPLORASI	
Alat Eksplorasi Topografi	300.000,00
Alat Eksplorasi Geofisika	300.000,00
ALAT PENGEBORAN	
Alat Pengeboran Mesin	300.000,00
Alat Pengeboran Non Mesin	300.000,00
ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	
Sumur	300.000,00
Produksi	300.000,00
Pengolahan Dan Pemurnian	300.000,00
ALAT BANTU EKSPLORASI	
Alat Bantu Eksplorasi	300.000,00
Alat Bantu Produksi	300.000,00
ALAT KESELAMATAN KERJA	
Alat Deteksi	300.000,00
Alat Pelindung	300.000,00



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

Uraian	Batasan Minimum Kapitalisasi
Alat Sar	300.000,00
Alat Kerja Penerbangan	300.000,00
ALAT PERAGA	
Alat Peraga Pelatihan Dan Percontohan	300.000,00
PERALATAN PROSES/PRODUKSI	
Unit Peralatan Proses/Produksi	300.000,00
RAMBU – RAMBU	
Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	300.000,00
Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	300.000,00
Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	300.000,00
PERALATAN OLAH RAGA	
Peralatan Olah Raga	300.000,00
GEDUNG DAN BANGUNAN	
BANGUNAN GEDUNG	
Bangunan Gedung Tempat Kerja	10.000.000,00
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	10.000.000,00
MONUMEN	
Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	10.000.000,00
BANGUNAN MENARA	
Bangunan Menara Perambuan	10.000.000,00
TUGU TITIK KONTROL/PASTI	
Tugu/Tanda Batas	10.000.000,00
JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	
JALAN DAN JEMBATAN	
Jalan	0,00
Jembatan	0,00
BANGUNAN AIR	
Bangunan Air Irigasi	0,00
Bangunan Pengairan Pasang Surut	0,00
Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	0,00
Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana Alam	0,00
Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	0,00
Bangunan Air Bersih/Air Baku	0,00
Bangunan Air Kotor	0,00
INSTALASI	
Instalasi Air Bersih / Air Baku	0,00
Instalasi Air Kotor	0,00
Instalasi Pengolahan Sampah	0,00
Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	0,00
Instalasi Pembangkit Listrik	0,00
Instalasi Gardu Listrik	0,00
Instalasi Pertahanan	0,00
Instalasi Gas	0,00
Instalasi Pengaman	0,00
Instalasi Lain	0,00
JARINGAN	
Jaringan Air Minum	0,00
Jaringan Listrik	0,00
Jaringan Telepon	0,00
Jaringan Gas	0,00
ASET TETAP LAINNYA	
BAHAN PERPUSTAKAAN	
Bahan Perpustakaan Tercetak	0,00
Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	0,00
Kartografi, Naskah Dan Lukisan	0,00
Musik	0,00
Karya Grafika (Graphic Material)	0,00
Three Dimensional Artefacts and Realita	0,00
Tarscalt	0,00
BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAH RAGA	
Barang Bercorak Kesenian	0,00
Alat Bercorak Kebudayaan	0,00
Tanda Penghargaan	0,00
HEWAN	
Hewan Piaraan	500.000,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

Uraian	Batasan Minimum Kapitalisasi
Ternak	500.000,00
Hewan Lainnya	500.000,00
BIOTA PERAIRAN	
Ikan Bersirip (Pisces/Ikan Bersirip)	500.000,00
Crustea (Udang, Rajungan, Kepiting, dan Sebangsanya)	500.000,00
Mollusca (Kerang, Tiram, Cumi-Cumi, Gurita, Siput, dan Sebangsanya)	500.000,00
Coelenterata (Ubur-Ubur dan Sebangsanya)	500.000,00
Echinodermata (Tripang, Bulu Babi, dan Sebangsanya)	500.000,00
Amphibia (Kodok dan Sebangsanya)	500.000,00
Reptilia (Buaya, Penyu, Kura-Kura, Biawak, Ular Air, dan Sebangsanya)	500.000,00
Mammalia (Paus, Lumba-Lumba, Pesut, Duyung, dan Sebangsanya)	500.000,00
Algae (Rumput Laut dan Tumbuh-Tumbuhan Lain Yang Hidup di Dalam Air)	500.000,00
Biota Perairan Lainnya	500.000,00
TANAMAN	
Tanaman	500.000,00
BARANG KOLEKSI NON BUDAYA	
Barang Koleksi Non Budaya	300.000,00

b. Pengakuan Kewajiban

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Sejalan dengan penerapan basis akrual, kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.

c. Pengakuan Pendapatan

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi. Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

d. Pengakuan Beban dan Belanja

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Belanja diakui berdasarkan terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada Dalam SAP Pemerintah Daerah

Kerangka konseptual kebijakan akuntansi mengacu pada kerangka konseptual Standar Akuntansi Pemerintah untuk merumuskan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una. Diawali dengan penetapan tujuan pelaporan keuangan. Diikuti dengan penjelasan karakteristik kualitatif informasi akuntansi yang membuat informasi itu bermanfaat. Selanjutnya unsur-unsur laporan keuangan didefinisikan. Berikut dijelaskan pedoman operasi yang lebih rinci yaitu asumsi-asumsi dan prinsip-prinsip,



kerangka konseptual juga mengakui adanya kendala dalam lingkungan pelaporan keuangan. Tujuan kerangka konseptual kebijakan akuntansi adalah sebagai acuan bagi:

- a. Penyusunan laporan keuangan dalam menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam kebijakan akuntansi;
- b. Pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan kebijakan akuntansi; dan
- c. Para pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan pada laporan keuangan yang disusun sesuai dengan kebijakan akuntansi.

Kerangka Konseptual ini berfungsi sebagai acuan dalam hal terdapat masalah akuntansi yang belum dinyatakan dalam kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una. Dalam hal ini terjadi pertentangan antara kerangka konseptual dan standar, maka ketentuan standar diunggulkan relatif terhadap kerangka konseptual ini. Dalam jangka panjang, konflik demikian diharapkan dapat diselesaikan sejalan dengan pengembangan Standar Akuntansi Pemerintah di masa depan. Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip akuntansi yang telah dipilih berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah untuk diterapkan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una. Kebijakan Akuntansi ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Kebijakan akuntansi pemerintah daerah meliputi kebijakan akuntansi pelaporan dan akuntansi akun. Kebijakan akuntansi pelaporan berfungsi sebagai pedoman dalam penyajian laporan keuangan dan kebijakan akuntansi akun mengatur definisi, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi atau peristiwa sesuai dengan SAP meliputi : (a) pemilihan metode akuntansi akan kebijakan akuntansi dalam SAP, (b) pengaturan yang lebih rinci atas kebijakan akuntansi SAP. Tujuan kebijakan akuntansi adalah mengatur penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode. Kebijakan ini berlaku untuk setiap entitas akuntansi/pelaporan Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.

BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

5.1 Rincian Dari Penjelasan Masing-Masing Pos-Pos Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

5.1.1 Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan Laporan yang mengungkapkan kegiatan keuangan Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD. Laporan ini menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah dalam satu periode pelaporan. Secara lebih rinci LRA Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una pada TA 2023 (dalam satuan mata uang Rupiah) diungkapkan dan dijelaskan sebagai berikut:

5.1.1.1 Pendapatan Daerah

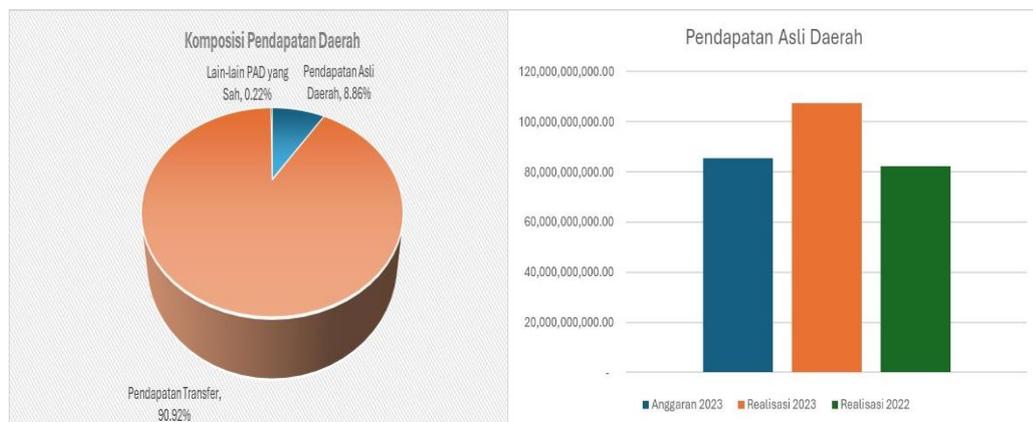
Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Daerah TA 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.1.1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan TA 2023 dan 2022

Kode Rek	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	%	31 Desember 2022 (Rp)
4.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	85.249.568.078,00	107.675.677.114,91	126,31	82.308.772.759,12
4.2	Pendapatan Transfer	1.102.475.225.794,00	1.103.495.196.621,00	100,09	991.542.706.305,00
4.3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	2.720.000.000,00	2.693.331.842,00	99,02	349.900.000,00
Jumlah		1.190.444.793.872,00	1.213.864.205.577,91	101,97	1.074.201.379.064,12

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2023

Komposisi realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 digambarkan dalam bentuk diagram di bawah ini.





Grafik 5.1 Realisasi Pendapatan Daerah TA 2023

5.1.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Asli Daerah TA 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Asli Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.1.2 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) TA 2023 dan 2022

Kode Rek	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	(%)	31 Desember 2022 (Rp)
4.1.01	Pajak Daerah	12.280.075.000,00	13.636.152.679,00	111,04	11.412.985.463,08
4.1.02	Retribusi Daerah	5.023.770.508,00	6.128.186.120,00	121,98	4.956.310.770,00
4.1.03	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	4.165.684.360,00	4.165.684.360,00	100,00	2.888.444.941,71
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	63.780.038.210,00	83.745.653.955,91	131,30	63.051.031.584,33
Jumlah		85.249.568.078,00	107.675.677.114,91	126,31	82.308.772.759,12

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2023

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp107.675.677.114,91 mengalami peningkatan sebesar Rp25.366.904.355,79 atau 30,82% dibandingkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp82.308.772.759,12.

Realisasi dari masing-masing akun Pendapatan Asli Daerah (PAD) dijelaskan sebagai berikut:

5.1.1.1.1.1 Pajak Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Pajak Daerah TA 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Pajak Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Tabel 5.1.1.3 Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah TA 2023 dan 2022

Kode Rek	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	(%)	31 Desember 2022 (Rp)
4.1.01.06	Pajak Hotel	175.000.000,00	409.523.220,00	234,01	183.409.435,00
4.1.01.07	Pajak Restoran	1.532.375.000,00	1.975.925.622,00	128,95	1.917.451.349,08
4.1.01.08	Pajak Hiburan	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	1.725.000,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	403.800.000,00	447.425.910,00	110,80	411.271.808,00
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	4.767.000.000,00	4.868.653.463,00	102,13	4.503.078.358,00
4.1.01.11	Pajak Parkir	80.000.000,00	107.568.000,00	134,46	109.475.333,00
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	4.000.000,00	4.811.675,00	120,29	0,00
4.1.01.14	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan	1.792.000.000,00	2.043.627.259,00	114,04	1.586.801.946,00
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	1.700.000.000,00	1.746.846.685,00	102,76	1.588.888.161,00
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (PBHTB)	1.823.400.000,00	2.029.270.845,00	111,29	1.110.884.073,00
Jumlah		12.280.075.000,00	13.636.152.679,00	111,04	11.412.985.463,08

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2023

Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Pendapatan Pajak Daerah di TA 2023 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yang diuraikan diantaranya sebagai berikut:

1. Banyaknya pembayaran piutang yang seharusnya dilakukan pada tahun 2022 namun dilakukan pada tahun 2023, menyebabkan peningkatan realisasi pendapatan pajak daerah pada tahun 2023;
2. Adanya peningkatan jumlah kunjungan wisatawan pada tahun 2023 turut berkontribusi terhadap peningkatan realisasi pajak daerah dan Kabupaten Tojo Una-Una menjadi tuan rumah dalam penyelenggaraan STQH Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 ke-XXVII. Kedatangan wisatawan dan penyelenggaraan kegiatan tersebut diiringi dengan pengeluaran untuk berbagai layanan dan barang sehingga meningkatkan pelayanan pajak dari sektor pariwisata;
3. Banyaknya pengunjung yang menggunakan lahan parkir di Rumah Sakit pada tahun 2023 karena adanya peningkatan perluasan lahan parkir;
4. Masih adanya SPPT yang belum dilunasi menjadi salah satu faktor penyebab rendahnya capaian realisasi pendapatan pajak daerah;
5. Adanya peningkatan transaksi jual beli dan penggunaan hak guna usaha oleh Perusahaan Perkebunan Touna Coconut selama 25 tahun sehingga mempengaruhi capaian realisasi pendapatan pajak daerah pada tahun 2023.

Pemungutan Pajak-Pajak Daerah di atas telah dilandasi Perda sebagai berikut:

1. Perda Nomor 9 Tahun 2018 tentang perubahan atas Perda Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah;
2. Perda Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 40 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

4.1.01.06 Pajak Hotel

Realisasi pajak hotel Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp409.523.220,00 mengalami peningkatan sebesar Rp226.113.785,00 atau 123,28% dari pajak hotel Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp183.409.435,00. Rincian anggaran dan realisasi pajak hotel Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

Tabel 5.1.1.4 Anggaran dan Realisasi Pajak Hotel TA 2023

Kode Rekening	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	(%)
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	150.000.000,00	365.785.720,00	243,86
4.1.01.06.07.0001	Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya	20.000.000,00	43.737.500,00	218,69
4.1.01.06.08.0001	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	5.000.000,00	0,00	0,00
Jumlah		175.000.000,00	409.523.220,00	234,01

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2023

4.1.01.07 Pajak Restoran

Realisasi pajak restoran Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.975.925.622,00 mengalami peningkatan sebesar Rp58.474.272,92 atau 3,05% dari Pajak restoran Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.917.451.349,08. Rincian anggaran dan realisasi pajak restoran Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

Tabel 5.1.1.5 Anggaran dan Realisasi Pajak Restoran TA 2023

Kode Rekening	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	(%)
4.1.01.07.02.0001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	35.000.000,00	47.298.334,00	135,14
4.1.01.07.03.0001	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	20.000.000,00	23.505.461,00	117,53
4.1.01.07.04.0001	Pajak Kantin dan Sejenisnya	345.000,00	1.640.000,00	475,36
4.1.01.07.05.0001	Pajak Warung dan Sejenisnya	150.000,00	550.000,00	366,67
4.1.01.07.07.0001	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	1.476.880.000,00	1.902.931.827,00	128,85
Jumlah		1.532.375.000,00	1.975.925.622,00	128,95

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2023

4.1.01.08 Pajak Hiburan

Realisasi pajak hiburan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.500.000,00 mengalami peningkatan sebesar 44,93% dari pajak hiburan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.725.000,00. Rincian anggaran dan realisasi pajak hiburan Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

Tabel 5.1.1.6 Anggaran dan Realisasi Pajak Hiburan TA 2023

Kode Rekening	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	(%)
4.1.01.08.06.0001	Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap	500.000,00	0,00	0,00
4.1.01.08.10.0001	Pajak Pertandingan Olahraga	2.000.000,00	2.500.000,00	125,00
Jumlah		2.500.000,00	2.500.000,00	125,00

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2023

4.1.01.09 Pajak Reklame

Realisasi pajak reklame Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp447.425.910,00 mengalami peningkatan sebesar Rp36.154.102,00 atau 8,79% dari pajak reklame Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp411.271.808,00. Rincian anggaran dan realisasi pajak reklame Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

Tabel 5.1.1.7 Anggaran dan Realisasi Pajak Reklame TA 2023

Kode Rekening	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	(%)
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard /Videotron/Megatron	303.975.000,00	325.380.006,00	107,04
4.1.01.09.02.0001	Pajak Reklame Kain	99.825.000,00	122.045.904,00	122,26
Jumlah		403.800.000,00	447.425.910,00	110,80

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2023

4.1.01.10 Pajak Penerangan Jalan

Realisasi dengan kode rekening 4.1.01.10.01.0001 merupakan pajak penerangan jalan dihasilkan sendiri Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp4.868.653.463,00 mengalami peningkatan sebesar Rp365.575.105,00 atau 8,12% dari pajak penerangan jalan dihasilkan sendiri Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp4.503.078.358,00.

4.1.01.11 Pajak Parkir

Realisasi dengan kode rekening 4.1.01.11.01.0001 merupakan pajak parkir Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 107.568.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.907.333,00 atau 1,74% dari pajak parkir Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp109.475.333,00.

4.1.01.12 Pajak Air Tanah

Realisasi dengan kode rekening 4.1.01.12.01.0001 merupakan pajak air tanah yang mulai dianggarkan pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp4.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp4.811.675,00.

4.1.01.14 Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan

Realisasi pajak mineral bukan logam dan batuan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.043.627.259,00 mengalami peningkatan sebesar Rp456.825.313,00 atau 28,79% dari pajak mineral bukan logam dan batuan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.586.801.946,00. Rincian anggaran dan realisasi pendapatan pajak mineral bukan logam dan batuan Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

Tabel 5.1.1.8 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan TA 2023

Kode Rekening	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	(%)
4.1.01.14.04.0001	Pajak Batu Kapur	250.000.000,00	351.610.771,20	140,64
4.1.01.14.23.0001	Pajak Pasir dan Kerikil	1.501.000.000,00	1.500.006.492,80	99,93
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	41.000.000,00	192.009.995,00	468,32
Jumlah		1.792.000.000,00	2.043.627.259,00	108,76

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2023

4.1.01.15 Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

Realisasi dengan kode rekening 4.1.01.15.01.0001 merupakan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.746.846.685,00 mengalami peningkatan sebesar Rp157.958.524,00 atau 9,94% dari pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.588.888.161,00.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

4.1.01.16 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Realisasi dengan kode rekening 4.1.01.16.01.0001 merupakan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.029.270.845,00 mengalami peningkatan sebesar Rp918.386.772,00 atau 82,67% dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.110.884.073,00.

5.1.1.1.1.2 Retribusi Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Retribusi Daerah TA 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Retribusi Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.1.9 Anggaran dan Realisasi Retribusi Daerah TA 2023 dan 2022

Kode Rek	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	(%)	31 Desember 2022 (Rp)
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum				
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	3.850.000.008,00	4.724.737.900,00	122,72	3.814.355.644,00
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	80.100.000,00	85.843.000,00	107,17	90.502.000,00
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	24.000.000,00	28.150.000,00	117,29	30.325.000,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha				
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	260.137.000,00	406.048.000,00	156,09	193.745.000,00
4.1.02.02.02	Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan	201.396.000,00	118.672.500,00	58,92	121.628.500,00
4.1.02.02.03	Retribusi Tempat Pelelangan	126.500.000,00	139.521.250,00	110,29	110.950.125,00
4.1.02.02.04	Retribusi Terminal	0,00	0,00	0,00	3.450.000,00
4.1.02.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	57.500.000,00	56.200.000,00	97,74	52.100.000,00
4.1.02.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan	42.337.500,00	35.190.000,00	83,12	39.865.000,00
4.1.02.02.08	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	164.800.000,00	211.658.470,00	128,43	246.521.501,00
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga	175.000.000,00	172.040.000,00	98,31	98.500.000,00
4.1.02.02.10	Retribusi Penyeberangan di Air	0,00	0,00	0,00	37.075.000,00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu				
4.1.02.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	40.000.000,00	148.125.000,00	370,31	110.293.000,00
4.1.02.03.04	Retribusi Izin Usaha Perikanan	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	7.000.000,00
	Jumlah	5.023.770.508,00	6.128.186.120,00	121,98	4.956.310.770,00

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2023

Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Retribusi Daerah di TA 2023 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yang diuraikan diantaranya sebagai berikut:



1. Terjadinya kenaikan tarif sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Hal ini berdampak pada peningkatan penerimaan pendapatan dari sektor kesehatan. Kenaikan tarif ini disebabkan oleh peningkatan biaya layanan kesehatan atau penyesuaian kebijakan terkait peningkatan kualitas layanan kesehatan;
2. Banyaknya pembayaran retribusi parkir dari pihak yang wajib membayar karena adanya peningkatan tarif parkir menjadi salah satu faktor penyebab meningkatnya penerimaan pendapatan pada sektor perhubungan.

Pemungutan Retribusi-Retribusi Daerah di atas telah dilandasi Perda sebagai berikut:

1. Perda Nomor 1 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 1 Tahun 2017 tentang perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2013 tentang retribusi jasa umum;
2. Perda Nomor 2 Tahun 2013 tentang retribusi jasa usaha sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perda Nomor 8 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Perda Nomor 2 tahun 2013 tentang retribusi jasa usaha;
3. Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang retribusi perizinan tertentu.

4.1.02.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan

Realisasi Retribusi pelayanan kesehatan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp4.724.737.900,00 mengalami peningkatan sebesar Rp910.382.256,00 atau 23,87% dari Retribusi pelayanan kesehatan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp3.814.355.644,00. Rincian anggaran dan realisasi retribusi pelayanan kesehatan Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

Tabel 5.1.1.10 Anggaran dan Realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan TA 2023

Kode Rekening	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	(%)
4.1.02.01.01.0001	Retribusi Pelayanan di Puskesmas	2.500.000.008,00	3.247.162.400,00	129,89
4.1.02.01.01.0005	Retribusi Pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah	1.350.000.000,00	1.477.575.500,00	109,45
	Jumlah	3.850.000.008,00	4.724.737.900,00	122,72

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2023

4.1.02.01.02 Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pengambilan/pengumpulan sampah, pengangkutan sampah, dan penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah. Objek retribusi tersebut dikecualikan untuk pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial dan tempat umum lainnya.

Realisasi dengan kode rekening 4.1.02.01.02.0001 merupakan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp85.843.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp4.659.000,00 atau 5,15% dari Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp90.502.000,00.

4.1.02.01.04 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah retribusi yang dipungut atas kendaraan dengan keadaan tidak bergerak yang bersifat tidak sementara



yang berada di tepi jalan umum tertentu yang telah ditetapkan Bupati sebagai tempat parkir.

Realisasi dengan kode rekening 4.1.02.01.04.0001 merupakan Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp28.150.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp2.175.000,00 atau 7,17% dari Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp30.325.000,00.

4.1.02.02.01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pungutan yang dikenakan atas pemakaian atau penggunaan kekayaan milik daerah. Objek retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah pemakaian kekayaan daerah dikecualikan penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

Realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp406.048.000,00 mengalami peningkatan sebesar Rp212.303.000,00 atau 109,58% dari Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp193.745.000,00. Rincian anggaran dan realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

Tabel 5.1.1.11 Anggaran dan Realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah TA 2023

Kode Rekening	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	(%)
4.1.02.02.01.0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium	38.800.000,00	48.615.000,00	125,30
4.1.02.02.01.0005	Retribusi Pemakaian Ruang	143.500.000,00	272.883.000,00	190,16
4.1.02.02.01.0006	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	77.837.000,00	84.550.000,00	108,62
	Jumlah	260.137.000,00	406.048.000,00	156,09

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2023

4.1.02.02.02 Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan

Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah retribusi yang dipungut atas penyediaan fasilitas pasar yang dikelola oleh pemerintah daerah. Objek retribusi pelayanan Pasar berupa penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa pelataran, los, kios yang dikelola oleh pemerintah daerah dan khusus disediakan untuk pedagang, objek retribusi dikecualikan untuk pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Realisasi dengan kode rekening 4.1.02.02.02.0002 merupakan Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir dan/atau Pertokoan yang dikontrakkan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp118.672.500,00 mengalami penurunan sebesar Rp2.956.000,00 atau 2,43% dari Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir dan/atau Pertokoan yang dikontrakkan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp121.628.500,00.

4.1.02.02.03 Retribusi Tempat Pelelangan

Objek retribusi berupa penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh pemerintah daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan. Objek retribusi termasuk tempat yang dikontrak oleh Pemda dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan dan dikecualikan bagi tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.



Realisasi dengan kode rekening 4.1.02.02.03.0001 merupakan Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp139.521.250,00 mengalami peningkatan sebesar Rp28.571.125,00 atau 25,75% dari Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp110.950.125,00.

4.1.02.02.05 Retribusi Tempat Khusus Parkir

Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah retribusi yang dipungut atas pelayanan penyediaan tempat khusus parkir yang disediakan dan dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.

Realisasi dengan kode rekening 4.1.02.02.05.0001 merupakan Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp56.200.000,00 mengalami peningkatan sebesar Rp4.100.000,00 atau 7,87% dari Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp52.100.000,00.

4.1.02.02.07 Retribusi Rumah Potong Hewan

Retribusi Rumah Potong Hewan adalah retribusi yang dipungut sebagai pembayaran atas jasa pelayanan fasilitas rumah potong hewan. Objek retribusi berupa pelayanan fasilitas rumah potong hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan Kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemda, dikecualikan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Realisasi dengan kode rekening 4.1.02.02.07.0001 merupakan Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp35.190.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp4.675.000,00 atau 11,73% dari Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp39.865.000,00.

4.1.02.02.08 Retribusi Pelayanan Kepelabuhan

Retribusi Pelayanan Kepelabuhan adalah pungutan yang dikenakan atas jasa pelayanan kepelabuhan, termasuk fasilitas lainnya dilingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemda dan dikecualikan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Realisasi dengan kode rekening 4.1.02.02.08.0001 merupakan Retribusi Pelayanan Kepelabuhan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp211.658.470,00 mengalami penurunan sebesar Rp34.863.031,00 atau 14,14% dari Retribusi Pelayanan Kepelabuhan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp246.521.501,00.

4.1.02.02.09 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pungutan yang dikenakan atas pelayanan, penyediaan fasilitas tempat untuk rekreasi dan olahraga yang dimiliki atau dikelola oleh Pemda dan dikecualikan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Realisasi dengan kode rekening 4.1.02.02.09.0001 merupakan Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp172.040.000,00 mengalami peningkatan sebesar Rp73.540.000,00 atau 74,66% dari Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olah Raga Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp98.500.000,00.



4.1.02.03.01 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah retribusi atas pemberian izin untuk membangun baru, bangunan yang sudah ada, memperluas bangunan dan/atau memugar dalam rangka melestarikan bangunan sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku, dikecualikan pemberian izin bangunan milik pemerintah atau pemda.

Realisasi dengan kode rekening 4.1.02.03.01.0001 merupakan Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp148.125.000,00 mengalami peningkatan sebesar Rp37.832.000,00 atau 34,30% dari Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp110.293.000,00.

4.1.02.03.04 Retribusi Izin Usaha Perikanan

Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah retribusi yang dipungut atas pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan usaha pembudidayaan ikan.

Realisasi dengan kode rekening 4.1.02.03.04.0002 merupakan Retribusi Pemberian Izin Usaha Pembudidayaan Ikan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.000.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp.5.000.000,00 atau 71,43% dari Retribusi Pemberian Izin Usaha Pembudidayaan Ikan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp7.000.000,00.

5.1.1.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2023 dan 2022 yang merupakan Pendapatan Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemda (Deviden) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasinya dan nilai yang direalisasikan pada TA 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.1.12 Anggaran dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2023 dan 2022

Kode Rek	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	(%)	31 Desember 2022 (Rp)
4.1.03.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	4.165.684.360,00	4.165.684.360,00	100,00	2.888.444.941,71
Jumlah		4.165.684.360,00	4.165.684.360,00	100,00	2.888.444.941,71

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2023

Sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan di TA 2023 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya disebabkan adanya peningkatan investasi permanen dalam penyertaan modal pada PT Bank Pembangunan Sulawesi Tengah pada tahun 2023, sehingga menyebabkan pembagian deviden meningkat secara signifikan. Deviden merupakan bagian dari laba bersih yang dibagikan kepada pemegang saham, ketika laba meningkat pembagian deviden pun menjadi lebih besar.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan pembagian deviden atas laba dari Lembaga keuangan PT Bank Pembangunan Sulawesi Tengah. Pendapatan bagian laba yang dibagikan kepada Pemda (Deviden) atas Penyertaan Modal dari PT Bank Pembangunan Sulawesi Tengah diakui berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPS-LB PT Bank Sulteng Nomor 69 tanggal 21 Juni 2013.

5.1.1.1.1.4 Lain-Lain PAD yang Sah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah TA 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasinya dan nilai yang direalisasikan pada TA 2022 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.1.13 Anggaran dan Realisasi Lain-Lain PAD yang Sah TA 2023 dan 2022

Kode Rekening	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	(%)	31 Desember 2022 (Rp)
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan	18.000.000,00	18.475.000,00	102,64	27.820.000,00
4.1.04.04	Hasil Kerja Sama Daerah	168.013.500,00	18.100.000,00	10,77	20.285.000,00
4.1.04.05	Jasa Giro	200.000.000,00	206.450.372,96	103,23	1.128.565.942,04
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	1.500.000.000,00	1.930.204.611,91	128,68	751.617.289,89
4.1.04.13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	5.648.000,00
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	4.500.000.000,00	5.269.889.969,19	117,11	2.321.332.741,00
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	48.000.000.000,00	67.280.179.423,85	140,17	51.114.270.778,40
4.1.04.18	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	9.394.024.710,00	9.022.354.578,00	96,04	7.681.491.833,00
Jumlah		63.780.038.210,00	83.745.653.955,91	131,30	63.051.031.584,33

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2023

Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah di TA 2023 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:

1. Belum adanya Peraturan Daerah terkait pengenaan pungutan terhadap hasil kerja sama daerah untuk lalu lintas hewan ternak pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
2. Adanya pendapatan bunga yang bersumber dari Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF) pada Bank Indonesia tahun 2023;
3. Adanya peningkatan pendapatan BLUD atas pembayaran piutang tahun 2022 yang direalisasikan pada tahun 2023.

4.1.04.03 Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan

Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan bersumber dari Hasil Sewa BMD pada Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup dan Sekretariat Daerah.



Realisasi dengan kode rekening 4.1.04.03.01.0001 merupakan Hasil Sewa BMD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp18.475.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp9.345.000,00 atau 33,59% dari Hasil Sewa BMD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp27.820.000,00.

4.1.04.04 Hasil Kerja Sama Daerah

Hasil Kerja Sama Daerah bersumber dari penjualan hasil perikanan pada Dinas Perikanan.

Realisasi dengan kode rekening 4.1.04.04.01.0001 merupakan Hasil Kerja Sama Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp18.100.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp2.185.000,00 atau 10,77% dari Hasil Kerja Sama Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp20.285.000,00.

4.1.04.05 Jasa Giro

Jasa giro bersumber dari hasil penempatan uang pada beberapa rekening bank. Realisasi jasa giro Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp206.450.372,96 mengalami penurunan sebesar Rp922.115.569,08 atau 81,71% dari jasa giro Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.128.565.942,04. Rincian anggaran dan realisasi jasa giro Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

Tabel 5.1.1.14 Anggaran dan Realisasi Jasa Giro TA 2023

Kode Rekening	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	(%)
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	150.000.000,00	167.625.276,68	111,75
4.1.04.05.02.0001	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	50.000.000,00	38.825.096,28	77,65
	Jumlah	200.000.000,00	206.450.372,96	103,23

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2023

4.1.04.07 Pendapatan Bunga

Pendapatan Bunga bersumber dari hasil penempatan deposito pada PT Bank Sulteng, BRI, Bank Mandiri dan BNI.

Realisasi dengan kode rekening 4.1.04.07.01.0001 merupakan Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.930.204.611,91 mengalami peningkatan sebesar Rp1.178.587.322,02 atau 156,81% dari Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp751.617.289,89.

4.1.04.13 Pendapatan Denda Retribusi Daerah

Pendapatan dengan kode rekening 4.1.04.13.01.0011 merupakan Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang tidak dianggarkan pada tahun 2023.

4.1.04.15 Pendapatan dari Pengembalian

Pendapatan dari Pengembalian bersumber dari pengembalian belanja daerah pada tahun-tahun sebelum Tahun Anggaran 2023, yang sebelumnya telah diperhitungkan sebagai belanja pada tahun yang bersangkutan.

Realisasi dengan kode rekening 4.1.04.15.04.0001 merupakan Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp5.269.889.969,19 mengalami peningkatan sebesar Rp2.948.557.228,19 atau 127,02% dari Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.321.332.741,00.



4.1.04.16 Pendapatan BLUD

Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Ampana diatur dalam Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan BLUD RSUD Ampana. Pendapatan BLUD bersumber dari jasa pelayanan, hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain, APBD, APBN dan lain-lain pendapatan yang sah yang tidak mengikat (hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan, hasil pemanfaatan kekayaan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD serta hasil investasi). Mekanisme pengakuan Pendapatan BLUD berdasarkan Surat Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan BLUD oleh BUD.

Realisasi Pendapatan BLUD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp67.280.179.423,85 mengalami peningkatan sebesar Rp16.165.908.645,45 atau 31,63% dari Pendapatan BLUD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp51.114.270.778,40 yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.1.1.15 Realisasi Pendapatan BLUD TA 2023 dan 2022

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	67.004.720.415,00	50.713.700.691,00
2	Hasil Kerjasama BLUD	52.500.000,00	42.000.000,00
3	Pendapatan Lain yang Sah	222.959.008,85	358.570.087,40
	Jumlah	67.280.179.423,85	51.114.270.778,40

Sumber : RSUD Ampana

Rincian laporan keuangan BLUD *Audited* dapat dilihat pada *Lampiran 58*.

4.1.04.18 Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)

Pendapatan Dana Kapitasi JKN merupakan dana yang langsung diterima oleh Puskesmas dari Pemerintah Pusat untuk kebutuhan pelayanan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) pada puskesmas. Untuk mekanisme pengakuan Pendapatan Dana Kapitasi JKN berdasarkan Surat Pengesahan Pendapatan Dana Kapitasi (SP2DK) oleh BUD.

Realisasi dengan kode rekening 4.1.04.18.01.0001 merupakan Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp9.022.354.578,00 mengalami peningkatan sebesar Rp1.340.862.745,00 atau 17,46% dari Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp7.681.491.833,00.

Realisasi Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Tahun Anggaran 2023 dan 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.1.1.16 Realisasi Pendapatan Dana Kapitasi JKN TA 2023 dan 2022

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	Puskesmas Wakai	736.138.964,00	759.887.421,00
2	Puskesmas Lebiti	544.948.735,00	425.127.832,00
3	Puskesmas Dolong	256.189.174,00	184.560.704,00
4	Puskesmas Pasokan	291.276.621,00	211.436.389,00
5	Puskesmas Tete	1.541.946.409,00	1.307.471.764,00
6	Puskesmas Dataran Bulan	313.163.108,00	226.436.711,00
7	Puskesmas Ampana Timur	1.617.252.262,00	1.501.211.097,00
8	Puskesmas Ampana Barat	1.065.986.379,00	905.916.618,00
9	Puskesmas Marowo	804.158.628,00	687.810.618,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
10	Puskesmas Uekuli	705.780.549,00	585.635.526,00
11	Puskesmas Matakoto	308.437.533,00	275.768.115,00
12	Puskesmas Tombiano	285.819.552,00	261.870.574,00
13	Puskesmas Popoli'i	349.872.676,00	329.474.964,00
14	Puskesmas Watusongu	76.559.474,00	7.614.000,00
15	Puskesmas Molowagu	67.567.586,00	6.412.500,00
16	Puskesmas Kalia	57.256.928,00	4.857.000,00
Jumlah		9.022.354.578,00	7.681.491.833,00

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2023

5.1.1.1.2 Pendapatan Transfer

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Transfer TA 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Transfer yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.1.17 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer TA 2023 dan 2022

Kode Rek	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	(%)	31 Desember 2022 (Rp)
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.061.460.392.465,00	1.062.475.826.443,00	100,10	952.472.843.783,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	41.014.833.329,00	41.019.370.178,00	100,01	39.069.862.522,00
Jumlah		1.102.475.225.794,00	1.103.495.196.621,00	100,09	991.542.706.305,00

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2023

5.1.1.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat TA 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 5.1.1.18 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
TA 2023 dan 2022**

Kode Rek	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	(%)	31 Desember 2022 (Rp)
4.2.01.01	Dana Perimbangan	900.900.107.465,00	898.145.207.443,00	99,69	835.619.223.783,00
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	49.620.369.000,00	49.620.369.000,00	100,00	5.259.510.000,00
4.2.01.05	Dana Desa	110.939.916.000	114.710.250.000,00	103,40	111.594.110.000,00
Jumlah		1.061.460.392.465,00	1.062.475.826.443,00	100,10	952.472.843.783,00

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2023

Rincian Saldo Transfer Pemerintah Pusat yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasinya dan nilai yang direalisasikan pada TA 2022 diuraikan sebagai berikut:



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

**Tabel 5.1.1.19 Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
TA 2023 dan 2022**

Kode Rek	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	(%)	31 Desember 2022 (Rp)
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	122.840.222.000,00	122.838.930.500,00	100,00	83.227.223.214,00
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	563.464.553.000,00	566.048.075.000,00	100,46	544.410.196.000,00
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	108.024.603.000,00	105.409.293.801,00	97,58	118.507.522.025,00
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	106.570.729.465,00	103.848.908.142,00	97,45	89.474.282.544,00
4.2.01.02.01	DID	49.620.369.000,00	49.620.369.000,00	100,00	5.259.510.000,00
4.2.01.05.01	Dana Desa	110.939.916.000,00	114.710.250.000,00	103,40	111.594.110.000,00
Jumlah		1.061.460.392.465,00	1.062.475.826.443,00	100,10	952.472.843.783,00

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2023

Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat di TA 2023 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:

1. Adanya hasil perhitungan tambahan dana desa untuk setiap desa Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan PMK 98 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;
2. Adanya tambahan Dana Insentif Daerah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diberikan kepada Pemerintah Daerah atas capaian/penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 10 kali berturut-turut atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

4.2.01.01.01 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)

Rincian Saldo Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasinya dan nilai yang direalisasikan pada TA 2022 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.1.20 Anggaran dan Realisasi Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)

Kode Rekening	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	(%)
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	2.882.696.000,00	2.882.696.000,00	100,00
4.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21	3.415.019.000,00	3.415.019.000,00	100,00
4.2.01.01.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPND	90.509.000,00	90.509.000,00	100,00
4.2.01.01.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	17.220.000,00	15.928.500,00	92,50
4.2.01.01.01.0005	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	13.000.878.000,00	13.000.878.000,00	100,00
4.2.01.01.01.0006	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	55.275.134.000,00	55.275.134.000,00	100,00
4.2.01.01.01.0008	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan	172.233.000,00	172.233.000,00	100,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

Kode Rekening	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	(%)
	Batubara-Landrent			
4.2.01.01.01.0009	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	39.337.864.000,00	39.337.864.000,00	100,00
4.2.01.01.01.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	3.541.413.000,00	3.541.413.000,00	100,00
4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	5.107.256.000,00	5.107.256.000,00	100,00
	Jumlah	122.840.222.000,00	122.838.930.500,00	100,00

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2023

Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) yang diterima pada TA 2023 sebesar Rp122.838.930.500,00, tidak sesuai dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2023 pada Lampiran V.02 sampai dengan V.09 tentang Rincian Dana Alokasi Umum Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023 disebabkan penerimaan DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) sebesar Rp1.245.000,00 ditransfer pada tanggal 29 Desember 2023 dan diterima pada Kas Daerah pada tanggal 2 Januari 2024.

4.2.01.01.02 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)

Rincian Saldo Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasinya dan nilai yang direalisasikan pada TA 2022 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.1.21 Anggaran dan Realisasi Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum (DAU)

Kode Rekening	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	(%)
4.2.01.01.02.0001	DAU	526.760.993.000,00	529.344.515.000,00	100,49
4.2.01.01.02.0002	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	2.400.000.000,00	2.400.000.000,00	100,00
4.2.01.01.02.0004	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	34.303.560.000,00	34.303.560.000,00	100,00
	Jumlah	563.464.553.000,00	566.048.075.000,00	100,46

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2023

Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima pada TA 2023 sebesar Rp566.048.075.000,00, telah sesuai dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2023 pada Lampiran V.10 tentang Rincian Dana Alokasi Umum Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023.

4.2.01.01.03 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

Rincian Saldo Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasinya dan nilai yang direalisasikan pada TA 2022 diuraikan sebagai berikut:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Tabel 5.1.1.22 Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik TA 2023

Kode Rekening	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	(%)
4.2.01.01.03.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	353.963.000,00	353.118.150,00	99,76
4.2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	11.028.178.000,00	10.971.986.800,00	99,49
4.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	8.695.276.000,00	8.634.296.300,00	99,30
4.2.01.01.03.0018	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	865.314.000,00	853.600.000,00	98,65
4.2.01.01.03.0025	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-KB	226.757.000,00	217.757.000,00	96,03
4.2.01.01.03.0031	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	9.300.000.000,00	9.300.000.000,00	100,00
4.2.01.01.03.0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	38.105.316.000,00	37.435.002.000,00	98,24
4.2.01.01.03.0043	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	2.350.513.000,00	2.307.835.000,00	98,18
4.2.01.01.03.0052	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	6.366.246.000,00	6.318.093.491,00	99,24
4.2.01.01.03.0054	DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Reguler	12.113.600.000,00	10.558.868.000,00	87,17
4.2.01.01.03.0063	DAK Fisik-Bidang Transportasi Perairan-Penugasan	18.619.440.000,00	18.458.737.060,00	99,14
Jumlah		108.024.603.000,00	105.409.293.801,00	97,58

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2023

Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik yang diterima pada TA 2023 sebesar Rp105.409.293.801,00, tidak sesuai dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2023 pada Lampiran V.11 tentang Rincian Dana Alokasi Khusus Fisik Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023 disebabkan Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik direalisasikan berdasarkan nilai kontrak pekerjaan.

4.2.01.01.04 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

Rincian Saldo Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasinya dan nilai yang direalisasikan pada TA 2022 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.1.23 Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik TA 2022

Kode Rekening	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	(%)
4.2.01.01.04.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	25.370.840.000,00	25.330.800.478,00	99,84
4.2.01.01.03.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	30.950.606.000,00	30.693.413.400,00	99,17
4.2.01.01.03.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	2.272.750.000,00	2.272.750.000,00	100,00
4.2.01.01.03.0006	DAK Non Fisik-TKG	14.535.195.465,00	14.535.195.000,00	100,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

Kode Rekening	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	(%)
	PNSD			
4.2.01.01.03.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	3.586.200.000,00	3.579.315.000,00	99,81
4.2.01.01.03.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	992.600.000,00	992.600.000,00	100,00
4.2.01.01.03.0011	DAK Non Fisik-BOKKB- BOK	23.732.409.000,00	21.706.372.174,00	91,46
4.2.01.01.03.0015	DAK Non Fisik-BOKKB- BOKB	3.943.654.000,00	3.780.744.175,00	95,87
4.2.01.01.03.0020	DAK Non Fisik-Fasilitas Penanaman Modal	459.100.000,00	459.033.750,00	99,99
4.2.01.01.03.0022	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	438.800.000,00	304.497.850,00	69,39
4.2.01.01.03.0023	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	288.575.000,00	194.186.315,00	67,29
	Jumlah	106.570.729.465,00	103.848.908.142,00	97,45

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2023

Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik yang diterima pada TA 2023 sebesar Rp103.848.908.142,00, tidak sesuai dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2023 pada Lampiran V.12 tentang Rincian Dana Alokasi Khusus Non Fisik Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023 disebabkan adanya pengurangan atas SiLPA Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik tahun sebelumnya.

4.2.01.02.01 Dana Insentif Daerah (DID)

Dana Insentif Daerah (DID) yang diterima pada TA 2023 sebesar Rp49.620.369.000,00 telah sesuai dengan PMK Nomor 208/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Insentif Fiskal sebesar Rp22.085.174.000,00, PMK Nomor 336 Tahun 2023 tentang Rincian Alokasi Insentif Fiskal Tahun Berjalan untuk Kelompok Kategori Kinerja dalam rangka Pengendalian Inflasi Daerah pada Tahun anggaran 2023 periode kedua menurut Provinsi/Kabupaten/Kota sebesar Rp9.300.511.000,00 dan PMK Nomor 350 Tahun 2023 tentang Rincian Alokasi Insentif Fiskal Tahun Berjalan Kategori Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat pada Tahun Anggaran 2023 menurut Provinsi/Kabupaten/Kota sebesar Rp18.234.684.000,00.

4.2.01.05.01 Dana Desa

Dana Desa yang diterima pada TA 2023 sebesar Rp114.710.250.000,00, tidak sesuai dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2023 pada Lampiran V.15 tentang Rincian Dana Alokasi Umum Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023 disebabkan adanya hasil perhitungan tambahan dana desa untuk setiap desa Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan PMK 98 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa.

5.1.1.1.2.2 Pendapatan Transfer Antar Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Transfer Antar Daerah TA 2023 dan 2022 yaitu rincian saldo Pendapatan Transfer Antar Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023,



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.1.24 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah TA 2023 dan 2022

Kode Rek	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	(%)	31 Desember 2022 (Rp)
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	38.334.833.329,00	38.339.370.178,00	100,01	35.069.862.522,00
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	2.680.000.000,00	2.680.000.000,00	100,00	4.000.000.000,00
Jumlah		41.014.833.329,00	41.019.370.178,00	100,01	39.069.862.522,00

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2023

4.2.02.01 Pendapatan Bagi Hasil

Rincian Pendapatan Bagi Hasil yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasinya dan nilai yang direalisasikan pada TA 2022 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.1.25 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak TA 2023

Kode Rekening	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	(%)
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	6.452.556.975,00	5.862.653.884,00	90,86
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	6.763.275.042,00	6.180.389.249,00	91,38
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	15.433.171.176,00	15.460.082.684,00	100,17
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	568.552.602,00	775.671.523,00	136,43
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	9.117.277.534,00	10.060.572.838,00	110,35
Jumlah		38.334.833.329,00	38.339.370.178,00	100,01

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2023

Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Pendapatan Bagi Hasil di TA 2023 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:

1. Adanya peningkatan pendapatan bagi hasil pajak oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, disebabkan adanya pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor yang meningkat setiap tahun;
2. Adanya intensifikasi dalam penagihan piutang kendaraan bermotor sehingga menyebabkan peningkatan penerimaan pendapatan dana bagi hasil di kabupaten.

4.2.02.02 Bantuan Keuangan

Rincian Pendapatan Bantuan Keuangan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasinya dan nilai yang direalisasikan pada TA 2022 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.1.26 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Bantuan Keuangan Pajak TA 2023

Kode Rekening	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	(%)
4.2.02.02.02.0001	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	2.680.000.000,00	2.680.000.000,00	100,00
Jumlah		2.680.000.000,00	2.680.000.000,00	100,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2023

Sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Bantuan Keuangan di TA 2023 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya disebabkan adanya Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada tahun 2022 yang menyebabkan peningkatan penerimaan Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi pada tahun tersebut.

5.1.1.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian saldo Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasinya dan nilai yang direalisasikan pada TA 2022 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.1.27 Anggaran & Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah TA 2023 & 2022

Kode Rekening	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	(%)	31 Desember 2022 (Rp)
4.3.01	Pendapatan Hibah	2.720.000.000,00	2.693.331.842,00	99,02	349.900.000,00
	Jumlah	2.720.000.000,00	2.693.331.842,00	99,02	349.900.000,00

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2023

5.1.1.1.3.1 Pendapatan Hibah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Hibah Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian saldo Pendapatan Hibah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasinya dan nilai yang direalisasikan pada TA 2022 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.1.28 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Hibah TA 2023 dan 2022

Kode Rekening	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	(%)	31 Desember 2022 (Rp)
4.3.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	2.720.000.000,00	2.693.331.842,00	99,02	349.900.000,00
	Jumlah	2.720.000.000,00	2.693.331.842,00	99,02	349.900.000,00

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2023

Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat tahun 2023 sebesar Rp2.693.331.842,00 terdiri atas pendapatan hibah air minum sebesar Rp473.331.842,00 dan pendapatan hibah sanitasi sebesar Rp2.220.000.000,00. Sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Pendapatan Hibah di TA 2023 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya disebabkan adanya tambahan pendapatan hibah sanitasi dari Pemerintah Pusat yang merupakan kontribusi dalam mendukung program sanitasi tingkat daerah.

5.1.1.2 Belanja Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Daerah TA 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Belanja Daerah yang



dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.1.29 Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2023 dan 2022

Kode Rek	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	(%)	31 Desember 2022 (Rp)
5.1	Belanja Operasi	819.182.101.291,00	775.133.396.504,70	94,62	731.051.110.659,00
5.2	Belanja Modal	254.049.216.596,00	251.332.245.844,00	98,93	193.694.719.732,00
5.3	Belanja Tidak Terduga	1.174.747.166,00	23.000.000,00	1,96	1.396.601.886,00
5.4	Belanja Transfer	180.733.560.200,00	184.503.894.200,00	102,09	172.604.110.000,00
Jumlah		1.255.139.625.253,00	1.210.992.536.548,70	96,48	1.098.746.542.277,00

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2023

5.1.1.2.1 Belanja Operasi

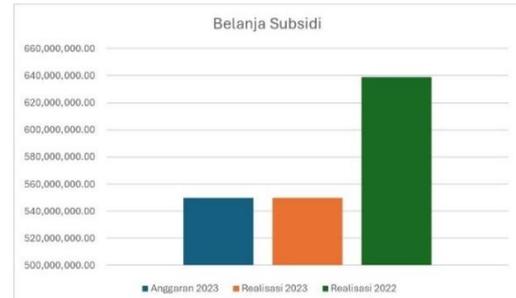
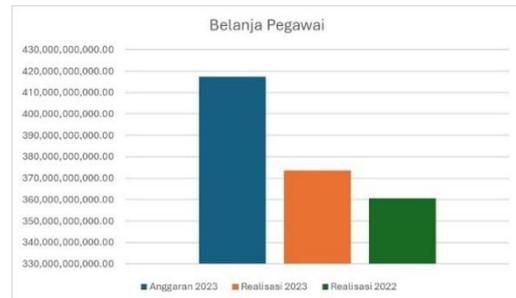
Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Operasi TA 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Belanja Operasi yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.1.30 Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi TA 2023 dan 2022

Kode Rek	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	(%)	31 Desember 2022 (Rp)
5.1.01	Belanja Pegawai	417.216.280.033,00	373.618.188.186,00	89,55	360.535.788.753,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	355.910.656.891,00	357.250.742.082,70	100,38	337.632.112.181,00
5.1.04	Belanja Subsidi	550.000.000,00	550.000.000,00	100,00	639.110.500,00
5.1.05	Belanja Hibah	37.573.903.725,00	35.978.355.030,00	95,75	15.185.239.825,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	7.931.260.642,00	7.736.111.206,00	97,54	17.058.859.400,00
Jumlah		819.182.101.291,00	775.133.396.504,70	94,62	731.051.110.659,00

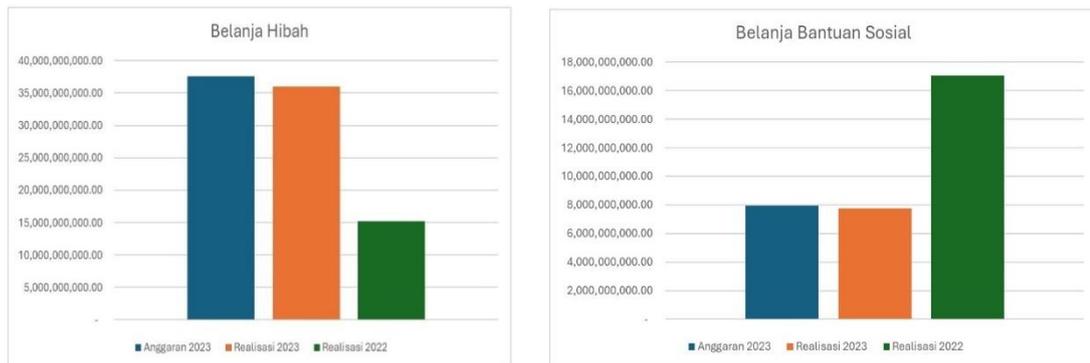
Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2023

Komposisi realisasi Belanja Operasi TA 2023 digambarkan dalam bentuk diagram di bawah ini.





CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023



Grafik 5.2 Realisasi Belanja Daerah TA 2023

Rincian saldo Belanja Operasi yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023 di masing-masing Perangkat Daerah dapat dilihat pada *Lampiran 42*.

5.1.1.2.1.1 Belanja Pegawai

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Pegawai TA 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Belanja Pegawai yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.1.31 Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2023 dan 2022

Kode Rek	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	(%)	31 Desember 2022 (Rp)
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	300.839.934.210,00	264.776.463.894,00	88,01	260.769.138.929,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	41.152.151.387,00	39.058.117.123,00	94,91	39.237.721.645,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	55.615.865.752,00	53.284.972.112,00	95,81	49.874.520.900,00
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	10.109.406.691,00	9.923.863.864,00	98,16	9.890.599.399,00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	216.381.993,00	162.711.680,00	75,20	162.407.880,00
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	635.200.000,00	582.600.000,00	91,72	601.400.000,00
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	8.647.340.000	5.829.459.513,00	67,41	0,00
Jumlah		417.216.280.033,00	373.618.188.186,00	89,55	360.535.788.753,00

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2023

Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Pegawai di TA 2023 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:

1. Anggaran yang dialokasikan untuk ASN PPPK tidak mencapai target yang ditetapkan sesuai dengan jumlah formasi yang dibutuhkan;



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

2. Capaian realisasi tahun 2023 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya karena adanya penambahan anggaran untuk pembayaran gaji ASN PPPK;
3. Adanya perubahan perhitungan TPP pada beberapa perangkat daerah meliputi Sekretariat Daerah, Inspektorat Daerah, dan Rumah Sakit Umum Daerah;
4. Adanya penyesuaian terhadap regulasi pada jenis penganggaran belanja BLUD, sehingga pada tahun 2023 belanja operasi terbagi atas 2 (dua) jenis belanja yaitu belanja pegawai dan belanja barang dan jasa. Pada tahun sebelumnya belanja pegawai masih digabungkan dengan belanja barang dan jasa.

Rincian saldo Belanja Pegawai yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasinya dan nilai yang direalisasikan pada TA 2022 di masing-masing Perangkat Daerah dapat dilihat pada *Lampiran 43*.

5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN

Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Tahun Anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp264.776.463.894,00 atau 88,01% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp300.839.934.210,00.

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Tahun Anggaran 2023 disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.1.32 Anggaran dan Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan ASN TA 2023

Kode Rekening	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	(%)
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	229.224.470.358,00	198.985.330.255,00	86,81
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	19.286.496.580,00	18.682.416.610,00	96,87
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	6.663.518.740,00	6.555.127.740,00	98,37
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	13.004.158.585,00	12.360.605.385,00	95,05
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	3.099.113.450,00	2.956.082.000,00	95,38
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	12.083.510.277,00	11.741.610.417,00	97,17
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	976.582.257,00	553.754.258,00	56,70
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	3.147.585,00	3.046.542,00	96,79
5.1.01.01.09.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS	14.341.379.261,00	11.283.209.731,00	78,68
5.1.01.01.10.0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	435.093.740,00	411.772.131,00	94,64
5.1.01.01.11.0001	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	1.253.467.793,00	1.243.501.092,00	99,20
5.1.01.01.12.0001	Belanja luran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	468.995.584,00	7.733,00	0,00
Jumlah		300.839.934.210,00	264.776.463.894,00	88,01

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2023

5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN

Belanja Tambahan Penghasilan ASN Tahun Anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp39.058.117.123,00 atau 94,91% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp41.152.151.387,00.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

Rincian anggaran dan realisasi Tambahan Penghasilan ASN Tahun Anggaran 2023 disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.1.33 Anggaran dan Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan ASN TA 2023

Kode Rekening	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	(%)
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	37.076.151.387,00	35.782.985.393,00	96,51
5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	4.076.000.000,00	3.275.131.730,00	80,35
Jumlah		41.152.151.387,00	39.058.117.123,00	94,91

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2023

5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN

Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Tahun Anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp53.284.972.112,00 atau 95,81% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp55.615.865.752,00.

Rincian anggaran dan realisasi Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Tahun Anggaran 2023 disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.1.34 Anggaran dan Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN TA 2023

Kode Rekening	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	(%)
5.1.01.03.01.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	8.750.000,00	8.750.000,00	100,00
5.1.01.03.01.0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	76.618.750,00	76.618.750,00	100,00
5.1.01.03.01.0008	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	125.000,00	125.000,00	100,00
5.1.01.03.01.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	20.190.000,00	20.190.000,00	100,00
5.1.01.03.01.0010	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	238.350.000,00	238.350.000,00	100,00
5.1.01.03.01.0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	4.000.000,00	3.970.930,00	99,27
5.1.01.03.01.0012	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	200.000,00	200.000,00	100,00
5.1.01.03.01.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan	89.600.000,00	89.600.000,00	100,00
5.1.01.03.01.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	89.000.000,00	63.985.400,00	71,89
5.1.01.03.01.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	91.170.000,00	91.170.000,00	100,00
5.1.01.03.02.0002	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Persampahan/Kebersihan	4.005.000,00	4.005.000,00	100,00
5.1.01.03.02.0004	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00
5.1.01.03.	Belanja bagi ASN atas Insentif	600.000,00	0,00	0,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode Rekening	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	(%)
02.0011	Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Tera/Tera Ulang			
5.1.01.03.02.0014	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Jasa Usaha- Pemakaian Kekayaan Daerah	13.006.850,00	11.006.260,00	84,62
5.1.01.03.02.0015	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Jasa Usaha- Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	10.069.800,00	0,00	0,00
5.1.01.03.02.0016	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Jasa Usaha- Tempat Pelelangan	6.325.000,00	6.325.000,00	100,00
5.1.01.03.02.0018	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Jasa Usaha- Tempat Khusus Parkir	2.875.000,00	2.154.472,00	74,94
5.1.01.03.02.0019	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Jasa Usaha- Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila	2.250.000,00	0,00	0,00
5.1.01.03.02.0020	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Jasa Usaha- Rumah Potong Hewan	2.116.875,00	0,00	0,00
5.1.01.03.02.0021	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Jasa Usaha- Pelayanan Kepelabuhan	8.240.000,00	8.240.000,00	100,00
5.1.01.03.02.0022	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Jasa Usaha- Tempat Rekreasi dan Olahraga	8.750.000,00	8.500.000,00	97,14
5.1.01.03.02.0025	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu- Izin Mendirikan Bangunan	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
5.1.01.03.02.0028	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Usaha Perikanan	100.000,00	100.000,00	100,00
5.1.01.03.03.0001	Belanja TPG PNSD	30.950.606.000,00	29.380.674.400,00	94,93
5.1.01.03.04.0001	Belanja TKG PNSD	14.535.195.465,00	13.999.224.900,00	96,31
5.1.01.03.05.0001	Belanja Tamsil Guru PNSD	2.272.750.000,00	2.270.490.000,00	99,90
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	4.239.782.008,00	4.132.192.000,00	97,46
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.888.092.004,00	1.843.852.000,00	97,66
5.1.01.03.07.0003	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengeadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	57.000.000,00	57.000.000,00	100,00
5.1.01.03.08.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	53.078.000,00	53.078.000,00	100,00
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang tidak Menghasilkan Pendapatan	939.820.000,00	911.970.000,00	97,04
	Jumlah	55.615.865.752,00	53.284.972.112,00	95,81

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2023



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

5.1.01.04 Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD

Belanja Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD Tahun Anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp9.923.863.864,00 atau 98,16% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp10.109.406.691,00.

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD Tahun Anggaran 2023 disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.1.35 Anggaran dan Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD TA 2023

Kode Rekening	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	(%)
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	591.540.000,00	552.090.000,00	93,33
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	73.235.800,00	37.489.200,00	51,19
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	83.138.160,00	51.273.360,00	61,67
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	56.154.000,00	48.132.000,00	85,71
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	814.233.000,00	802.638.400,00	98,58
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	100.191.224,00	84.955.500,00	84,79
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.150.000.000,00	3.150.000.000,00	100,00
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	787.500.000,00	787.500.000,00	100,00
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	5.510.449,00	681.948,00	12,38
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	59.013.274,00	48.482.784,00	82,16
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	1.347.696,00	1.155.168,00	85,71
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	4.043.088,00	3.465.504,00	85,71
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	1.584.000.000,00	1.584.000.000,00	100,00
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	2.772.000.000,00	2.772.000.000,00	100,00
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	27.500.000,00	0,00	0,00
	Jumlah	10.109.406.691,00	9.923.863.864,00	98,16

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2023

5.1.01.05 Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH

Belanja Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH Tahun Anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp162.711.680,00 atau 75,20% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp216.381.993,00.

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH Tahun Anggaran 2023 disajikan sebagai berikut:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

Tabel 5.1.1.36 Anggaran dan Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH TA 2023

Kode Rekening	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	(%)
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	105.380.000,00	54.600.000,00	51,81
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	99.684.000,00	98.280.000,00	98,59
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	2.056.728,00	2.027.760,00	98,59
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	3.473.265,00	2.110.800,00	60,77
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	2.272,00	2.240,00	98,59
5.1.01.05.07.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	5.338.320,00	5.250.960,00	98,36
5.1.01.05.08.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	132.912,00	131.040,00	98,59
5.1.01.05.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	314.496,00	308.880,00	98,21
Jumlah		216.381.993,00	162.711.680,00	75,20

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2023

5.1.01.06 Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH

Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH Tahun Anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp582.600.000,00 atau 91,72% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp635.200.000,00.

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH Tahun Anggaran 2023 disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.1.37 Anggaran dan Realisasi Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH TA 2023

Kode Rekening	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	(%)
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	235.200.000,00	201.600.000,00	85,71
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	400.000.000,00	381.000.000,00	95,25
Jumlah		635.200.000,00	582.600.000,00	91,72

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2023

5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD

Belanja dengan kode rekening 5.1.01.99.99.9999 merupakan Belanja Pegawai BLUD Tahun Anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp5.829.459.513,00 atau 67,41% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp8.647.340.000,00.

5.1.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Barang dan Jasa TA 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Belanja Barang dan Jasa yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

Tabel 5.1.1.38 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2023 dan 2022

Kode Rek	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	(%)	31 Desember 2022 (Rp)
5.1.02.01	Belanja Barang	63.839.410.240,00	61.423.690.250,00	96,22	48.316.208.876,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	144.415.449.994,00	138.399.857.244,70	95,83	131.897.777.631,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	21.346.313.037,00	20.736.256.073,00	97,14	14.020.533.092,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	61.148.860.307,00	58.890.549.414,00	96,31	57.242.547.727,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.443.730.100,00	1.352.260.106,00	93,66	571.545.500,00
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	20.705.889.473,00	20.892.483.563,00	100,90	21.464.668.860,00
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	43.011.003.740,00	55.555.645.432,00	129,17	64.118.830.495,00
	Jumlah	355.910.656.891,00	357.250.742.082,70	100,38	337.632.112.181,00

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2023

Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Barang dan Jasa di TA 2023 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:

1. Adanya pembayaran utang jasa tenaga kesehatan tahun sebelumnya yang dibayarkan pada tahun 2023, sehingga capaian realisasi belanja barang dan jasa BLUD meningkat dibandingkan tahun sebelumnya;
2. Adanya penyesuaian terhadap regulasi pada jenis penganggaran belanja BLUD, sehingga pada tahun 2023 belanja operasi terbagi atas 2 (dua) jenis belanja yaitu belanja pegawai dan belanja barang dan jasa. Pada tahun sebelumnya belanja pegawai masih digabungkan dengan belanja barang dan jasa.

Rincian saldo Belanja Barang dan Jasa yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasinya dan nilai yang direalisasikan pada TA 2022 di masing-masing Perangkat Daerah dapat dilihat pada **Lampiran 44**.

5.1.02.01 Belanja Barang

Belanja Barang merupakan belanja barang pakai habis Tahun Anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp61.423.690.250,00 atau 96,22% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp63.839.410.240,00.

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Barang Pakai Habis Tahun Anggaran 2023 disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.1.39 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Pakai Habis TA 2023

Kode Rekening	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	(%)
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	597.876.000,00	490.212.170,00	81,99
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	348.582.000,00	346.104.794,00	99,29
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	14.317.756.549,00	13.486.381.766,00	94,19
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan /Bibit Tanaman	417.793.250,00	341.378.575,00	81,71
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadan	8.400.000,00	8.391.600,00	99,90



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

Kode Rekening	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	(%)
	Kebakaran			
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	123.228.575,00	113.810.300,00	92,36
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	177.485.550,00	164.104.739,00	92,46
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	8.386.757.931,00	8.131.293.380,00	96,95
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	268.720.477,00	237.905.000,00	88,53
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	347.275.000,00	344.682.000,00	99,25
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	64.405.000,00	64.300.000,00	99,84
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	925.047.320,00	889.138.550,00	96,12
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	606.747.475,00	598.224.375,00	98,60
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	96.700.800,00	95.664.000,00	98,93
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga	867.824.450,00	848.469.000,00	97,77
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	94.616.000,00	63.320.400,00	66,92
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	4.528.320.959,00	4.408.183.058,00	97,35
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	3.905.605.084,00	3.780.519.292,00	96,80
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat Lainnya	64.481.543,00	63.204.823,00	98,02
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	109.015.000,00	107.247.000,00	98,38
5.1.02.01.01.0043	Belanja Naturan dan Pakan-Natura	6.711.722.300,00	6.365.979.650,00	94,85
5.1.02.01.01.0044	Belanja Naturan dan Pakan-Pakan	30.237.480,00	29.670.000,00	98,12
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.275.364.337,00	10.971.266.652,00	97,30
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	2.072.186.500,00	2.056.915.075,00	99,26
5.1.02.01.01.0055	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	394.513.000,00	366.211.000,00	92,83
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	1.820.625.250,00	1.790.041.500,00	98,32
5.1.02.01.01.0057	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	4.592.000,00	4.592.000,00	100,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	823.017.410,00	821.409.000,00	99,80
5.1.02.01.01.0059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	225.000.000,00	225.000.000,00	100,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	38.250.000,00	37.605.000,00	98,31
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	3.148.260.500,00	3.140.240.640,00	99,75
5.1.02.01.01.0065	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
5.1.02.01.01.0068	Belanja Pakaian Siaga	20.750.000,00	20.750.000,00	100,00
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	261.620.000,00	260.375.960,00	99,52
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	386.187.500,00	383.665.951,00	99,35
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	145.225.000,00	142.213.000,00	97,93
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	223.220.000,00	223.220.000,00	100,00
	Jumlah	63.839.410.240,00	61.423.690.250,00	96,22

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2023

5.1.02.02 Belanja Jasa

Belanja Belanja Jasa Tahun Anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp138.399.857.244,70 atau 95,83% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp144.415.449.994,00.



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Jasa Tahun Anggaran 2023 disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.1.40 Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa TA 2023

Kode Rekening	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	(%)
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.231.390.599,00	2.107.957.396,00	94,47
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	6.115.711.483,00	5.337.212.500,00	87,27
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	1.560.000.000,00	1.517.350.000,00	97,27
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	1.129.200.000,00	1.094.725.000,00	96,95
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	17.700.000,00	17.700.000,00	100,00
5.1.02.02.01.0009	Honorarium Penyelenggara Ujian	74.725.000,00	54.125.000,00	72,43
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	108.970.000,00	69.600.000,00	63,87
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	530.400.000,00	530.200.000,00	99,96
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	8.260.840.000,00	8.115.685.000,00	98,24
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	25.764.017.776,00	24.367.996.013,70	94,58
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	304.275.000,00	303.420.000,00	99,72
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	374.970.000,00	332.308.892,00	88,62
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	634.500.000,00	634.500.000,00	100,00
5.1.02.02.01.0018	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	637.900.000,00	637.800.000,00	99,98
5.1.02.02.01.0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	152.250.000,00	152.250.000,00	100,00
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	96.000.000,00	96.000.000,00	100,00
5.1.02.02.01.0021	Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air	543.600.000,00	542.500.000,00	99,80
5.1.02.02.01.0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	396.000.000,00	392.000.000,00	98,99
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	146.600.000,00	125.400.000,00	85,54
5.1.02.02.01.0024	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	250.200.000,00	249.200.000,00	99,60
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	177.400.000,00	172.345.500,00	97,15
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	8.816.298.233,00	8.482.750.187,00	96,22
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	4.739.130.000,00	4.647.892.000,00	98,07
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	1.717.450.000,00	1.601.924.336,00	93,27
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	5.444.475.004,00	5.074.074.000,00	93,20
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	6.587.810.000,00	6.458.513.204,00	98,04
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	5.697.420.000,00	5.596.059.000,00	98,22
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	3.167.700.300,00	3.092.753.338,00	97,63
5.1.02.02.01.0034	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	360.000.000,00	348.000.000,00	96,67
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	300.000.000,00	284.400.000,00	94,80
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	783.050.000,00	780.380.000,00	99,66
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	66.500.000,00	65.360.200,00	98,29
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	37.000.000,00	36.850.000,00	99,59
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	207.070.000,00	204.051.500,00	98,54
5.1.02.02.01.0044	Belanja Jasa Pelayanan Perpustakaan	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00
5.1.02.02.01.0045	Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan	115.200.000,00	115.200.000,00	100,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	3.274.156.000,00	3.161.769.338,00	96,57



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	(%)
5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	222.000.000,00	222.000.000,00	100,00
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	261.202.500,00	250.239.612,00	95,80
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	226.334.999,00	179.794.054,00	79,44
5.1.02.02.01.0057	Belanja Jasa Operator Kapal	771.248.000,00	756.348.000,00	98,07
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	188.539.246,00	168.857.170,00	89,56
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	325.962.004,00	286.388.808,00	87,86
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	7.547.782.236,00	7.230.477.409,00	95,80
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	125.778.476,00	88.186.000,00	70,11
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	2.455.363.580,00	2.414.348.865,00	98,33
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	94.450.000,00	73.470.009,00	77,79
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	1.200.000,00	226.000,00	18,83
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	1.215.696.618,00	1.191.244.901,00	97,99
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	160.000.000,00	140.000.000,00	87,50
5.1.02.02.01.0074	Belanja Insentif Tenaga Kesehatan Vaksinator	5.030.000,00	5.000.000,00	99,40
5.1.02.02.02.0002	Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI	13.350.112.300,00	13.243.863.100,00	99,20
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	5.804.329.623,00	5.760.803.125,00	99,25
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	263.068.008,00	229.680.985,00	87,31
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	315.642.658,00	281.750.235,00	89,26
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	85.000.000,00	74.893.162,00	88,11
5.1.02.02.04.0022	Belanja Sewa Electric Generating Set	54.450.000,00	46.830.000,00	86,01
5.1.02.02.04.0035	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	3.824.612.400,00	3.796.689.486,00	99,27
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	426.000.000,00	355.970.000,00	83,56
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	18.000.000,00	7.500.000,00	41,67
5.1.02.02.04.0043	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	3.930.000,00	3.930.000,00	100,00
5.1.02.02.04.0049	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	11.000.000,00	11.000.000,00	100,00
5.1.02.02.04.0052	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	9.268.000,00	9.268.000,00	100,00
5.1.02.02.04.0058	Belanja Sewa Alat Angkutan Bermotor Udara Lainnya	7.734.000,00	6.878.040,00	88,93
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	637.950.000,00	594.616.260,00	93,21
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	273.250.000,00	270.450.000,00	98,98
5.1.02.02.04.0204	Belanja Sewa Alat Kedokteran Umum	522.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.04.0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	178.468.500,00	123.859.000,00	69,40
5.1.02.02.04.0405	Belanja Sewa Personal Computer	96.600.000,00	96.585.000,00	99,98
5.1.02.02.04.0411	Belanja Sewa Peralatan Komputer Lainnya	32.000.000,00	32.000.000,00	100,00
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	25.000.000,00	24.960.000,00	99,84
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	505.800.000,00	474.850.000,00	93,88
5.1.02.02.05.0011	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga	18.000.000,00	14.940.000,00	83,00
5.1.02.02.05.0042	Belanja Sewa Asrama	140.000.000,00	140.000.000,00	100,00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	1.548.673.001,00	1.362.194.900,00	87,96
5.1.02.02.05.0049	Belanja Sewa Rumah Tidak Bersusun	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00
5.1.02.02.05.0050	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	202.200.000,00	101.200.000,00	50,05



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	(%)
5.1.02.02.06.0126	Belanja Sewa Jaringan Listrik Lainnya	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00
5.1.02.02.07.0031	Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya	6.950.000,00	6.700.000,00	96,40
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	1.537.002.250,00	1.535.757.450,00	99,92
5.1.02.02.08.0007	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	139.912.000,00	138.508.000,00	99,00
5.1.02.02.08.0008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	1.619.628.500,00	1.618.861.000,00	99,95
5.1.02.02.08.0009	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	398.749.000,00	398.494.000,00	99,94
5.1.02.02.08.0010	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal dalam Bangunan	80.000.000,00	79.800.000,00	99,75
5.1.02.02.08.0013	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	12.600.000,00	12.600.000,00	100,00
5.1.02.02.08.0015	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	707.165.000,00	627.150.000,00	88,69
5.1.02.02.08.0017	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang	200.000.000,00	99.966.589,00	49,98
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	455.213.400,00	452.293.000,00	99,36
5.1.02.02.08.0020	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	1.342.358.300,00	1.313.034.500,00	97,82
5.1.02.02.08.0021	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	596.945.900,00	578.293.400,00	96,88
5.1.02.02.08.0023	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Ruang	29.122.500,00	29.000.000,00	99,58
5.1.02.02.08.0030	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Sistem Mekanikal dan Elektrikal	100.000.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.09.0001	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pengembangan Pertanian dan Perdesaan	350.000.000,00	350.000.000,00	100,00
5.1.02.02.09.0011	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	200.087.000,00	199.900.000,00	99,91
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00
5.1.02.02.11.0001	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	50.000.000,00	2.500.000,00	5,00
5.1.02.02.11.0002	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	146.000.000,00	96.322.100,00	65,97
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	191.305.000,00	135.447.880,00	70,80
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	3.112.108.500,00	3.029.989.800,00	97,36
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	307.500.000,00	275.900.000,00	89,72
5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	352.195.100,00	319.295.000,00	90,66
	Jumlah	144.415.449.994,00	138.399.857.244,70	95,83

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2023

5.1.2.03 Belanja Pemeliharaan

Belanja Belanja Pemeliharaan Tahun Anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp20.736.256.073,00 atau 97,14% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp21.346.313.037,00.



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Pemeliharaan Tahun Anggaran 2023 disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.1.41 Anggaran dan Realisasi Belanja Pemeliharaan TA 2023

Kode Rekening	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	(%)
5.1.02.03.02.0003	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	418.943.519,00	406.881.014,00	97,12
5.1.02.03.02.0012	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	115.370.250,00	114.000.974,00	98,81
5.1.02.03.02.0017	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung-Mesin Proses Apung	16.800.000,00	16.739.700,00	99,64
5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	156.710.000,00	154.677.000,00	98,70
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	3.290.618.470,00	3.202.016.890,00	97,31
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	125.000.000,00	114.206.000,00	91,36
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	1.098.626.000,00	1.027.253.331,00	93,50
5.1.02.03.02.0039	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	42.640.000,00	40.373.000,00	94,68
5.1.02.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	423.289.400,00	383.237.765,00	90,54
5.1.02.03.02.0049	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	1.149.199.707,00	887.348.416,00	77,21
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	312.010.000,00	305.683.500,00	97,97
5.1.02.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	29.300.000,00	26.005.000,00	88,75
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	303.127.690,00	294.265.018,00	97,08
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	27.000.000,00	26.376.000,00	97,69
5.1.02.03.02.0132	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	3.900.000,00	3.500.000,00	89,74
5.1.02.03.02.0133	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
5.1.02.03.02.0137	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya	300.000,00	0,00	0,00
5.1.02.03.02.0204	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	3.600.000,00	3.600.000,00	100,00
5.1.02.03.02.0248	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum	52.200.000,00	51.973.356,00	99,57
5.1.02.03.02.0404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	113.000.000,00	111.742.700,00	98,89
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	386.815.311,00	372.970.034,00	96,42
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-	101.575.000,00	88.450.700,00	87,08



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	(%)
	Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer			
5.1.02.03.02.0492	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu- Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar	20.000.000,00	19.950.000,00	99,75
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	3.315.464.690,00	3.280.545.425,00	98,95
5.1.02.03.03.0012	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	250.125.000,00	249.900.000,00	99,91
5.1.02.03.03.0028	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Industri	6.396.000,00	6.350.000,00	99,28
5.1.02.03.03.0033	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir	170.000.000,00	169.800.000,00	99,88
5.1.02.03.03.0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	270.000.000,00	269.857.550,00	99,95
5.1.02.03.04.0003	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	4.707.173.000,00	4.681.105.000,00	99,45
5.1.02.03.04.0013	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten	1.733.034.000,00	1.726.027.900,00	99,60
5.1.02.03.04.0031	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya	1.324.773.000,00	1.324.773.000,00	100,00
5.1.02.03.04.0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	1.349.322.000,00	1.346.646.800,00	99,80
5.1.02.03.06.0005	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00
	Jumlah	21.346.313.037,00	20.736.256.073,00	97,14

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2023

5.1.2.04 Belanja Perjalanan Dinas

Belanja Belanja Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp58.890.549.414,00 atau 96,31% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp61.148.860.307,00. Belanja Perjalanan Dinas yaitu Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri.

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2023 disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.1.42 Anggaran dan Realisasi Belanja Perjalanan Dinas TA 2023

Kode Rekening	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	(%)
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	28.402.318.655,00	28.118.164.797,00	99,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	32.471.551.652,00	30.696.916.617,00	94,53
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	74.990.000,00	75.468.000,00	100,64
5.1.02.04.02.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri	200.000.000,00	0,00	0,00
	Jumlah	61.148.860.307,00	58.890.549.414,00	96,31

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2023



5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Tahun Anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp1.352.260.106,00 atau 93,66% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.443.730.100,00.

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Tahun Anggaran 2023 disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.1.43 Anggaran dan Realisasi Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat TA 2023

Kode Rekening	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	(%)
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	1.393.730.100,00	1.302.260.106,00	93,44
5.1.02.05.01.0005	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00
Jumlah		1.443.730.100,00	1.352.260.106,00	93,66

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2023

5.1.02.88 Belanja Barang dan Jasa BOS

Belanja dengan kode rekening 5.1.02.88.88.8888 merupakan Belanja Barang dan Jasa BOS Tahun Anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp20.892.483.563,00 atau 100,90% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp20.705.889.473,00. Mekanisme pengakuan Belanja Barang dan Jasa BOS berdasarkan Surat Pengesahan Belanja (SPB) oleh BUD.

5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD

Belanja Barang dan Jasa BLUD RSUD Ampana Tahun Anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp55.555.645.432,00. Realisasi Belanja Barang dan Jasa BLUD tersebut melebihi Pagu Anggaran yang ditetapkan yaitu sebesar Rp43.011.003.740,00 atau 129,17%.

Pelampauan anggaran tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum pada pasal 15 (2) yang menyatakan bahwa pengelolaan belanja BLU diselenggarakan secara fleksibel berdasarkan kesetaraan antara volume kegiatan pelayanan dengan jumlah pengeluaran, mengikuti praktek bisnis yang sehat, serta pada pasal 15 (3) yang menyatakan bahwa fleksibilitas pengelolaan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku dalam ambang batas sesuai dengan yang ditetapkan dalam RBA.

Selain aturan tersebut, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah pada pasal 74 menyatakan bahwa pengelolaan belanja BLUD diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan. Fleksibilitas merupakan belanja yang disesuaikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA dan DPA yang telah ditetapkan secara definitif. Ambang batas merupakan besaran persentase realisasi belanja yang diperkenankan melampaui anggaran dalam RBA dan DPA. Fleksibilitas dapat dilaksanakan terhadap belanja BLUD yang bersumber dari pendapatan BLUD dan hibah terikat. Selanjutnya pada pasal 75 menyatakan bahwa besaran presentase



ambang batas dihitung tanpa memperhitungkan saldo awal kas. Besaran presentase ambang batas tersebut memperhitungkan fluktuasi kegiatan operasional meliputi (a) kecenderungan/tren selisih anggaran pendapatan BLUD selain APBD tahun berjalan dengan realisasi 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya; dan (b) kecenderungan/tren selisih pendapatan BLUD selain APBD dengan prognosis tahun anggaran berjalan. Presentase ambang batas merupakan kebutuhan yang dapat diprediksi, dicapai, terukur, rasional dan dapat dipertanggungjawabkan. Besaran presentase ambang batas tersebut digunakan apabila pendapatan BLUD melebihi target pendapatan yang telah ditetapkan dalam RBA dan DPA tahun yang dianggarkan.

Penggunaan belanja barang dan jasa BLUD dapat dilakukan dengan penggunaan langsung. Mekanisme pengakuan Belanja Barang dan Jasa BLUD berdasarkan Surat Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan BLUD oleh BUD.

5.1.1.2.1.3 Belanja Subsidi

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Subsidi TA 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Belanja Subsidi yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.1.44 Anggaran dan Realisasi Belanja Subsidi TA 2023 dan 2022

Kode Rekening	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	(%)	31 Desember 2022 (Rp)
5.1.04.03	Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	550.000.000,00	550.000.000,00	100,00	639.110.500,00
Jumlah		550.000.000,00	550.000.000,00	100,00	639.110.500,00

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2023

Sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Subsidi di TA 2023 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya disebabkan adanya subsidi pada masyarakat untuk alat transportasi darat dan laut dalam rangka penanganan dampak inflasi.

Belanja Subsidi dikeluarkan berdasarkan Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2014 tentang Subsidi Sembako kepada Masyarakat di Kabupaten Tojo Una-Una. Subsidi tersebut diberikan kepada masyarakat yang dilaksanakan pada hari besar keagamaan dan sewaktu terjadinya inflasi daerah dengan nilai sebesar Rp550.000.000,00.

5.1.1.2.1.4 Belanja Hibah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Hibah TA 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Belanja Hibah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

Tabel 5.1.1.45 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah TA 2023 dan 2022

Kode Rek	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	(%)	31 Desember 2022 (Rp)
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	35.854.708.060,00	34.392.741.080,00	95,72	7.807.964.000,00
5.1.05.06	Belanja Hibah Dana BOS	875.000.000,00	741.419.845,00	84,78	6.283.082.650,00
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	844.195.665,00	844.194.105,00	100,00	844.193.175,00
Jumlah		37.573.903.725,00	35.978.355.030,00	95,75	15.185.239.825,00

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2023

Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Hibah di TA 2023 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:

1. Adanya belanja bantuan hibah kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk kegiatan pelaksanaan anggaran non tahapan pemilihan pada tahun sebelumnya;
2. Adanya perubahan jenis akun anggaran untuk belanja dana BOP Kesetaraan dan BOP PAUD di tahun 2023.

Rincian Belanja Hibah pada masing-masing Perangkat Daerah dapat dilihat pada *Lampiran 45*.

5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia

Pemberian Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia merupakan pemberian hibah berupa uang, barang dan jasa yang didasarkan pada Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 31 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial.

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Tahun Anggaran 2023 disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.1.46 Anggaran Dan Realisasi Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan Yang Berbadan Hukum Indonesia TA 2023

Kode Rekening	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	(%)
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	26.955.698.999,00	25.229.628.080,00	93,60
5.1.05.05.01.0003	Belanja Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga yang	4.179.959.000,00	4.571.915.000,00	109,38



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	(%)
	Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan			
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	1.662.500.000,00	1.540.000.000,00	92,63
5.1.05.05.03.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	3.056.550.061,00	3.051.198.000,00	99,82
Jumlah		35.854.708.060,00	34.392.741.080,00	95,92

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2023

5.1.05.06 Belanja Hibah Dana BOS

Pemberian Hibah Dana BOS merupakan pemberian hibah kepada satuan Pendidikan dasar, dan/atau menengah dan/atau khusus negeri dan swasta selama TA 2023 yang didasarkan pada Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 17 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah.

Belanja Hibah Dana BOS Tahun Anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp741.419.845,00 atau 84,73% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp875.000.000,00.

5.1.05.07 Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik

Pemberian Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik merupakan pemberian hibah kepada Partai Politik yang didasarkan pada Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 31 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Memperoleh Suara di DPRD Kabupaten Tojo Una-Una sesuai Surat Keputusan Bupati Tojo Una-Una Nomor 100.3.3.2/72/KESBANGPOL/2023 tentang Besaran Bantuan Keuangan Partai Politik Hasil Pemilu Tahun 2019 Kabupaten Tojo Una-Una Tahun Anggaran 2023 dengan nilai bantuan keuangan kepada masing-masing partai politik diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.1.47 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik TA 2023 dan 2022

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	(%)	31 Desember 2022 (Rp)
1	Partai Amanat Nasional	103.786.965,00	103.786.000,00	100,00	103.786.000,00
2	Partai Bulan Bintang	29.575.935,00	29.575.925,00	100,00	29.575.925,00
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	86.707.155,00	86.707.000,00	100,00	86.707.000,00
4	Partai Demokrat	98.192.955,00	98.192.900,00	100,00	98.192.900,00
5	Partai Gerindra	79.826.310,00	79.826.300,00	100,00	79.826.300,00
6	Partai Golkar	145.763.310,00	145.763.000,00	100,00	145.763.000,00
7	Partai Kebangkitan Bangsa	80.017.740,00	80.017.700,00	100,00	80.017.700,00
8	Partai Nasdem	175.668.930,00	175.668.930,00	100,00	175.668.000,00
9	Partai Perindo	44.656.365,00	44.656.350,00	100,00	44.656.350,00
Jumlah		844.195.665,00	844.194.105,00	100,00	844.193.175,00

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2023



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

5.1.1.2.1.5 Belanja Bantuan Sosial

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Bantuan Sosial TA 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Belanja Bantuan Sosial yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.1.48 Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2023 dan 2022

Kode Rek	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	(%)	31 Desember 2022 (Rp)
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	1.668.610.000,00	1.544.410.000,00	92,56	257.200.000,00
5.1.06.02	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	2.080.000.000,00	2.080.000.000,00	100,00	599.600.000,00
5.1.06.03	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	4.058.900.642,00	3.988.489.206,00	98,27	15.819.881.780,00
5.1.06.04	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	123.750.000,00	123.212.000,00	99,57	382.177.620,00
Jumlah		7.931.260.642,00	7.736.111.206,00	97,54	17.058.859.400,00

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2023

Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Bantuan Sosial di TA 2023 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:

1. Adanya bantuan sosial berupa peningkatan kualitas rumah swadaya pada Masyarakat tahun 2023;
2. Meningkatnya capaian realisasi belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu di tahun 2023 dibandingkan tahun sebelumnya disebabkan adanya pemberian bantuan beasiswa pendidikan kepada mahasiswa berprestasi;
3. Meningkatnya capaian realisasi belanja bantuan sosial di tahun 2023 dibandingkan tahun sebelumnya disebabkan adanya kegiatan program gerak cepat pengantasan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat (Gercep Gaskan Berdaya) kepada kepala keluarga atau rumah tangga miskin (RTM).

Pemberian bantuan sosial di atas, sesuai dengan Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 31 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial.

5.1.06.01 Belanja Bantuan Sosial kepada Individu

Belanja Bantuan Sosial kepada Individu Tahun Anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp1.544.410.000,00 atau 92,56% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.668.610.000,00. Meningkatnya capaian realisasi belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu di tahun 2023 dibandingkan tahun sebelumnya



disebabkan adanya pemberian bantuan beasiswa pendidikan kepada mahasiswa berprestasi.

Rincian anggaran dan realisasi Bantuan Sosial kepada Individu Tahun Anggaran 2023 disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.1.49 Anggaran dan Realisasi Bantuan Sosial kepada Individu TA 2023

Kode Rekening	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	(%)
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	187.500.000,00	167.300.000,00	89,23
5.1.06.01.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	1.481.110.000,00	1.377.110.000,00	92,98
Jumlah		1.668.610.000,00	1.544.410.000,00	92,56

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2023

5.1.06.02 Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga

Belanja dengan kode rekening 5.1.06.02.01.0001 merupakan belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada keluarga Tahun Anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp2.080.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp2.080.000.000,00. Meningkatnya capaian realisasi belanja bantuan sosial kepada keluarga di tahun 2023 dibandingkan tahun sebelumnya disebabkan adanya kegiatan program gerak cepat pengantasan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat (Gercep Gaskan Berdaya) kepada kepala keluarga atau rumah tangga miskin (RTM).

5.1.06.03 Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat

Belanja dengan kode rekening 5.1.06.03.02.0001 merupakan belanja bantuan sosial barang yang direncanakan kepada kelompok masyarakat Tahun Anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp3.988.489.206,00 atau 98,27% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp4.058.900.642,00.

5.1.06.04 Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)

Belanja dengan kode rekening 5.1.06.04.02.0001 merupakan Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) Tahun Anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp123.212.000,00 atau 99,57% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp123.750.000,00.

5.1.1.2.2 Belanja Modal

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Modal TA 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Belanja Modal yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

Tabel 5.1.1.50 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA 2023 dan 2022

Kode Rek	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	(%)	31 Desember 2022 (Rp)
5.2.01	Belanja Modal Tanah	940.000.000,00	910.595.000,00	96,87	1.902.408.200,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	46.890.666.007,00	45.588.017.814,00	97,22	35.140.034.761,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	53.342.457.135,00	53.133.843.499,00	99,61	53.648.605.064,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	150.848.250.336,00	149.756.808.488,00	99,28	100.587.673.882,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.027.843.118,00	1.942.981.043,00	95,82	2.415.997.825,00
Jumlah		254.049.216.596,00	251.332.245.844,00	98,93	193.694.719.732,00

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2023

Rincian saldo Belanja Modal yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023 serta persentase capaian realisasinya di masing-masing Perangkat Daerah dapat dilihat pada **Lampiran 46**.

5.1.1.2.2.1 Belanja Modal Tanah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Modal Tanah TA 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Belanja Modal Tanah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.1.51 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2023 dan 2022

Kode Rekening	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	(%)	31 Desember 2022 (Rp)
5.2.01.01.01	Belanja Modal Tanah Persil	700.000.000,00	700.000.000,00	100,00	643.928.000,00
5.2.01.01.03	Belanja Modal Lapangan	240.000.000,00	210.595.000,00	87,75	1.258.480.200,00
Jumlah		940.000.000,00	910.595.000,00	96,87	1.902.408.200,00

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2023

Realisasi Belanja Modal Tanah sebesar Rp910.595.000,00 merupakan salah satu penambah nilai perolehan aset tetap tanah setelah dikurangi koreksi/reklasifikasi. Realisasi dan reklasifikasi belanja modal per OPD disajikan dalam rekap rekonsiliasi nilai tercatat aset tetap tanah pada awal dan akhir periode per 31 Desember 2023 pada **Lampiran 14**.

Sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Modal Tanah di TA 2023 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya disebabkan adanya pembayaran biaya ganti rugi tanaman dan tanah untuk kepentingan umum kegiatan pembangunan jalur sungai baru pada Tahun Anggaran 2022.

Rincian saldo Belanja Modal Tanah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023 serta persentase capaian realisasinya di masing-masing Perangkat Daerah dapat dilihat pada **Lampiran 47**.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

5.2.01.01.01 Belanja Modal Tanah Persil

Belanja Modal Tanah Persil dengan kode rekening 5.2.01.01.01.0007 merupakan Belanja Modal Tanah Persil Lainnya Tahun Anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp700.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp700.000.000,00.

5.2.01.01.03 Belanja Modal Lapangan

Belanja Modal Lapangan dengan kode rekening 5.2.01.01.03.0007 merupakan Belanja Modal Tanah untuk Jalan Tahun Anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp210.595.000,00 atau 87,75 % dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp240.000.000,00.

5.1.1.2.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.1.52 Anggaran & Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2023 & 2022

Kode Rek	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	(%)	31 Desember 2022 (Rp)
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	8.676.528.500,00	8.220.180.000,00	94,74	2.289.594.433,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	15.650.498.000,00	15.586.859.000,00	99,59	1.805.835.600,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	16.521.100,00	16.271.100,00	98,49	0,00
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	2.712.000,00	2.712.000,00	100,00	2.500.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	6.392.592.683,00	6.256.050.583,00	97,86	3.340.196.147,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	476.000.603,00	440.700.818,00	92,58	465.527.517,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	6.439.641.244,00	6.031.959.817,00	93,67	10.268.589.125,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	900.389.225,00	854.857.000,00	94,94	724.108.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	5.345.072.913,00	5.263.119.899,00	98,47	12.490.413.035,00
5.2.02.11	Belanja Modal Alat Eksplorasi	3.902.500,00	0,00	0,00	147.119.850,00
5.2.02.13	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	0,00	0,00	0,00	38.000.000,00
5.2.02.14	Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi	0,00	0,00	0,00	29.000.000,00
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	62.000.000,00	61.896.000,00	99,83	12.000.000,00
5.2.02.16	Belanja Modal Alat Peraga	360.000.000,00	355.000.000,00	98,61	790.425.000,00
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	265.000.000,00	264.850.000,00	99,94	191.250.000,00
5.2.02.19	Belanja Modal	11.499.500,00	11.000.000,00	95,66	1.000.000,00



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

Kode Rek	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	(%)	31 Desember 2022 (Rp)
	Peralatan Olahraga				
5.2.02.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	2.288.307.739,00	2.222.561.597,00	97,13	2.544.476.054,00
	Jumlah	46.890.666.007,00	45.588.017.814,00	97,22	35.140.034.761,00

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2023

Realisasi belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp45.588.017.814,00 merupakan salah satu penambah nilai perolehan aset tetap peralatan dan mesin setelah dikurangi koreksi/reklasifikasi. Realisasi dan reklasifikasi belanja modal per OPD disajikan dalam rekap rekonsiliasi nilai tercatat aset tetap peralatan dan mesin pada awal dan akhir periode per 31 Desember 2023 pada *Lampiran 17*.

Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Modal Peralatan dan Mesin di TA 2023 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:

1. Meningkatnya capaian realisasi belanja modal peralatan dan mesin disebabkan adanya pengadaan belanja modal perkakas bengkel kayu yang dianggarkan pada tahun 2023;
2. Capaian realisasi belanja modal peralatan dan mesin tahun 2022 lebih tinggi dibandingkan tahun 2023 disebabkan adanya pengadaan belanja modal sumur pemboran yang dianggarkan pada tahun 2022.

Rincian saldo Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023 serta persentase capaian realisasinya di masing-masing Perangkat Daerah dapat dilihat pada *Lampiran 48*.

5.2.02.01 Belanja Modal Alat Besar

Belanja Modal Alat Besar Tahun Anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp8.220.180.000,00 atau 94,74% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp8.676.528.500,00.

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Alat Besar Tahun Anggaran 2023 disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.1. 53 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Besar TA 2023

Kode Rekening	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	(%)
5.2.02.01.01.0003	Belanja Modal Excavator	1.742.700.000,00	1.742.700.000,00	100,00
5.2.02.01.01.0012	Belanja Modal Alat Besar Darat Lainnya	1.329.948.500,00	1.329.948.500,00	100,00
5.2.02.01.02.0005	Belanja Modal Mesin Proses Apung	2.390.580.000,00	2.061.327.000,00	86,23
5.2.02.01.03.0004	Belanja Modal Electric Generating Set	3.184.100.000,00	3.059.408.000,00	96,08
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	29.200.000,00	26.796.500,00	91,77
	Jumlah	8.676.528.500,00	8.220.180.000,00	94,74

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2023

5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan

Belanja Modal Alat Angkutan Tahun Anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp15.586.859.000,00 atau 99,59% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp15.650.498.000,00.



Rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Alat Angkutan Tahun Anggaran 2023 disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.1. 54 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Angkutan TA 2023

Kode Rekening	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	(%)
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	521.498.000,00	515.572.000,00	98,86
5.2.02.02.01.0005	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	126.400.000,00	123.389.000,00	97,62
5.2.02.02.02.0001	Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	2.600.000,00	2.598.000,00	99,92
5.2.02.02.03.0002	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	3.600.000.000,00	3.599.700.000,00	99,99
5.2.02.02.03.0003	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus	11.400.000.000,00	11.345.600.000,00	99,52
Jumlah		15.650.498.000,00	15.586.859.000,00	99,59

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2023

5.2.02.03 Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur

Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur Tahun Anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp16.271.100,00 atau 98,49% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp16.521.100,00.

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur Tahun Anggaran 2023 disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.1. 55 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur TA 2023

Kode Rekening	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	(%)
5.2.02.03.01.0006	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu	14.571.100,00	14.571.100,00	100,00
5.2.02.03.03.0010	Belanja Modal Alat Timbangan/Biara	1.950.000,00	1.700.000,00	87,18
Jumlah		16.521.100,00	16.271.100,00	98,49

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2023

5.2.02.04 Belanja Modal Alat Pertanian

Realisasi Belanja dengan kode rekening 5.2.02.04.01.0002 merupakan Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak Tahun Anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp2.712.000,00 atau 100,00% dari anggaran yang ditetapkan.

5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga

Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Tahun Anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp6.256.050.583,00 atau 97,86% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp6.392.592.683,00.

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Tahun Anggaran 2023 disajikan sebagai berikut:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

Tabel 5.1.1. 56 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga TA 2023

Kode Rekening	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	(%)
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	33.729.000,00	33.380.750,00	98,97
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	656.036.422,00	605.470.462,00	92,29
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	3.273.378.200,00	3.212.422.360,00	98,14
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	105.782.509,00	104.513.500,00	98,80
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	1.105.059.659,00	1.095.095.402,00	99,10
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	10.179.000,00	10.153.000,00	99,74
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.197.587.893,00	1.184.415.109,00	98,90
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	4.400.000,00	4.400.000,00	100,00
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	6.440.000,00	6.200.000,00	96,27
	Jumlah	6.392.592.683,00	6.256.050.583,00	97,86

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2023

5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar

Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar Tahun Anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp440.700.818,00 atau 92,58% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp476.000.603,00.

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar Tahun Anggaran 2023 disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.1. 57 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar TA 2023

Kode Rekening	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	(%)
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	137.328.800,00	137.266.389,00	99,95
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	269.143.803,00	267.258.429,00	99,30
5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
5.2.02.06.02.0002	Belanja Modal Alat Komunikasi Radio SSB	14.200.000,00	12.900.000,00	90,85
5.2.02.06.02.0009	Belanja Modal Alat Komunikasi Digital dan Konvensional	16.328.000,00	14.276.000,00	87,43
5.2.02.06.03.0047	Belanja Modal Sumber Tenaga	36.000.000,00	6.000.000,00	16,67
	Jumlah	476.000.603,00	440.700.818,00	92,58

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2023

5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan

Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan Tahun Anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp6.031.959.817,00 atau 93,67% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp6.439.641.244,00.

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan Tahun Anggaran 2023 disajikan sebagai berikut:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

Tabel 5.1.1. 58 Anggaran & Realisasi Belanja Modal Alat Kedokteran & Kesehatan TA 2023

Kode Rekening	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	(%)
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	4.411.687.644,00	4.344.590.065,00	98,48
5.2.02.07.01.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	226.400.000,00	217.400.000,00	96,02
5.2.02.07.01.0010	Belanja Modal Alat Kedokteran Anak	24.600.000,00	24.600.000,00	100,00
5.2.02.07.01.0029	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	1.059.800.000,00	1.027.711.152,00	96,97
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	717.153.600,00	417.658.600,00	58,24
Jumlah		6.439.641.244,00	6.031.959.817,00	93,67

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2023

5.2.02.08 Belanja Modal Alat Laboratorium

Belanja Modal Alat Laboratorium Tahun Anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp854.857.000,00 atau 94,94% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp900.389.225,00. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Alat Laboratorium Tahun Anggaran 2023 disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.1. 59 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Laboratorium TA 2023

Kode Rekening	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	(%)
5.2.02.08.01.0014	Belanja Modal Alat Laboratorium Patologi	265.614.000,00	253.900.000,00	95,59
5.2.02.08.01.0016	Belanja Modal Alat Laboratorium Hematologi	68.400.225,00	61.800.000,00	90,35
5.2.02.08.01.0049	Belanja Modal Alat Laboratorium Geofisika	97.500.000,00	88.800.000,00	91,08
5.2.02.08.03.0015	Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK	468.875.000,00	450.357.000,00	96,05
Jumlah		900.389.225,00	854.857.000,00	94,94

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2023

5.2.02.10 Belanja Modal Komputer

Belanja Modal Komputer Tahun Anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp5.263.119.899,00 atau 98,47% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp5.345.072.913,00. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Komputer Tahun Anggaran 2023 disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.1. 60 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Komputer TA 2023

Kode Rekening	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	(%)
5.2.02.10.01.0001	Belanja Modal Komputer Jaringan	50.000.000,00	39.500.000,00	79,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	4.158.803.748,00	4.148.137.384,00	99,74
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	19.817.000,00	0,00	0,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	864.776.540,00	824.478.168,00	95,34
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	251.675.625,00	251.004.347,00	99,73
Jumlah		5.345.072.913,00	5.263.119.899,00	98,47

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2023



5.2.02.11 Belanja Modal Alat Eksplorasi

Belanja dengan kode rekening 5.2.02.11.02.0002 merupakan belanja modal Elektronik/Electric dengan anggaran sebesar Rp3.902.500,00 tidak terealisasi pada Tahun Anggaran 2023.

5.2.02.15 Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja

Belanja dengan kode rekening 5.2.02.15.02.0001 merupakan Belanja Modal Baju Pengaman Tahun Anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp61.896.000,00 atau 99,83% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp62.000.000,00.

5.2.02.16 Belanja Modal Alat Peraga

Belanja dengan kode rekening 5.2.02.16.01.0003 merupakan belanja modal alat peraga pelatihan dan percontohan lainnya Tahun Anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp355.000.000,00 atau 98,61% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp360.000.000,00.

5.2.02.18 Belanja Modal Rambu-Rambu

Belanja Modal Rambu-rambu Tahun Anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp264.850.000,00 atau 99,94% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp265.000.000,00. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Rambu-Rambu Tahun Anggaran 2023 disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.1. 61 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Rambu-Rambu TA 2023

Kode Rekening	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	(%)
5.2.02.18.01.0003	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00
5.2.02.18.03.0001	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	250.000.000,00	249.850.000,00	99,94
Jumlah		265.000.000,00	264.850.000,00	99,94

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2023

5.2.02.19 Belanja Modal Peralatan Olahraga

Belanja Modal Peralatan Olahraga Tahun Anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp11.000.000,00 atau 95,66% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp11.499.500,00.

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Peralatan Olahraga Tahun Anggaran 2023 disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.1. 62 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan Olahraga TA 2023

Kode Rekening	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	(%)
5.2.02.19.01.0001	Belanja Modal Peralatan Olahraga Atletik	9.800.000,00	9.800.000,00	100,00
5.2.02.19.01.0003	Belanja Modal Peralatan Senam	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00
5.2.02.19.01.0006	Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya	499.500,00	0,00	0,00
Jumlah		11.499.500,00	11.000.000,00	95,66

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2023



5.2.02.88 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS

Belanja dengan kode rekening 5.2.02.88.88.8888 merupakan belanja modal peralatan dan mesin BOS Tahun Anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp2.222.561.597,00 atau 97,13% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp2.288.307.739,00.

5.1.1.2.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.1. 63 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2023 dan 2022

Kode Rek	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	(%)	31 Desember 2022 (Rp)
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	48.293.511.129,00	48.115.746.899,00	99,63	52.480.438.064,00
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	5.048.946.006,00	5.018.096.600,00	99,39	1.168.167.000,00
Jumlah		53.342.457.135,00	53.133.843.499,00	99,61	53.648.605.064,00

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2023

Realisasi belanja modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp53.133.843.499,00 merupakan salah satu penambah nilai Perolehan aset tetap gedung dan bangunan setelah dikurangi koreksi/reklasifikasi. Realisasi dan reklasifikasi belanja modal per OPD disajikan dalam rekap rekonsiliasi nilai tercatat aset tetap gedung dan bangunan pada awal dan akhir periode per 31 Desember 2023 pada *lampiran 18*.

Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Modal Gedung dan Bangunan di TA 2023 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:

1. Meningkatnya capaian realisasi belanja modal gedung dan bangunan disebabkan adanya penambahan belanja modal pagar sekolah yang dianggarkan pada tahun 2023;
2. Capaian realisasi belanja modal gedung dan bangunan tahun 2022 lebih tinggi dibandingkan tahun 2023 disebabkan adanya kesalahan penganggaran belanja modal gedung tempat kerja lainnya Tahun Anggaran 2022 yang direklas sebagai aset jalan, jaringan dan irigasi.

Rincian saldo Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023 serta persentase capaian realisasinya di masing-masing Perangkat Daerah dapat dilihat pada *lampiran 49*.

5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung

Belanja Modal Bangunan Gedung Tahun Anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp48.115.746.899,00 atau 99,63% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp48.293.511.129,00.



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Bangunan Gedung Tahun Anggaran 2023 disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.1. 64 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Bangunan Gedung TA 2023

Kode Rekening	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	(%)
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	5.385.399.026,00	5.379.210.000,00	99,89
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	2.459.700.000,00	2.449.249.000,00	99,58
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	29.572.663.603,00	29.524.583.399,00	99,84
5.2.03.01.01.0011	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	100.000.000,00	99.996.000,00	100,00
5.2.03.01.01.0018	Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	7.886.262.000,00	7.822.520.000,00	99,19
5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	2.360.778.000,00	2.312.338.000,00	97,95
5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman	100.000.000,00	99.844.000,00	99,84
5.2.03.01.01.0037	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	318.008.500,00	317.306.500,00	99,78
5.2.03.01.02.0013	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	110.700.000,00	110.700.000,00	100,00
Jumlah		48.293.511.129,00	48.115.746.899,00	99,63

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2023

5.2.03.04 Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti

Belanja Modal dengan kode rekening 5.2.03.04.01.0004 merupakan Belanja Modal Pagar Tahun Anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp5.018.096.600,00 atau 99,39% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp5.048.946.006,00.

5.1.1.2.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi TA 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.1. 65 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi TA 2023 dan 2022

Kode Rek	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	(%)	31 Desember 2022 (Rp)
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	94.184.316.900,00	93.352.817.900,00	99,12	52.775.886.047,00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	45.803.890.009,00	45.736.407.100,00	99,85	35.192.683.835,00
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	38.000.000,00	35.000.000,00	92,11	0,00
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	10.822.043.427,00	10.632.583.488,00	98,25	12.619.104.000,00
Jumlah		150.848.250.336,00	149.756.808.488,00	99,28	100.587.673.882,00

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2023



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Rp149.756.808.488,00 merupakan salah satu penambah nilai aset tetap jalan, jaringan dan irigasi setelah dikurangi koreksi/reklasifikasi. Realisasi dan reklasifikasi belanja modal per opd disajikan dalam rekap rekonsiliasi nilai tercatat aset tetap jalan, jaringan dan irigasi pada awal dan akhir periode per 31 Desember 2023 pada *lampiran 19*.

Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi di TA 2023 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:

1. Meningkatnya capaian realisasi belanja modal jalan, jaringan dan irigasi disebabkan adanya kesalahan penganggaran belanja modal bangunan pelengkap air bersih/air baku pada tahun 2023 yang direklas sebagai barang yang diserahkan ke masyarakat;
2. Capaian realisasi belanja modal jalan, jaringan dan irigasi tahun 2022 lebih tinggi dibandingkan tahun 2023 disebabkan adanya kesalahan penganggaran belanja modal bangunan pembawa air kotor Tahun Anggaran 2022 yang direklas sebagai barang yang diserahkan ke masyarakat.

Rincian saldo Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023 serta persentase capaian realisasinya di masing-masing Perangkat Daerah dapat dilihat pada *lampiran 50*.

5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan

Belanja Modal Jalan dan Jembatan Tahun Anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp93.352.817.900,00 atau 99,12% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp94.184.316.900,00.

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Jalan dan Jembatan Tahun Anggaran 2023 disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.1. 66 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan dan Jembatan TA 2023

Kode Rekening	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	(%)
5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	60.094.719.000,00	59.366.209.400,00	98,79
5.2.04.01.01.0005	Belanja Modal Jalan Desa	203.590.000,00	203.026.000,00	99,72
5.2.04.01.01.0009	Belanja Modal Jalan Khusus	10.735.000.000,00	10.733.238.000,00	99,98
5.2.04.01.01.0010	Belanja Modal Jalan Lainnya	10.063.707.900,00	10.056.972.500,00	99,93
5.2.04.01.02.0003	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	11.744.759.000,00	11.652.800.000,00	99,22
5.2.04.01.02.0005	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Desa	1.042.541.000,00	1.041.451.000,00	99,90
5.2.04.01.02.0013	Belanja Modal Jembatan Lainnya	300.000.000,00	299.121.000,00	99,71
	Jumlah	94.184.316.900,00	93.352.817.900,00	99,12

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2023



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

5.2.04.02 Belanja Modal Bangunan Air

Belanja Modal Bangunan Air Tahun Anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp45.736.407.100,00 atau 99,85% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp45.803.890.009,00. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Bangunan Air Tahun Anggaran 2023 disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.1. 67 Anggaran Dan Realisasi Belanja Modal Bangunan Air TA 2023

Kode Rekening	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	(%)
5.2.04.02.01.0002	Belanja Modal Bangunan Pengambilan Irigasi	132.000.000,00	131.768.000,00	99,82
5.2.04.02.01.0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	3.685.464.000,00	3.641.389.000,00	98,80
5.2.04.02.01.0005	Belanja Modal Bangunan Pengaman Irigasi	595.500.000,00	595.148.000,00	99,94
5.2.04.02.04.0001	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	11.963.366.000,00	11.959.154.000,00	99,96
5.2.04.02.06.0002	Belanja Modal Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku	240.000.000,00	239.760.000,00	99,90
5.2.04.02.06.0005	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	20.729.128.000,00	20.718.066.900,00	99,95
5.2.04.02.06.0006	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	128.000.000,00	127.950.000,00	99,96
5.2.04.02.07.0003	Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor	7.255.123.009,00	7.248.462.200,00	99,91
5.2.04.02.07.0005	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Air Kotor	885.309.000,00	884.809.000,00	99,94
5.2.04.02.07.0006	Belanja Modal Bangunan Air Kotor Lainnya	190.000.000,00	189.900.000,00	99,95
Jumlah		45.803.890.009,00	45.736.407.100,00	99,85

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2023

5.2.04.03 Belanja Modal Instalasi

Belanja Modal Instalasi Tahun Anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp35.000.000,00 atau 92,11% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp38.000.000,00. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Instalasi Tahun Anggaran 2023 disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.1. 68 Anggaran Dan Realisasi Belanja Modal Instalasi TA 2023

Kode Rekening	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	(%)
5.2.04.03.01.0005	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	35.000.000,00	35.000.000,00	100,00
5.2.04.03.10.0001	Belanja Modal Instalasi Lain	3.000.000,00	0,00	0,00
Jumlah		38.000.000,00	35.000.000,00	92,11

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2023

5.2.04.04 Belanja Modal Jaringan

Belanja Modal Jaringan Tahun Anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp10.632.583.488,00 atau 98,25% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp10.822.043.427,00. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Jaringan Tahun Anggaran 2023 disajikan sebagai berikut:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

Tabel 5.1.1. 69 Anggaran Dan Realisasi Belanja Modal Jaringan TA 2023

Kode Rekening	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	(%)
5.2.04.04.01.0004	Belanja Modal Jaringan Sambungan ke Rumah	5.961.217.000,00	5.853.095.203,00	98,19
5.2.04.04.02.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	4.860.826.427,00	4.779.488.285,00	98,33
Jumlah		10.822.043.427,00	10.632.583.488,00	98,25

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2023

5.1.1.2.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Belanja Modal Aset Tetap Lainnya yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.1. 70 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2023 dan 2022

Kode Rek	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	(%)	31 Desember 2022 (Rp)
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	23.000.000,00	11.610.000,00	50,48	0,00
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	6.000.000,00	5.500.000,00	91,67	22.033.500,00
5.2.05.07	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	434.673.500,00	433.900.000,00	99,82	2.165.139.000,00
5.2.05.08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	8.000.000,00	6.000.000,00	75,00	7.992.000,00
5.2.05.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	1.556.169.618,00	1.485.971.043,00	95,49	220.833.325,00
Jumlah		2.027.843.118,00	1.942.981.043,00	95,82	2.415.997.825,00

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2023

Realisasi belanja modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp1.942.981.043,00 merupakan salah satu penambah nilai aset tetap aset tetap lainnya setelah dikurangi koreksi/reklasifikasi. Realisasi dan reklasifikasi belanja modal per opd disajikan dalam rekap rekonsiliasi nilai tercatat aset tetap lainnya pada awal dan akhir periode per 31 Desember 2023 pada *lampiran 20*.

Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Modal Aset Tetap Lainnya di TA 2023 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:

1. Meningkatnya capaian realisasi belanja modal aset tetap lainnya disebabkan adanya kesalahan penganggaran belanja modal aset tetap lainnya BOS pada tahun 2023 yang direklas sebagai aset peralatan dan mesin;
2. Capaian realisasi belanja modal aset tetap lainnya tahun 2022 lebih tinggi dibandingkan tahun 2023 disebabkan adanya kesalahan penganggaran belanja modal aset tetap dalam renovasi Tahun Anggaran 2022 yang direklas sebagai aset gedung dan bangunan serta aset jalan, jaringan dan irigasi.



Rincian saldo Belanja Modal Aset Tetap Lainnya yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023 serta persentase capaian realisasinya di masing-masing Perangkat Daerah dapat dilihat pada *lampiran 51*.

5.2.05.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan

Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tahun Anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp11.610.000,00 atau 50,48% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp23.000.000,00.

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tahun Anggaran 2023 disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.1. 71 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Bahan Perpustakaan TA 2023

Kode Rekening	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	(%)
5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	500.000,00	0,00	0,00
5.2.05.01.01.0003	Belanja Modal Buku Agama	22.500.000,00	11.610.000,00	51,60
Jumlah		23.000.000,00	11.610.000,00	50,48

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2023

5.2.05.02 Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga

Belanja dengan kode rekening 5.2.05.02.01.0001 merupakan belanja modal alat musik Tahun Anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp5.500.000,00 atau 91,67% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp6.000.000,00.

5.2.05.07 Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi

Belanja dengan kode rekening 5.2.05.07.01.0001 merupakan Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi Tahun Anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp433.900.000,00 atau 99,82% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp434.673.500,00.

5.2.05.08 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud

Belanja dengan kode rekening 5.2.05.08.01.0005 merupakan Belanja Modal Software Tahun Anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp6.000.000,00 atau 75,00% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp6.000.000,00.

5.2.05.88 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS

Belanja dengan kode rekening 5.2.05.88.88.8888 merupakan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS Tahun Anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp1.485.971.043,00 atau 95,49% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.556.169.618,00.

5.1.1.2.3 Belanja Tidak Terduga

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Tidak Terduga TA 2023 dan 2022 yang hanya terdiri dari rincian atas saldo Belanja Tidak Terduga yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasinya dan nilai yang direalisasikan pada TA 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.1. 72 Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Terduga TA 2023 dan 2022

Kode Rek	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	(%)	31 Desember 2022 (Rp)
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	1.174.747.166,00	23.000.000,00	1,96	1.396.601.886,00
Jumlah		1.174.747.166,00	23.000.000,00	1,96	1.396.601.886,00

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2023



Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Tidak Terduga di TA 2023 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:

1. Capaian realisasi belanja tidak terduga tahun 2023 tidak memenuhi target disebabkan dana belanja tidak terduga hanya digunakan untuk pengeluaran kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya.
2. Capaian realisasi belanja tidak terduga tahun 2022 lebih tinggi dibandingkan tahun 2023 disebabkan adanya pengembalian sisa dana hibah dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi paska bencana tahun anggaran 2021, penerimaan pemotongan penyaluran dana alokasi umum atau dana bagi hasil tahun anggaran 2022 tahap pertama dalam rangka penggantian dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atas dukungan terhadap penanganan dampak pandemik Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), penerimaan pemotongan dana alokasi umum tahun anggaran 2022 tahap pertama atas sisa dana alokasi khusus non fisik di rekening kas umum daerah sampai dengan tahun 2021, dan penerimaan pemotongan dana bagi hasil umum dan/atau dana bagi hasil tahun anggaran 2022 tahap kedua atas sisa dana alokasi khusus non fisik di rekening kas umum daerah.

Belanja Tidak Terduga tersebut merupakan belanja yang dikeluarkan dalam rangka bantuan untuk korban bencana alam angin puting beliung dan kebakaran rumah di Kelurahan Bailo Kecamatan Ampana Kota, Kelurahan Dondo Kecamatan Ratolindo dan Desa Pulau Enam Kecamatan Togeang.

5.1.1.2.4 Belanja Transfer

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Transfer TA 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Belanja Transfer yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasinya dan nilai yang direalisasikan pada TA 2022 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.1. 73 Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer TA 2023 dan 2022

Kode Rek	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	(%)	31 Desember 2022 (Rp)
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	100,00	1.510.000.000,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	179.233.560.200,00	183.003.894.200,00	102,10	171.094.110.000,00
Jumlah		180.733.560.200,00	184.503.894.200,00	102,09	172.604.110.000,00

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2023

Realisasi Transfer Bantuan Keuangan sebesar Rp183.003.894.200,00 yang bersumber dari APBN sebesar Rp114.710.250.000,00 dan bersumber dari APBD sebesar Rp68.293.644.200,00 yang disalurkan langsung ke Rekening Kas Desa. Mekanisme pengakuan belanja yang bersumber dari APBN berdasarkan Surat Pengesahan Belanja Dana Desa (SPBDD) oleh BUD, dimana pencatatan didasarkan pada dokumen sumber berupa SP2D BUN. Realisasi Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa disajikan pada *lampiran 40*.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

5.1.1.2.4.1 Belanja Bagi Hasil

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Bagi Hasil TA 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Belanja Bagi Hasil yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasinya dan nilai yang direalisasikan pada TA 2022 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.1. 74 Anggaran dan Realisasi Belanja Bagi Hasil TA 2023 dan 2022

Kode Rekening	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	(%)	31 Desember 2022 (Rp)
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	899.999.878,00	899.999.878,00	100,00	1.159.100.486,00
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	600.000.122,00	600.000.122,00	100,00	350.899.514,00
Jumlah		1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	100,00	1.510.000.000,00

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2023

Sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Bagi Hasil di TA 2023 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya disebabkan capaian realisasi belanja bagi hasil pajak tahun 2022 lebih tinggi dibandingkan tahun 2023 disebabkan adanya kesalahan penganggaran belanja bagi hasil pajak Tahun Anggaran 2022 yang seharusnya sebagai belanja bagi hasil retribusi.

Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa disalurkan kepada desa yang didasarkan pada Keputusan Bupati Tojo Una-Una Nomor 100.3.3.2/355/BAPENDA/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/50/BAPENDA/2023 tentang Besaran Jumlah Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tojo Una-Una yang Diterima Desa Tahun 2023.

5.1.1.2.4.2 Belanja Bantuan Keuangan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Belanja Bantuan Keuangan TA 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Belanja Bantuan Keuangan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasinya dan nilai yang direalisasikan pada TA 2022 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.1. 75 Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan TA 2023 dan 2022

Kode Rek	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	(%)	31 Desember 2022 (Rp)
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	179.233.560.200,00	183.003.894.200,00	102,10	171.094.110.000,00
Jumlah		179.233.560.200,00	183.003.894.200,00	102,10	171.094.110.000,00

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2023



Sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Transfer Bantuan Keuangan di TA 2023 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya disebabkan adanya penyesuaian dari hasil perhitungan tambahan dana desa untuk setiap desa Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan PMK 98 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa.

Transfer Bantuan Keuangan tersebut disalurkan kepada desa yang didasarkan pada Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2023.

5.1.1.3 Pembiayaan Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pembiayaan Daerah TA 2023 dan 2022 yang diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.1. 76 Anggaran dan Realisasi Pembiayaan TA 2023 dan 2022

Kode Rek	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	(%)	31 Desember 2022 (Rp)
6.1	Penerimaan Pembiayaan	67.994.831.381,00	67.994.772.289,50	100,00	94.539.994.594,38
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	3.300.000.000,00	3.300.000.000,00	100,00	2.000.000.000,00
	Pembiayaan Netto	64.694.831.381,00	64.694.772.289,50	100,00	92.539.994.594,38

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2023

5.1.1.3.1 Penerimaan Pembiayaan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Penerimaan Pembiayaan TA 2023 dan 2022 yang hanya terdiri dari rincian atas saldo Penerimaan Pembiayaan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasinya dan nilai yang direalisasikan pada TA 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.1. 77 Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan TA 2023 dan 2022

Kode Rek	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	(%)	31 Desember 2022 (Rp)
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	67.994.831.381,00	67.994.772.289,50	100,00	94.539.994.594,38
	Jumlah	67.994.831.381,00	67.994.772.289,50	100,00	94.539.994.594,38

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2023

Sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Penerimaan Pembiayaan di TA 2023 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya disebabkan adanya pengakuan dana Treasury Deposit Facility (TDF) sebagai pendapatan LRA pada Tahun Anggaran 2022.

5.1.1.3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya TA 2023 dan 2022 yaitu rincian saldo Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya yang



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasinya dan nilai yang direalisasikan pada TA 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.1. 78 Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan TA 2023 dan 2022

Kode Rek	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	(%)	31 Desember 2022 (Rp)
6.1.01.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	67.994.831.381,00	67.994.772.289,50	100,00	94.539.994.594,38
Jumlah		67.994.831.381,00	67.994.772.289,50	100,00	94.539.994.594,38

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2023

5.1.1.3.2 Pengeluaran Pembiayaan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pengeluaran Pembiayaan TA 2023 dan 2022 yang hanya terdiri dari rincian atas saldo Pengeluaran Pembiayaan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasinya dan nilai yang direalisasikan pada TA 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.1. 79 Anggaran dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan TA 2023 dan 2022

Kode Rek	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	(%)	31 Desember 2022 (Rp)
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	3.300.000.000,00	3.300.000.000,00	100,00	2.000.000.000,00
Jumlah		3.300.000.000,00	3.300.000.000,00	100,00	2.000.000.000,00

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2023

Sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Pengeluaran Pembiayaan di TA 2023 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya disebabkan adanya penambahan penyertaan modal pada PDAM Ue Tanah pada Tahun Anggaran 2023.

5.1.1.3.2.1 Penyertaan Modal Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Penyertaan Modal Daerah TA 2023 dan 2022 yang merupakan saldo Penyertaan Modal Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2023, persentase capaian realisasinya dan nilai yang direalisasikan pada TA 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.1. 80 Anggaran dan Realisasi Penyertaan Modal Daerah TA 2023 dan 2022

Kode Rek	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	(%)	31 Desember 2022 (Rp)
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)				
	• PT Bank Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Cabang Ampana	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	100,00	2.000.000.000,00



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

Kode Rek	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	(%)	31 Desember 2022 (Rp)
	• Perusahaan Daerah Air Minum Ue Tanah	300.000.000,00	300.000.000,00	100,00	0,00
	Jumlah	3.300.000.000,00	3.300.000.000,00	100,00	2.000.000.000,00

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2023

5.1.1.4 Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran-SiLPA/(SiKPA)

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran-SiLPA/(SiKPA) TA 2023 dan 2022 yang dihitung dari:

Tabel 5.1.1. 81 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran TA 2023 dan 2022

Kode Rek	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	(%)	31 Desember 2022 (Rp)
4	Pendapatan	1.190.444.793.872,00	1.213.864.205.577,91	101,97	1.074.201.379.064,12
4.1	Pendapatan Asli Daerah	85.249.568.078,00	107.675.677.114,91	126,31	82.308.772.759,12
4.2	Pendapatan Transfer	1.102.475.225.794,00	1.103.495.196.621,00	100,09	991.542.706.305,00
4.3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	2.720.000.000,00	2.693.331.842,00	99,02	349.900.000,00
5	Belanja Daerah	1.255.139.625.253,00	1.210.992.536.548,70	96,48	1.098.746.542.277,00
5.1	Belanja Operasi	819.182.101.291,00	775.133.396.504,70	94,62	731.051.110.659,00
5.2	Belanja Modal	254.049.216.596,00	251.332.245.844,00	98,93	193.694.719.732,00
5.3	Belanja Tidak Terduga	1.174.747.166,00	23.000.000,00	1,96	1.396.601.886,00
5.4	Belanja Transfer	180.733.560.200,00	184.503.894.200,00	102,09	172.604.110.000,00
	Surplus/Defisit	(64.694.831.381,00)	2.871.669.029,21	(4,44)	(24.545.163.212,88)
6	Pembiayaan Netto	64.694.831.381,00	64.694.772.289,50	100,00	92.539.994.594,38
6.1	Penerimaan Pembiayaan	67.994.831.381,00	67.994.772.289,50	100,00	94.539.994.594,38
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	3.300.000.000,00	3.300.000.000,00	100,00	2.000.000.000,00
	SILPA	0,00	67.566.441.318,71	0,00	67.994.831.381,50

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2023

Berdasarkan perhitungan di atas, Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una pada TA 2023 memiliki SiLPA sebesar Rp67.566.441.318,71 dari nilai SiLPA tersebut terdapat SiLPA Terikat dan SiLPA Non-Terikat yang diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.1. 82 SiLPA Terikat dan SiLPA Non-Terikat TA 2023

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)
➤ Dana SiLPA Terikat	
✓ Dana pada Kas di BLUD	9.553.418.219,78
✓ Dana pada Kas Dana BOS	29.360.170,00
✓ Dana pada Kas Dana Kapitasi pada FKTP	142.895.487,55
✓ Dana pada Kas Lainnya yang didalamnya memuat dana:	
• Dana pada Kas Dana BOK Puskesmas	1.971.808.830,00
• Pajak Pusat Terutang	446.772.214,00
• Pendapatan Jasa Giro yang belum disetor ke Kasda	5.877.501,84
✓ Dana pada Kas di Kas Daerah, Setara Kas dan Investasi Jangka Pendek yang didalamnya memuat dana:	
• Kewajiban Pembayaran Utang Jangka Pendek Lainnya	243.632.171,72



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)
• Sisa Dana Transfer Pusat – DAK Fisik yang terdiri dari:	
» DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	21.650,00
» DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	131.400,00
» DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	28.800,00
» DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	535.000,00
» DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Reguler	1.839.000,00
» DAK Fisik-Bidang Transportasi Perairan-Penugasan	21.267.135,00
» DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	111.942.000,00
• Sisa Dana Transfer Pusat – DAK Non-Fisik yang terdiri dari:	
» DAK Non Fisik-TPG PNSD	1.360.788.100,00
» DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	111.750.000,00
» DAK Non Fisik-TKG PNSD	560.732.935,00
» DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	614.347.937,00
» DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	106.003.69,00
» DAK Non Fisik-Fasilitas Penanaman Modal	5.441.000,00
» DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	14.197.717,00
➤ Dana SiLPA Non-Terikat	
✓ Dana pada Kas di Bendahara Penerimaan	186.663.624,00
✓ Dana pada Kas di Kas Daerah	52.172.390.056,82
Jumlah	67.566.441.318,71

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2023

Rincian keberadaan SiLPA tersebut sebagai berikut:

Tabel 5.1.1. 83 Rincian Keberadaan SiLPA TA 2023

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)
Kas di Kas Daerah	55.920.049.657,26
Kas di Bendahara Penerimaan	186.663.624,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00
Kas di BLUD	9.553.418.219,78
Kas Dana BOS	29.360.170,00
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	142.895.487,55
Kas Lainnya	2.424.458.545,84
Setara Kas	0,00
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	(690.404.385,72)
Jumlah	67.566.441.318,71

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2023

Jumlah SiLPA tersebut di atas sama dengan nilai Saldo Kas Akhir dalam LAK sebagaimana dijelaskan dalam CaLK terkait Laporan Arus Kas pada *point 5.1.5* dan juga telah sama dengan Saldo Anggaran Lebih Akhir sebagaimana dijelaskan dalam CaLK terkait Penjelasan Pos-Pos LP-SAL pada *point 5.1.2*.

5.1.2 Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan SAL tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. LP-SAL merupakan laporan yang menyajikan gunggung saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. LP-SAL Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una (dalam satuan mata uang Rupiah) diungkapkan dan dijelaskan sebagai berikut:

5.1.2.1 Sisa Anggaran Lebih Awal

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Sisa Anggaran Lebih Awal Tahun 2023 dan 2022 yang terdiri dari:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

Tabel 5.1.2. 1 Nilai Sisa Anggaran Lebih Awal Tahun 2023 dan 2022

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Kas di Kas Daerah	35.197.426.273,21	77.274.221.708,89
Kas di Bendahara Penerimaan	11.596.000,00	187.723.564,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Kas di BLUD	3.658.343.740,93	16.662.903.457,53
Kas Dana BOS	40.995.740,00	412.872.233,00
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	76.771.462,25	84.599.617,25
Kas Lainnya	657.470.084,83	416.314.910,43
Setara Kas	29.237.107.423,00	0,00
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	(884.879.342,72)	(498.640.896,72)
Jumlah	67.994.831.381,50	94.539.994.594,38

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2023

Saldo di atas merupakan Sisa Akhir Anggaran Lebih Akhir di Tahun 2022 dan 2021 pada Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una. Nilai Saldo Anggaran Lebih Awal ini juga merupakan saldo SiLPA pada tahun anggaran berkenaan dalam masing-masing LRA.

5.1.2.2 Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan Tahun 2023 dan 2022 yang hanya terdiri dari:

Tabel 5.1.2. 2 Nilai Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun 2023 dan 2022

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	67.994.772.289,50	94.539.994.594,38
Jumlah	67.994.772.289,50	94.539.994.594,38

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2023

Saldo tersebut adalah SiLPA Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una pada TA 2022 dan 2021 yang dialokasikan sebagai penerimaan pembiayaan pada TA 2023 dan 2022 dan digunakan seluruhnya dalam kegiatan operasional serta pembiayaan Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una selama TA 2023 dan 2022. Untuk saldo SiLPA TA 2022, penggunaannya sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan mengalami perbedaan dengan saldo SiLPA dalam LRA TA 2022 dikarenakan adanya koreksi penyajian atas kesalahan pengakuan SiLPA Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una pada TA 2023 sebagaimana diungkapkan dalam catatan *point 5.1.2.4* di bawah.

5.1.2.3 Saldo Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Saldo Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) Tahun 2023 dan 2022 yang hanya terdiri dari:

Tabel 5.1.2. 3 Nilai Saldo Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) Tahun 2023 dan 2022

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Saldo Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	67.566.441.318,71	67.994.831.381,50
Jumlah	67.566.441.318,71	67.994.831.381,50

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2023



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

Saldo tersebut adalah SiLPA Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una pada TA 2023 dan 2022 yang akan dialokasikan sebagai penerimaan pembiayaan pada TA 2024 dan 2023. Saldo tersebut sama dengan jumlah SiLPA pada tahun anggaran berkenaan dalam masing-masing LRA pada tahun berkenaan sebagaimana juga telah diungkapkan dalam CaLK terkait Laporan Realisasi Anggaran pada *point 5.1.1*. saldo tersebut juga sama dengan jumlah saldo dalam saldo anggaran lebih akhir sebagaimana telah dijelaskan pada *point 5.1.2.5* di bawah.

5.1.2.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Koreksi Kesalahan Tahun Sebelumnya Tahun 2023 dan 2022 yang hanya terdiri dari:

Tabel 5.1.2. 4 Nilai Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun 2023 dan 2022

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Koreksi Kesalahan Pengakuan Pendapatan LRA Jasa Giro Dana BOK di Puskesmas Dataran Bulan dan Puskesmas Lebiti	59.092,00	0,00
Jumlah	59.092,00	0,00

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2023

5.1.2.5 Saldo Anggaran Lebih Akhir

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Saldo Anggaran Lebih Akhir milik Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una per 31 Desember Tahun 2023 dan 2022 yang terdiri dari:

Tabel 5.1.2. 5 Nilai Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun 2023 dan 2022

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Kas di Kas Daerah	55.920.049.657,26	35.197.426.273,21
Kas di Bendahara Penerimaan	186.663.624,00	11.596.000,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Kas di BLUD	9.553.418.219,78	3.658.343.740,93
Kas Dana BOS	29.360.170,00	40.995.740,00
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	142.895.487,55	76.771.462,25
Kas Lainnya	2.424.458.545,84	657.470.084,83
Setara Kas	0,00	29.237.107.423,00
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	(690.404.385,72)	(884.879.342,72)
Jumlah	67.566.441.318,71	67.994.831.381,50

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2023

Saldo Anggaran Lebih Akhir yang tersaji dalam LP-SAL ini sama besarnya dengan jumlah SiLPA pada tahun anggaran berkenaan dalam masing-masing LRA pada tahun berkenaan sebagaimana juga telah diungkapkan dalam CaLK terkait penjelasan Laporan Realisasi Anggaran pada *point 5.1.1*. Saldo tersebut juga sama dengan jumlah saldo dalam Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) sebagaimana telah dijelaskan pada *point 5.1.2.3* di atas.

5.1.3 Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una mengenai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana per 31 Desember 2023 dan 2022. Berikut ini disajikan penjelasan atas saldo-saldo dan perkiraan akun yang tercantum dalam Neraca tahun 2023.



5.1.3.1 Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, dan Aset Tetap, Dana Cadangan dan Aset Lainnya yang disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5.1.3. 1 Nilai Aset Tahun 2023 dan 2022

Kode Rekening	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1.1	Aset Lancar	114.012.563.501,57	144.242.772.291,05
1.2	Investasi Jangka Panjang	43.461.704.414,00	40.971.368.718,00
1.3	Aset Tetap	1.995.702.891.524,97	1.917.674.183.415,97
1.4	Dana Cadangan	0,00	0,00
1.5	Aset Lainnya	135.821.555.472,71	35.809.633.293,77
Jumlah		2.288.998.714.913,25	2.138.697.957.718,79

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2023

Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.288.998.714.913,25 mengalami peningkatan sebesar Rp150.300.757.194,46 atau 7,03% dari aset tahun 2022 sebesar Rp2.138.697.957.718,79.

5.1.3.1.1 Aset Lancar

Aset lancar terdiri dari kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Penyajian aset lancar dijelaskan sebagai berikut:

1. Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal;
2. Piutang disajikan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihannya;
3. Persediaan disajikan di neraca berdasarkan harga pembelian terakhir apabila diperoleh dengan pembelian harga standar. Apabila persediaannya diproduksi sendiri dan berasal dari donasi atau rampasan, maka penyajiannya menggunakan harga wajar atau estimasi nilai penjualannya.

Aset lancar per 31 Desember 2023 dan 2022 disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5.1.3. 2 Nilai Aset Lancar Tahun 2023 dan 2022

Kode Rekening	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1.1.01	Kas dan Setara Kas	68.794.371.347,43	68.879.710.724,22
1.1.03	Piutang Pajak Daerah	3.981.679.222,00	3.531.624.984,00
1.1.06	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	8.148.396.472,00	15.109.732.631,00
1.1.07	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	1.250.309,00	23.625.741.811,00
1.1.08	Piutang Transfer Antar Daerah	5.429.576.183,00	5.240.089.182,00
1.1.09	Piutang Lainnya	306.198.218,00	445.781.847,00
1.1.10	Penyisihan Piutang	(4.181.368.466,28)	(3.851.731.251,86)
1.1.12	Persediaan	31.714.862.755,42	31.261.822.363,69
Jumlah		114.194.966.040,57	144.242.772.291,05

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2023



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

Aset Lancar Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una per 31 Desember 2023 sebesar Rp114.194.966.040,57 mengalami penurunan sebesar Rp30.047.806.250,48 atau 20,83% dari Aset Lancar tahun 2022 sebesar Rp144.242.772.291,05.

5.1.3.1.1.1 Kas dan Setara Kas

Aset Lancar Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2023 sebesar Rp68.794.371.347,43 mengalami penurunan sebesar Rp85.339.376,79 atau 0,12% dari Kas dan Setara Kas tahun 2022 sebesar Rp68.879.710.724,22. Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2023 dan 2022 disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5.1.3. 3 Nilai Kas dan Setara Kas Tahun 2023 dan 2022

Kode Rekening	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1.1.01.01	Kas di Kas Daerah	55.920.049.657,26	35.197.426.273,21
1.1.01.02	Kas di Bendahara Penerimaan	186.663.624,00	11.596.000,00
1.1.01.03	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
1.1.01.04	Kas di BLUD	9.553.418.219,78	3.658.343.740,93
1.1.01.05	Kas Dana BOS	29.360.170,00	40.995.740,00
1.1.01.06	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	142.895.487,55	76.771.462,25
1.1.01.07	Kas Lainnya	2.961.984.188,84	657.470.084,83
1.1.01.08	Setara Kas	0,00	29.237.107.423,00
Jumlah		68.794.371.347,43	68.879.710.724,22

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2023

1.1.01.01 Kas di Kas Daerah

Saldo akun Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2023 sebesar Rp55.920.049.657,26 merupakan saldo Kas Daerah yang ada di Bendahara Umum Daerah (BUD) mengalami peningkatan sebesar Rp20.722.623.384,05 atau 58,88% dari saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp35.197.426.273,21 yang disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5.1.3. 4 Rincian Rekening Kas di Kas Daerah Tahun 2023

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	Keterangan
1	Rekening BPD Sulteng		
	- 3010103200060	55.920.049.657,26	Rekening Penerimaan dana Transfer dan Pengeluaran Kas daerah
Jumlah		55.920.049.657,26	

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2023

Kas di Kas Daerah berada di bawah penguasaan BUD yang disimpan pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Pembukaan RKUD dilakukan oleh Kepala PPKD selaku BUD pada Bank Umum yang ditunjuk oleh Bupati. RKUD ditujukan untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

1.1.01.02 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan akan bertambah apabila terdapat uang masuk dari penerimaan pendapatan umumnya dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah, dan saldo Kas di Bendahara Penerimaan akan berkurang apabila terdapat uang keluar yang berasal dari transfer penerimaan pendapatan ke rekening Kas Daerah. Sampai



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

dengan 31 Desember 2023 saldo Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp186.663.624,00 mengalami peningkatan sebesar Rp175.067.624,00 atau 1.509,72% dari tahun 2022 sebesar Rp11.596.000,00 yang disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5.1.3. 5 Rincian Kas di Bendahara Penerimaan Tahun 2023

No	Uraian	Keterangan	31 Desember 2023 (Rp)
1	Dinas Perhubungan	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	3.900.000,00
2	Badan Pendapatan Daerah	Pajak Hotel	500.000,00
3	Badan Pendapatan Daerah	Pajak Restoran	311.350,00
4	Badan Pendapatan Daerah	Pajak Reklame	2.860.125,00
5	Badan Pendapatan Daerah	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	94.707.623,00
6	Badan Pendapatan Daerah	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	84.384.526,00
Jumlah			186.663.624,00

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2023

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan pada Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp182.402.539,00 merupakan pengakuan kekurangan kas tunai atas penggunaan pribadi oleh bendahara penerimaan. Sampai dengan tanggal 16 Mei 2024 seluruh saldo Kas di Bendahara Penerimaan telah disetorkan ke Kas di Kas Daerah.

1.1.01.03 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening bendahara pengeluaran, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas (pada pemerintah pusat termasuk bukti pengeluaran yang belum dipertanggungjawabkan) yang sumbernya berasal dari dana kas kecil (UP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetor kembali ke Kas Negara/Daerah per tanggal neraca. Per 31 Desember 2023 tidak terdapat saldo kas di bendahara pengeluaran.

1.1.01.04 Kas di BLUD

Kas di BLUD merupakan kas yang berasal dari pendapatan BLUD baik yang telah dan nilai yang belum diakui oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum. Saldo Kas di BLUD pada RSUD Ampana sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp9.553.418.219,78 mengalami peningkatan sebesar Rp5.895.074.478,85 atau 161,14% dari saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.658.343.740,93. Saldo pada Kas di BLUD sebesar Rp9.553.418.219,78 disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5.1.3. 6 Rincian Kas di BLUD Tahun 2023

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	Keterangan
1	Rekening Bank MANDIRI Cabang Palu 151.00.2244660.0	9.482.791.219,78	Rekening Kas BLUD
2	Kas Tunai di Bendahara BLUD	70.627.000,00	
Jumlah		9.553.418.219,78	

Sumber : RSUD Ampana

Saldo Kas BLUD tersebut diatas merupakan saldo yang bersumber dari Pendapatan dan Belanja BLUD direalisasikan melalui Pelayanan Kesehatan disajikan dalam tabel sebagai berikut:



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

Tabel 5.1.3. 7 Uraian Kas BLUD Tahun 2023

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)
1	Saldo Awal	3.658.343.740,93
2	Pendapatan (Berdasarkan SPB)	67.280.179.423,85
3	Belanja (Berdasarkan SPB)	61.388.798.695,00
4	Koreksi Berkurang Belanja	(3.693.750,00)
	Jumlah	9.553.418.219,78

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2023

1.1.01.05 Kas Dana BOS

Saldo Kas Dana BOS merupakan bantuan operasional sekolah yang langsung diterima oleh 226 sekolah dari pemerintah pusat. Saldo Kas Dana BOS per 31 Desember 2023 sebesar Rp29.360.170,00 mengalami penurunan sebesar Rp11.635.570,00 atau 28,38% dari saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp40.995.740,00 yang disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5.1.3. 8 Uraian Kas Dana BOS Tahun 2023

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)
1	Saldo Awal	40.995.740,00
2	Pendapatan (Berdasarkan Pengesahan SPT)	24.589.380.633,00
3	Belanja (Berdasarkan Pengesahan SPB)	(24.601.016.203,00)
	Jumlah	29.360.170,00

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2023

Saldo Kas Dana BOS sebesar Rp29.360.170,00 terdiri atas saldo kas tunai sebesar Rp23.322.410,00 dan saldo kas Bank sebesar Rp6.037.760,00. Adapun rincian Pendapatan dan Belanja Realisasi Dana Bospus pada SD dan SMP negeri untuk masing-masing kecamatan Tahun Anggaran 2023 disajikan pada *lampiran 2*.

1.1.01.06 Kas Dana Kapitasi pada FKTP

Kas Dana Kapitasi pada FKTP tahun 2023 merupakan saldo kas yang ada di bendahara Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) pada 16 Puskesmas. Saldo Kas di Bendahara FKTP tahun 2023 sebesar Rp142.895.487,55 mengalami peningkatan sebesar Rp66.124.025,30 atau 86,13% dari tahun 2022 sebesar Rp76.771.462,25 disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5.1.3. 9 Kas Dana Kapitasi pada FKTP Tahun 2023

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)
1	Puskesmas Wakai	20.438.891,00
2	Puskesmas Lebiti	11.228.213,00
3	Puskesmas Dolong	9.647.821,00
4	Puskesmas Pasokan	15.569.285,00
5	Puskesmas Tete	4.797.921,83
6	Puskesmas Dataran Bulan	4.893.345,00
7	Puskesmas Ampana Timur	6.741.553,00
8	Puskesmas Ampana Barat	2.716.554,77
9	Puskesmas Marowo	36.378.988,00
10	Puskesmas Uekuli	6.719.861,00
11	Puskesmas Matako	1.899.170,00
12	Puskesmas Tombiano	(5.922,00)
13	Puskesmas Popoli'i	10.410.196,95
14	Puskesmas Watusongu	10.317.174,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)
15	Puskesmas Molowagu	456.086,00
16	Puskesmas Kalia	686.349,00
Jumlah		142.895.487,55

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2023

Saldo Kas Dana Kapitasi pada FKTP tahun 2023 tersebut diatas merupakan saldo yang bersumber dari Dana Kapitasi JKN yang ditransfer langsung ke rekening bendahara Puskesmas yang disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5.1.3. 10 Uraian Kas Dana Kapitasi pada FKTP Tahun 2023

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)
1	Saldo Awal	76.771.462,25
2	Pendapatan (Berdasarkan SPB)	9.022.354.578,00
3	Belanja (Berdasarkan SPB)	(8.956.230.552,70)
Jumlah		142.895.487,55

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2023

Saldo Kas Dana Kapitasi pada FKTP sebesar Rp142.895.487,55 terdiri atas saldo kas tunai sebesar Rp390.373,00 dan saldo kas di Bank sebesar Rp142.505.114,55. Rincian Penerimaan dan Pengeluaran Kas Dana Kapitasi pada FKTP untuk masing-masing Puskesmas Tahun Anggaran 2023 disajikan pada *lampiran 1*.

1.1.01.07 Kas Lainnya

Kas lainnya merupakan penerimaan tertentu lainnya yang diterima karena penyelenggaraan pemerintahan. Saldo kas lainnya sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp2.961.984.188,84 mengalami peningkatan sebesar Rp2.304.514.104,01 atau 350,51% dari saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp657.470.084,83 yang disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5.1.3. 11 Rincian Kas Lainnya Tahun 2023

No	Uraian	Keterangan	31 Desember 2023 (Rp)
1	Dinas Kesehatan	Saldo Kas Akhir BOK	1.971.808.830,00
2	Dinas Kesehatan	Jasa Giro FKTP	2.309.767,48
3	Dinas Kesehatan	Utang PFK	30.635.588,00
4	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Utang PFK BOSPUS	387.116.465,00
5	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Utang PFK BOSDA	15.126.222,00
6	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Utang PFK	1.478.803,00
7	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Saldo Akhir Rek CSR	537.525.643,00
8	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Jasa Giro Rek Deposito	3.346.394,36
9	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Utang PFK	12.230.136,00
10	Badan Pendapatan Daerah	Jasa Giro Rek PBB	221.340,00
11	Kecamatan Walea Besar	Utang PFK	185.000,00
Jumlah			2.961.984.188,84

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2023

1.1.01.08 Setara Kas

Saldo setara kas sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 mengalami penurunan sebesar 100,00% dari tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan adanya perubahan pengelolaan Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) melalui rekening Treasury Deposit Facility (TDF) sesuai dengan Surat Edaran Nomor



900.1.14.1/7481/Keuda. Dalam hal ini pokok DBH/DAU yang telah disalurkan dari RKUN ke rekening TDF Pemda mencatat sebagai aset lainnya.

5.1.3.1.1.2 Piutang Pajak Daerah

Piutang Pajak Daerah adalah piutang yang timbul atas pendapatan pajak sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau Peraturan Daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan. Saldo Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.981.679.222,00 mengalami peningkatan sebesar Rp450.054.238,00 atau 12,74% dari saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.531.624.984,00 yang disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5.1.3. 12 Nilai Piutang Pajak Daerah Tahun 2023 dan 2022

Kode Rekening	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1.1.03.06	Piutang Pajak Hotel	22.308.500,00	22.508.500,00
1.1.03.07	Piutang Pajak Restoran	24.812.000,00	24.542.000,00
1.1.03.09	Piutang Pajak Reklame	80.550.277,00	71.134.827,00
1.1.03.10	Piutang Pajak Penerangan Jalan	448.348.842,00	398.180.630,00
1.1.03.14	Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	376.871.618,00	292.920.247,00
1.1.03.15	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)	3.028.787.985,00	2.722.338.780,00
	Jumlah	3.981.679.222,00	3.531.624.984,00

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2023

1.1.03.06 Piutang Pajak Hotel

Saldo piutang pajak hotel sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp22.308.500,00 mengalami penurunan sebesar Rp200.000,00 atau 0,89% dari saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp22.508.500,00. Daftar piutang pajak hotel disajikan pada *lampiran 3*.

1.1.03.07 Piutang Pajak Restoran

Saldo piutang pajak restoran sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp24.812.000,00 mengalami peningkatan sebesar Rp270.000,00 atau 1,10% dari saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp24.542.000,00. Daftar piutang pajak restoran disajikan pada *lampiran 4*.

1.1.03.09 Piutang Pajak Reklame

Saldo piutang pajak reklame sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp80.550.277,00 mengalami peningkatan sebesar Rp9.415.450,00 atau 13,24% dari saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp71.134.827,00. Daftar piutang pajak reklame disajikan pada *lampiran 5*.

1.1.03.10 Piutang Pajak Penerangan Jalan

Saldo piutang pajak penerangan jalan sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp448.348.842,00 mengalami peningkatan sebesar Rp50.168.212,00 atau 12,60% dari saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp398.180.630,00.

1.1.03.14 Piutang Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan

Saldo piutang pajak mineral bukan logam dan batuan sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp376.871.618,00 mengalami peningkatan sebesar



Rp83.951.371,00 atau 28,66% dari saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp292.920.247,00. Daftar piutang pajak mineral bukan logam dan batuan disajikan pada *lampiran 6*.

1.1.03.15 Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)

Saldo piutang pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBBP2) sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp3.028.787.985,00 mengalami peningkatan sebesar Rp306.449.205,00 atau 11,26% dari saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.722.338.780,00. Daftar piutang pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBBP2) disajikan pada *lampiran 7*.

5.1.3.1.1.3 Piutang Lain-Lain PAD yang Sah

Piutang Lain-Lain PAD yang Sah sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp8.148.396.472,00 mengalami penurunan sebesar Rp6.961.336.159,00 atau 46,07% dari tahun 2022 sebesar Rp15.109.732.631,00. Rincian Piutang Lain-Lain PAD yang Sah Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2023 dan tahun 2022 terdiri atas:

Tabel 5.1.3. 13 Nilai Piutang Lain-Lain PAD yang Sah Tahun 2023 dan 2022

Kode Rekening	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1.1.06.05	Piutang Jasa Giro	353.790.323,00	353.790.323,00
1.1.06.06	Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	410.229.761,00	410.229.761,00
1.1.06.15	Piutang Pendapatan dari Pengembalian	1.550.872.000,00	1.550.872.000,00
1.1.06.16	Piutang Pendapatan BLUD	5.833.504.388,00	12.794.840.547,00
	Jumlah	8.148.396.472,00	15.109.732.631,00

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2023

1.1.06.05 Piutang Jasa Giro

Piutang jasa giro merupakan tagihan atas kesalahan perhitungan potongan pajak pada deposito yang mengurangi akun penerimaan pendapatan jasa giro Tahun Anggaran 2016 pada Bank BPD Sulteng sebesar Rp353.333.333,67 dan Bank BRI sebesar Rp456.989,33. Saldo piutang jasa giro tahun 2023 tidak mengalami perubahan dari tahun 2022.

1.1.06.06 Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir

Pengembalian dana bergulir kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagai pengelola dana bergulir dapat dilakukan dengan cicilan atau pengembalian sekaligus. Dana bergulir yang ditarik dari masyarakat terdiri dari dua unsur yaitu dana yang berasal dari pinjaman pokok dan pendapatan bunga. Piutang hasil pengelolaan dana bergulir tahun 2023 sebesar Rp410.229.761,00 tidak mengalami perubahan dari tahun 2022. Daftar piutang hasil pengelolaan dana bergulir disajikan pada *lampiran 10*.

1.1.06.15 Piutang Pendapatan dari Pengembalian

Piutang pendapatan dari pengembalian merupakan piutang dana operasional dan tunjangan intensif pada Sekretariat DPRD. Piutang hasil pendapatan dari pengembalian tahun 2023 sebesar Rp1.550.872.000,00 tidak mengalami perubahan dari tahun 2022.



1.1.06.16 Piutang Pendapatan BLUD

Piutang pendapatan BLUD sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp5.833.504.388,00 mengalami penurunan sebesar Rp6.961.336.159,00 atau 54,41% dari tahun 2022 sebesar Rp12.794.840.547,00. Piutang pendapatan BLUD merupakan tagihan pada BLUD RSUD Ampana atas piutang BPJS Kesehatan, Jasa Raharja, Inhealth dan piutang pasien umum. Daftar piutang pendapatan BLUD disajikan pada *lampiran 8*.

5.1.3.1.1.4 Piutang Transfer Pemerintah Pusat

Piutang Transfer Pemerintah Pusat merupakan Dana Bagi Hasil (DBH) yang terdiri dari bagi hasil pajak dan sumber daya alam, yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada pemerintah daerah yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK), dan sudah menjadi hak daerah yang belum ditransfer ke rekening kas daerah yang merupakan pengakuan oleh pemerintah pusat atas kurang bayar DBH ke pemerintah daerah yang berdasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 38/KM.7/2023 Tanggal 19 Desember 2023 tentang penyaluran kurang bayar dana bagi hasil dan penyelesaian lebih bayar dana bagi hasil pada tahun 2023.

Piutang Transfer Pemerintah Pusat–Dana Perimbangan sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp1.250.309,00 mengalami penurunan sebesar Rp23.624.491.502,00 atau 99,99% dari tahun 2022 sebesar Rp23.625.741.811,00. Rincian piutang transfer pemerintah pusat disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.1.3. 14 Nilai Piutang Transfer Pemerintah Pusat Tahun 2023 dan 2022

Kode Rekening	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1.1.07.01.01.0001	Piutang Dana Transfer Umum-DBH PBB	947,00	0,00
1.1.07.01.01.0002	Piutang Dana Transfer Umum-DBH PPh Pasal 21	659,00	0,00
1.1.07.01.01.0003	Piutang Dana Transfer Umum-DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	34,00	0,00
1.1.07.01.01.0004	Piutang Dana Transfer Umum-DBH CHT	1.245.127,00	1.208.127,00
1.1.07.01.01.0005	Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Minyak Bumi	901,00	0,00
1.1.07.01.01.0006	Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Gas Bumi	910,00	0,00
1.1.07.01.01.0009	Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty	1.608,00	23.624.533.684,00
1.1.07.01.01.0010	Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Kehutanan-PSDH	123,00	0,00
	Jumlah	1.250.309,00	23.625.741.811,00

Sumber : KMK Nomor 38/PMK.07/2023

Rincian piutang Piutang Transfer Pemerintah Pusat–Dana Perimbangan tahun 2023 terdapat pada *lampiran 9*.

5.1.3.1.1.5 Piutang Transfer Antar Daerah

Piutang Transfer antar Daerah sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp5.429.576.183,00 mengalami peningkatan sebesar Rp189.487.001,00 atau 3,62% dari tahun 2022 sebesar Rp5.240.089.182,00. Piutang Transfer antar daerah merupakan tagihan Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una kepada Pemerintah Provinsi



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

Sulawesi Tengah yang dihitung berdasarkan hasil realisasi pajak dan hasil sumber daya alam yang menjadi bagian daerah yang belum dibayar. Piutang Dana Bagi Hasil dari Provinsi pada tahun 2023 disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5.1.3. 15 Piutang Transfer Antar Daerah Tahun 2023 dan 2022

No	Uraian	Surat Ketetapan Kurang Salur Tahun 2023	Pendapatan Realisasi Tahun 2023	Piutang dan Realisasi Tahun 2022
I	Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor			
1	Target Penerimaan	SK	7.152.320.797,00	1.468.867.511,00
2	Realisasi Penerimaan	900.1.14.3/29/BAPEN DA-G.ST/2024	5.862.653.884,00	1.468.867.511,00
	Sisa Piutang (1-2)		1.289.666.913,00	0,00
II	Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor			
1	Target Penerimaan	SK	7.274.841.084,00	1.032.032.158,00
2	Realisasi Penerimaan	900.1.14.3/29/BAPEN DA-G.ST/2024	6.180.389.249,00	1.032.032.158,00
	Sisa Piutang (1-2)		1.094.451.835,00	0,00
III	Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor			
1	Target Penerimaan	SK	18.411.560.590,00	2.688.831.142,00
2	Realisasi Penerimaan	900.1.14.3/29/BAPEN DA-G.ST/2024	15.460.082.684,00	2.688.831.142,00
	Sisa Piutang (1-2)		2.951.477.906,00	0,00
IV	Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan			
1	Target Penerimaan	SK	869.651.052,00	50.358.371,00
2	Realisasi Penerimaan	900.1.14.3/29/BAPEN DA-G.ST/2024	775.671.523,00	50.358.371,00
	Sisa Piutang (1-2)		93.979.529,00	0,00
V	Bagi Hasil Dari Pajak Rokok			
1	Target Penerimaan	SK	10.060.572.838,00	0,00
2	Realisasi Penerimaan	900.1.14.3/29/BAPEN DA-G.ST/2024	10.060.572.838,00	0,00
	Sisa Piutang (1-2)		0,00	0,00
	Total Sisa Piutang		5.429.576.183,00	0,00

Sumber : Keputusan Gubernur Nomor 900.1.14.3/29/BAPENDA-G.ST/2024

5.1.3.1.1.6 Piutang Lainnya

Piutang lainnya merupakan bagian lancar tuntutan ganti kerugian daerah. Saldo piutang lainnya tahun 2023 sebesar Rp306.198.218,00 mengalami penurunan sebesar Rp139.583.629,00 atau 31,31% dari tahun 2022 sebesar Rp445.781.847,00.

Tabel 5.1.3. 16 Rincian Piutang Lainnya Tahun 2023 dan 2022

Kode Rekening	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1.1.09.04	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	306.198.218,00	306.198.218,00
1.1.09.05	Uang Muka	0,00	139.583.629,00
	Jumlah	306.198.218,00	445.781.847,00

Sumber : SIPD AKLAP TA 2023

1.1.09.04 Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah merupakan peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan Tuntutan Ganti Rugi (TGR), didukung dengan bukti Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM), yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan).



SKTJM merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut.

Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Kerugian Daerah tahun 2023 sebesar Rp306.198.218,00 tidak mengalami perubahan dari tahun 2022. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi tahun 2023 sebesar Rp306.198.218,00 merupakan piutang yang bersumber dari temuan sampai dengan akhir tahun 2023 atas pegawai Negara bukan Bendahara/Pegawai Lain sebanyak 24 kasus. Rincian bagian lancar tuntutan ganti rugi disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.1.3. 17 Rincian Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Tahun 2023 dan 2022

Kode Rekening	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1.1.09.04.01	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara	69.233.168,00	69.233.168,00
1.1.09.04.02	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	236.965.050,00	236.965.050,00
	Jumlah	306.198.218,00	306.198.218,00

Sumber : SIPD AKLAP TA 2023

1.1.09.05 Uang Muka

Saldo uang muka pengadaan barang/jasa tahun 2022 sebesar Rp139.583.629,00 merupakan uang muka pengadaan barang/jasa yang dibayarkan pada pihak ketiga atas belanja pengadaan barang pakai habis obat-obatan yang telah diterima oleh Dinas Kesehatan pada bulan Februari tahun 2023.

5.1.3.1.1.7 Penyisihan Piutang

Penyisihan piutang adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya di masa yang akan datang. Penyisihan piutang yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una dalam upaya untuk menyajikan nilai piutang yang dapat direalisasikan. Penyisihan piutang tahun 2023 sebesar Rp4.181.368.466,28 mengalami peningkatan sebesar Rp329.637.214,42 atau 8,56% dari tahun 2022 sebesar Rp3.851.731.251,86 disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5.1.3. 18 Penyisihan Piutang Tahun 2023 dan 2022

Kode Rekening	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1.1.10.01	Penyisihan Piutang Pendapatan	(3.947.512.482,28)	(3.617.875.267,86)
1.1.10.02	Penyisihan Piutang Lainnya	(233.855.984,00)	(233.855.984,00)
	Jumlah	(4.181.368.466,28)	(3.851.731.251,86)

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2023

1.1.10.01 Penyisihan Piutang Pendapatan

Penyisihan piutang pendapatan tahun 2023 sebesar Rp3.947.512.482,28 mengalami peningkatan sebesar Rp329.637.214,42 atau 8,56% dari tahun 2022 sebesar Rp3.617.875.267,86 disajikan dalam tabel sebagai berikut:



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

Tabel 5.1.3. 19 Penyisihan Piutang Pendapatan Tahun 2023 dan 2022

Kode Rekening	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1.1.10.01.01.0077	Penyisihan Piutang Pajak Hotel- Hotel	(12.009.250,00)	(8.419.725,00)
1.1.10.01.01.0085	Penyisihan Piutang Pajak Restoran-Restoran dan Sejenisnya	(13.010.750,00)	(3.280.725,00)
1.1.10.01.01.0102	Penyisihan Piutang Pajak Reklame-Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	(19.646.889,24)	(8.354.070,43)
1.1.10.01.01.0153	Penyisihan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya	(160.623.875,32)	(82.005.597,23)
1.1.10.01.01.0154	Penyisihan Piutang PBBP2	(1.619.070.926,28)	(1.392.982.877,96)
1.1.10.01.04.3261	Penyisihan Piutang Jasa Giro pada Kas Daerah	(35.379.032,00)	(35.379.032,00)
1.1.10.01.04.3266	Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	(410.229.761,00)	(410.229.761,00)
1.1.10.01.04.3502	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	(1.550.872.000,00)	(1.550.872.000,00)
1.1.10.01.04.6576	Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD	(126.669.998,44)	(126.351.479,24)
	Jumlah	(3.947.512.482,28)	(3.617.875.267,86)

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2023

Rincian penyisihan piutang pendapatan tahun 2023 terdapat pada *lampiran 3 s.d 8*.

1.1.10.02 Penyisihan Piutang Lainnya

Penyisihan piutang lainnya merupakan penyisihan bagian lancar tuntutan ganti kerugian daerah terhadap bendahara. Penyisihan piutang lainnya tahun 2023 sebesar Rp233.855.984,00 tidak mengalami perubahan dari tahun 2022. Rincian penyisihan piutang lainnya tahun 2023 terdapat pada *lampiran 8.a*.

5.1.3.1.1.8 Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Saldo persediaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp31.734.698.959,42 mengalami peningkatan sebesar Rp472.876.595,73 atau 1,51% dari tahun 2022 sebesar Rp31.261.822.363,69 yang disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5.1.3. 20 Rekap Nilai Persediaan Tahun 2023 dan 2022

Kode Rekening	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	199.598.401,00	45.044.650,00
1.1.12.01.01.0004	Bahan Bakar dan Pelumas	268.266.000,00	24.495.800,00
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	19.034.340,00	0,00
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	121.859.553,00	164.160.442,83
1.1.12.01.03.0002	Kertas dan Cover	885.000,00	60.304.501,00
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	400.573.798,00	357.992.748,00
1.1.12.01.03.0004	Benda Pos	700.000,00	300.000,00
1.1.12.01.03.0005	Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	0,00	53.535.300,00
1.1.12.01.03.0006	Bahan Komputer	0,00	100.000,00
1.1.12.01.03.0008	Alat Listrik	19.504.650,00	24.024.775,00
1.1.12.01.03.0013	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	41.520.811,11	99.662.287,86
1.1.12.01.04.0001	Obat	30.634.267.702,31	30.255.395.842,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

Kode Rekening	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1.1.12.01.05.0001	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	916.000,00	64.000.000,00
1.1.12.01.07.0001	Natura	7.736.500,00	112.806.017,00
Jumlah		31.714.862.755,42	31.261.822.363,69

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2023

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 6 tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una, bahwa metode dalam hal persediaan dicatat secara periodik, maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai per-unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan yaitu metode harga pembelian terakhir. Rekap Saldo Persediaan disajikan dalam *lampiran 11*.

5.1.3.1.2 Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang terdiri dari Investasi Non Permanen dan Permanen. Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2023 sebesar Rp43.461.704.414,00 mengalami peningkatan sebesar Rp2.490.335.696,00 atau 6,08% dari tahun 2022 sebesar Rp40.971.368.718,00 yang disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5.1.3. 21 Jenis Investasi Jangka Panjang Tahun 2023 dan 2022

Kode Rekening	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1.2.01	Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0,00	0,00
1.2.02	Investasi Jangka Panjang Permanen	43.461.704.414,00	40.971.368.718,00
Jumlah		43.461.704.414,00	40.971.368.718,00

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2022

5.1.3.1.2.1 Investasi Jangka Panjang Non-Permanen

Investasi jangka panjang non-permanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen, dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi jangka Panjang non permanen tahun 2023 yaitu dana bergulir. Dana bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya. Mekanisme kegiatan Dana Bergulir dilakukan dengan cara menggunakan pokok dana bergulir untuk digulirkan kembali kepada masyarakat. Untuk penerimaan denda dan bunga/jasa dana bergulir diakui sebagai pendapatan dan disetor ke kas daerah. Dana Bergulir dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Dana Bergulir disajikan menurut nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Investasi jangka Panjang non permanen per 31 Desember 2023 tidak mengalami perubahan dari tahun 2022 yang disajikan dalam tabel sebagai berikut:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

Tabel 5.1.3. 22 Rincian Dana Bergulir Tahun 2023

No	Tahun	Piutang Dana Bergulir		
		Program	Perguliran	Jumlah
1	2	3	4	5
1	2006	154.257.053	-	154.257.053
2	2007	215.078.840	28.733.330	243.812.170
3	2008	94.053.302	480.728.883	574.782.185
4	2009	31.124.986	365.230.407	396.355.393
5	2010	-	113.382.889	113.382.889
Jumlah 1 s.d. 5		494.514.181	988.075.509	1.482.589.690
6	Dana bergulir diragukan tertagih			(1.482.589.690)
7	Nilai Bersih Dana Bergulir yang dapat Direalisasikan (<i>Net Realizable Value</i>)			0,00

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2023

Rincian Dana bergulir dan Penyisihan Dana bergulir diragukan tertagih disajikan pada lampiran 10.

5.1.3.1.2.2 Investasi Jangka Panjang Permanen

Investasi jangka Panjang permanen adalah investasi jangka Panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi jangka Panjang permanen yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una adalah investasi yang tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, tetapi untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan.

Investasi jangka Panjang permanen per 31 Desember 2023 sebesar Rp43.461.704.414,00 mengalami peningkatan sebesar Rp2.490.335.696,00 atau 6,08% dari tahun 2022 sebesar Rp40.971.368.718,00 yang disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5.1.3. 23 Jenis Investasi Jangka Panjang Permanen Tahun 2023 dan 2022

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada BPD Sulteng	21.245.685.965,00	18.245.685.965,00
2. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada PDAM Tojo Una-Una	21.580.273.982,00	22.089.938.286,00
3. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perusda Tojo Una-Una	635.744.467,00	635.744.467,00
Jumlah	43.461.704.414,00	40.971.368.718,00

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2023

1. Penyertaan Modal pada PT Bank Sulawesi Tengah

Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una telah melakukan penyertaan modal pada PT Bank Sulteng dicatat dengan metode biaya. Pada tahun 2023 terdapat penambahan penyertaan modal yang bersumber dari pengeluaran pembiayaan sebesar Rp3.000.000.000,00 sehingga total investasi pada PT Bank Sulteng sampai dengan tahun 2023 adalah sebesar Rp21.245.685.965,00 yang disajikan dalam tabel sebagai berikut:



Tabel 5.1.3. 24 Penyertaan Modal pada PT Bank Sulawesi Tengah Tahun 2023

No	Uraian	Lembar Saham	Nilai Nominal Saham (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Modal Awal disetor	145.563	100.000	14.556.300.000,00
2	Dana Setoran Modal belum ditempatkan			213.852,00
3	Agio Saham			3.689.172.113,00
4	Penyertaan Modal tahun 2023			3.000.000.000,00
			Jumlah	21.245.685.965,00

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2023

Laporan Keuangan PT Bank Sulawesi Tengah *Audited* tahun 2023 disajikan pada *lampiran 57*.

2. Penyertaan Modal pada PDAM Kabupaten Tojo Una-Una

Pada tahun 2023 terdapat penyertaan modal pada PDAM Kabupaten Tojo Una-Una sebesar Rp300.000.000,00. Sejak tahun buku 2012 metode pencatatan yang diterapkan untuk penyertaan pada PDAM adalah Metode Ekuitas, hal ini berimplikasi pada pengakuan laba rugi perusahaan terhadap nilai penyertaan yaitu rugi sebesar Rp809.664.304,00. Investasi permanen penyertaan modal pemerintah daerah pada PDAM Tojo Una-Una sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp21.580.273.982,00. Rincian perhitungan disajikan pada *lampiran 12*.

Laporan Keuangan PDAM Kabupaten Tojo Una-una *Audited* tahun 2023 disajikan pada *lampiran 55*.

3. Penyertaan Modal pada Perusda Tojo Una-Una

Pada tahun 2023 tidak terdapat penyertaan modal pada Perusda Tojo Una-Una. Mulai tahun buku 2012 metode pencatatan yang diterapkan untuk penyertaan pada Perusda Tojo Una-una adalah Metode Ekuitas, hal ini berimplikasi pada pengakuan laba rugi perusahaan terhadap nilai penyertaan yaitu rugi sebesar Rp107.556.840,00. Investasi permanen penyertaan modal pemerintah daerah pada Perusda Tojo Una-Una sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp635.744.467,00. Rincian perhitungan disajikan pada *lampiran 12*.

Laporan Keuangan Perusda Tojo Una-Una *Unaudited* tahun 2023 disajikan pada *lampiran 56*.

5.1.3.1.3 Aset Tetap

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Aset Tetap per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.995.702.891.524,97 mengalami peningkatan sebesar Rp78.028.708.109,00 atau 4,07% dari tahun 2022 sebesar Rp1.917.674.183.415,97.

Nilai buku aset tetap per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.995.702.891.524,97 dengan perhitungan sebagai berikut:

Nilai Perolehan Per 31 Desember 2022	3.323.119.241.790,77
Penambahan Tahun 2023	437.726.675.728,00
Jumlah	<u>3.760.845.917.518,77</u>



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

Pengurangan Tahun 2023	224.105.163.351,00
Nilai Aset Tetap Per 31 Desember 2023	3.536.740.754.167,77
Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2023	(1.541.037.862.642,80)
Nilai Buku Aset Tetap Per 31 Desember 2023	1.995.702.891.524,97

Rekap Nilai Aset Tetap Per 31 Desember 2023 disajikan pada *lampiran 13*.

Rincian Nilai Aset Tetap tahun 2023 dan tahun 2022 disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5.1.3. 25 Nilai Aset Tetap Tahun 2023 dan 2022

Kode Rekening	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1.3.01	Tanah	186.843.970.121,00	184.626.727.721,00
1.3.02	Peralatan dan Mesin	585.837.833.685,80	542.655.151.721,80
1.3.03	Gedung dan Bangunan	979.591.893.577,69	925.919.066.544,69
1.3.04	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.722.058.091.733,28	1.604.832.778.529,28
1.3.05	Aset Tetap Lainnya	52.667.526.985,00	51.747.935.640,00
1.3.06	Konstruksi Dalam Pengerjaan	9.741.438.065,00	13.337.581.634,00
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	(1.541.037.862.642,80)	(1.405.445.058.374,80)
	Jumlah	1.995.702.891.524,97	1.917.674.183.415,97

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2023

Penjelasan rinci masing-masing jenis aset tetap Per 31 Desember 2023 dijelaskan sebagai berikut:

5.1.3.1.3.1 Tanah

Aset Tetap Tanah adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Aset Tanah per 31 Desember 2023 sebesar Rp186.843.970.121,00 mengalami peningkatan sebesar Rp2.217.242.400,00 atau 1,20% dari tahun 2022 sebesar Rp184.626.727.721,00.

Nilai aset tanah per 31 Desember 2023 sebesar Rp186.843.970.121,00 dengan perhitungan sebagai berikut:

Saldo Per 31 Desember 2022	184.626.727.721,00
Penambahan Tahun 2023	7.969.979.627,00
Jumlah	192.596.707.348,00
Pengurangan Tahun 2023	5.752.737.227,00
Nilai Aset Tanah Per 31 Desember 2023	186.843.970.121,00

Tanah Per 31 Desember 2023 senilai Rp186.843.970.121,00 terdiri atas 1.170 bidang tanah yang merupakan tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una dengan rincian 417 bidang tanah yang sudah bersertifikat dan 753 bidang tanah yang belum memiliki sertifikat.

Pencatatan nilai aset tanah berdasarkan rekonsiliasi nilai tercatat aset tanah pada awal dan akhir periode yang menunjukkan kenaikan nilai aset tanah, disajikan dalam tabel sebagai berikut:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

Tabel 5.1.3. 26 Rekapitulasi Nilai Tercatat Tanah Tahun 2023

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)
1	Saldo Per 31 Desember 2022	Rp 184.626.727.721,00
2	Penambahan :	
3	Pembelian (Belanja Modal)	Rp 910.595.000,00
4	Pengadaan Melalui Belanja Barang/Jasa/Tak Terduga	Rp 99.900.000,00
5	Mutasi antar SKPD	Rp 5.510.897.627,00
6	Hibah/Donasi	Rp 1.341.312.000,00
7	Reklasifikasi :	
8	a. Belanja Modal Gedung dan Bangunan 2023	Rp 107.275.000,00
9	Pengurangan :	
10	Reklas ke Aset Lainnya Diserahkan ke Masyarakat	Rp 241.839.600,00
11	Mutasi Antar SKPD	Rp 5.510.897.627,00
12	Saldo Per 31 Desember 2023	Rp 186.843.970.121,00

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2023

Aset Tanah sebesar Rp186.843.970.121,00 disajikan dalam Rekap Rekonsiliasi nilai tercatat Tanah pada awal dan akhir periode Per 31 Desember 2023 pada **lampiran 14**. Rincian 1.170 bidang tanah untuk seluruh perangkat daerah disajikan dalam **lampiran 15**. Rincian bidang tanah yang masih bernilai Rp0,00 terdapat pada **lampiran 16**.

5.1.3.1.3.2 Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai. Aset Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 sebesar Rp585.837.833.685,80 mengalami peningkatan sebesar Rp43.182.681.964,00 atau 7,96% dari tahun 2022 sebesar Rp542.655.151.721,80.

Nilai aset peralatan dan mesin per 31 Desember 2023 sebesar Rp585.837.833.685,80 dengan perhitungan sebagai berikut:

Saldo Per 31 Desember 2022	542.655.151.721,80
Penambahan Tahun 2023	96.720.314.374,00
Jumlah	639.375.466.095,80
Pengurangan Tahun 2023	53.537.632.410,00
Nilai Aset Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2023	585.837.833.685,80

Peralatan dan Mesin senilai Rp585.837.833.685,80 terdiri atas 114.571 Unit merupakan peralatan dan mesin yang dimiliki Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una. Penilaian Peralatan dan Mesin berdasarkan harga perolehan. Pencatatan nilai aset peralatan dan mesin berdasarkan rekonsiliasi nilai tercatat aset peralatan dan mesin pada awal dan akhir periode yang menunjukkan kenaikan nilai aset peralatan dan mesin, disajikan dalam tabel sebagai berikut:



Tabel 5.1.3. 27 Rekapitulasi Nilai Tercatat Peralatan dan Mesin Tahun 2023

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	
1	Saldo Per 31 Desember 2022	Rp	542.655.151.721,80
2	Penambahan :		
3	Pembelian (Belanja Modal) 2023	Rp	45.588.017.814,00
4	Hibah/Donasi	Rp	2.184.213.996,00
5	Pengadaan Melalui Belanja Barang/Jasa/Tak Terduga	Rp	539.380.200,00
6	Mutasi Antar SKPD	Rp	46.595.863.654,00
7	Reklasifikasi :		
8	a. Belanja Modal Gedung dan Bangunan 2023	Rp	1.134.129.210,00
9	b. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi 2023	Rp	252.590.000,00
10	c. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 2023	Rp	103.645.000,00
11	d. Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rp	199.800.000,00
12	Reklasifikasi dari Aset Lainnya	Rp	122.674.500,00
13	Pengurangan :		
14	Reklas ke Aset Lainnya Diserahkan ke Masyarakat	Rp	3.130.551.000,00
15	Mutasi Antar SKPD	Rp	46.595.863.654,00
16	Usulan Rusak Berat/Hilang/Terbakar	Rp	3.197.349.065,00
17	Belanja Modal bukan Aset	Rp	99.934.430,00
18	Dibawah Minimum Kapitalisasi	Rp	301.970.962,00
19	Reklasifikasi		
20	a. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi 2023	Rp	44.443.099,00
21	b. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 2023	Rp	162.156.200,00
22	c. Aset tidak Berwujud 2023	Rp	5.364.000,00
23	Saldo Per 31 Desember 2023	Rp	585.837.833.685,80

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2023

Aset Peralatan dan Mesin sebesar Rp585.837.833.685,80 disajikan dalam Rekap Rekonsiliasi nilai tercatat peralatan dan mesin pada awal dan akhir periode Per 31 Desember 2023 pada *lampiran 17*.

Berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) Hibah Barang Milik Negara (BMN) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Nomor KN.02.07/I.3/11595/2022 tanggal 15 Agustus 2022 tentang penyerahan BMN peralatan dan mesin sebesar Rp37.971.952.217,00. Aset Peralatan dan Mesin tersebut telah dicatat dalam Laporan Keuangan pada Rumah Sakit Umum Daerah Ampana. Atas aset tersebut, telah dilakukan verifikasi dan perhitungan kembali oleh Bidang Aset berdasarkan pendekatan minimum kapitalisasi pada 359 register barang sebesar Rp107.900.000,00 dan telah dicatat sebagai aset lain-lain rusak berat pada tahun 2023.

Selain itu, terdapat barang pada RS Pratama Togeana yang merupakan hibah dari Kemenkes yang belum disertai dengan BAST Hibah BMN Kemenkes. Atas hibah tersebut telah dilengkapi dengan konsep BAST hibah BMN dan belum disahkan oleh Kemenkes sebanyak 398 register barang sebesar Rp2.576.400.292,00. Berdasarkan surat persetujuan relokasi aset Nomor 000.2.4/14/BPKAD/2024 tanggal 21 Januari 2024 barang tersebut telah direlokasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Wakai sebanyak 128 register sebesar Rp1.624.171.296,00.

5.1.3.1.3.3 Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Aset Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 sebesar



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

Rp979.591.893.577,69 mengalami peningkatan sebesar Rp53.672.827.033,00 atau 5,80% dari tahun 2022 sebesar Rp925.919.066.544,69.

Nilai aset gedung dan bangunan per 31 Desember 2023 sebesar Rp979.591.893.577,69 dengan perhitungan sebagai berikut:

Saldo Per 31 Desember 2022	925.919.066.544,69
Penambahan Tahun 2023	98.881.664.107,00
Jumlah	1.024.800.730.651,69
Pengurangan Tahun 2023	45.208.837.074,00
Nilai Aset Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2023	979.591.893.577,69

Gedung dan Bangunan senilai Rp979.591.893.577,69 terdiri atas 3.150 Unit merupakan Gedung dan Bangunan yang dimiliki Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una. Penilaian Gedung dan Bangunan berdasarkan harga perolehan. Rincian unit gedung dan bangunan yang masih bernilai Rp0,00 terdapat pada *lampiran 18*. Pencatatan nilai aset gedung dan bangunan berdasarkan rekonsiliasi nilai tercatat aset Gedung dan bangunan pada awal dan akhir periode yang menunjukkan kenaikan nilai aset gedung dan bangunan, disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5.1.3. 28 Rekapitulasi Nilai Tercatat Gedung dan Bangunan Tahun 2023

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)
1	Saldo Per 31 Desember 2022	Rp 925.919.066.544,69
2	Penambahan :	
3	Pembelian (Belanja Modal) 2023	Rp 53.133.843.499,00
4	Hibah/Donasi	Rp 4.219.163.000,00
5	Belanja Barang dan Jasa	Rp 2.303.382.466,00
6	Mutasi Antar SKPD	Rp 29.449.930.573,00
7	Reklasifikasi :	
8	a. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi 2023	Rp 4.731.551.000,00
9	b. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 2023	Rp 583.370.000,00
10	c. Aset Tetap Konstruksi dalam Pengerjaan	Rp 4.450.523.569,00
11	Reklasifikasi dari Aset Lainnya	Rp 9.900.000,00
12	Pengurangan :	
13	Reklas ke Aset Lainnya Diserahkan ke Masyarakat	Rp 929.482.000,00
14	Reklas ke Aset Lainnya Kemitraan Pihak Ketiga	Rp 1.285.726.000,00
15	Mutasi Antar SKPD	Rp 29.449.930.573,00
16	Usulan Rusak Berat/Terbakar	Rp 2.526.383.371,00
17	Belanja Modal bukan Aset	Rp 176.474.000,00
18	Dibawah Minimum Kapitalisasi	Rp 31.909.670,00
19	Reklasifikasi :	
20	a. Belanja Modal Tanah 2023	Rp 107.275.000,00
21	b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2023	Rp 1.134.129.210,00
22	c. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi 2023	Rp 8.580.987.250,00
23	d. Aset Tetap Konstruksi dalam Pengerjaan	Rp 986.540.000,00
24	Saldo Per 31 Desember 2023	Rp 979.591.893.577,69

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2023

Aset Gedung dan Bangunan sebesar Rp979.591.893.577,69 disajikan dalam Rekap Rekonsiliasi nilai tercatat gedung dan bangunan pada awal dan akhir periode Per 31 Desember 2023 pada *lampiran 18*.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

5.1.3.1.3.4 Jalan, Jaringan dan Irigasi

Jalan, Jaringan dan Irigasi mencakup Jalan, Jaringan dan Irigasi yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi yang siap pakai. Aset Jalan, Jaringan dan Irigasi per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.722.058.091.733,28 mengalami peningkatan sebesar Rp117.225.313.204,00 atau 7,30% dari tahun 2022 sebesar Rp1.604.832.778.529,28.

Nilai aset Jalan, Jaringan dan Irigasi per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.722.058.091.733,28 dengan perhitungan sebagai berikut:

Saldo Per 31 Desember 2022	1.604.832.778.529,28
Penambahan Tahun 2023	230.707.101.919,00
Jumlah	1.835.539.880.448,28
Pengurangan Tahun 2023	113.481.788.715,00
Nilai Aset Jalan, Jaringan dan Irigasi Per 31 Desember 2023	1.722.058.091.733,28

Jalan, Jaringan dan Irigasi senilai Rp1.722.058.091.733,28 sebanyak 3.054 Unit terdiri dari Jalan, Jaringan dan Irigasi yang dimiliki Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una. Pencatatan nilai aset Jalan, Jaringan dan Irigasi berdasarkan rekonsiliasi nilai tercatat aset Jalan, Jaringan dan Irigasi pada awal dan akhir periode yang menunjukkan kenaikan nilai aset Jalan, Jaringan dan Irigasi, disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5.1.3. 29 Rekapitulasi Nilai Tercatat Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun 2023

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)
1	Saldo Per 31 Desember 2022	Rp 1.604.832.778.529,28
2	Penambahan :	
3	Pembelian (Belanja Modal) 2023	Rp 149.756.808.488,00
4	Hibah/Donasi 2023	Rp 5.820.467.000,00
5	Pengadaan Melalui Belanja Barang/Jasa	Rp 2.304.622.990,00
6	Mutasi Antar SKPD	Rp 64.075.813.092,00
7	Reklasifikasi :	
8	a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2023	Rp 44.443.099,00
9	b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan 2023	Rp 8.580.987.250,00
10	c. Aset Tetap Konstruksi dalam Pengerjaan	Rp 109.460.000,00
12	Reklasifikasi dari Aset Lainnya	Rp 14.500.000,00
13	Pengurangan :	
14	Reklas ke Aset Lainnya Diserahkan ke Masyarakat	Rp 42.896.939.623,00
15	Reklas ke Aset Lainnya Kemitraan Pihak Ketiga	58.850.000,00
16	Mutasi Antar SKPD	Rp 64.075.813.092,00
17	Rusak Berat/Hilang/Terbakar	Rp 1.119.615.000,00
18	Belanja Modal bukan Aset	Rp 346.430.000,00
19	Reklasifikasi :	
20	a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2023	Rp 252.590.000,00
21	b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan 2023	Rp 4.731.551.000,00
22	Saldo Per 31 Desember 2023	Rp 1.722.058.091.733,28

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2023

Aset Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp1.722.058.091.733,28 disajikan dalam Rekap Rekonsiliasi nilai tercatat Jalan, Jaringan dan Irigasi pada awal dan akhir periode Per 31 Desember 2023 pada *lampiran 19*.



5.1.3.1.3.5 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp52.667.526.985,00 mengalami peningkatan sebesar Rp919.591.345,00 atau 1,78% dari tahun 2022 sebesar Rp51.747.935.640,00.

Nilai aset tetap lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp52.667.526.985,00 dengan perhitungan sebagai berikut:

Saldo Per 31 Desember 2022	51.747.935.640,00
Penambahan Tahun 2023	2.221.439.243,00
Jumlah	53.969.374.883,00
Pengurangan Tahun 2023	1.301.847.898,00
Nilai Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2023	52.667.526.985,00

Aset Tetap Lainnya senilai Rp52.667.526.985,00 terdiri atas 942.738 Unit Aset Tetap Lainnya yang dimiliki Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una. Pencatatan nilai aset tetap lainnya berdasarkan rekonsiliasi nilai tercatat aset tetap lainnya pada awal dan akhir periode yang menunjukkan kenaikan nilai aset tetap lainnya, disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5.1.3. 30 Rekapitulasi Nilai Tercatat Aset Tetap Lainnya Tahun 2023

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)
1	Saldo Per 31 Desember 2022	Rp 51.747.935.640,00
2	Penambahan :	
3	Pembelian (Belanja Modal) 2023	Rp 1.942.981.043,00
3	Mutasi Antar SKPD	Rp 86.402.000,00
4	Pengadaan Melalui Belanja Barang/Jasa	Rp 29.900.000,00
5	Reklasifikasi :	
6	a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2023	Rp 162.156.200,00
7	Pengurangan :	
8	Mutasi Antar SKPD	Rp 86.402.000,00
9	Rusak Berat/Hilang/Terbakar	Rp 522.430.898,00
10	Reklasifikasi :	
11	a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2023	Rp 103.645.000,00
12	b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan 2023	Rp 583.370.000,00
13	Reklasifikasi ke Aset Lainnya (ATB)	Rp 6.000.000,00
14	Saldo Per 31 Desember 2023	Rp 52.667.526.985,00

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2023

Aset Tetap Lainnya sebesar Rp52.667.526.985,00 disajikan dalam Rekap Rekonsiliasi nilai tercatat aset tetap lainnya pada awal dan akhir periode Per 31 Desember 2023 pada *lampiran 20*.

5.1.3.1.3.6 Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya. Konstruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp9.741.438.065,00 mengalami penurunan sebesar Rp3.596.143.569,00 atau 29,96% dari tahun 2022 sebesar Rp13.337.581.634,00.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

Nilai Konstruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp9.741.438.065,00 dengan perhitungan sebagai berikut:

Saldo Per 31 Desember 2022	13.337.581.634,00
Penambahan Tahun 2023	1.226.176.458,00
Jumlah	14.563.758.092,00
Pengurangan Tahun 2023	4.822.320.027,00
Nilai Konstruksi dalam Pengerjaan Per 31 Desember 2023	9.741.438.065,00

Aset Tetap KDP senilai Rp9.741.438.065,00 terdiri atas 50 Unit Konstruksi dalam pengerjaan yang dimiliki Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una. Penilaian Konstruksi dalam pengerjaan berdasarkan harga perolehan. Pencatatan nilai Konstruksi dalam pengerjaan berdasarkan hasil rekonsiliasi nilai tercatat konstruksi dalam pengerjaan pada awal dan akhir periode yang menunjukkan kenaikan nilai konstruksi dalam pengerjaan disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5.1.3. 31 Rekapitulasi Nilai Tercatat Konstruksi dalam Pengerjaan Tahun 2023

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)
1	Saldo Per 31 Desember 2022	Rp 13.337.581.634,00
2	Penambahan :	
3	Pengadaan Melalui Belanja Barang/Jasa	Rp 177.100.000,00
4	Mutasi Antar SKPD	Rp 62.536.458,00
5	Reklasifikasi	
6	a. Belanja Modal Gedung dan Bangunan 2023	Rp 986.540.000,00
7	Pengurangan :	
8	Mutasi Antar SKPD	Rp 62.536.458,00
9	Reklasifikasi :	
10	a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2023	Rp 199.800.000,00
11	b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan 2023	Rp 4.450.523.569,00
12	c. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi 2023	Rp 109.460.000,00
13	Saldo Per 31 Desember 2023	Rp 9.741.438.065,00

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2023

Konstruksi dalam Pengerjaan sebesar Rp9.741.438.065,00 disajikan dalam Rekap Rekonsiliasi nilai tercatat konstruksi dalam pengerjaan pada awal dan akhir periode Per 31 Desember 2023 pada *lampiran 21*.

5.1.3.1.3.7 Akumulasi Penyusutan

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap dikurangi akumulasi penyusutan. Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*). Waktu yang digunakan dalam perhitungan penyusutan aset tetap adalah pendekatan bulan penggunaan. Dengan pendekatan bulan penggunaan, maka waktu penyusutan ditentukan per bulan.

Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.541.037.862.642,80 mengalami peningkatan sebesar Rp135.592.804.268,00 atau 9,65% dari tahun 2022 sebesar Rp1.405.445.058.374,80. Rincian Nilai Akumulasi Penyusutan tahun 2023 dan tahun 2022 disajikan dalam tabel sebagai berikut:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Tabel 5.1.3. 32 Nilai Akumulasi Penyusutan Tahun 2023 dan 2022

Kode Rekening	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1.3.07.01	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(451.377.295.141,80)	(408.403.188.304,80)
1.3.07.02	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(171.717.210.372,00)	(153.164.338.607,00)
1.3.07.03	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	(917.624.295.949,00)	(843.564.322.408,00)
1.3.07.04	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(319.061.180,00)	(313.209.055,00)
	Jumlah	(1.541.037.862.642,80)	(1.405.445.058.374,80)

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2023

Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.541.037.862.642,80 disajikan dalam *lampiran 22* dengan rincian sebagai berikut:

1.3.07.01 Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin

Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 sebesar Rp451.377.295.141,80 mengalami peningkatan sebesar Rp42.974.106.837,00 atau 10,52% dari tahun 2022 sebesar Rp408.403.188.304,80 yang disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5.1.3. 33 Rekapitulasi Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin Tahun 2023

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)
1	Saldo Awal 2023	Rp (408.403.188.304,80)
2	Bertambah	
3	Koreksi Saldo Awal 2023	Rp (568.434.147,00)
4	Beban Penyusutan	Rp (45.366.299.959,00)
5	Mutasi antar SKPD Lain	Rp (37.774.027.170,00)
6	Reklasifikasi dari Aset Lainnya	Rp (122.674.500,00)
7	Berkurang	
8	Koreksi saldo awal 2023	Rp (296,00)
9	Mutasi antar SKPD Lain	Rp (37.774.027.170,00)
10	Hibah	Rp (51.786.416,00)
11	Rusak Berat/Hilang/Terbakar/Lain-lain	Rp (3.031.515.057,00)
12	Jumlah Akumulasi Penyusutan 2023	Rp (451.377.295.141,80)

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2023

Rekonsiliasi nilai tercatat Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin pada awal dan akhir periode Per 31 Desember 2023 disajikan pada *lampiran 23*.

1.3.07.02 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan

Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 sebesar Rp171.717.210.372,00 mengalami peningkatan sebesar Rp18.552.871.765,00 atau 12,11% dari tahun 2022 sebesar Rp153.164.338.607,00 disajikan dalam tabel sebagai berikut:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

Tabel 5.1.3. 34 Rekapitulasi Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan Tahun 2023

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)
1	Saldo Awal 2023	Rp (153.164.338.607,00)
2	Bertambah	
3	Koreksi Saldo Awal 2023	Rp (1.134.414.596,00)
4	Beban Penyusutan	Rp (18.408.771.593,00)
5	Mutasi antar SKPD Lain	Rp (3.966.098.837,00)
6	Reklasifikasi dari Aset Lainnya	Rp (1.815.000,00)
7	Berkurang	
8	Koreksi saldo awal 2023	Rp (21,00)
9	Barang yang dimanfaatkan Pihak Lain	Rp (293.530.063,00)
10	Mutasi antar SKPD Lain	Rp (3.966.098.837,00)
11	Hibah	Rp (39.963.317,00)
12	Rusak Berat	Rp (658.636.023,00)
13	Jumlah Akumulasi Penyusutan 2023	Rp (171.717.210.372,00)

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2023

Rekonsiliasi nilai tercatat Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan pada awal dan akhir periode Per 31 Desember 2023 disajikan pada *lampiran 24*.

1.3.07.03 Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi

Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi per 31 Desember 2023 sebesar Rp917.624.295.949,00 mengalami peningkatan sebesar Rp74.059.973.541,00 atau 8,78% dari tahun 2022 sebesar Rp843.564.322.408,00 disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5.1.3. 35 Rekapitulasi Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Irigasi Tahun 2023

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)
1	Saldo Awal 2023	Rp (843.564.322.408,00)
2	Bertambah	
3	Koreksi Saldo Awal 2023	Rp (2.732.353.549,00)
4	Beban Penyusutan	Rp (72.130.696.141,00)
5	Mutasi antar SKPD Lain	Rp (17.820.931.208,00)
6	Reklasifikasi dari Aset Lainnya	Rp (4.742.708,00)
7	Berkurang	
8	Koreksi saldo awal 2023	Rp (18,00)
9	Mutasi antar SKPD Lain	Rp (17.820.931.208,00)
10	Diserahkan ke Masyarakat/Hibah	Rp (520.772.805,00)
11	Barang yang dimanfaatkan Pihak Lain	Rp (9.971.805,00)
12	Rusak Berat	Rp (277.074.229,00)
13	Jumlah Akumulasi Penyusutan 2023	Rp (917.624.295.949,00)

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2023

Rekonsiliasi nilai tercatat Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi pada awal dan akhir periode Per 31 Desember 2023 disajikan pada *lampiran 25*.

1.3.07.04 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp319.061.180,00 mengalami peningkatan sebesar Rp5.852.125,00 atau 1,87% dari tahun 2022 sebesar Rp313.209.055,00 disajikan dalam tabel sebagai berikut:



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

Tabel 5.1.3. 36 Rekapitulasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya Tahun 2023

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)
1	Saldo Awal 2023	Rp (313.209.055,00)
2	Bertambah	
3	Beban Penyusutan	Rp (5.852.125,00)
4	Berkurang	
5	Koreksi saldo awal 2023	Rp (0,00)
6	Jumlah Akumulasi Penyusutan 2023	Rp (319.061.180,00)

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2023

Rekonsiliasi nilai tercatat Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya pada awal dan akhir periode Per 31 Desember 2023 disajikan pada *lampiran 26*.

5.1.3.1.4 Dana Cadangan

Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk membiayai kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu periode akuntansi. Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una, dari tahun 2022 sampai dengan 31 Desember 2023 belum membentuk dana cadangan.

5.1.3.1.5 Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan. Aset Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp135.639.152.933,71 mengalami peningkatan sebesar Rp99.829.519.639,94 atau 278,78% dari tahun 2022 sebesar Rp35.809.633.293,77 disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5.1.3. 37 Nilai Aset Lainnya Tahun 2023 dan 2022

Kode Rekening	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1.5.01	Tagihan Jangka Panjang	9.306.573.003,03	7.890.714.515,43
1.5.02	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	1.344.576.000,00	0,00
1.5.03	Aset Tidak Berwujud	2.775.147.954,00	2.763.783.954,00
1.5.04	Aset Lain-lain	62.928.546.839,85	25.938.196.087,01
1.5.05	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(921.568.659,33)	(783.061.262,67)
1.5.06	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(11.546.147.203,84)	0,00
1.5.07	Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	71.752.025.000,00	0,00
	Jumlah	135.639.152.933,71	35.809.633.293,77

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2023

Rekap nilai Harga perolehan Aset Lainnya disajikan pada *lampiran 27*.

5.1.3.1.5.1 Tagihan Jangka Panjang

Tagihan Jangka Panjang merupakan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain ditetapkan oleh BPK kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian negara/daerah untuk jumlah yang akan diterima dalam waktu 12 bulan mendatang. Tuntutan Ganti Rugi/Perbendaharaan per 31 Desember 2023 disajikan berdasarkan hasil pemantauan Tim TP-TGR sampai dengan semester 2 (dua) tahun 2023 yaitu sebesar Rp9.306.573.003,03 mengalami peningkatan sebesar Rp1.415.858.487,60 atau 17,94% dari tahun 2022 sebesar Rp7.890.714.515,43 yang disajikan dalam tabel sebagai berikut:



Tabel 5.1.3. 38 Tuntutan Ganti Rugi/Perbendaharaan Tahun 2023

No	Uraian	Jumlah Kasus	31 Desember 2023 (Rp)
1	LHP BPK	140	8.243.275.692,86
2	Selain LHP BPK	13	476.628.330,17
3	Dalam Proses	11	586.668.980,00
	Jumlah	164	9.306.573.003,03

Sumber : Hasil Pemantauan Penyelesaian Kerugian Daerah

5.1.3.1.5.2 Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Kemitraan dengan pihak ketiga untuk pemanfaatan barang milik daerah yang dimiliki oleh pemerintah daerah dengan prinsip saling menguntungkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jenis akun kemitraan dengan pihak ketiga merupakan bagian dari akun properti investasi yang belum disajikan dalam *face* Laporan Keuangan. Properti investasi dikuasai untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk memperoleh kenaikan nilai atau keduanya. Kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan. Sewa tahun 2023 sebesar Rp1.344.576.000,00 mengalami peningkatan 100,00% dari tahun sebelumnya yang terdapat pada Dinas Perikanan. Rincian sewa disajikan pada *lampiran 34 dan 35*.

5.1.3.1.5.3 Aset Tidak Berwujud

Aset tidak berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Masa manfaat aset tidak berwujud telah sesuai dengan Kebijakan Akuntansi, dimana jumlah yang dapat diamortisasi dari aset tidak berwujud harus dialokasikan secara sistematis berdasarkan perkiraan terbaik dari masa manfaatnya. Pada umumnya masa manfaat suatu aset tak berwujud dihitung dengan masa manfaat 20 tahun sejak tanggal aset siap. Dengan metode Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una menggunakan metode amortisasi garis lurus dan diterapkan secara konsisten.

Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.775.147.954,00 mengalami peningkatan sebesar Rp11.364.000,00 atau 0,41% dari tahun 2022 sebesar Rp2.763.783.954,00. Rincian Aset tidak Berwujud disajikan pada *lampiran 38 dan 39*.

5.1.3.1.5.4 Aset Lain-Lain

Aset Lain-Lain digunakan untuk mencatat Aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran, tuntutan perbendaharaan, tuntutan ganti rugi dan kemitraan dengan pihak ketiga. Aset Lain-Lain terdiri dari Aset lain-lain kondisi rusak berat, Aset lain-lain kondisi hilang/terbakar, Aset lain-lain yang telah diserahkan kemasayarakat/Pemerintah Prov/Pusat dan Aset lain-lain yang siap dijual yang digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintah dan pelayanan publik, dan selanjutnya akan dihapus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Khusus pada Aset yang hilang akan diproses sesuai dengan prosedur penyelesaian kerugian daerah.

Aset lain-lain per 31 Desember 2023 sebesar Rp62.928.546.839,85 mengalami peningkatan sebesar Rp36.990.350.752,84 atau 142,61% dari tahun 2022 sebesar Rp25.938.196.087,01 yang disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5.1.3. 39 Nilai Aset Lain-Lain Tahun 2023 dan 2022



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

Kode Rekening	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1.5.04.01.01.0001	Aset Rusak Berat/Usang	6.052.673.057,00	462.086.289,00
1.5.04.01.01.0002	Aset Tetap yang tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	56.875.873.782,85	25.476.109.798,01
Jumlah		62.928.546.839,85	25.938.196.087,01

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2023

1.5.04.01.01.0001 Aset Rusak Berat/Usang

Aset Rusak Berat/Usang sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp6.052.673.057,00 yang disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5.1.3. 40 Rekapitulasi Aset Rusak Berat/Usang Tahun 2023

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)
I	Nilai Perolehan	
1	Saldo Awal 2023	Rp 5.321.231.069,00
2	Penambahan	
3	Rusak Berat 2023	Rp 7.473.678.334,00
4	Mutasi antar SKPD Lain	Rp 543.776.454,00
5	Pengurangan	
6	Reklasifikasi Ke Aset Tetap	Rp 122.674.500,00
7	Penghapusan	Rp 6.619.561.846,00
8	Mutasi antar SKPD Lain	Rp 543.776.454,00
9	Saldo Akhir Nilai Perolehan 2023	Rp 6.052.673.057,00
II	Akumulasi Penyusutan	
1	Saldo Awal 2023	Rp (4.859.144.780,00)
2	Penambahan	
3	Usulan Rusak Berat	Rp (3.902.418.312,00)
4	Usulan Berjalan	Rp (98.860.497,00)
5	Mutasi antar SKPD Lain	Rp (542.596.204,00)
6	Pengurangan	
7	Penghapusan	Rp (3.256.242.571,00)
8	Mutasi antar SKPD Lain	Rp (542.596.204,00)
9	Reklasifikasi Ke Aset Tetap	Rp (122.674.500,00)
10	Saldo Akhir Akumulasi Penyusutan 2023	Rp (5.481.506.518,00)
III	Nilai Buku 2023	Rp 571.166.539,00

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2023

Rekap Perhitungan dan Rincian Aset kondisi rusak berat disajikan dalam *lampiran 28 dan 29*.

1.5.04.01.01.0002 Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah

Aset tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah berupa aset yang hilang/terbakar, aset lain-lain yang diserahkan ke masyarakat, aset lain-lain pinjam pakai dan aset lain-lain siap untuk dijual. Aset tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp56.875.873.782,85 dengan rincian sebagai berikut:

1. Aset Lain-lain Hilang/Terbakar

Aset Lain-lain Hilang/Terbakar sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp38.225.466,00 yang disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5.1.3. 41 Rekapitulasi Aset Lain-Lain Hilang/Terbakar Tahun 2023



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)
I	Nilai Perolehan	
1	Saldo Awal 2023	Rp 1.294.676.625,34
2	Penambahan	
3	Mutasi antar SKPD Lain	Rp 55.735.000,00
4	Pengurangan	
5	Penghapusan	Rp 3.682.000,00
6	Mutasi antar SKPD Lain	Rp 55.735.000,00
7	Saldo Akhir Nilai Perolehan 2023	Rp 1.290.994.625,34
II	Akumulasi Penyusutan	
1	Saldo Awal 2023	Rp (1.255.701.159,34)
2	Penambahan	
3	Mutasi antar SKPD Lain	Rp (53.695.834,00)
4	Pengurangan	
5	Penghapusan	Rp (2.932.000,00)
6	Mutasi antar SKPD Lain	Rp (53.695.834,00)
7	Saldo Akhir Akumulasi Penyusutan 2023	Rp (1.252.769.159,34)
III	Nilai Buku 2023	Rp 38.225.466,00

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2023

Rekap Perhitungan dan Rincian Aset Hilang/Terbakar disajikan dalam *lampiran 30 dan 31*.

3. Aset Lain-lain Diserahkan Masyarakat dan Pemerintah Pusat/Provinsi

Aset Lain-lain diserahkan ke masyarakat merupakan aset yang tujuannya diserahkan ke masyarakat yang sampai dengan 31 Desember 2023 belum adanya Surat Keputusan Penghapusan. Aset Lain-lain Diserahkan Masyarakat dan Pemerintah Pusat/Provinsi sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp51.076.509.499,01 yang disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5.1.3. 42 Rekapitulasi Aset Lain-Lain Diserahkan Masyarakat dan Pemerintah Pusat/Provinsi Tahun 2023

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)
I	Nilai Perolehan	
1	Saldo Awal 2023	Rp 28.772.790.901,51
2	Penambahan	
3	Barang diserahkan ke Masyarakat 2023	Rp 47.198.812.223,00
4	Mutasi antar SKPD Lain	Rp 1.952.990.900,00
5	Pengurangan	
6	Penghapusan	Rp 21.752.858.967,00
7	Mutasi antar SKPD Lain	Rp 1.952.990.900,00
8	Reklasifikasi ke Aset Tetap	Rp 14.500.000,00
9	Reklasifikasi ke Barang dan Jasa	Rp 73.465.000,00
10	Saldo Akhir Nilai Perolehan 2023	Rp 54.130.779.157,51
II	Akumulasi Penyusutan	
1	Saldo Awal 2023	Rp (3.353.389.485,50)
2	Penambahan	
3	Barang diserahkan ke Masyarakat 2023	Rp (555.796.810,00)
4	Usulan 2023	Rp (4.939.312,00)
5	Mutasi antar SKPD Lain	Rp (389.381.366,00)
6	Pengurangan	
7	Penghapusan	Rp (855.838.241,00)
8	Mutasi antar SKPD Lain	Rp (389.381.366,00)
9	Reklasifikasi Ke Aset Tetap	Rp (4.017.708,00)
10	Saldo Akhir Akumulasi Penyusutan 2023	Rp (3.054.269.658,50)



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)
III	Nilai Buku 2023	Rp 51.076.509.499,01

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2023

Rekap Perhitungan dan Rincian Aset Diserahkan Masyarakat dan Pemerintah Pusat/Provinsi disajikan dalam *lampiran 32 dan 33*.

4. Aset Lain-lain Siap untuk Dijual

Aset Lain-lain Siap untuk Dijual sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 yang disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5.1.3. 43 Rekapitulasi Aset Lain-Lain Siap untuk Dijual Tahun 2023

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)
I	Nilai Perolehan	
1	Saldo Awal 2023	Rp 1.454.100.000,00
2	Penambahan	
3	Aset yang Dijual 2023	Rp 0,00
4	Pengurangan	
5	Penghapusan	Rp 0,00
6	Saldo Akhir Nilai Perolehan 2023	Rp 1.454.100.000,00
II	Akumulasi Penyusutan	
1	Saldo Awal 2023	Rp (1.454.100.000,00)
2	Penambahan	
3	Aset yang Dijual 2023	Rp (0,00)
4	Pengurangan	
5	Penghapusan	Rp (0,00)
6	Saldo Akhir Akumulasi Penyusutan 2023	Rp (1.454.100.000,00)
III	Nilai Buku 2023	Rp 0,00

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2023

Rekap Perhitungan dan Rincian Aset lain-lain Siap untuk Dijual disajikan dalam *lampiran 36 dan 37*.

5.1.3.1.5.5 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud per 31 Desember 2023 sebesar Rp921.568.659,33 mengalami peningkatan sebesar Rp138.507.396,66 atau 17,69% dari tahun 2022 sebesar Rp783.061.262,67.

5.1.3.1.5.6 Akumulasi Aset Lainnya

Akumulasi penyusutan aset lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp11.546.147.203,84 mengalami peningkatan 100,00% dari tahun 2022 disebabkan adanya pengakuan rekening akumulasi penyusutan aset lainnya pada rekening aset lainnya.

5.1.3.1.5.7 Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)

Dana transfer treasury deposit facility (TDF) per 31 Desember 2023 sebesar Rp71.752.025.000,00 mengalami peningkatan 100,00% dari tahun 2022. Hal ini disebabkan adanya perubahan pengelolaan Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) melalui rekening Treasury Deposit Facility (TDF) sesuai dengan Surat Edaran Nomor 900.1.14.1/7481/Keuda. Dalam hal ini pokok DBH/DAU yang telah disalurkan dari RKUN ke rekening TDF Pemda mencatat sebagai aset lainnya.



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

5.1.3.2 Kewajiban

Kewajiban adalah dampak transaksi masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi. Kewajiban per 31 Desember 2023 sebesar Rp10.737.924.166,97 mengalami penurunan sebesar Rp9.960.761.792,23 atau 48,12% dari tahun 2022 sebesar Rp20.698.685.959,20 yang disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5.1.3. 44 Nilai Kewajiban Tahun 2023 dan 2022

Kode Rekening	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
2.1	Kewajiban Jangka Pendek	10.737.924.166,97	20.698.685.959,20
2.2	Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00
Jumlah		10.737.924.166,97	20.698.685.959,20

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2023

5.1.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek Per 31 Desember 2023 sebesar Rp10.737.924.166,97 mengalami penurunan sebesar Rp9.960.761.792,23 atau 48,12% dari tahun 2022 sebesar Rp20.698.685.959,20 yang disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5.1.3. 45 Jenis Kewajiban Jangka Pendek Tahun 2023 dan 2022

Kode Rekening	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
2.1.01	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	690.404.385,72	884.879.342,72
2.1.06	Utang Belanja	4.619.397.553,25	7.553.506.184,48
2.1.07	Utang Jangka Pendek Lainnya	5.428.122.228,00	12.260.300.432,00
Jumlah		10.737.924.166,97	20.698.685.959,20

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2023

5.1.3.2.1.1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) adalah utang pemerintah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan Pemerintah Daerah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Iuran BPJS Kesehatan, Taspen, Taperum, dan Pajak Daerah. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) tahun 2023 sebesar Rp690.404.385,72 mengalami penurunan sebesar Rp194.474.957,00 atau 21,98% dari tahun 2022 sebesar Rp884.879.342,72 yang disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5.1.3. 46 Rincian Utang PFK Tahun 2023

No	Uraian	Saldo Awal	Penerimaan Kas	Pengeluaran Kas	Saldo Akhir
1	Utang Iuran Jaminan Kesehatan	(769.328,00)	17.164.579.842,00	17.163.810.514,00	0,00
2	Utang Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	0,00	413.014.498,00	413.014.498,00	0,00
3	Utang Iuran Jaminan Kematian	0,00	1.239.042.859,00	1.239.042.859,00	0,00
4	Utang PPh 21	229.567.229,00	10.635.014.172,00	10.624.437.630,00	240.143.771,00
5	Utang PPh 22/Ps 4 (2)	2.710.598,00	5.003.015.999,00	5.001.407.112,00	4.319.485,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

No	Uraian	Saldo Awal	Penerimaan Kas	Pengeluaran Kas	Saldo Akhir
6	Utang PPh 23/Lainnya	84.264.215,64	2.177.424.818,00	2.183.305.226,01	78.383.807,63
7	Utang PPN Pusat	472.748.633,08	29.078.593.404,00	29.267.392.880,99	283.949.156,09
8	Utang Iuran Wajib Pegawai	96.357.995,00	18.757.902.167,00	18.770.651.996,00	83.608.166,00
Jumlah		884.879.342,72	84.468.587.759,00	84.663.062.716,00	690.404.385,72

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2023

5.1.3.2.1.2 Utang Belanja

Utang belanja adalah kewajiban pemerintah yang masih harus dibayar yang timbul akibat hak atas pegawai, pengadaan barang dan jasa, serta pemberian bantuan keuangan ke desa. Utang Belanja Per 31 Desember 2023 sebesar Rp4.619.397.553,25 mengalami penurunan sebesar Rp2.934.108.631,23 atau 38,84% dari tahun 2022 sebesar Rp7.553.506.184,48 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.3. 47 Rincian Utang Belanja Tahun 2023 dan 2022

Kode Rekening	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
2.1.06.01	Utang Belanja Pegawai	3.099.127,00	3.890.160.897,00
2.1.06.02	Utang Belanja Barang dan Jasa	4.376.298.426,25	3.423.345.287,48
2.1.06.13	Utang Belanja Bantuan Keuangan	240.000.000,00	240.000.000,00
Jumlah		4.619.397.553,25	7.553.506.184,48

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2023

Rincian utang belanja pada masing-masing perangkat daerah dapat dilihat pada *lampiran 52*.

5.1.3.2.1.3 Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya adalah utang yang timbul selain dari utang perhitungan pihak ketiga maupun utang belanja. Utang Jangka Pendek Lainnya Per 31 Desember 2023 sebesar Rp5.428.122.228,00 mengalami penurunan sebesar Rp6.832.178.204,00 atau 55,73% dari tahun 2022 sebesar Rp12.260.300.432,00. Utang Jangka Pendek Lainnya berupa utang kelebihan pembayaran transfer bagi hasil pusat sebesar Rp5.428.122.228,00 rincian perhitungan disajikan pada *lampiran 9*.

5.1.3.2.2 Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban Jangka Panjang merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 tidak memiliki kewajiban jangka panjang.

5.1.3.3 Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una. Ekuitas per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.278.260.790.746,28 mengalami peningkatan sebesar Rp160.261.518.986,69 atau 7,57% dari tahun 2022 sebesar Rp2.117.999.271.759,59. Rincian Ekuitas Dana disajikan dalam penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas pada *poin 5.1.6*.



5.1.4 Laporan Operasional

Laporan Operasional merupakan laporan yang menyajikan informasi ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2023 dan 2022 (dalam satuan mata uang Rupiah) diungkapkan dan dijelaskan sebagai berikut:

5.1.4.1 Pendapatan-LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan-LO Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Daerah-LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.4. 1 Realisasi Pendapatan-LO TA 2023 dan 2022

Kode Rek	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
7.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO	102.640.169.447,74	89.990.469.267,82	12.649.700.179,92	14,06
7.2	Pendapatan Transfer-LO	1.060.727.703.622,00	881.019.924.862,00	179.707.778.760,00	20,40
7.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah-LO	17.209.986.103,00	24.850.038.684,79	(7.640.052.581,79)	(30,74)
Jumlah		1.180.577.859.172,74	995.860.432.814,61	184.717.426.358,13	18,55

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2023

5.1.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.4. 2 Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO TA 2023 dan 2022

Kode Rek	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
7.1.01	Pajak Daerah-LO	14.091.920.677,00	11.892.014.719,08	2.199.905.957,92	18,50
7.1.02	Retribusi Daerah-LO	6.128.186.120,00	4.956.310.770,00	1.171.875.350,00	23,64
7.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	4.165.684.360,00	2.888.444.941,71	1.277.239.418,29	44,22
7.1.04	Lain-Lain PAD yang Sah-LO	78.254.378.290,74	70.253.698.837,03	8.000.679.453,71	11,39
Jumlah		102.640.169.447,74	89.990.469.267,82	12.649.700.179,92	14,06

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2023



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

5.1.4.1.1.1 Pajak Daerah-LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pajak Daerah-LO Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Pajak Daerah-LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.4. 3 Realisasi Pajak Daerah-LO TA 2023 dan 2022

Kode Rek	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
7.1.01.06	Pajak Hotel – LO	409.323.220,00	183.424.435,00	225.898.785,00	123,16
7.1.01.07	Pajak Restoran – LO	1.976.195.622,00	1.917.581.349,08	58.614.272,92	3,06
7.1.01.08	Pajak Hiburan – LO	2.500.000,00	1.725.000,00	775.000,00	44,93
7.1.01.09	Pajak Reklame – LO	456.841.360,00	427.948.646,00	28.892.714,00	6,75
7.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan – LO	4.918.821.675,00	4.530.056.093,00	388.765.582,00	8,58
7.1.01.11	Pajak Parkir – LO	107.568.000,00	109.475.333,00	(1.907.333,00)	(1,74)
7.1.01.12	Pajak Air Tanah – LO	4.811.675,00	0,00	4.811.675,00	100,00
7.1.01.14	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan – LO	2.127.578.630,00	1.602.309.904,00	525.268.726,00	32,78
7.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan – LO	2.059.009.650,00	2.008.609.886,00	50.399.764,00	2,51
7.1.01.16	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)– LO	2.029.270.845,00	1.110.884.073,00	918.386.772,00	82,67
Jumlah		14.091.920.677,00	11.892.014.719,08	2.199.905.957,92	18,50

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2023

Perubahan nilai Pajak Daerah–LO Tahun 2023 dari Tahun 2022 disebabkan hal-hal berikut:

1. Adanya peningkatan jumlah kunjungan wisatawan pada tahun 2023 turut berkontribusi terhadap peningkatan realisasi pajak daerah dan Kabupaten Tojo Una-Una menjadi tuan rumah dalam penyelenggaraan STQH Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 ke-XXVII. Kedatangan wisatawan dan penyelenggaraan kegiatan tersebut diiringi dengan pengeluaran untuk berbagai layanan dan barang sehingga meningkatkan pelayanan pajak dari sektor pariwisata;
2. Banyaknya pengunjung yang menggunakan lahan parkir di Rumah Sakit pada tahun 2023 karena adanya peningkatan perluasan lahan parkir;
3. Adanya peningkatan permintaan bahan material sejalan dengan meningkatnya belanja modal;
4. Adanya peningkatan transaksi jual beli dan penggunaan hak guna usaha oleh Perusahaan Perkebunan Touna Coconut selama 25 tahun sehingga mempengaruhi capaian realisasi pendapatan pajak daerah pada tahun 2023.

Perbandingan pendapatan pajak daerah LO dan LRA tahun 2023 sebagai berikut:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Tabel 5.1.4. 4 Perbandingan Pendapatan Pajak Daerah LO dan LRA Tahun 2023

Kode Rekening	Uraian	LO	LRA	Selisih
7.1.01.06	Pajak Hotel – LO	409.323.220,00	409.523.220,00	200.000,00
7.1.01.07	Pajak Restoran – LO	1.976.195.622,00	1.975.925.622,00	(270.000,00)
7.1.01.08	Pajak Hiburan – LO	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
7.1.01.09	Pajak Reklame – LO	456.841.360,00	447.425.910,00	(9.415.450,00)
7.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan – LO	4.918.821.675,00	4.868.653.463,00	(50.168.212,00)
7.1.01.11	Pajak Parkir – LO	107.568.000,00	107.568.000,00	0,00
7.1.01.12	Pajak Air Tanah – LO	4.811.675,00	4.811.675,00	0,00
7.1.01.14	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan – LO	2.127.578.630,00	2.043.627.259,00	(83.951.371,00)
7.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan – LO	2.059.009.650,00	1.746.846.685,00	(312.162.965,00)
7.1.01.16	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)– LO	2.029.270.845,00	2.029.270.845,00	0,00
	Jumlah	14.091.920.677,00	13.636.152.679,00	(455.767.998,00)

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2023

Pengakuan Pendapatan Pajak Daerah dalam LO Tahun 2023 *lebih besar* dari saldo Pendapatan Pajak Daerah dalam LRA TA 2023 sebesar Rp455.767.998,00 (Rp14.091.920.677,00-Rp13.636.152.679,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Pendapatan Pajak Daerah dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Selisih LO-LRA	Rp	455.767.998,00
Penambah :		
1. Penambahan Piutang Pajak Restoran	Rp	450.000,00
2. Penambahan Piutang Pajak Reklame	Rp	19.168.188,00
1. Penambahan Piutang Pajak Penerangan Jalan	Rp	448.348.842,00
4. Penambahan Piutang Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan	Rp	96.012.583,00
5. Penambahan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	Rp	516.737.855,00
Jumlah Penambah	Rp	1.080.717.468,00
Pengurang :		
1. Pelunasan Piutang Pajak Hotel	Rp	200.000,00
2. Pelunasan Piutang Pajak Restoran	Rp	180.000,00
3. Pelunasan Piutang Pajak Reklame	Rp	9.752.738,00
4. Pelunasan Piutang Pajak Penerangan Jalan	Rp	398.180.630,00
5. Pelunasan Piutang Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan	Rp	12.061.212,00
6. Pelunasan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	Rp	204.574.890,00
Jumlah Pengurang	Rp	624.949.470,00
Jumlah Penjelasan Selisih	Rp	455.767.998,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

7.1.01.06 Pajak Hotel - LO

Realisasi pajak hotel-LO tahun 2023 sebesar Rp409.323.220,00 bersumber dari realisasi pajak hotel-LRA sebesar Rp409.523.220,00 dan pengurangan piutang tahun 2022 sebesar Rp200.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.4. 5 Realisasi Pajak Hotel-LO TA 2023 dan 2022

Kode Rek	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
7.1.01.06 .01.0001	Pajak Hotel-LO	365.785.720,00	129.203.935,00	236.581.785,00	183,11
7.1.01.06 .07.0001	Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya-LO	43.537.500,00	34.993.500,00	8.544.000,00	24,42
7.1.01.06 .08.0001	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)-LO	0,00	19.227.000,00	(19.227.000,00)	(100,00)
Jumlah		409.323.220,00	183.424.435,00	225.898.785,00	123,16

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2023

7.1.01.07 Pajak Restoran – LO

Realisasi pajak restoran-LO tahun 2023 sebesar Rp1.976.195.622,00 bersumber dari realisasi pajak restoran-LRA sebesar Rp1.975.925.622,00 dengan penambahan penerimaan piutang tahun 2023 sebesar Rp450.000,00 dan pengurangan piutang tahun 2022 sebesar Rp180.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.4. 6 Realisasi Pajak Restoran-LO TA 2023 dan 2022

Kode Rek	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
7.1.01.07 .01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya-LO	761.350,00	130.000,00	631.350,00	485,65
7.1.01.07 .02.0001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya-LO	47.118.334,00	47.872.500,00	(754.166,00)	(1,58)
7.1.01.07 .03.0001	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya-LO	23.505.461,00	30.384.202,08	(6.878.741,08)	(22,64)
7.1.01.07 .04.0001	Pajak Kantin dan Sejenisnya-LO	1.640.000,00	580.000,00	1.060.000,00	182,76
7.1.01.07 .05.0001	Pajak Warung dan Sejenisnya-LO	550.000,00	0,00	550.000,00	100,00
7.1.01.07 .07.0001	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya-LO	1.902.620.477,00	1.838.614.647,00	64.005.830,00	3,48
Jumlah		1.976.195.622,00	1.917.581.349,08	58.614.272,92	3,06

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2023

7.1.01.08 Pajak Hiburan – LO

Realisasi pajak hiburan-LO tahun 2023 sebesar Rp2.500.000,00 bersumber dari realisasi pajak hiburan-LRA sebesar Rp2.500.000,00.

7.1.01.09 Pajak Reklame – LO

Realisasi pajak reklame-LO tahun 2023 sebesar Rp456.841.360,00 bersumber dari realisasi pajak reklame-LRA sebesar Rp447.425.910,00 dengan penambahan piutang tahun 2023 sebesar Rp19.168.188,00 dan pengurangan piutang tahun 2022 sebesar Rp9.752.738,00 dengan rincian sebagai berikut:



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

Tabel 5.1.4. 7 Realisasi Pajak Reklame-LO TA 2023 dan 2022

Kode Rek	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
7.1.01.09 .01.0001	Pajak Reklame Papan /Billboard /Videotron/Megatron-LO	335.228.356,00	383.519.022,00	(48.290.666,00)	(12,59)
7.1.01.09 .02.0001	Pajak Reklame Kain-LO	121.613.004,00	44.429.624,00	77.183.380,00	173,72
Jumlah		456.841.360,00	427.948.646,00	28.892.714,00	6,75

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2023

7.1.01.10 Pajak Penerangan Jalan – LO

Realisasi pajak reklame-LO tahun 2023 sebesar Rp4.918.821.675,00 bersumber dari realisasi pajak reklame-LRA sebesar Rp4.868.653.463,00 dengan penambahan piutang tahun 2023 sebesar Rp448.348.842,00 serta pengurangan piutang tahun 2022 sebesar Rp398.180.630,00.

7.1.01.11 Pajak Parkir - LO

Realisasi pajak parkir-LO tahun 2023 sebesar Rp107.568.000,00 bersumber dari realisasi pajak parkir-LRA sebesar Rp107.568.000,00.

7.1.01.14 Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan - LO

Realisasi pajak mineral bukan logam dan batuan-LO tahun 2023 sebesar Rp2.127.578.630,00 bersumber dari realisasi pajak mineral bukan logam dan batuan-LRA sebesar Rp2.043.627.259,00 dengan penambahan piutang tahun 2023 sebesar Rp96.012.583,00 dan pengurangan piutang tahun 2022 sebesar Rp12.061.212,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.4. 8 Realisasi Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan-LO TA 2023 dan 2022

Kode Rek	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
7.1.01.14 .04.0001	Pajak Batu Kapur-LO	349.160.537,20	204.935.696,00	144.224.841,20	70,38
7.1.01.14 .23.0001	Pajak Pasir dan Kerikil-LO	1.490.395.514,80	863.604.473,00	626.791.041,80	72,58
7.1.01.14 .37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya-LO	288.022.578,00	533.769.735,00	(245.747.157,00)	(46,04)
Jumlah		2.127.578.630,00	1.602.309.904,00	525.268.726,00	32,78

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2023

7.1.01.15 Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan – LO

Realisasi pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan-LO tahun 2023 sebesar Rp2.059.009.650,00 bersumber dari realisasi pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan-LRA sebesar Rp1.746.846.685,00 dengan penambahan piutang tahun 2023 sebesar Rp516.737.855,00 dan pengurangan piutang tahun 2022 sebesar Rp204.574.890,00.

7.1.01.16 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) – LO

Realisasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO tahun 2023 sebesar Rp2.029.270.845,00 bersumber dari realisasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LRA sebesar Rp2.029.270.845,00.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

5.1.4.1.1.2 Retribusi Daerah-LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Retribusi Daerah-LO Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Retribusi Daerah-LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.4. 9 Realisasi Retribusi Daerah-LO TA 2023 dan 2022

Kode Rek	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
7.1.02.01	Retribusi Jasa Umum-LO				
7.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan – LO	4.724.737.900,00	3.814.355.644,00	910.382.256,00	23,87
7.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan – LO	85.843.000,00	90.502.000,00	(4.659.000,00)	(5,15)
7.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum – LO	28.150.000,00	30.325.000,00	(2.175.000,00)	(7,17)
7.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha-LO				
7.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – LO	406.048.000,00	193.745.000,00	212.303.000,00	109,58
7.1.02.02.02	Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan – LO	118.672.500,00	121.628.500,00	(2.956.000,00)	(2,43)
7.1.02.02.03	Retribusi Tempat Pelelangan- LO	139.521.250,00	110.950.125,00	28.571.125,00	25,75
7.1.02.02.04	Retribusi Terminal – LO	0,00	3.450.000,00	(3.450.000,00)	(100,00)
7.1.02.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir – LO	56.200.000,00	52.100.000,00	4.100.000,00	7,87
7.1.02.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan – LO	35.190.000,00	39.865.000,00	(4.675.000,00)	(11,73)
7.1.02.02.08	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan – LO	211.658.470,00	246.521.501,00	(34.863.031,00)	(14,14)
7.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga- LO	172.040.000,00	98.500.000,00	73.540.000,00	74,66
7.1.02.02.10	Retribusi Penyeberangan di Air- LO	0,00	37.075.000,00	(37.075.000,00)	(100,00)
7.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu-LO				
7.1.02.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan – LO	148.125.000,00	110.293.000,00	37.832.000,00	34,30
7.1.02.03.04	Retribusi Izin Usaha Perikanan – LO	2.000.000,00	7.000.000,00	(5.000.000,00)	(71,43)
	Jumlah	6.128.186.120,00	4.956.310.770,00	1.171.875.350,00	23,64

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2023

Perubahan nilai Retribusi Daerah-LO Tahun 2023 dari Tahun 2022 disebabkan hal-hal berikut:



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

1. Terjadinya kenaikan tarif sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Hal ini berdampak pada peningkatan penerimaan pendapatan dari sektor kesehatan. Kenaikan tarif ini disebabkan oleh peningkatan biaya layanan kesehatan atau penyesuaian kebijakan terkait peningkatan kualitas layanan kesehatan;
2. Banyaknya pembayaran retribusi parkir dari pihak yang wajib membayar karena adanya peningkatan tarif parkir menjadi salah satu faktor penyebab meningkatnya penerimaan pendapatan pada sektor perhubungan.

Perbandingan pendapatan retribusi daerah LO dan LRA tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 5.1.4. 10 Perbandingan Pendapatan Retribusi Daerah LO dan LRA Tahun 2023

Kode Rek	Uraian	LO	LRA	Selisih
7.1.02.01	Retribusi Jasa Umum-LO			
7.1.02.01 .01	Retribusi Pelayanan Kesehatan – LO	4.724.737.900,00	4.724.737.900,00	0,00
7.1.02.01 .02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan – LO	85.843.000,00	85.843.000,00	0,00
7.1.02.01 .04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum – LO	28.150.000,00	28.150.000,00	0,00
7.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha-LO			
7.1.02.02 .01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – LO	406.048.000,00	406.048.000,00	0,00
7.1.02.02 .02	Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan – LO	118.672.500,00	118.672.500,00	0,00
7.1.02.02 .03	Retribusi Tempat Pelelangan- LO	139.521.250,00	139.521.250,00	0,00
7.1.02.02 .04	Retribusi Terminal – LO	0,00	0,00	0,00
7.1.02.02 .05	Retribusi Tempat Khusus Parkir – LO	56.200.000,00	56.200.000,00	0,00
7.1.02.02 .07	Retribusi Rumah Potong Hewan – LO	35.190.000,00	35.190.000,00	0,00
7.1.02.02 .08	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan – LO	211.658.470,00	211.658.470,00	0,00
7.1.02.02 .09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga- LO	172.040.000,00	172.040.000,00	0,00
7.1.02.02 .10	Retribusi Penyeberangan di Air- LO	0,00	0,00	0,00
7.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu-LO			
7.1.02.03 .01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan – LO	148.125.000,00	148.125.000,00	0,00
7.1.02.03 .04	Retribusi Izin Usaha Perikanan – LO	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
	Jumlah	6.128.186.120,00	6.128.186.120,00	0,00

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2023

Pengakuan Retribusi Daerah dalam LO Tahun 2023 sama dengan saldo Retribusi Daerah dalam LRA Tahun 2023 sebesar Rp6.128.186.120,00. Rincian Retribusi Daerah-LO, diuraikan sebagai berikut:

7.1.02.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan - LO

Realisasi retribusi pelayanan kesehatan-LO tahun 2023 sebesar Rp4.724.737.900,00 bersumber dari realisasi retribusi pelayanan kesehatan-LRA sebesar Rp4.724.737.900,00.



7.1.02.01.02 Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan – LO

Realisasi retribusi pelayanan persampahan/kebersihan-LO tahun 2023 sebesar Rp85.843.000,00 bersumber dari realisasi retribusi pelayanan persampahan/kebersihan-LRA sebesar Rp85.843.000,00.

7.1.02.01.04 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum – LO

Realisasi retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum-LO tahun 2023 sebesar Rp28.150.000,00 bersumber dari realisasi retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum-LRA sebesar Rp28.150.000,00.

7.1.02.02.01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – LO

Realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah-LO tahun 2023 sebesar Rp406.048.000,00 bersumber dari realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah-LRA sebesar Rp406.048.000,00.

7.1.02.02.02 Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan – LO

Realisasi retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan-LO tahun 2023 sebesar Rp118.672.500,00 bersumber dari realisasi retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan-LRA sebesar Rp118.672.500,00.

7.1.02.02.03 Retribusi Tempat Pelelangan- LO

Realisasi retribusi tempat pelelangan-LO tahun 2023 sebesar Rp139.521.250,00 bersumber dari realisasi retribusi tempat pelelangan-LRA sebesar Rp139.521.250,00.

7.1.02.02.04 Retribusi Terminal – LO

Retribusi terminal-LO tidak terealisasi pada tahun 2023.

7.1.02.02.05 Retribusi Tempat Khusus Parkir – LO

Realisasi retribusi tempat khusus parkir-LO tahun 2023 sebesar Rp56.200.000,00 bersumber dari realisasi retribusi tempat khusus parkir-LRA sebesar Rp56.200.000,00.

7.1.02.02.07 Retribusi Rumah Potong Hewan – LO

Realisasi retribusi rumah potong hewan-LO tahun 2023 sebesar Rp35.190.000,00 bersumber dari realisasi retribusi rumah potong hewan-LRA sebesar Rp35.190.000,00.

7.1.02.02.08 Retribusi Pelayanan Kepelabuhan – LO

Realisasi retribusi pelayanan kepelabuhan-LO tahun 2023 sebesar Rp211.658.470,00 bersumber dari realisasi retribusi pelayanan kepelabuhan-LRA sebesar Rp211.658.470,00.

7.1.02.02.09 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga- LO

Realisasi retribusi tempat rekreasi dan olahraga-LO tahun 2023 sebesar Rp172.040.000,00 bersumber dari realisasi retribusi tempat rekreasi dan olahraga-LRA sebesar Rp172.040.000,00.

7.1.02.02.10 Retribusi Penyeberangan di Air – LO

Retribusi penyeberangan di air-LO tidak terealisasi pada tahun 2023.



7.1.02.03.01 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan – LO

Realisasi retribusi izin mendirikan bangunan-LO tahun 2023 sebesar Rp148.125.000,00 bersumber dari realisasi retribusi izin mendirikan bangunan-LRA sebesar Rp148.125.000,00.

7.1.02.03.04 Retribusi Izin Usaha Perikanan – LO

Realisasi retribusi izin usaha perikanan-LO tahun 2023 sebesar Rp2.000.000,00 bersumber dari realisasi retribusi izin usaha perikanan-LRA sebesar Rp2.000.000,00.

5.1.4.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk pos Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO Tahun 2023 dan 2022 yaitu saldo Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 5.1.4. 11 Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO
TA 2023 dan 2022**

Kode Rek	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
7.1.03.01.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN-LO	4.165.684.360,00	2.888.444.941,71	1.277.239.418,29	44,22
Jumlah		4.165.684.360,00	2.888.444.941,71	1.277.239.418,29	44,22

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2023

Perubahan nilai Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO Tahun 2023 dari Tahun 2022 disebabkan adanya peningkatan investasi permanen dalam penyertaan modal pada PT Bank Pembangunan Sulawesi Tengah pada tahun 2023, sehingga menyebabkan pembagian deviden meningkat secara signifikan. Deviden merupakan bagian dari laba bersih yang dibagikan kepada pemegang saham, ketika laba meningkat pembagian deviden pun menjadi lebih besar.

Pengakuan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam LO Tahun 2023 sama dengan saldo Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam LRA Tahun 2023 sebesar Rp4.165.684.360,00.

5.1.4.1.1.4 Lain-Lain PAD yang Sah-LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Lain-lain PAD Yang Sah-LO Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Lain-lain PAD Yang Sah-LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

Tabel 5.1.4. 12 Realisasi Lain-Lain PAD yang Sah-LO TA 2023 dan 2022

Kode Rek	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
7.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan – LO	18.475.000,00	27.820.000,00	(9.345.000,00)	(33,59)
7.1.04.04	Hasil Kerja Sama Daerah – LO	18.100.000,00	20.285.000,00	(2.185.000,00)	(10,77)
7.1.04.05	Jasa Giro – LO	206.450.372,96	1.128.565.942,04	(922.115.569,08)	(81,71)
7.1.04.07	Pendapatan Bunga – LO	1.930.204.611,91	751.617.289,89	1.178.587.322,02	156,81
7.1.04.13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah - LO	0,00	5.648.000,00	(5.648.000,00)	(100,00)
7.1.04.15	Pendapatan Dari Pengembalian – LO	6.685.748.463,02	647.839.646,70	6.037.908.816,32	932,01
7.1.04.16	Pendapatan dari BLUD – LO	60.373.045.264,85	59.990.431.125,40	382.614.139,45	0,64
7.1.04.18	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)– LO	9.022.354.578,00	7.681.491.833,00	1.340.862.745,00	17,46
Jumlah		78.254.378.290,74	70.253.698.837,03	8.000.679.453,71	11,39

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2023

Perubahan nilai Lain-lain PAD Yang Sah-LO Tahun 2023 dari Tahun 2022 disebabkan hal-hal berikut:

1. Belum adanya Peraturan Daerah terkait pengenaan pungutan terhadap hasil kerja sama daerah untuk lalu lintas hewan ternak pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
2. Adanya pendapatan bunga yang bersumber dari Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF) pada Bank Indonesia tahun 2023.

Perbandingan lain-lain PAD yang sah LO dan LRA tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 5.1.4. 13 Perbandingan Lain-Lain PAD yang Sah LO dan LRA Tahun 2023

Kode Rek	Uraian	LO	LRA	Selisih
7.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan – LO	18.475.000,00	18.475.000,00	0,00
7.1.04.04	Hasil Kerja Sama Daerah – LO	18.100.000,00	18.100.000,00	0,00
7.1.04.05	Jasa Giro – LO	206.450.372,96	206.450.372,96	0,00
7.1.04.07	Pendapatan Bunga – LO	1.930.204.611,91	1.930.204.611,91	0,00
7.1.04.15	Pendapatan Dari Pengembalian – LO	6.685.748.463,02	5.269.889.969,19	(1.415.858.493,83)
7.1.04.16	Pendapatan dari BLUD – LO	60.373.045.264,85	67.280.179.423,85	6.907.134.159,00
7.1.04.18	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)– LO	9.022.354.578,00	9.022.354.578,00	0,00
Jumlah		78.254.378.290,74	83.745.653.955,91	5.491.275.665,17

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2023



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

Pengakuan Lain-lain PAD Yang Sah dalam LO Tahun 2023 *lebih kecil* dari saldo Lain-lain PAD Yang Sah dalam LRA TA 2023 sebesar Rp5.491.275.665,17 (Rp78.254.378.290,74-Rp83.745.653.955,91). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Lain-lain PAD Yang Sah dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Selisih LO-LRA		Rp	5.491.275.665,17
Penambah :			
1. Penambahan Tuntutan Ganti Rugi	Rp	4.304.413.235,60	
2. Penambahan Piutang BLUD	Rp	5.700.492.188,00	
	Jumlah Penambah	Rp	10.004.905.423,60
Pengurang :			
1. Penyesuaian Tuntutan Ganti Rugi	Rp	2.837.890.638,00	
2. Penyesuaian Tuntutan Perbendaharaan- Tuntutan Ganti Rugi	Rp	50.664.103,77	
3. Pelunasan Piutang BLUD	Rp	12.607.626.347,00	
	Jumlah Pengurang	Rp	15.496.181.088,77
Jumlah Penjelasan Selisih		Rp	5.491.275.665,17

7.1.04.03 Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan – LO

Realisasi hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan-LO tahun 2023 sebesar Rp18.475.000,00 bersumber dari realisasi hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan-LRA sebesar Rp18.475.000,00.

7.1.04.04 Hasil Kerja Sama Daerah – LO

Realisasi hasil kerja sama daerah-LO tahun 2023 sebesar Rp18.100.000,00 bersumber dari realisasi hasil kerja sama daerah-LRA sebesar Rp18.100.000,00.

7.1.04.05 Jasa Giro – LO

Realisasi hasil kerja sama daerah-LO tahun 2023 sebesar Rp206.450.372,96 bersumber dari realisasi hasil kerja sama daerah-LRA sebesar Rp206.450.372,96.

7.1.04.07 Pendapatan Bunga – LO

Realisasi pendapatan bunga-LO tahun 2023 sebesar Rp1.930.204.611,91 bersumber dari realisasi pendapatan bunga-LRA sebesar Rp1.930.204.611,91.

7.1.04.13 Pendapatan Denda Retribusi Daerah – LO

Pendapatan denda retribusi daerah-LO tidak terealisasi pada tahun 2023.

7.1.04.15 Pendapatan dari Pengembalian– LO

Realisasi pendapatan dari pengembalian-LO tahun 2023 sebesar Rp6.685.748.463,02 bersumber dari realisasi pendapatan dari pengembalian-LRA sebesar Rp5.269.889.969,19 serta pengurangan pendapatan atas pengembalian temuan tahun sebelumnya sebesar Rp2.888.554.741,77 dan penyesuaian atas penerimaan berdasarkan LHP BPK sebesar Rp4.304.413.235,60.



7.1.04.16 Pendapatan BLUD – LO

Realisasi pendapatan BLUD-LO tahun 2023 sebesar Rp60.373.045.264,85 bersumber dari realisasi pendapatan BLUD-LRA sebesar Rp67.280.179.423,85 dengan penambahan piutang tahun 2023 sebesar Rp5.700.492.188,00 serta pengurangan piutang tahun 2022 sebesar Rp12.607.626.347,00.

7.1.04.18 Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) – LO

Realisasi pendapatan dana kapitasi jaminan Kesehatan nasional (JKN) pada fasilitas Kesehatan tingkat pertama (FKTP)-LO tahun 2023 sebesar Rp9.022.354.578,00 bersumber dari realisasi pendapatan dana kapitasi jaminan Kesehatan nasional (JKN) pada fasilitas Kesehatan tingkat pertama (FKTP)-LRA sebesar Rp9.022.354.578,00.

5.1.4.1.2 Pendapatan Transfer-LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Transfer-LO Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Transfer-LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.4. 14 Realisasi Pendapatan Transfer-LO TA 2023 dan 2022

Kode Rek	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
7.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.019.518.846.443,00	840.878.733.783,00	178.640.112.660,00	21,24
7.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO	41.208.857.179,00	40.141.191.079,00	1.067.666.100,00	2,66
Jumlah		1.060.727.703.622,00	881.019.924.862,00	179.707.778.760,00	20,40

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2023

5.1.4.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.4. 15 Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO TA 2023 dan 2022

Kode Rek	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
7.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) – LO	194.592.200.500,00	83.227.223.214,00	111.364.977.286,00	133,81
7.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) – LO	566.048.075.000,00	544.410.196.000,00	21.637.879.000,00	3,97
7.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana	105.409.293.801,00	118.507.522.025,00	(13.098.228.224,00)	(11,05)



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

Kode Rek	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
	Alokasi Khusus (DAK) Fisik- LO				
7.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO	103.848.908.142,00	89.474.282.544,00	14.374.625.598,00	16,07
7.2.01.02.01	DID-LO	49.620.369.000,00	5.259.510.000,00	44.360.859.000,00	843,44
Jumlah		1.019.518.846.443,00	840.878.733.783,00	178.640.112.660,00	21,24

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2023

Perubahan nilai Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO Tahun 2023 dari Tahun 2022 disebabkan hal-hal berikut:

1. Adanya hasil perhitungan tambahan dana desa untuk setiap desa Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan PMK 98 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;
2. Adanya tambahan Dana Insentif Daerah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diberikan kepada Pemerintah Daerah atas capaian/penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 10 kali berturut-turut atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Perbandingan pendapatan transfer pemerintah pusat LO dan LRA tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 5.1.4. 16 Perbandingan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat LO dan LRA Tahun 2023

Kode Rek	Uraian	LO	LRA	Selisih
7.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) – LO	194.592.200.500,00	122.838.930.500,00	(71.753.270.000,00)
7.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) – LO	566.048.075.000,00	566.048.075.000,00	0,00
7.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik- LO	105.409.293.801,00	105.409.293.801,00	0,00
7.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik- LO	103.848.908.142,00	103.848.908.142,00	0,00
7.2.01.02.01	DID-LO	49.620.369.000,00	49.620.369.000,00	0,00
7.2.01.05.01	Dana Desa-LO	0,00	114.710.250.000,00	114.710.250.000,00
Jumlah		1.019.518.846.443,00	1.062.475.826.443,00	42.956.980.000,00

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2023

Pengakuan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dalam LO Tahun 2023 *lebih kecil* dari saldo Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dalam LRA TA 2023 sebesar Rp42.956.980.000,00 (Rp1.019.518.846.443,00–Rp1.062.475.826.443,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Selisih LO-LRA	Rp	42.956.980.000,00
Penambah :		
1. Penyesuaian Dana Transfer Treasury Deposit Facility(TDF)	Rp	71.752.025.000,00
2. Piutang DBH CHT	Rp	1.245.000,00
Jumlah Penambah	Rp	71.753.270.000,00
Pengurang :		
1. Penerapan Bultek 21 (Dana Desa (non provinsi) tidak diakui dalam LO)	Rp	114.710.250.000,00
Jumlah Pengurang	Rp	114.710.250.000,00
Jumlah Penjelasan Selisih	Rp	42.956.980.000,00

7.2.01.01.01 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) - LO

Realisasi dana transfer umum-dana bagi hasil (DBH)-LO tahun 2023 sebesar Rp194.592.200.500,00 bersumber dari realisasi dana transfer umum-dana bagi hasil (DBH)-LRA sebesar Rp122.838.930.500,00 dan penambahan penyesuaian dana transfer treasury deposit facility (TDF) tahun 2023 sebesar Rp71.752.025.000,00 dan Piutang DBH CHT sebesar Rp1.250.000,00.

Rincian realisasi dana transfer umum-dana bagi hasil (DBH)-LO tahun 2023 dan tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 5.1.4. 17 Realisasi Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) TA 2023 dan 2022

Kode Rek	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
7.2.01.01.01.0001	DBH PBB – LO	3.373.286.000,00	6.704.069.157,00	(3.330.783.157,00)	(49,68)
7.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21 – LO	4.084.325.000,00	3.695.248.975,00	389.076.025,00	10,53
7.2.01.01.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN – LO	93.055.000,00	0,00	93.055.000,00	100,00
7.2.01.01.01.0004	DBH CHT– LO	17.173.500,00	14.573.782,00	2.599.718,00	17,84
7.2.01.01.01.0005	DBH SDA Minyak Bumi-LO	14.304.742.000,00	0,00	14.304.742.000,00	100,00
7.2.01.01.01.0006	DBH SDA Gas Bumi-LO	84.912.130.000,00	31.211.993.569,00	53.700.136.431,00	172,05
7.2.01.01.01.0008	DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent-LO	229.727.000,00	39.221.989.772,00	(38.992.262.772,00)	(99,41)
7.2.01.01.01.0009	DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty-LO	78.929.093.000,00	0,00	78.929.093.000,00	100,00
7.2.01.01.01.0010	DBH SDA Kehutanan-PSDH-LO	3.541.413.000,00	209.283.748,00	3.332.129.252,00	1.592,16
7.2.01.01.01.0013	DBH SDA Perikanan– LO	5.107.256.000,00	2.170.064.211,00	2.937.191.789,00	135,35
Jumlah		194.592.200.500,00	83.227.223.214,00	111.364.977.286,00	133,81

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2023



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

7.2.01.01.02 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) – LO

Realisasi dana transfer umum-dana alokasi umum (DAU)-LO tahun 2023 sebesar Rp566.048.075.000,00 bersumber dari realisasi dana transfer umum-dana alokasi umum (DAU)-LRA sebesar Rp566.048.075.000,00.

Rincian realisasi dana transfer umum-dana alokasi umum (DAU)-LO tahun 2023 dan tahun 2022 sebagai berikut:

**Tabel 5.1.4. 18 Realisasi Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)
TA 2023 dan 2022**

Kode Rek	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
7.2.01.01.02.0001	DAU-LO	529.344.515.000,00	544.410.196.000,00	(15.065.681.000,00)	(2,77)
7.2.01.01.02.0002	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan-LO	2.400.000.000,00	0,00	2.400.000.000,00	100,00
7.2.01.01.02.0004	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja-LO	34.303.560.000,00	0,00	34.303.560.000,00	100,00
Jumlah		566.048.075.000,00	544.410.196.000,00	21.637.879.000,00	3,97

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2023

7.2.01.01.03 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik – LO

Realisasi dana transfer khusus-dana alokasi khusus (DAK) fisik-LO tahun 2023 sebesar Rp105.409.293.801,00 bersumber dari realisasi dana transfer khusus-dana alokasi khusus (DAK) fisik-LRA sebesar Rp105.409.293.801,00.

Rincian realisasi dana transfer khusus-dana alokasi khusus (DAK) fisik-LO tahun 2023 dan tahun 2022 sebagai berikut:

**Tabel 5.1.4. 19 Realisasi Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO
TA 2023 dan 2022**

Kode Rek	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
7.2.01.01.03.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD-LO	353.118.150,00	961.576.500,00	(608.458.350,00)	(63,28)
7.2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD-LO	10.971.986.800,00	19.483.608.600,00	(8.511.621.800,00)	(43,69)
7.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP-LO	8.634.296.300,00	13.437.226.000,00	(4.802.929.700,00)	(35,74)
7.2.01.01.03.0011	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah-LO	0,00	10.083.410.000,00	(10.083.410.000,00)	(100,00)
7.2.01.01.	DAK Fisik-Bidang	0,00	4.852.981.124,00	(4.852.981.124,00)	(100,00)



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode Rek	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
03.0015	Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian-LO				
7.2.01.01.03.0016	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB-LO	0,00	19.054.614.329,00	(19.054.614.329,00)	(100,00)
7.2.01.01.03.0018	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat-LO	853.600.000,00	664.634.555,00	188.965.445,00	28,43
7.2.01.01.03.0025	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB-LO	217.757.000,00	2.657.304.002,00	(2.439.547.002,00)	(91,81)
7.2.01.01.03.0026	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan Stunting (KB) -LO	0,00	718.722.200,00	(718.722.200,00)	(100,00)
7.2.01.01.03.0028	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Afirmasi-Penyediaan Rumah Swadaya-LO	0,00	2.821.000.000,00	(2.821.000.000,00)	(100,00)
7.2.01.01.03.0031	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian-LO	9.300.000.000,00	0,00	9.300.000.000,00	100,00
7.2.01.01.03.0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan-LO	37.435.002.000,00	28.356.152.621,00	9.078.849.379,00	32,02
7.2.01.01.03.0039	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan-LO	0,00	7.626.782.000,00	(7.626.782.000,00)	(100,00)
7.2.01.01.03.0042	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan-LO	0,00	5.083.429.000,00	(5.083.429.000,00)	(100,00)
7.2.01.01.03.0043	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan-LO	2.307.835.000,00	0,00	2.307.835.000,00	100,00
7.2.01.01.03.0052	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan-LO	6.318.093.491,00	0,00	3.612.012.397,00	133,48
7.2.01.01.03.0054	DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan-Reguler -LO	10.558.868.000,00	2.706.081.094,00	10.558.868.000,00	100,00
7.2.01.01.03.0063	DAK Fisik-Bidang Transportasi Perairan-Penugasan-LO	18.458.737.060,00		18.458.737.060,00	100,00
Jumlah		105.409.293.801,00	118.507.522.025,00	(13.098.228.224,00)	(11,05)

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2023

7.2.01.01.04 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik – LO

Realisasi dana transfer khusus-dana alokasi khusus (DAK) non fisik-LO tahun 2023 sebesar Rp103.848.908.142,00 bersumber dari realisasi dana transfer khusus-dana alokasi khusus (DAK) non fisik-LRA sebesar Rp103.848.908.142,00.

Rincian realisasi dana transfer khusus-dana alokasi khusus (DAK) non fisik-LO tahun 2023 dan tahun 2022 sebagai berikut:



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

**Tabel 5.1.4. 20 Realisasi Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO
TA 2023 dan 2022**

Kode Rek	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
7.2.01.01.04 .0001	DAK Non Fisik- BOS Reguler-LO	25.330.800.478,00	24.436.923.896,00	893.876.582,00	3,66
7.2.01.01.03 .0004	DAK Non Fisik- TPG PNSD-LO	30.693.413.400,00	28.287.110.625,00	2.406.302.775,00	8,51
7.2.01.01.03 .0005	DAK Non Fisik- Tamsil Guru PNSD-LO	2.272.750.000,00	1.573.500.000,00	699.250.000,00	44,44
7.2.01.01.03 .0006	DAK Non Fisik- TKG PNSD-LO	14.535.195.000,00	11.212.784.000,00	3.322.411.000,00	29,63
7.2.01.01.03 .0007	DAK Non Fisik- BOP PAUD-LO	3.579.315.000,00	3.504.286.000,00	75.029.000,00	2,14
7.2.01.01.03 .0008	DAK Non Fisik- BOP Pendidikan Kesetaraan-LO	992.600.000,00	535.500.000,00	457.100.000,00	85,36
7.2.01.01.03 .0011	DAK Non Fisik- BOKKB-BOK-LO	21.706.372.174,00	15.190.183.439,00	6.516.188.735,00	42,90
7.2.01.01.03 .0015	DAK Non Fisik- BOKKB-BOKB- LO	3.780.744.175,00	3.307.741.709,00	473.002.466,00	14,30
7.2.01.01.03 .0020	DAK Non Fisik- Fasilitasi Penanaman Modal-LO	459.033.750,00	341.789.875,00	117.243.875,00	34,30
7.2.01.01.03 .0022	DAK NonFisik- Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	304.497.850,00	451.800.000,00	(147.302.150,00)	(32,60)
7.2.01.01.03 .0023	DAK NonFisik- Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	194.186.315,00	632.663.000,00	(438.476.685,00)	(69,31)
Jumlah		103.848.908.142,00	89.474.282.544,00	14.374.625.598,00	16,07

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2023

7.2.01.02.01 Dana Insentif Daerah (DID) – LO

Realisasi DID-LO tahun 2023 sebesar Rp49.620.369.000,00 mengalami peningkatan sebesar Rp44.360.859.000,00 atau 843,44% dibandingkan realisasi DID-LO tahun 2022 sebesar Rp5.259.510.000,00.

5.1.4.1.2.2 Pendapatan Transfer Antar Daerah -LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Transfer Antar Daerah-LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.4. 21 Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO TA 2023 dan 2022

Kode Rek	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
7.2.02. 01	Pendapatan Bagi Hasil – LO	38.528.857.179,00	36.141.191.079,00	2.387.666.100,00	6,61
7.2.02. 02	Bantuan Keuangan – LO	2.680.000.000,00	4.000.000.000,00	(1.320.000.000,00)	(33,00)
Jumlah		41.208.857.179,00	40.141.191.079,00	1.067.666.100,00	2,66

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2023



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

Perubahan nilai Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO Tahun 2023 dari Tahun 2022 disebabkan hal-hal berikut:

1. Adanya peningkatan pendapatan bagi hasil pajak oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, disebabkan adanya pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor yang meningkat setiap tahun;
2. Adanya Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada tahun 2022 yang menyebabkan peningkatan penerimaan Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi pada tahun tersebut.

Perbandingan pendapatan transfer antar daerah LO dan LRA tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 5.1.4. 22 Perbandingan Pendapatan Transfer Antar Daerah LO dan LRA Tahun 2023

Kode Rek	Uraian	LO	LRA	Selisih
7.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil – LO	38.528.857.179,00	38.339.370.178,00	(189.487.001,00)
7.2.02.02	Bantuan Keuangan – LO	2.680.000.000,00	2.680.000.000,00	0,00
Jumlah		41.208.857.179,00	41.019.370.178,00	(189.487.001,00)

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2023

Pengakuan Pendapatan Transfer Antar Daerah dalam LO Tahun 2023 *lebih besar* dari saldo Pendapatan Transfer Antar Daerah dalam LRA TA 2023 sebesar Rp189.487.001,00 (Rp41.208.857.179,00–Rp41.019.370.178,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Pendapatan Transfer Antar Daerah dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Selisih LO-LRA		Rp	189.487.001,00
Penambah :			
1. Penambahan Piutang Transfer Antar Daerah	Rp	5.429.576.183,00	
Jumlah Penambah	Rp	5.429.576.183,00	
Pengurang :			
1. Penyesuaian Piutang Transfer Antar Daerah	Rp	5.240.089.182,00	
Jumlah Pengurang	Rp	5.240.089.182,00	
Jumlah Penjelasan Selisih	Rp		189.487.001,00

7.2.02.01 Pendapatan Bagi Hasil – LO

Realisasi pendapatan bagi hasil-LO tahun 2023 sebesar Rp38.528.857.179,00 bersumber dari realisasi pendapatan bagi hasil pajak-LRA sebesar Rp38.339.370.178,00 dengan penambahan piutang tahun 2023 sebesar Rp5.429.576.183,00 serta pengurangan piutang tahun 2022 sebesar Rp5.240.089.182,00.

Rincian realisasi Pendapatan bagi hasil-LO tahun 2023 dan tahun 2022 sebagai berikut:



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

Tabel 5.1.4. 23 Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO TA 2023 dan 2022

Kode Rek	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
7.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor-LO	5.683.453.286,00	5.478.406.093,00	205.047.193,00	3,74
7.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-LO	6.242.808.926,00	5.940.890.667,00	301.918.259,00	5,08
7.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor-LO	15.722.729.448,00	14.392.494.365,00	1.330.235.083,00	9,24
7.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan-LO	819.292.681,00	120.167.590,00	699.125.091,00	581,79
7.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-LO	10.060.572.838,00	10.209.232.364,00	(148.659.526,00)	(1,46)
Jumlah		38.528.857.179,00	36.141.191.079,00	2.387.666.100,00	6,61

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2023

7.2.02.02 Bantuan Keuangan – LO

Realisasi bantuan keuangan-LO tahun 2023 sebesar Rp2.680.000.000,00 bersumber dari realisasi pendapatan bantuan keuangan khusus dari pemerintah provinsi-LRA sebesar Rp2.680.000.000,00.

5.1.4.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Lain-Lain Pendapatan yang Sah-LO Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Lain-Lain Pendapatan yang Sah-LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.4. 24 Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO TA 2023 dan 2022

Kode Rek	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
7.3.01	Pendapatan Hibah-LO	17.209.986.103,00	24.850.038.684,79	(7.640.052.581,79)	(30,74)
Jumlah		17.209.986.103,00	24.850.038.684,79	(7.640.052.581,79)	(30,74)

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2023

5.1.4.1.3.1 Pendapatan Hibah -LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Hibah-LO Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Hibah-LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

Tabel 5.1.4. 25 Realisasi Pendapatan Hibah-LO TA 2023 dan 2022

Kode Rek	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
7.3.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat – LO	16.231.386.060,00	24.242.973.379,79	(8.011.587.319,79)	(33,05)
7.3.01.02	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya – LO	4.914.400,00	593.908.811,00	(588.994.411,00)	(99,17)
7.3.01.03	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat-LO	150.000.000,00	13.156.494,00	136.843.506,00	1.040,12
7.3.01.04	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri-LO	823.685.643,00	0,00	823.685.643,00	100,00
Jumlah		17.209.986.103,00	24.850.038.684,79	(7.640.052.581,79)	(30,74)

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2023

Perubahan nilai Pendapatan Hibah-LO Tahun 2023 dari Tahun 2022 disebabkan hal-hal berikut:

1. Adanya tambahan pendapatan hibah sanitasi dari Pemerintah Pusat yang merupakan kontribusi dalam mendukung program sanitasi tingkat daerah;
2. Terdapat hibah dari pemerintah pusat berupa aset tetap peralatan dan mesin, gedung dan bangunan serta jalan, jaringan dan irigasi pada tahun 2022.

Perbandingan pendapatan hibah LO dan LRA tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 5.1.4. 26 Perbandingan Pendapatan Hibah LO dan LRA Tahun 2023

Kode Rek	Uraian	LO	LRA	Selisih
7.3.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat – LO	16.231.386.060,00	2.693.331.842,00	(13.538.054.218,00)
7.3.01.02	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya – LO	4.914.400,00	0,00	(4.914.400,00)
7.3.01.03	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat-LO	150.000.000,00	0,00	(150.000.000,00)
7.3.01.04	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri-LO	823.685.643,00	0,00	(823.685.643,00)
Jumlah		17.209.986.103,00	2.693.331.842,00	(14.516.654.261,00)

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2023

Pengakuan Pendapatan Hibah dalam LO Tahun 2023 lebih besar dari saldo Pendapatan Hibah dalam LRA TA 2023 sebesar Rp14.516.654.261,00 (Rp17.209.986.103,00–Rp2.693.331.842,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Pendapatan Hibah dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

Selisih LO-LRA		Rp	14.516.654.261,00
Penambah :			
1. Penambahan Hibah Aset Tetap dari KEMENDES	Rp	974.000.000,00	
2. Penambahan Hibah Aset Tetap dari KEMENTERIAN PUPR	Rp	6.367.943.016,00	
3. Penambahan Hibah Aset Tetap dari KEMENKES RI	Rp	4.577.563.067,00	
4. Penambahan Hibah Aset Tetap dari Perpustakaan Nasional RI	Rp	262.737.980,00	
5. Penambahan Hibah Aset Tetap dari Kelompok Nelayan	Rp	150.000.000,00	
6. Penambahan Hibah Aset Tetap dari BNN	Rp	1.341.312.000,00	
7. Penambahan Hibah Persediaan dari Dinkes Provinsi	Rp	4.914.400,00	
8. Penambahan Hibah Persediaan dari KEMENKES	Rp	14.498.155,00	
9. Penambahan Hibah dana CSR dari PT Bank Sulteng	Rp	823.685.643,00	
Jumlah Penambah	Rp	14.516.654.261,00	
Pengurang :			
1. -	Rp	0,00	
Jumlah Pengurang	Rp	0,00	
Jumlah Penjelasan Selisih		Rp	14.516.654.261,00

5.1.4.2 Beban

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Beban yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.4. 27 Realisasi Beban TA 2023 dan 2022

Kode Rek	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
8.1	Beban Operasi	767.767.540.687,44	733.954.867.151,23	33.812.673.536,21	4,61
8.1	Beban Penyusutan dan Amortisasi	136.050.127.214,00	140.434.817.440,83	(4.384.690.226,83)	(3,12)
8.2	Beban Tidak Terduga	23.000.000,00	902.699.886,00	(879.699.886,00)	(97,45)
8.3	Beban Transfer	69.793.644.200,00	61.010.000.000,00	8.783.644.200,00	14,40
	Jumlah	973.634.312.101,44	936.302.384.478,06	37.331.927.623,38	3,99

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2023

5.1.4.2.1 Beban Operasi

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Operasi Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Beban Operasi yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:



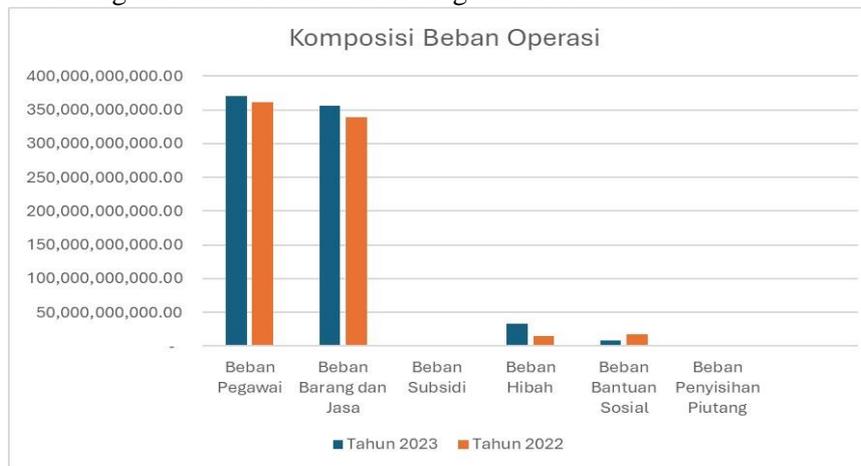
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

Tabel 5.1.4. 28 Realisasi Beban Operasi TA 2023 dan 2022

Kode Rek	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
8.1.01	Beban Pegawai	369.731.126.416,00	361.474.984.814,00	8.256.141.602,00	2,28
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	356.036.389.620,22	339.316.918.470,10	16.719.471.150,12	4,93
8.1.04	Beban Subsidi	550.000.000,00	639.110.500,00	(89.110.500,00)	(13,94)
8.1.05	Beban Hibah	33.380.510.030,00	15.185.239.825,00	18.195.270.205,00	119,82
8.1.06	Beban Bantuan Sosial	7.736.111.206,00	17.058.859.400,00	(9.322.748.194,00)	(54,65)
8.1.07	Beban Penyisihan Piutang	333.403.415,22	279.754.142,13	53.649.273,09	19,18
	Jumlah	767.767.540.687,44	733.954.867.151,23	33.812.673.536,21	4,61

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2023

Komposisi realisasi Beban Operasi Tahun 2023 pada Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una digambarkan dalam bentuk diagram di bawah ini.



Grafik 5. 3 Komposisi Beban Operasi Tahun 2023 dan 2022

5.1.4.2.1.1 Beban Pegawai

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Pegawai Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Beban Pegawai yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.4. 29 Realisasi Beban Pegawai TA 2023 dan 2022

Kode Rek	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
8.1.01.01	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	263.665.534.340,00	261.762.550.819,00	1.902.983.521,00	0,73
8.1.01.02	Beban Tambahan Penghasilan ASN	36.281.984.907,00	39.183.505.816,00	(2.901.520.909,00)	(7,40)
8.1.01.03	Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	53.284.972.112,00	49.874.520.900,00	3.410.451.212,00	6,84
8.1.01.04	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	9.923.863.864,00	9.890.599.399,00	33.264.465,00	0,34
8.1.01.	Beban Gaji dan	162.711.680,00	162.407.880,00	303.800,00	0,19



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

Kode Rek	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
05	Tunjangan KDH/WKDH				
8.1.01.06	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	582.600.000,00	601.400.000,00	(18.800.000,00)	(3,13)
8.1.01.99	Beban Pegawai BLUD	5.829.459.513,00	0,00	5.829.459.513,00	100,00
	Jumlah	369.731.126.416,00	361.474.984.814,00	8.256.141.602,00	2,28

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2023

Perubahan nilai Beban Pegawai Tahun 2023 dari Tahun 2022 disebabkan hal-hal berikut:

1. Penambahan pembayaran gaji untuk ASN PPPK pada tahun 2023;
2. Perubahan perhitungan TPP pada beberapa perangkat daerah meliputi Sekretariat Daerah, Inspektorat Daerah, dan Rumah Sakit Umum Daerah;
3. Penyesuaian terhadap regulasi pada jenis penganggaran belanja BLUD, sehingga pada tahun 2023 belanja operasi terbagi atas 2 (dua) jenis belanja yaitu belanja pegawai dan belanja barang dan jasa. Pada tahun sebelumnya belanja pegawai masih digabungkan dengan belanja barang dan jasa.

Perbandingan beban pegawai dan belanja pegawai tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 5.1.4. 30 Perbandingan Beban Pegawai dan Belanja Pegawai Tahun 2023

Kode Rek	Uraian	LO	LRA	Selisih
8.1.01.01	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	263.665.534.340,00	264.776.463.894,00	1.110.929.554,00
8.1.01.02	Beban Tambahan Penghasilan ASN	36.281.984.907,00	39.058.117.123,00	2.776.132.216,00
8.1.01.03	Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	53.284.972.112,00	53.284.972.112,00	0,00
8.1.01.04	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	9.923.863.864,00	9.923.863.864,00	0,00
8.1.01.05	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	162.711.680,00	162.711.680,00	0,00
8.1.01.06	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	582.600.000,00	582.600.000,00	0,00
8.1.01.99	Beban Pegawai BLUD	5.829.459.513,00	5.829.459.513,00	0,00
	Jumlah	369.731.126.416,00	373.618.188.186,00	3.887.061.770,00

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2023

Pengakuan Beban Pegawai dalam LO Tahun 2023 *lebih kecil* dari saldo Belanja Pegawai dalam LRA TA 2023 sebesar Rp3.887.061.770,00 (Rp369.731.126.416,00–Rp373.618.188.186,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Beban Pegawai dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

Selisih LO-LRA		Rp	3.887.061.770,00
Penambah :			
1. Penambahan Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	Rp		3.099.127,00
	Jumlah Penambah	Rp	3.099.127,00
Pengurang :			
1. Pembayaran Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	Rp		1.114.028.681,00
2. Pembayaran Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN	Rp		2.776.132.216,00
	Jumlah Pengurang	Rp	3.890.160.897,00
Jumlah Penjelasan Selisih		Rp	3.887.061.770,00

8.1.01.01 Beban Gaji dan Tunjangan ASN

Beban Gaji dan Tunjangan ASN tahun 2023 sebesar Rp263.665.534.340,00 mengalami peningkatan sebesar Rp1.902.983.521,00 atau 0,73% dari beban gaji dan tunjangan ASN tahun 2022 sebesar Rp261.762.550.819,00 yang disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.1.4. 31 Realisasi Beban Gaji dan Tunjangan ASN TA 2023 dan 2022

Kode Rek	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
8.1.01.01.01.0001	Beban Gaji Pokok PNS	198.279.055.247,00	196.443.520.644,00	1.835.534.603,00	0,93
8.1.01.01.02.0001	Beban Tunjangan Keluarga PNS	18.615.121.268,00	18.595.929.306,00	19.191.962,00	0,10
8.1.01.01.03.0001	Beban Tunjangan Jabatan PNS	6.552.132.000,00	6.959.999.850,00	(407.867.850,00)	(5,86)
8.1.01.01.04.0001	Beban Tunjangan Fungsional PNS	12.185.163.925,00	12.133.744.090,00	51.419.835,00	0,42
8.1.01.01.05.0001	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	2.953.493.939,00	2.954.103.002,00	(609.063,00)	(0,02)
8.1.01.01.06.0001	Beban Tunjangan Beras PNS	11.741.755.257,00	11.781.937.380,00	(40.182.123,00)	(0,34)
8.1.01.01.07.0001	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	551.727.829,00	464.832.148,00	86.895.681,00	18,69
8.1.01.01.08.0001	Beban Pembulatan Gaji PNS	2.984.327,00	3.071.650,00	(87.323,00)	(2,84)
8.1.01.01.09.0001	Beban luran Jaminan Kesehatan PNS	11.135.607.483,00	10.798.854.724,00	336.752.759,00	3,12
8.1.01.01.10.0001	Beban luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	410.077.242,00	404.233.698,00	5.843.544,00	1,45
8.1.01.01.11.0001	Beban luran Jaminan Kematian PNS	1.238.415.823,00	1.222.324.327,00	16.091.496,00	1,32
	Jumlah	263.665.534.340,00	261.762.550.819,00	1.902.983.521,00	0,73

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2023



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

8.1.01.02 Beban Tambahan Penghasilan ASN

Beban Tambahan Penghasilan ASN tahun 2023 sebesar Rp36.281.984.907,00 mengalami penurunan sebesar Rp2.901.520.909,00 atau 7,40% dari beban tambahan penghasilan ASN tahun 2022 sebesar Rp39.183.505.816,00 yang disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.1.4. 32 Realisasi Beban Tambahan Penghasilan ASN TA 2023 dan 2022

Kode Rek	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
8.1.01.02.01.0001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	33.006.853.177,00	35.747.393.816,00	(2.740.540.639,00)	(7,67)
8.1.01.02.04.0001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	3.275.131.730,00	3.436.112.000,00	(160.980.270,00)	(4,68)
Jumlah		36.281.984.907,00	39.183.505.816,00	(2.901.520.909,00)	(7,40)

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2023

8.1.01.03 Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN

Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN tahun 2023 sebesar Rp53.284.972.112,00 mengalami peningkatan sebesar Rp3.410.451.212,00 atau 6,84% dari beban Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN tahun 2022 sebesar Rp49.874.520.900,00 yang disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.1.4. 33 Realisasi Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN TA 2023 dan 2022

Kode Rek	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
8.1.01.03.01.0006	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	8.750.000,00	7.250.000,00	1.500.000,00	20,69
8.1.01.03.01.0007	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	76.618.750,00	65.117.000,00	11.501.750,00	17,66
8.1.01.03.01.0008	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	125.000,00	50.000,00	75.000,00	150,00
8.1.01.03.01.0009	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	20.190.000,00	18.750.000,00	1.440.000,00	7,68
8.1.01.03.01.0010	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	238.350.000,00	196.264.100,00	42.085.900,00	21,44
8.1.01.03.01.0011	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	3.970.930,00	4.000.000,00	(29.070,00)	(0,73)
8.1.01.03.01.0012	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	200.000,00		200.000,00	100,00
8.1.01.03.01.0014	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan	89.600.000,00	47.920.000,00	41.680.000,00	86,98
8.1.01.03.01.0015	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	63.985.400,00	65.750.000,00	(1.764.600,00)	(2,68)
8.1.01.03.01.	Beban Insentif bagi ASN atas	91.170.000,00	42.312.900,00	48.857.100,00	115,47



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode Rek	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
0016	Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan				
8.1.01.03.02.0002	Beban bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Persampahan/Kebersihan	4.005.000,00	4.005.000,00	0,00	0,00
8.1.01.03.02.0004	Beban bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.200.000,00	1.150.000,00	50.000,00	4,35
8.1.01.03.02.0014	Beban bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Jasa Usaha- Pemakaian Kekayaan Daerah	11.006.260,00	10.191.100,00	815.160,00	8,00
8.1.01.03.02.0016	Beban bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Jasa Usaha- Tempat Pelelangan	6.325.000,00	4.397.500,00	1.927.500,00	43,83
8.1.01.03.02.0017	Beban bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Jasa Usaha- Terminal	0,00	630.000,00	(630.000,00)	(100,00)
8.1.01.03.02.0018	Beban bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Jasa Usaha- Tempat Khusus Parkir	2.154.472,00	2.575.000,00	(420.528,00)	(16,33)
8.1.01.03.02.0020	Beban bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Jasa Usaha- Rumah Potong Hewan	0,00	1.587.300,00	(1.587.300,00)	(100,00)
8.1.01.03.02.0021	Beban bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Jasa Usaha- Pelayanan Kepelabuhan	8.240.000,00	3.639.100,00	4.600.900,00	126,43
8.1.01.03.02.0022	Beban bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Jasa Usaha- Tempat Rekreasi dan Olahraga	8.500.000,00	7.500.000,00	1.000.000,00	13,33
8.1.01.03.02.0023	Beban bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Jasa Usaha- Penyeberangan Air	0,00	1.150.000,00	(1.150.000,00)	(100,00)
8.1.01.03.02.0025	Beban bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu- Izin Mendirikan Bangunan	2.000.000,00	4.500.000,00	(2.500.000,00)	(55,56)
8.1.01.03.02.0028	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Usaha Perikanan	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
8.1.01.03.03.0001	Beban TPG PNSD	29.380.674.400,00	29.790.398.200,00	(409.723.800,00)	(1,38)
8.1.01.03.04.0001	Beban TKG PNSD	13.999.224.900,00	11.207.038.200,00	2.792.186.700,00	24,91
8.1.01.03.05.0001	Beban Tamsil Guru PNSD	2.270.490.000,00	1.464.000.000,00	806.490.000,00	55,09
8.1.01.03.07.0001	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	4.132.192.000,00	4.361.750.500,00	(229.558.500,00)	(5,26)
8.1.01.03.07.0002	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.843.852.000,00	1.752.770.000,00	91.082.000,00	5,20
8.1.01.03.07.0003	Beban Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengeadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	57.000.000,00	84.000.000,00	(27.000.000,00)	(32,14)
8.1.01.03.08.0001	Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	53.078.000,00	45.650.000,00	7.428.000,00	16,27
8.1.01.03.08.0002	Beban Jasa Pengelolaan BMD yang tidak Menghasilkan Pendapatan	911.970.000,00	680.175.000,00	231.795.000,00	34,08
	Jumlah	53.284.972.112,00	49.874.520.900,00	3.410.451.212,00	6,84

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2023



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

8.1.01.04 Beban Gaji dan Tunjangan DPRD

Beban Gaji dan Tunjangan DPRD tahun 2023 sebesar Rp9.923.863.864,00 mengalami peningkatan sebesar Rp33.264.465,00 atau 0,34% dari Beban Gaji dan Tunjangan DPRD tahun 2022 sebesar Rp9.890.599.399,00 yang disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.1.4. 34 Realisasi Beban Gaji dan Tunjangan DPRD TA 2023 dan 2022

Kode Rek	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
8.1.01.04.01.0001	Beban Uang Representasi DPRD	552.090.000,00	548.940.000,00	3.150.000,00	0,57
8.1.01.04.02.0001	Beban Tunjangan Keluarga DPRD	37.489.200,00	37.300.200,00	189.000,00	0,51
8.1.01.04.03.0001	Beban Tunjangan Beras DPRD	51.273.360,00	51.418.200,00	(144.840,00)	(0,28)
8.1.01.04.04.0001	Beban Uang Paket DPRD	48.132.000,00	47.974.500,00	157.500,00	0,33
8.1.01.04.05.0001	Beban Tunjangan Jabatan DPRD	802.638.400,00	798.070.900,00	4.567.500,00	0,57
8.1.01.04.06.0001	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	84.955.500,00	83.630.925,00	1.324.575,00	1,58
8.1.01.04.08.0001	Beban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.150.000.000,00	3.139.500.000,00	10.500.000,00	0,33
8.1.01.04.09.0001	Beban Tunjangan Reses DPRD	787.500.000,00	787.500.000,00	0,00	0,00
8.1.01.04.10.0001	Beban Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	681.948,00	681.948,00	0,00	0,00
8.1.01.04.12.0001	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	48.482.784,00	48.327.174,00	155.610,00	0,32
8.1.01.04.12.0002	Beban Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	1.155.168,00	1.151.388,00	3.780,00	0,33
8.1.01.04.12.0003	Beban Jaminan Kematian DPRD	3.465.504,00	3.454.164,00	11.340,00	0,33
8.1.01.04.12.0004	Beban Tunjangan Perumahan DPRD	1.584.000.000,00	1.578.000.000,00	6.000.000,00	0,38
8.1.01.04.13.0001	Beban Tunjangan Transportasi DPRD	2.772.000.000,00	2.761.500.000,00	10.500.000,00	0,38
8.1.01.04.14.0001	Beban Uang Jasa Pengabdian DPRD	0,00	3.150.000,00	(3.150.000,00)	(100,00)
Jumlah		9.923.863.864,00	9.890.599.399,00	33.264.465,00	0,34

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2023

8.1.01.05 Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH

Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH tahun 2023 sebesar Rp162.711.680,00 mengalami peningkatan sebesar Rp303.800,00 atau 0,19% dari Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH tahun 2022 sebesar Rp162.407.880,00 yang disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.1.4. 35 Realisasi Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH TA 2023 dan 2022

Kode Rek	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
8.1.01.05.01.0001	Beban Gaji Pokok KDH/WKDH	54.600.000,00	54.600.021,00	(21,00)	(0,00)
8.1.01.05.03.0001	Beban Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000,00	98.280.000,00	0,00	0,00
8.1.01.	Beban Tunjangan	2.027.760,00	1.738.080,00	289.680,00	16,67



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

Kode Rek	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
05.04.0001	Beras KDH/WKDH				
8.1.01.05.05.0001	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	2.110.800,00	2.097.275,00	13.525,00	0,64
8.1.01.05.06.0001	Beban Pembulatan Gaji KDH/WKDH	2.240,00	1.624,00	616,00	37,93
8.1.01.05.07.0001	Beban luran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	5.250.960,00	5.241.600,00	9.360,00	0,18
8.1.01.05.08.0001	Beban luran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	131.040,00	112.320,00	18.720,00	16,67
8.1.01.05.09.0001	Beban luran Jaminan Kematian KDH/WKDH	308.880,00	336.960,00	(28.080,00)	(8,33)
	Jumlah	162.711.680,00	162.407.880,00	303.800,00	0,19

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2023

8.1.01.06 Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH

Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH tahun 2023 sebesar Rp582.600.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp18.800.000,00 atau 3,13% dari Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH tahun 2022 sebesar Rp601.400.000,00 yang disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.1.4. 36 Realisasi Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH TA 2023 dan 2022

Kode Rek	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
8.1.01.06.01.0001	Beban Dana Operasional Pimpinan DPRD	201.600.000,00	201.600.000,00	0,00	0,00
8.1.01.06.02.0001	Beban Dana Operasional KDH/WKDH	381.000.000,00	399.800.000,00	(18.800.000,00)	(4,70)
	Jumlah	582.600.000,00	601.400.000,00	(18.800.000,00)	(3,13)

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2023

8.1.01.99 Beban Pegawai BLUD

Beban Pegawai BLUD tahun 2023 sebesar Rp5.829.459.513,00 mengalami peningkatan 100,00% dari tahun sebelumnya.

5.1.4.2.1.2 Beban Barang dan Jasa

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Barang dan Jasa Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Beban Barang dan Jasa yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.4. 37 Realisasi Beban Barang dan Jasa TA 2023 dan 2022

Kode Rek	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
8.1.02.01	Beban Barang	65.690.944.745,43	60.345.753.587,24	5.345.191.158,19	8,86
8.1.02.02	Beban Jasa	135.085.788.693,95	129.038.628.142,00	6.047.160.551,95	4,69
8.1.02.03	Beban Pemeliharaan	19.490.081.057,00	12.889.152.536,00	6.600.928.521,00	51,21
8.1.02.04	Beban Perjalanan	59.084.824.414,00	57.242.547.727,00	1.842.276.687,00	3,22



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode Rek	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
	Dinas				
8.1.02.05	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.352.260.106,00	571.545.500,00	780.714.606,00	136,60
8.1.02.88	Beban Barang dan Jasa BOS	23.888.703.563,00	21.464.668.860,00	2.424.034.703,00	11,29
8.1.02.99	Beban Barang dan Jasa BLUD	51.443.787.040,84	57.764.622.117,86	(6.320.835.077,02)	(10,94)
	Jumlah	356.036.389.620,22	339.316.918.470,10	16.719.471.150,12	4,93

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2023

Perubahan nilai Beban Barang dan Jasa Tahun 2023 dari Tahun 2022 disebabkan penyesuaian terhadap regulasi pada jenis penganggaran belanja BLUD, sehingga pada tahun 2023 belanja operasi terbagi atas 2 (dua) jenis belanja yaitu belanja pegawai dan belanja barang dan jasa. Pada tahun sebelumnya belanja pegawai masih digabungkan dengan belanja barang dan jasa.

Perbandingan beban barang dan jasa dan belanja barang dan jasa tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 5.1.4. 38 Perbandingan Beban Barang dan Jasa dan Belanja Barang dan Jasa Tahun 2023

Kode Rek	Uraian	LO	LRA	Selisih
8.1.02.01	Beban Barang	65.690.944.745,43	61.423.690.250,00	(4.267.254.495,43)
8.1.02.02	Beban Jasa	135.085.788.693,95	138.399.857.244,70	3.314.068.550,75
8.1.02.03	Beban Pemeliharaan	19.490.081.057,00	20.736.256.073,00	1.246.175.016,00
8.1.02.04	Beban Perjalanan Dinas	59.084.824.414,00	58.890.549.414,00	(194.275.000,00)
8.1.02.05	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.352.260.106,00	1.352.260.106,00	0,00
8.1.02.88	Beban Barang dan Jasa BOS	23.888.703.563,00	20.892.483.563,00	(2.996.220.000,00)
8.1.02.99	Beban Barang dan Jasa BLUD	51.443.787.040,84	55.555.645.432,00	4.111.858.391,16
	Jumlah	356.036.389.620,22	357.250.742.082,70	1.214.352.462,48

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2023

Pengakuan Beban Barang dan Jasa dalam LO Tahun 2023 *lebih kecil* dari saldo Belanja Barang dan Jasa dalam LRA TA 2023 sebesar Rp1.214.352.462,48 (Rp356.036.389.620,22–Rp357.250.742.082,70). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Beban Barang dan Jasa dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

Selisih LO-LRA		Rp	1.214.352.462,48
Penambah :			
1. Penyesuaian Persediaan Barang Awal	Rp	31.261.822.363,69	
2. Penambahan Beban Barang dari Aset Tetap	Rp	210.634.430,00	
3. Penambahan Beban Barang dari Pendapatan Hibah	Rp	19.412.555,00	
4. Koreksi Beban Barang dari Piutang Persediaan	Rp	139.583.629,00	
5. Penambahan Beban Pemeliharaan dari Aset Tetap	Rp	373.454.000,00	
6. Penambahan Beban Barang dan Jasa BOS dari Beban Hibah	Rp	2.996.220.000,00	
7. Penambahan Utang Beban Barang	Rp	398.551.029,00	
8. Penambahan Utang Beban Jasa	Rp	824.980.705,25	
9. Penambahan Utang Beban Pemeliharaan	Rp	150.000,00	
10. Penambahan Utang Beban Perjalanan Dinas	Rp	281.650.000,00	
11. Penambahan Utang Beban Barang dan jasa BLUD	Rp	2.890.802.896,00	
12. Koreksi Ekuitas Utang Beban Barang	Rp	715.832,48	
Jumlah Penambah	Rp	39.397.977.440,42	
Pengurang :			
1. Penyesuaian Persediaan Barang Akhir	Rp	27.097.288.665,26	
2. Penyesuaian Persediaan Barang dan Jasa BLUD Akhir	Rp	4.637.410.294,16	
3. Pengurangan Beban Barang ke Aset Tetap	Rp	214.912.000,00	
4. Pengurangan Beban Jasa ke Aset Tetap	Rp	3.619.594.640,00	
5. Pengurangan Beban Pemeliharaan ke Aset Tetap	Rp	1.619.779.016,00	
6. Pengurangan Utang Beban Barang	Rp	259.474.678,48	
7. Pengurangan Utang Beban Jasa	Rp	798.619.616,00	
8. Pengurangan Utang Barang dan Jasa BLUD	Rp	2.365.250.993,00	
Jumlah Pengurang	Rp	40.612.329.902,90	
Jumlah Penjelasan Selisih	Rp		1.214.352.462,48

8.1.02.01 Beban Barang

Beban Barang tahun 2023 sebesar Rp65.690.944.745,43 mengalami peningkatan sebesar Rp5.345.191.158,19 atau 8,86% dari Beban Barang tahun 2022 sebesar Rp60.345.753.587,24 yang disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.1.4. 39 Realisasi Beban Barang Pakai Habis TA 2023 dan 2022

Kode Rek	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
8.1.02.01.01.0001	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	384.522.170,00	80.535.000,00	303.987.170,00	377,46
8.1.02.01.01.0002	Beban Bahan-Bahan Kimia	191.551.043,00	376.630.500,00	(185.079.457,00)	(49,14)
8.1.02.01.01.0004	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	13.440.739.566,00	9.013.396.045,00	4.427.343.521,00	49,12
8.1.02.01.01.0008	Beban Bahan-Bahan /Bibit Tanaman	341.378.575,00	65.875.000,00	275.503.575,00	418,22
8.1.02.01.01.0009	Beban Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	8.391.600,00	17.450.000,00	(9.058.400,00)	(51,91)
8.1.02.01.01.0010	Beban Bahan-Isi Tabung Gas	113.810.300,00	75.715.150,00	38.095.150,00	50,31
8.1.02.01.01.0011	Beban Bahan-Bahan /Bibit Ternak/ Bibit Ikan	0,00	14.997.000,00	(14.997.000,00)	(100,00)
8.1.02.01.01.0012	Beban Bahan-Bahan Lainnya	164.104.739,00	108.900.000,00	55.204.739,00	50,69



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode Rek	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
8.1.02.01.01 .0013	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	0,00	5.710.000,00	(5.710.000,00)	(100,00)
8.1.02.01.01 .0015	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	0,00	1.768.816,00	(1.768.816,00)	(100,00)
8.1.02.01.01 .0018	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	0,00	15.120.000,00	(15.120.000,00)	(100,00)
8.1.02.01.01 .0023	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	0,00	76.000,00	(76.000,00)	(100,00)
8.1.02.01.01 .0024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	8.223.849.707,83	4.694.630.052,00	3.529.219.655,83	75,18
8.1.02.01.01 .0025	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	59.419.501,00	970.966.190,00	(911.546.689,00)	(93,88)
8.1.02.01.01 .0026	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	307.958.950,00	2.697.670.847,00	(2.389.711.897,00)	(88,58)
8.1.02.01.01 .0027	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	344.682.000,00	481.433.000,00	(136.751.000,00)	(28,40)
8.1.02.01.01 .0029	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	75.385.430,00	53.453.745,00	21.931.685,00	41,03
8.1.02.01.01 .0030	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	833.521.550,00	795.732.600,00	37.788.950,00	4,75
8.1.02.01.01 .0031	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	618.360.400,00	838.829.700,00	(220.469.300,00)	(26,28)
8.1.02.01.01 .0032	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	95.664.000,00	107.465.000,00	(11.801.000,00)	(10,98)
8.1.02.01.01 .0034	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga	794.864.000,00	62.750.000,00	732.114.000,00	1.166,72
8.1.02.01.01 .0035	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	63.320.400,00	57.625.000,00	5.695.400,00	9,88
8.1.02.01.01 .0036	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	4.486.527.804,75	3.155.477.082,14	1.331.050.722,61	42,18
8.1.02.01.01 .0037	Beban Obat-Obatan-Obat	7.846.887.740,85	9.827.349.048,10	(1.980.461.307,25)	(20,15)
8.1.02.01.01 .0038	Beban Obat-Obatan-Obat Lainnya	63.204.823,00	257.208.232,00	(194.003.409,00)	(75,43)
8.1.02.01.01 .0039	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	281.031.000,00	6.592.419.000,00	(6.311.388.000,00)	(95,74)
8.1.02.01.01 .0043	Beban Naturan dan Pakan-Natura	6.477.140.667,00	4.010.480.450,00	2.466.660.217,00	61,51
8.1.02.01.01 .0044	Beban Naturan dan Pakan-Pakan	29.670.000,00	32.541.000,00	(2.871.000,00)	(8,82)
8.1.02.01.01 .0045	Beban Naturan dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	0,00	2.094.000,00	(2.094.000,00)	(100,00)
8.1.02.01.01 .0052	Beban Makanan dan Minuman Rapat	10.971.266.652,00	10.309.513.338,00	661.753.314,00	6,42
8.1.02.01.01 .0053	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	2.056.915.075,00	1.727.748.000,00	329.167.075,00	19,05
8.1.02.01.01 .0055	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	366.211.000,00	46.524.000,00	319.687.000,00	687,14
8.1.02.01.01 .0056	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	1.789.494.500,00	1.458.659.292,00	330.835.208,00	22,68
8.1.02.01.01 .0057	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	4.592.000,00	11.252.000,00	(6.660.000,00)	(59,19)
8.1.02.01.01 .0058	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	821.409.000,00	1.362.311.000,00	(540.902.000,00)	(39,70)



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode Rek	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
8.1.02.01.01 .0059	Beban Pakaian Dinas KDH dan WKDH	225.000.000,00	137.500.000,00	87.500.000,00	63,64
8.1.02.01.01 .0063	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	37.605.000,00	32.525.000,00	5.080.000,00	15,62
8.1.02.01.01 .0064	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	3.140.240.640,00	96.762.500,00	3.043.478.140,00	3.145,31
8.1.02.01.01 .0065	Beban Pakaian Sipil Resmi (PSR)	2.000.000,00	2.300.000,00	(300.000,00)	(13,04)
8.1.02.01.01 .0066	Beban Pakaian Dinas Upacara (PDU)	0,00	78.000.000,00	(78.000.000,00)	(100,00)
8.1.02.01.01 .0068	Beban Pakaian Siaga	20.750.000,00	56.300.000,00	(35.550.000,00)	(63,14)
8.1.02.01.01 .0069	Beban Pakaian Teknik	0,00	6.000.000,00	(6.000.000,00)	(100,00)
8.1.02.01.01 .0071	Beban Pakaian Kerja Laboratorium	0,00	7.200.000,00	(7.200.000,00)	(100,00)
8.1.02.01.01 .0074	Beban Pakaian Adat Daerah	260.375.960,00	163.400.000,00	96.975.960,00	59,35
8.1.02.01.01 .0075	Beban Pakaian Batik Tradisional	383.665.951,00	181.350.000,00	202.315.951,00	111,56
8.1.02.01.01 .0076	Beban Pakaian Olahraga	142.213.000,00	193.525.000,00	(51.312.000,00)	(26,51)
8.1.02.01.01 .0077	Beban Pakaian Paskibraka	223.220.000,00	60.585.000,00	162.635.000,00	268,44
Jumlah		65.690.944.745,43	60.345.753.587,24	5.345.191.158,19	8,86

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2023

8.1.02.02 Beban Jasa

Beban Jasa tahun 2023 sebesar Rp135.085.788.693,95 mengalami peningkatan sebesar Rp6.047.160.551,95 atau 4,69% dari Beban Jasa tahun 2022 sebesar Rp129.038.628.142,00 yang disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.1.4. 40 Realisasi Beban Jasa TA 2023 dan 2022

Kode Rek	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
8.1.02.02.01 .0003	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.107.957.396,00	975.870.000,00	1.132.087.396,00	116,01
8.1.02.02.01 .0004	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	5.337.212.500,00	7.288.389.650,00	(1.951.177.150,00)	(26,77)
8.1.02.02.01 .0006	Beban Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	1.517.350.000,00	1.428.800.000,00	88.550.000,00	6,20
8.1.02.02.01 .0007	Beban Honorarium Rohaniwan	1.094.725.000,00	1.038.767.500,00	55.957.500,00	5,39
8.1.02.02.01 .0008	Beban Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	17.700.000,00	31.990.000,00	(14.290.000,00)	(44,67)
8.1.02.02.01 .0009	Beban Honorarium Penyelenggara Ujian	54.125.000,00	78.075.000,00	(23.950.000,00)	(30,68)
8.1.02.02.01 .0011	Beban Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	69.600.000,00	19.975.000,00	49.625.000,00	248,44
8.1.02.02.01 .0012	Beban Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	530.200.000,00	534.300.000,00	(4.100.000,00)	(0,77)
8.1.02.02.01 .0013	Beban Jasa Tenaga Pendidikan	8.115.685.000,00	6.161.800.000,00	1.953.885.000,00	31,71
8.1.02.02.01 .0014	Beban Jasa Tenaga Kesehatan	24.654.096.813,70	21.963.315.312,00	2.690.781.501,70	12,25



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

Kode Rek	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
8.1.02.02.01 .0015	Beban Jasa Tenaga Laboratorium	303.420.000,00	274.840.000,00	28.580.000,00	10,40
8.1.02.02.01 .0016	Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	332.308.892,00	351.272.450,00	(18.963.558,00)	(5,40)
8.1.02.02.01 .0017	Beban Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	634.500.000,00	534.980.000,00	99.520.000,00	18,60
8.1.02.02.01 .0018	Beban Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	637.800.000,00	677.600.000,00	(39.800.000,00)	(5,87)
8.1.02.02.01 .0019	Beban Jasa Tenaga Penanganan Bencana	152.250.000,00	254.250.000,00	(102.000.000,00)	(40,12)
8.1.02.02.01 .0020	Beban Jasa Tenaga Penanganan Sosial	96.000.000,00	406.403.000,00	(310.403.000,00)	(76,38)
8.1.02.02.01 .0021	Beban Jasa Tenaga Sumber Daya Air	542.500.000,00	543.600.000,00	(1.100.000,00)	(0,20)
8.1.02.02.01 .0022	Beban Jasa Tenaga Perhubungan	392.000.000,00	279.800.000,00	112.200.000,00	40,10
8.1.02.02.01 .0023	Beban Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	125.400.000,00	101.500.000,00	23.900.000,00	23,55
8.1.02.02.01 .0024	Beban Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	249.200.000,00	0,00	249.200.000,00	100,00
8.1.02.02.01 .0025	Beban Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	172.345.500,00	54.950.000,00	117.395.500,00	213,64
8.1.02.02.01 .0026	Beban Jasa Tenaga Administrasi	8.482.750.187,00	8.854.236.587,00	(371.486.400,00)	(4,20)
8.1.02.02.01 .0027	Beban Jasa Tenaga Operator Komputer	4.647.892.000,00	4.473.855.000,00	174.037.000,00	3,89
8.1.02.02.01 .0028	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	1.601.924.336,00	1.547.602.611,00	54.321.725,00	3,51
8.1.02.02.01 .0029	Beban Jasa Tenaga Ahli	5.074.074.000,00	5.472.804.000,00	(398.730.000,00)	(7,29)
8.1.02.02.01 .0030	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	6.458.513.204,00	6.293.475.000,00	165.038.204,00	2,62
8.1.02.02.01 .0031	Beban Jasa Tenaga Keamanan	5.596.059.000,00	5.636.520.000,00	(40.461.000,00)	(0,72)
8.1.02.02.01 .0033	Beban Jasa Tenaga Supir	3.092.753.338,00	2.920.197.500,00	172.555.838,00	5,91
8.1.02.02.01 .0034	Beban Jasa Tenaga Juru Masak	348.000.000,00	404.000.000,00	(56.000.000,00)	(13,86)
8.1.02.02.01 .0035	Beban Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	284.400.000,00	262.025.000,00	22.375.000,00	8,54
8.1.02.02.01 .0037	Beban Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	780.380.000,00	42.500.000,00	737.880.000,00	1.736,19
8.1.02.02.01 .0038	Beban Jasa Tata Rias	65.360.200,00	30.100.000,00	35.260.200,00	117,14
8.1.02.02.01 .0039	Beban Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	36.850.000,00	268.026.500,00	(231.176.500,00)	(86,25)
8.1.02.02.01 .0041	Beban Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	204.051.500,00	526.748.958,00	(322.697.458,00)	(61,26)
8.1.02.02.01 .0044	Beban Jasa Pelayanan Perpustakaan	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	100,00
8.1.02.02.01 .0045	Beban Jasa Pelayanan Kearsipan	115.200.000,00	322.650.000,00	(207.450.000,00)	(64,30)
8.1.02.02.01 .0047	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara	3.161.769.338,00	1.290.057.500,00	1.871.711.838,00	145,09
8.1.02.02.01 .0049	Beban Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	222.000.000,00	216.000.000,00	6.000.000,00	2,78
8.1.02.02.01 .0050	Beban Jasa Kalibrasi	250.239.612,00	6.727.500,00	243.512.112,00	3.619,65
8.1.02.02.01 .0055	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	179.794.054,00	106.410.544,00	73.383.510,00	68,96
8.1.02.02.01 .0057	Beban Jasa Operator Kapal	756.348.000,00	716.448.000,00	39.900.000,00	5,57



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode Rek	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
8.1.02.02.01 .0059	Beban Tagihan Telepon	168.857.170,00	261.461.123,00	(92.603.953,00)	(35,42)
8.1.02.02.01 .0060	Beban Tagihan Air	290.424.053,00	275.003.628,00	15.420.425,00	5,61
8.1.02.02.01 .0061	Beban Tagihan Listrik	7.229.539.409,00	6.474.579.055,00	754.960.354,00	11,66
8.1.02.02.01 .0062	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	89.986.000,00	110.580.000,00	(20.594.000,00)	(18,62)
8.1.02.02.01 .0063	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	2.415.009.225,25	3.329.577.907,00	(914.568.681,75)	(27,47)
8.1.02.02.01 .0064	Beban Paket/Pengiriman	73.470.009,00	61.116.650,00	12.353.359,00	20,21
8.1.02.02.01 .0067	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	226.000,00	84.185.200,00	(83.959.200,00)	(99,73)
8.1.02.02.01 .0068	Beban Rekening Penerangan Jalan Umum	0,00	14.985.000,00	(14.985.000,00)	(100,00)
8.1.02.02.01 .0071	Beban Lembur	1.191.244.901,00	1.035.461.509,00	155.783.392,00	15,04
8.1.02.02.01 .0073	Beban Medical Check Up	140.000.000,00	89.378.050,00	50.621.950,00	56,64
8.1.02.02.01 .0074	Beban Insentif Tenaga Kesehatan Vaksinator	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	100,00
8.1.02.02.01 .0075	Beban Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan COVID- 19	0,00	245.435.000,00	(245.435.000,00)	(100,00)
8.1.02.02.02 .0002	Beban Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI	13.243.863.100,00	12.183.190.900,00	1.060.672.200,00	8,71
8.1.02.02.02 .0005	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	5.760.803.125,00	5.010.879.097,00	749.924.028,00	14,97
8.1.02.02.02 .0006	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	232.999.611,00	237.238.907,00	(4.239.296,00)	(1,79)
8.1.02.02.02 .0007	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	285.899.293,00	296.585.872,00	(10.686.579,00)	(3,60)
8.1.02.02.02 .0008	Beban Asuransi Barang Milik Daerah	74.893.162,00	74.893.162,00	0,00	0,00
8.1.02.02.04 .0022	Beban Sewa Electric Generating Set	46.830.000,00	11.299.490,00	35.530.510,00	314,44
8.1.02.02.04 .0031	Beban Sewa Peralatan Selam	0,00	40.000.000,00	(40.000.000,00)	(100,00)
8.1.02.02.04 .0035	Beban Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	3.796.689.486,00	3.376.650.836,00	420.038.650,00	12,44
8.1.02.02.04 .0036	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	355.970.000,00	282.124.879,00	73.845.121,00	26,17
8.1.02.02.04 .0037	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	7.500.000,00	155.206.150,00	(147.706.150,00)	(95,17)
8.1.02.02.04 .0040	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Khusus	0,00	5.600.000,00	(5.600.000,00)	(100,00)
8.1.02.02.04 .0043	Beban Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	3.930.000,00	26.500.000,00	(22.570.000,00)	(85,17)
8.1.02.02.04 .0048	Beban Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang	0,00	3.928.000,00	(3.928.000,00)	(100,00)
8.1.02.02.04 .0049	Beban Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	11.000.000,00	110.375.000,00	(99.375.000,00)	(90,03)
8.1.02.02.04 .0052	Beban Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	9.268.000,00	25.630.000,00	(16.362.000,00)	(63,84)
8.1.02.02.04 .0058	Beban Sewa Alat Angkutan Bermotor Udara Lainnya	6.878.040,00	0,00	6.878.040,00	100,00
8.1.02.02.04 .0117	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya	594.616.260,00	431.335.000,00	163.281.260,00	37,85
8.1.02.02.04 .0132	Beban Sewa Peralatan Studio Audio	270.450.000,00	159.740.500,00	110.709.500,00	69,31
8.1.02.02.04 .0355	Beban Sewa Peralatan Umum	123.859.000,00	14.376.000,00	109.483.000,00	761,57
8.1.02.02.04	Beban Sewa Personal Computer	96.585.000,00	20.300.000,00	76.285.000,00	375,79



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode Rek	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
.0405					
8.1.02.02.04 .0411	Beban Sewa Peralatan Komputer Lainnya	32.000.000,00	15.975.000,00	16.025.000,00	100,31
8.1.02.02.04 .0416	Beban Sewa Elektronik/Electric	0,00	2.800.000,00	(2.800.000,00)	(100,00)
8.1.02.02.05 .0001	Beban Sewa Bangunan Gedung Kantor	24.960.000,00	59.700.000,00	(34.740.000,00)	(58,19)
8.1.02.02.05 .0005	Beban Sewa Bangunan Gedung Laboratorium	0,00	10.500.000,00	(10.500.000,00)	(100,00)
8.1.02.02.05 .0009	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	474.850.000,00	336.450.000,00	138.400.000,00	41,14
8.1.02.02.05 .0011	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga	14.940.000,00	3.640.000,00	11.300.000,00	310,44
8.1.02.02.05 .0030	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00	15.680.000,00	(15.680.000,00)	(100,00)
8.1.02.02.05 .0041	Beban Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	0,00	3.150.000,00	(3.150.000,00)	(100,00)
8.1.02.02.05 .0042	Beban Sewa Asrama	140.000.000,00	35.000.000,00	105.000.000,00	300,00
8.1.02.02.05 .0043	Beban Sewa Hotel	1.362.194.900,00	867.325.015,00	494.869.885,00	57,06
8.1.02.02.05 .0049	Beban Sewa Rumah Tidak Bersusun	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	100,00
8.1.02.02.05 .0050	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	101.200.000,00	109.050.000,00	(7.850.000,00)	(7,20)
8.1.02.02.06 .0126	Beban Sewa Jaringan Listrik Lainnya	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	100,00
8.1.02.02.07 .0031	Beban Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya	6.700.000,00	7.500.000,00	(800.000,00)	(10,67)
8.1.02.02.09 .0002	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	1.165.192.853,00	133.105.000,00	1.032.087.853,00	775,39
8.1.02.02.09 .0008	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	1.226.381.000,00	23.912.450,00	1.202.468.550,00	5.028,63
8.1.02.02.09 .0009	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	233.850.000,00	439.562.500,00	(205.712.500,00)	(46,80)
8.1.02.02.09 .0010	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal dalam Bangunan	79.800.000,00	0,00	79.800.000,00	100,00
8.1.02.02.09 .0015	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang- Jasa Perencanaan Wilayah	401.040.000,00	83.666.250,00	317.373.750,00	379,33
8.1.02.02.09 .0017	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang- Pengembangan Pemanfaatan Ruang	99.966.589,00	0,00	99.966.589,00	100,00
8.1.02.02.09 .0019	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	55.442.857,00	0,00	55.442.857,00	100,00
8.1.02.02.09 .0020	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	0,00	262.512.500,00	(262.512.500,00)	(100,00)
8.1.02.02.09 .0021	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	0,00	358.724.000,00	(358.724.000,00)	(100,00)



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

Kode Rek	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
8.1.02.02.09 .0023	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Ruang	2.490.000,00	0,00	2.490.000,00	100,00
8.1.02.02.10 .0001	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang- Pengembangan Pertanian dan Perdesaan	350.000.000,00	0,00	350.000.000,00	100,00
8.1.02.02.10 .0011	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	199.900.000,00	179.900.000,00	20.000.000,00	11,12
8.1.02.02.10 .0012	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	200.000.000,00		200.000.000,00	100,00
8.1.02.02.12 .0001	Beban Beasiswa Tugas Belajar S1	2.500.000,00	28.670.000,00	(26.170.000,00)	(91,28)
8.1.02.02.12 .0002	Beban Beasiswa Tugas Belajar S2	96.322.100,00	24.650.000,00	71.672.100,00	290,76
8.1.02.02.13 .0001	Beban Kursus Singkat/Pelatihan	141.847.880,00	236.147.900,00	(94.300.020,00)	(39,93)
8.1.02.02.13 .0002	Beban Sosialisasi	3.029.989.800,00	8.030.665.000,00	(5.000.675.200,00)	(62,27)
8.1.02.02.13 .0003	Beban Bimbingan Teknis	275.900.000,00	631.952.000,00	(356.052.000,00)	(56,34)
8.1.02.02.13 .0004	Beban Diklat Kepemimpinan	319.295.000,00	299.911.000,00	19.384.000,00	6,46
Jumlah		135.085.788.693,95	129.038.628.142,00	6.047.160.551,95	4,69

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2023

8.1.02.03 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan tahun 2023 sebesar Rp19.490.081.057,00 mengalami peningkatan sebesar Rp6.600.928.521,00 atau 51,21% dari Beban Pemeliharaan tahun 2022 sebesar Rp12.889.152.536,00 yang disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.1.4. 41 Realisasi Beban Pemeliharaan TA 2023 dan 2022

Kode Rek	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
8.1.02.03.02 .0003	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	406.881.014,00	359.952.567,00	46.928.447,00	13,04
8.1.02.03.02 .0012	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	114.000.974,00	66.827.563,00	47.173.411,00	70,59
8.1.02.03.02 .0017	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung-Mesin Proses Apung	16.739.700,00	7.650.000,00	9.089.700,00	118,82
8.1.02.03.02 .0022	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	154.677.000,00	151.768.500,00	2.908.500,00	1,92
8.1.02.03.02 .0035	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	3.197.400.890,00	2.361.543.116,00	835.857.774,00	35,39
8.1.02.03.02 .0036	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	114.206.000,00	89.490.000,00	24.716.000,00	27,62
8.1.02.03.02 .0038	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	1.027.253.331,00	1.154.809.324,00	(127.555.993,00)	(11,05)
8.1.02.03.02 .0039	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	40.373.000,00	40.622.500,00	(249.500,00)	(0,61)
8.1.02.03.02	Beban Pemeliharaan Alat	383.237.765,00	935.994.481,00	(552.756.716,00)	(59,06)



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

Kode Rek	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
.0040	Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus				
8.1.02.03.02 .0049	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	887.348.416,00	679.521.999,00	207.826.417,00	30,58
8.1.02.03.02 .0117	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	305.683.500,00	101.089.460,00	204.594.040,00	202,39
8.1.02.03.02 .0118	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	0,00	64.978.000,00	(64.978.000,00)	(100,00)
8.1.02.03.02 .0120	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	26.005.000,00	32.663.000,00	(6.658.000,00)	(20,38)
8.1.02.03.02 .0121	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	294.265.018,00	260.901.597,00	33.363.421,00	12,79
8.1.02.03.02 .0123	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	26.376.000,00	7.500.000,00	18.876.000,00	251,68
8.1.02.03.02 .0132	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	100,00
8.1.02.03.02 .0133	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	10.000.000,00	3.800.000,00	6.200.000,00	163,16
8.1.02.03.02 .0143	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Sosial	0,00	11.915.000,00	(11.915.000,00)	(100,00)
8.1.02.03.02 .0148	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Lainnya	0,00	29.968.500,00	(29.968.500,00)	(100,00)
8.1.02.03.02 .0204	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	3.600.000,00	10.900.000,00	(7.300.000,00)	(66,97)
8.1.02.03.02 .0248	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum	51.973.356,00	0,00	51.973.356,00	100,00
8.1.02.03.02 .0371	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lain	0,00	105.063.520,00	(105.063.520,00)	(100,00)
8.1.02.03.02 .0404	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	111.742.700,00	30.350.000,00	81.392.700,00	268,18
8.1.02.03.02 .0405	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	372.970.034,00	151.058.000,00	221.912.034,00	146,91
8.1.02.03.02 .0407	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe	0,00	90.146.000,00	(90.146.000,00)	(100,00)
8.1.02.03.02 .0409	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	88.450.700,00	268.692.882,00	(180.242.182,00)	(67,08)
8.1.02.03.02 .0411	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan	0,00	5.500.000,00	(5.500.000,00)	(100,00)



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode Rek	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
	Komputer Lainnya				
8.1.02.03.02 .0492	Beban Pemeliharaan Rambu- Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar	19.950.000,00	20.000.000,00	(50.000,00)	(0,25)
8.1.02.03.02 .0493	Beban Pemeliharaan Rambu- Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar	0,00	21.000.000,00	(21.000.000,00)	(100,00)
8.1.02.03.03 .0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1.910.632.575,00	2.931.092.728,00	(1.020.460.153,00)	(34,82)
8.1.02.03.03 .0010	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	0,00	34.860.000,00	(34.860.000,00)	(100,00)
8.1.02.03.03 .0012	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	39.383.834,00	0,00	39.383.834,00	100,00
8.1.02.03.03 .0028	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Industri	6.350.000,00	0,00	6.350.000,00	100,00
8.1.02.03.03 .0032	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	0,00	157.240.000,00	(157.240.000,00)	(100,00)
8.1.02.03.03 .0033	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir	169.800.000,00	0,00	169.800.000,00	100,00
8.1.02.03.03 .0036	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	608.727.550,00	102.334.250,00	506.393.300,00	494,84
8.1.02.03.04 .0003	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	4.681.105.000,00	899.904.440,00	3.781.200.560,00	420,18
8.1.02.03.04 .0013	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten	1.726.027.900,00	649.392.109,00	1.076.635.791,00	165,79
8.1.02.03.04 .0031	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi- Bangunan Air Irigasi Lainnya	1.324.773.000,00	680.973.000,00	643.800.000,00	94,54
8.1.02.03.04 .0126	Beban Pemeliharaan Jaringan- Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	1.346.646.800,00	369.650.000,00	976.996.800,00	264,30
8.1.02.03.06 .0005	Beban Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	100,00
Jumlah		19.490.081.057,00	12.889.152.536,00	6.600.928.521,00	51,21

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2023

8.1.02.04 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas tahun 2023 sebesar Rp59.084.824.414,00 mengalami peningkatan sebesar Rp1.842.276.687,00 atau 3,22% dari Beban Perjalanan Dinas tahun 2022 sebesar Rp57.242.547.727,00 yang disajikan pada tabel sebagai berikut:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Tabel 5.1.4. 42 Realisasi Beban Perjalanan Dinas TA 2023 dan 2022

Kode Rek	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	28.225.224.797,00	27.474.876.352,00	750.348.445,00	2,73
8.1.02.04.01.0003	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	30.784.131.617,00	29.757.276.375,00	1.026.855.242,00	3,45
8.1.02.04.01.0004	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	75.468.000,00	0,00	75.468.000,00	100,00
8.1.02.04.01.0005	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0,00	10.395.000,00	(10.395.000,00)	(100,00)
Jumlah		59.084.824.414,00	57.242.547.727,00	1.842.276.687,00	3,22

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2023

8.1.02.05 Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat tahun 2023 sebesar Rp1.352.260.106,00 mengalami peningkatan sebesar Rp780.714.606,00 atau 136,60% dari Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat tahun 2022 sebesar Rp571.545.500,00 yang disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.1.4. 43 Realisasi Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat TA 2023 dan 2022

Kode Rek	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
8.1.02.05.01.0001	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	1.302.260.106,00	270.045.500,00	1.032.214.606,00	382,24
8.1.02.05.01.0005	Beban Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	50.000.000,00	300.000.000,00	(250.000.000,00)	(83,33)
8.1.02.05.02.0002	Beban Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	0,00	1.500.000,00	(1.500.000,00)	(100,00)
Jumlah		1.352.260.106,00	571.545.500,00	780.714.606,00	136,60

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2023

8.1.02.88 Beban Barang dan Jasa BOS

Beban Barang dan Jasa BOS tahun 2023 sebesar Rp23.888.703.563,00 mengalami peningkatan sebesar Rp2.424.034.703,00 atau 11,29% dari beban Barang dan Jasa BOS tahun 2022 sebesar Rp21.464.668.860,00.

8.1.02.99 Beban Barang dan Jasa BLUD

Beban Barang dan Jasa BLUD tahun 2023 sebesar Rp51.443.787.040,84 mengalami penurunan sebesar Rp6.320.835.077,02 atau 10,94% dari Beban Barang dan Jasa BLUD tahun 2022 sebesar Rp57.764.622.117,86.



5.1.4.2.1.3 Beban Subsidi

Berikuti ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk pos Beban Subsidi Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Beban Subsidi yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.4. 44 Realisasi Beban Subsidi TA 2023 dan 2022

Kode Rek	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
8.1.04.03	Beban Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	550.000.000,00	639.110.500,00	(89.110.500,00)	(13,94)
Jumlah		550.000.000,00	639.110.500,00	(89.110.500,00)	(13,94)

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2023

Perubahan nilai Beban Subsidi Tahun 2023 dari Tahun 2022 disebabkan adanya subsidi pada masyarakat untuk alat transportasi darat dan laut dalam rangka penanganan dampak inflasi.

Perbandingan beban subsidi dan belanja subsidi tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 5.1.4. 45 Perbandingan Beban Subsidi dan Belanja Subsidi Tahun 2023

Kode Rek	Uraian	LO	LRA	Selisih
8.1.04.03	Beban Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	550.000.000,00	550.000.000,00	0,00
Jumlah		550.000.000,00	550.000.000,00	0,00

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2023

Pengakuan Beban Subsidi dalam LO Tahun 2023 sama dengan dari saldo Belanja Subsidi dalam LRA TA 2023 sebesar Rp550.000.000,00.

8.1.04.03 Beban Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta

Beban Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta tahun 2023 sebesar Rp550.000.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp89.110.500,00 atau 13,94% dari beban subsidi kepada badan usaha milik swasta tahun 2022 sebesar Rp639.110.500,00.

5.1.4.2.1.4 Beban Hibah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Hibah Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Beban Hibah yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

Tabel 5.1.4. 46 Realisasi Beban Hibah TA 2023 dan 2022

Kode Rek	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
8.1.05.01	Beban Hibah Kepada Pemerintah Pusat	0,00	250.000.000,00	(250.000.000,00)	(100,00)
8.1.05.05	Beban Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Masyarakat yang Berbadan Hukum Indonesia	31.794.896.080,00	7.807.964.000,00	23.986.932.080,00	307,21
8.1.05.06	Beban Hibah Dana BOS	741.419.845,00	6.283.082.650,00	(5.541.662.805,00)	(88,20)
8.1.05.07	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	844.194.105,00	844.193.175,00	930,00	0,00
Jumlah		33.380.510.030,00	15.185.239.825,00	18.195.270.205,00	119,82

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2023

Perubahan nilai Beban Hibah Tahun 2023 dari Tahun 2022 disebabkan hal-hal berikut:

1. Terdapat belanja bantuan hibah kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk kegiatan pelaksanaan anggaran non tahapan pemilihan pada tahun sebelumnya;
2. Perubahan jenis akun anggaran untuk belanja dana BOP Kesenjangan dan BOP PAUD di tahun 2023.

Perbandingan beban hibah dan belanja hibah tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 5.1.4. 47 Perbandingan Beban Hibah dan Belanja Hibah Tahun 2023

Kode Rek	Uraian	LO	LRA	Selisih
8.1.05.01	Beban Hibah Kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00
8.1.05.05	Beban Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Masyarakat yang Berbadan Hukum Indonesia	31.794.896.080,00	34.392.741.080,00	2.597.845.000,00
8.1.05.06	Beban Hibah Dana BOS	741.419.845,00	741.419.845,00	0,00
8.1.05.07	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	844.194.105,00	844.194.105,00	0,00
Jumlah		33.380.510.030,00	35.978.355.030,00	2.597.845.000,00

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2023

Pengakuan Beban Hibah dalam LO Tahun 2023 *lebih kecil* dari saldo Belanja Hibah dalam LRA TA 2023 sebesar Rp2.597.845.000,00 (Rp33.380.510.030,00-Rp35.978.355.030,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Beban Hibah dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Selisih LO-LRA		Rp	2.597.845.000,00
Penambah :			
1. Beban Hibah dari Aset Tetap	Rp	112.215.000,00	
2. Beban Hibah Barang	Rp	286.160.000,00	
Jumlah Penambah	Rp	398.375.000,00	
Pengurang :			
1. Pengurangan Beban Hibah ke Beban Barang dan Jasa BOS	Rp	2.996.220.000,00	
Jumlah Pengurang	Rp	2.996.220.000,00	
Jumlah Penjelasan Selisih		Rp	2.597.845.000,00



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

8.1.05.05 Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia

Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia tahun 2023 sebesar Rp31.794.896.080,00 mengalami peningkatan sebesar Rp23.986.932.080,00 atau 307,21% dari beban hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia tahun 2022 sebesar Rp7.807.964.000,00 yang disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.1.4. 48 Realisasi Beban Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan Yang Berbadan Hukum Indonesia TA 2023 dan 2022

Kode Rek	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
8.1.05.05.01.0001	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	22.233.408.080,00	5.622.961.000,00	16.610.447.080,00	295,40
8.1.05.05.01.0002	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	1.061.503.000,00	(1.061.503.000,00)	(100,00)
8.1.05.05.01.0003	Beban Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	4.571.915.000,00	0,00	4.571.915.000,00	100,00
8.1.05.05.03.0001	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	1.540.000.000,00	1.123.500.000,00	416.500.000,00	37,07
8.1.05.05.03.0002	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	3.449.573.000,00	0,00	3.449.573.000,00	100,00
Jumlah		31.794.896.080,00	7.807.964.000,00	23.986.932.080,00	307,21

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2023

8.1.05.06 Beban Hibah Dana BOS

Beban Hibah Dana BOS tahun 2023 sebesar Rp741.419.845,00 mengalami penurunan sebesar Rp5.541.662.805,00 atau 88,20% dari beban hibah dana BOS tahun 2022 sebesar Rp6.283.082.650,00 yang disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.1.4. 49 Realisasi Beban Hibah Dana BOS TA 2023 dan 2022

Kode Rek	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
8.1.05.06.01.0001	Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri	741.419.845,00	1.928.474.500,00	(1.187.054.655,00)	(61,55)
8.1.05.06.02.0001	Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	0,00	4.354.608.150,00	(4.354.608.150,00)	(100,00)
Jumlah		741.419.845,00	6.283.082.650,00	(5.541.662.805,00)	(88,20)

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2023

8.1.05.07 Beban Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik

Beban Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik tahun 2023 sebesar Rp844.194.105,00 mengalami peningkatan sebesar Rp930,00 dari beban hibah bantuan keuangan kepada partai politik tahun 2022 sebesar Rp844.193.175,00.



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

5.1.4.2.1.5 Beban Bantuan Sosial

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Bantuan Sosial Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Beban Bantuan Sosial yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.4. 50 Realisasi Beban Bantuan Sosial TA 2023 dan 2022

Kode Rek	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
8.1.06.01	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu	1.544.410.000,00	257.200.000,00	1.287.210.000,00	500,47
8.1.06.02	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Keluarga	2.080.000.000,00	599.600.000,00	1.480.400.000,00	246,90
8.1.06.03	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Kelompok Masyarakat	3.988.489.206,00	15.819.881.780,00	(11.831.392.574,00)	(74,79)
8.1.06.04	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	123.212.000,00	382.177.620,00	(258.965.620,00)	(67,76)
Jumlah		7.736.111.206,00	17.058.859.400,00	(9.322.748.194,00)	(54,65)

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2023

Perubahan nilai Beban Bantuan Sosial Tahun 2023 dari Tahun 2022 disebabkan hal-hal berikut:

1. Terdapat bantuan sosial berupa peningkatan kualitas rumah swadaya pada Masyarakat tahun 2023;
2. Meningkatnya capaian realisasi belanja bantuan sosial di tahun 2023 dibandingkan tahun sebelumnya disebabkan adanya kegiatan program gerak cepat pengantasan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat (Gercep Gaskan Berdaya) kepada kepala keluarga atau rumah tangga miskin (RTM).

Perbandingan beban bantuan sosial dan belanja bantuan sosial tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 5.1.4. 51 Perbandingan Beban Bantuan Sosial dan Belanja Bantuan Sosial Tahun 2023

Kode Rek	Uraian	LO	LRA	Selisih
8.1.06.01	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu	1.544.410.000,00	1.544.410.000,00	0,00
8.1.06.02	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Keluarga	2.080.000.000,00	2.080.000.000,00	0,00
8.1.06.03	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Kelompok Masyarakat	3.988.489.206,00	3.988.489.206,00	0,00
8.1.06.04	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	123.212.000,00	123.212.000,00	0,00
Jumlah		7.736.111.206,00	7.736.111.206,00	0,00

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2023

Pengakuan Beban Bantuan Sosial dalam LO Tahun 2023 sama dengan saldo Belanja Bantuan Sosial dalam LRA TA 2023 sebesar Rp7.736.111.206,00.



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

8.1.06.01 Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu

Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu tahun 2023 sebesar Rp1.544.410.000,00 mengalami peningkatan sebesar Rp1.287.210.000,00 atau 500,47% dari beban bantuan sosial uang kepada individu tahun 2022 sebesar Rp257.200.000,00 yang disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.1.4. 52 Realisasi Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu TA 2023 dan 2022

Kode Rek	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
8.1.06.01.01.0001	Beban Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	167.300.000,00	30.000.000,00	137.300.000,00	457,67
8.1.06.01.02.0001	Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	1.377.110.000,00	227.200.000,00	1.149.910.000,00	506,12
Jumlah		1.544.410.000,00	257.200.000,00	1.287.210.000,00	500,47

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2023

8.1.06.02 Beban Bantuan Sosial Uang kepada Keluarga

Beban Bantuan Sosial Uang kepada Keluarga tahun 2023 sebesar Rp2.080.000.000,00 mengalami peningkatan sebesar Rp1.480.400.000,00 atau 246,90% dari beban bantuan sosial uang kepada keluarga tahun 2022 sebesar Rp599.600.000,00.

8.1.06.03 Beban Bantuan Sosial Uang kepada Kelompok Masyarakat

Beban Bantuan Sosial Uang kepada Kelompok Masyarakat tahun 2023 sebesar Rp3.988.489.206,00 mengalami penurunan sebesar Rp11.831.392.574,00 atau 74,79% dari beban bantuan sosial uang kepada kelompok masyarakat tahun 2022 sebesar Rp15.819.881.780,00.

8.1.06.04 Beban Bantuan Sosial Uang kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)

Beban Bantuan Sosial Uang kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) tahun 2023 sebesar Rp123.212.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp258.965.620,00 atau 67,76% dari beban bantuan sosial uang kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya) tahun 2022 sebesar Rp382.177.620,00 yang disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.1.4. 53 Realisasi Beban Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) TA 2023 dan 2022

Kode Rek	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
8.1.06.04.01.0001	Beban Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	0,00	275.000.000,00	(275.000.000,00)	(100,00)
8.1.06.04.02.	Beban Bantuan Sosial Barang yang	123.212.000,00	107.177.620,00	16.034.380,00	14,96



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

Kode Rek	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
0001	Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)				
Jumlah		123.212.000,00	382.177.620,00	(258.965.620,00)	(67,76)

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2023

5.1.4.2.1.6 Beban Penyisihan Piutang

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Penyisihan Piutang Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Beban Penyisihan Piutang yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.4. 54 Realisasi Beban Penyisihan Piutang TA 2023 dan 2022

Kode Rek	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
8.1.07.01	Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	329.318.695,22	216.063.210,39	113.255.484,83	52,42
8.1.07.04	Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	4.084.720,00	63.690.931,74	(59.606.211,74)	(93,59)
Jumlah		333.403.415,22	279.754.142,13	53.649.273,09	19,18

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2023

Perubahan nilai Beban Penyisihan Piutang Tahun 2023 dari Tahun 2022 disebabkan Penambahan perhitungan penyisihan piutang pajak daerah tahun berjalan.

Pengakuan Beban Penyisihan Piutang dalam LO Tahun 2023 ini *lebih besar* dari selisih/perubahan saldo Penyisihan Piutang dari Tahun 2022 ke Tahun 2023 dalam Neraca per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.766.200,80 [Rp329.318.695,22-(Rp4.177.283.746,28-Rp3.851.731.251,86)]. Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan/atau pengurangan Kenaikan Penyisihan Piutang dalam Neraca, yang dijelaskan sebagai berikut:

Selisih LO-Perubahan Saldo dalam Neraca	Rp	3.766.200,80
Penjelasan Selisih :		
1. Koreksi Ekuitas - Penyisihan atas pelunasan Piutang BLUD	Rp	3.766.200,80
Jumlah Penjelasan Selisih	Rp	3.766.200,80

8.1.07.01 Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah

Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah tahun 2023 sebesar Rp329.318.695,22 mengalami peningkatan sebesar Rp113.255.484,83 atau 52,42% dari beban penyisihan piutang pajak daerah tahun 2022 sebesar Rp216.063.210,39 yang disajikan pada tabel sebagai berikut:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

Tabel 5.1.4. 55 Realisasi Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah TA 2023 dan 2022

Kode Rek	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
8.1.07.01.06.0001	Beban Penyisihan Piutang Pajak Hotel	3.589.525,00	5.427.825,00	(1.838.300,00)	(33,87)
8.1.07.01.07.0001	Beban Penyisihan Piutang Pajak Restoran dan Sejenisnya	9.730.025,00	35.775,00	9.694.250,00	27.097,83
8.1.07.01.09.0001	Beban Penyisihan Piutang Pajak Reklame Papan/Billboard/ Videotron/Megatron	11.292.818,81	4.707.370,44	6.585.448,37	139,90
8.1.07.01.14.0037	Beban Penyisihan Piutang Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	78.618.278,09	10.385.183,89	68.233.094,20	657,02
8.1.07.01.15.0001	Beban Penyisihan Piutang PBBP2	226.088.048,32	195.507.056,06	30.580.992,26	15,64
Jumlah		329.318.695,22	216.063.210,39	113.255.484,83	52,42

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2023

8.1.07.04 Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah

Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah tahun 2023 sebesar Rp4.084.720,00 mengalami penurunan sebesar Rp59.606.211,74 atau 93,59% dari beban penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah tahun 2022 sebesar Rp63.690.931,74.

5.1.4.2.1.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Beban Penyusutan dan Amortisasi yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.4. 56 Realisasi Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2023 dan 2022

Kode Rek	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
8.1.08.01	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	45.366.299.959,00	45.290.873.804,00	75.426.155,00	0,17
8.1.08.02	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	18.408.771.593,00	18.555.106.707,00	(146.335.114,00)	(0,79)
8.1.08.03	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	72.130.696.141,00	76.447.308.473,00	(4.316.612.332,00)	(5,65)
8.1.08.04	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	5.852.125,00	3.672.255,00	2.179.870,00	59,36
8.1.08.06	Beban Amortisaasi Aset Lainnya-Aset tidak Berwujud	138.507.396,00	137.856.201,83	651.194,17	0,47
Jumlah		136.050.127.214,00	140.434.817.440,83	(4.384.690.226,83)	(3,12)

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2023



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

Perubahan nilai Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2023 dari Tahun 2022 disebabkan penambahan perhitungan beban penyusutan dan amortisasi pada aset tetap dan aset tidak berwujud tahun berjalan.

Perbedaan pengakuan Beban Penyusutan dan Amortisasi dalam LO Tahun 2023 dengan selisih/perubahan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Aset Lainnya serta perubahan saldo Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud dari Tahun 2022 ke Tahun 2023 dalam Neraca per 31 Desember 2023 diungkapkan dalam CaLK terkait Penjelasan atas Pos-Pos Neraca pada *point 5.1.3* dan rincian nilai Beban Penyusutan dan Amortisasi pada masing-masing perangkat daerah telah diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Penjelasan atas Pos-Pos Neraca pada *point 5.1.3*, dan juga dapat dilihat pada *lampiran 23 s.d 26 dan lampiran 38*.

8.1.08.01 Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin

Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin tahun 2023 sebesar Rp45.366.299.959,00 mengalami peningkatan sebesar Rp75.426.155,00 atau 0,17% dari beban penyusutan peralatan dan mesin tahun 2022 sebesar Rp45.290.873.804,00 yang disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.1.4. 57 Realisasi Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin TA 2023 dan 2022

Kode Rek	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
8.1.08.01.01	Beban Penyusutan Alat Besar	2.681.868.325,00	8.856.792.383,00	(6.174.924.058,00)	(69,72)
8.1.08.01.02	Beban Penyusutan Alat Angkutan	6.267.474.687,00	16.034.829.775,00	(9.767.355.088,00)	(60,91)
8.1.08.01.03	Beban Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	426.678.380,00	2.339.883.024,00	(1.913.204.644,00)	(81,76)
8.1.08.01.04	Beban Penyusutan Alat Pertanian	60.100.833,00	875.000,00	59.225.833,00	6.768,67
8.1.08.01.05	Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	8.490.879.704,00	6.197.235.934,00	2.293.643.770,00	37,01
8.1.08.01.06	Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	1.328.145.085,00	1.517.341.804,00	(189.196.719,00)	(12,47)
8.1.08.01.07	Beban Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan	11.833.185.511,00	3.959.107.281,00	7.874.078.230,00	198,89
8.1.08.01.08	Beban Penyusutan Alat Laboratorium	4.849.474.999,00	3.934.321.999,00	915.153.000,00	23,26
8.1.08.01.09	Beban Penyusutan	79.142.038,00	2.960.000,00	76.182.038,00	2.573,72
8.1.08.01.10	Beban Penyusutan Komputer	8.422.442.543,00	2.434.235.743,00	5.988.206.800,00	246,00
8.1.08.01.13	Beban Penyusutan Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	11.560.220,00	0,00	11.560.220,00	100,00
8.1.08.01.14	Beban Penyusutan Alat Eksplorasi	8.143.963,00	0,00	8.143.963,00	100,00
8.1.08.01.15	Beban Penyusutan Alat Keselamatan Kerja	433.080.196,00	0,00	433.080.196,00	100,00
8.1.08.01.16	Beban Penyusutan Alat Peraga	18.188.600,00	0,00	18.188.600,00	100,00
8.1.08.01.17	Beban Penyusutan Peralatan Proses/Produksi	3.134.932,00	763.750,00	2.371.182,00	310,47
8.1.08.01.18	Beban Penyusutan Rambu-Rambu	308.775.727,00	0,00	308.775.727,00	100,00
8.1.08.01.19	Beban Penyusutan Peralatan Olahraga	144.024.216,00	12.527.111,00	131.497.105,00	1.049,70
	Jumlah	45.366.299.959,00	45.290.873.804,00	75.426.155,00	0,17

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2023



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

8.1.08.01.01 Beban Penyusutan Alat Besar

Beban Penyusutan Alat Besar tahun 2023 sebesar Rp2.681.868.325,00 mengalami penurunan sebesar Rp6.174.924.058,00 atau 69,72% dari beban penyusutan alat besar tahun 2022 sebesar Rp8.856.792.383,00 yang disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.1.4. 58 Rincian Beban Penyusutan Alat Besar TA 2023 dan 2022

Kode Rek	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
8.1.08.01.01.0001	Beban Penyusutan Alat Besar Darat-Tractor	267.092.680,00	387.903.605,00	(120.810.925,00)	(31,14)
8.1.08.01.01.0003	Beban Penyusutan Alat Besar Darat-Excavator	774.234.352,00	598.042.971,00	176.191.381,00	29,46
8.1.08.01.01.0005	Beban Penyusutan Alat Besar Darat-Hauler	221.463.334,00	304.691.524,00	(83.228.190,00)	(27,32)
8.1.08.01.01.0007	Beban Penyusutan Alat Besar Darat-Compacting Equipment	54.564.610,00	60.836.277,00	(6.271.667,00)	(10,31)
8.1.08.01.01.0009	Beban Penyusutan Alat Besar Darat-Loader	99.596.138,00	0,00	99.596.138,00	100,00
8.1.08.01.01.0010	Beban Penyusutan Alat Besar Darat-Alat Pengangkat	271.331.123,00	242.387.603,00	28.943.520,00	11,94
8.1.08.01.01.0011	Beban Penyusutan Alat Besar Darat-Mesin Proses	46.112.067,00	395.671.109,00	(349.559.042,00)	(88,35)
8.1.08.01.01.0016	Beban Penyusutan Alat Besar Apung-Kapal Tarik	89.260.417,00	127.906.571,00	(38.646.154,00)	(30,21)
8.1.08.01.01.0017	Beban Penyusutan Alat Besar Apung-Mesin Proses Apung	97.395.849,00	539.140.730,00	(441.744.881,00)	(81,93)
8.1.08.01.01.0019	Beban Penyusutan Alat Bantu-Alat Penarik	0,00	527.058.935,00	(527.058.935,00)	(100,00)
8.1.08.01.01.0020	Beban Penyusutan Alat Bantu-Feeder	0,00	40.377.584,00	(40.377.584,00)	(100,00)
8.1.08.01.01.0022	Beban Penyusutan Alat Bantu-Electric Generating Set	614.784.894,00	5.557.495.402,00	(4.942.710.508,00)	(88,94)
8.1.08.01.01.0023	Beban Penyusutan Alat Bantu-Pompa	81.298.933,00	7.246.144,00	74.052.789,00	1.021,96
8.1.08.01.01.0028	Beban Penyusutan Alat Bantu-Air Port Maintenance Equipment/Alat Bantu Penerbangan	64.733.928,00	68.033.928,00	(3.300.000,00)	(4,85)
	Jumlah	2.681.868.325,00	8.856.792.383,00	(6.174.924.058,00)	(69,72)

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2023

8.1.08.01.02 Beban Penyusutan Alat Angkutan

Beban Penyusutan Alat Angkutan tahun 2023 sebesar Rp6.267.474.687,00 mengalami penurunan sebesar Rp9.767.355.088,00 atau 60,91% dari beban penyusutan alat angkutan tahun 2022 sebesar Rp16.034.829.775,00 yang disajikan pada tabel sebagai berikut:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Tabel 5.1.4. 59 Rincian Beban Penyusutan Alat Angkutan TA 2023 dan 2022

Kode Rek	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
8.1.08.01. 02.0001	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.140.369.838,00	6.579.886.359,00	(5.439.516.521,00)	(82,67)
8.1.08.01. 02.0002	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	478.471.878,00	3.821.582.706,00	(3.343.110.828,00)	(87,48)
8.1.08.01. 02.0003	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	330.400.905,00	604.499.724,00	(274.098.819,00)	(45,34)
8.1.08.01. 02.0004	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	468.076.706,00	748.911.103,00	(280.834.397,00)	(37,50)
8.1.08.01. 02.0006	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	583.322.104,00	956.928.130,00	(373.606.026,00)	(39,04)
8.1.08.01. 02.0008	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Kereta Rel	0,00	768.749.337,00	(768.749.337,00)	(100,00)
8.1.08.01. 02.0009	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	86.912.379,00	100.082.543,00	(13.170.164,00)	(13,16)
8.1.08.01. 02.0010	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	57.612.500,00	223.152.879,00	(165.540.379,00)	(74,18)
8.1.08.01. 02.0011	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Penumpang	572.917,00	0,00	572.917,00	100,00
8.1.08.01. 02.0014	Beban Penyusutan Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang	470.789.796,00	0,00	470.789.796,00	100,00
8.1.08.01. 02.0015	Beban Penyusutan Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	2.442.724.070,00	2.136.945.276,00	305.778.794,00	14,31
8.1.08.01. 02.0016	Beban Penyusutan Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus	72.255.325,00	61.804.205,00	10.451.120,00	16,91
8.1.08.01. 02.0018	Beban Penyusutan Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	14.685.933,00	32.287.513,00	(17.601.580,00)	(54,52)
8.1.08.01. 02.0020	Beban Penyusutan Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Penumpang	107.947.002,00	0,00	107.947.002,00	100,00
8.1.08.01. 02.0021	Beban Penyusutan Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus	13.333.334,00	0,00	13.333.334,00	100,00
	Jumlah	6.267.474.687,00	16.034.829.775,00	(9.767.355.088,00)	(60,91)

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2023



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

8.1.08.01.03 Beban Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur

Beban Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur tahun 2023 sebesar Rp426.678.380,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.913.204.644,00 atau 81,76% dari beban penyusutan alat bengkel dan alat ukur tahun 2022 sebesar Rp2.339.883.024,00 yang disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.1.4. 60 Rincian Beban Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur TA 2023 dan 2022

Kode Rek	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
8.1.08.01. 03.0001	Beban Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi	23.114.500,00	11.447.834,00	11.666.666,00	101,91
8.1.08.01. 03.0002	Beban Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Konstruksi Logam yang Transportable (Berpindah)	6.548.200,00	0,00	6.548.200,00	100,00
8.1.08.01. 03.0003	Beban Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik	15.821.650,00	154.757.870,00	(138.936.220,00)	(89,78)
8.1.08.01. 03.0004	Beban Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Service	395.250,00	0,00	395.250,00	100,00
8.1.08.01. 03.0006	Beban Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Kayu	53.513.923,00	84.954.493,00	(31.440.570,00)	(37,01)
8.1.08.01. 03.0007	Beban Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Khusus	0,00	15.387.119,00	(15.387.119,00)	(100,00)
8.1.08.01. 03.0008	Beban Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Peralatan Las	157.500,00	683.919.186,00	(683.761.686,00)	(99,98)
8.1.08.01. 03.0009	Beban Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Pabrik Es	11.874.400,00	4.336.408,00	7.537.992,00	173,83
8.1.08.01. 03.0010	Beban Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Alat Bengkel Bermesin Lainnya	1.771.100,00	245.157.598,00	(243.386.498,00)	(99,28)
8.1.08.01. 03.0012	Beban Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik	0,00	7.919.922,00	(7.919.922,00)	(100,00)
8.1.08.01. 03.0014	Beban Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Pengangkat	641.666,00	0,00	641.666,00	100,00
8.1.08.01. 03.0015	Beban Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Standar (Standard Tools)	5.242.600,00	50.657.051,00	(45.414.451,00)	(89,65)
8.1.08.01. 03.0016	Beban Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Khusus (Special Tools)	4.090.000,00	0,00	4.090.000,00	100,00
8.1.08.01. 03.0017	Beban Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Kerja	143.014.940,00	220.250.927,00	(77.235.987,00)	(35,07)
8.1.08.01. 03.0018	Beban Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Besi	3.005.996,00	54.145.840,00	(51.139.844,00)	(94,45)
8.1.08.01. 03.0019	Beban Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Kayu	4.477.268,00	85.649.302,00	(81.172.034,00)	(94,77)
8.1.08.01. 03.0020	Beban Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-	72.132,00	0,00	72.132,00	100,00



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

Kode Rek	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
	Peralatan Tukang Kayu				
8.1.08.01. 03.0021	Beban Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Ukur, Gip, dan Feeting	1.281.885,00	12.636.564,00	(11.354.679,00)	(89,86)
8.1.08.01. 03.0022	Beban Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Bengkel Khusus Peladam	6.370.460,00	57.237.820,00	(50.867.360,00)	(88,87)
8.1.08.01. 03.0024	Beban Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur Universal	60.004.833,00	12.941.390,00	47.063.443,00	363,67
8.1.08.01. 03.0027	Beban Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur/Tes Klinis Lain	5.879.940,00	0,00	5.879.940,00	100,00
8.1.08.01. 03.0028	Beban Penyusutan Alat Ukur-Alat Kalibrasi	0,00	385.300,00	(385.300,00)	(100,00)
8.1.08.01. 03.0030	Beban Penyusutan Alat Ukur-Universal Tester	9.373.941,00	66.772.609,00	(57.398.668,00)	(85,96)
8.1.08.01. 03.0031	Beban Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur/Pembanding	20.692.498,00	1.031.250,00	19.661.248,00	1.906,55
8.1.08.01. 03.0032	Beban Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur Lain-Lain	27.794.021,00	244.800.842,00	(217.006.821,00)	(88,65)
8.1.08.01. 03.0033	Beban Penyusutan Alat Ukur-Alat Timbangan/Biara	13.355.762,00	10.643.858,00	2.711.904,00	25,48
8.1.08.01. 03.0034	Beban Penyusutan Alat Ukur-Anak Timbangan/Biara	5.956.995,00	0,00	5.956.995,00	100,00
8.1.08.01. 03.0044	Beban Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur Lainnya	2.226.920,00	314.849.841,00	(312.622.921,00)	(99,29)
	Jumlah	426.678.380,00	2.339.883.024,00	(1.913.204.644,00)	(81,76)

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2023

8.1.08.01.04 Beban Penyusutan Alat Pertanian

Beban Penyusutan Alat Pertanian tahun 2023 sebesar Rp60.100.833,00 mengalami peningkatan sebesar Rp59.225.833,00 atau 6.768,67% dari beban penyusutan alat pertanian tahun 2022 sebesar Rp875.000,00 yang disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.1.4. 61 Rincian Beban Penyusutan Alat Pertanian TA 2023 dan 2022

Kode Rek	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
8.1.08.01 .04.0003	Beban Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Panen	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	100,00
8.1.08.01 .04.0004	Beban Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian	114.583,00	0,00	114.583,00	100,00
8.1.08.01 .04.0005	Beban Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Laboratorium Pertanian	58.736.250,00	875.000,00	57.861.250,00	6.612,71
	Jumlah	60.100.833,00	875.000,00	59.225.833,00	6.768,67

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2023

8.1.08.01.05 Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga

Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga tahun 2023 sebesar Rp8.490.879.704,00 mengalami peningkatan sebesar Rp2.293.643.770,00 atau 37,01% dari beban penyusutan alat kantor dan rumah tangga tahun 2022 sebesar Rp6.197.235.934,00 yang disajikan pada tabel sebagai berikut:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Tabel 5.1.4. 62 Rincian Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga
TA 2023 dan 2022

Kode Rek	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
8.1.08.01. 05.0001	Beban Penyusutan Alat Kantor-Mesin Ketik	2.042.925,00	1.074.353.858,00	(1.072.310.933,00)	(99,81)
8.1.08.01. 05.0002	Beban Penyusutan Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jumlah	5.252.133,00	191.605.538,00	(186.353.405,00)	(97,26)
8.1.08.01. 05.0003	Beban Penyusutan Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	0,00	5.288.141,00	(5.288.141,00)	(100,00)
8.1.08.01. 05.0004	Beban Penyusutan Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	608.564.636,00	229.878.091,00	378.686.545,00	164,73
8.1.08.01. 05.0005	Beban Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	1.269.697.434,00	1.253.279.863,00	16.417.571,00	1,31
8.1.08.01. 05.0006	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Mebel	2.825.865.885,00	694.111.952,00	2.131.753.933,00	307,12
8.1.08.01. 05.0007	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pengukur Waktu	5.134.127,00	0,00	5.134.127,00	100,00
8.1.08.01. 05.0008	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	275.410.820,00	406.235.266,00	(130.824.446,00)	(32,20)
8.1.08.01. 05.0009	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	1.605.950.274,00	0,00	1.605.950.274,00	100,00
8.1.08.01. 05.0010	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	75.073.116,00	0,00	75.073.116,00	100,00
8.1.08.01. 05.0011	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.333.574.444,00	1.018.498.029,00	315.076.415,00	30,94
8.1.08.01. 05.0012	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	57.594.846,00	153.053.947,00	(95.459.101,00)	(62,37)
8.1.08.01. 05.0013	Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat	45.082.815,00	0,00	45.082.815,00	100,00
8.1.08.01. 05.0014	Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Rapat Pejabat	10.357.997,00	0,00	10.357.997,00	100,00
8.1.08.01. 05.0015	Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat	138.229.135,00	932.588.591,00	(794.359.456,00)	(85,18)
8.1.08.01. 05.0016	Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Rapat Pejabat	7.856.347,00	0,00	7.856.347,00	100,00
8.1.08.01. 05.0017	Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	6.548.493,00	0,00	6.548.493,00	100,00
8.1.08.01. 05.0018	Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Tamu di Ruangannya	10.986.280,00	0,00	10.986.280,00	100,00
8.1.08.01. 05.0019	Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat	207.657.997,00	238.342.658,00	(30.684.661,00)	(12,87)
	Jumlah	8.490.879.704,00	6.197.235.934,00	2.293.643.770,00	37,01

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2023



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

8.1.08.01.06 Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar

Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar tahun 2023 sebesar Rp1.328.145.085,00 mengalami penurunan sebesar Rp189.196.719,00 atau 12,47% dari beban penyusutan alat studio, komunikasi dan pemancar tahun 2022 sebesar Rp1.517.341.804,00 yang disajikan pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 5.1.4. 63 Rincian Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar
TA 2023 dan 2022**

Kode Rek	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
8.1.08.01.06.0001	Beban Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Audio	523.861.812,00	0,00	523.861.812,00	100,00
8.1.08.01.06.0002	Beban Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	538.308.182,00	970.291.551,00	(431.983.369,00)	(44,52)
8.1.08.01.06.0004	Beban Penyusutan Alat Studio-Peralatan Cetak	25.386.754,00	0,00	25.386.754,00	100,00
8.1.08.01.06.0005	Beban Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	100,00
8.1.08.01.06.0006	Beban Penyusutan Alat Studio-Alat Studio Lainnya	1.675.000,00	0,00	1.675.000,00	100,00
8.1.08.01.06.0007	Beban Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	98.880.474,00	0,00	98.880.474,00	100,00
8.1.08.01.06.0008	Beban Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio SSB	7.516.916,00	299.125.599,00	(291.608.683,00)	(97,49)
8.1.08.01.06.0010	Beban Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio VHF	12.222.811,00	0,00	12.222.811,00	100,00
8.1.08.01.06.0011	Beban Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio UHF	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00
8.1.08.01.06.0012	Beban Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Sosial	2.192.475,00	0,00	2.192.475,00	100,00
8.1.08.01.06.0013	Beban Penyusutan Alat Komunikasi-Alat-Alat Sandi	10.271.000,00	12.994.000,00	(2.723.000,00)	(20,96)
8.1.08.01.06.0016	Beban Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Satelit	5.648.060,00	4.898.060,00	750.000,00	15,31
8.1.08.01.06.0017	Beban Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Lainnya	28.590.600,00	89.011.068,00	(60.420.468,00)	(67,88)
8.1.08.01.06.0018	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar MF/MW	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
8.1.08.01.06.0020	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar VHF/FM	8.079.500,00	0,00	8.079.500,00	100,00
8.1.08.01.06.0023	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Antena MF/MW	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00
8.1.08.01.06.0025	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Antena VHF/FM	2.744.800,00	300.000,00	2.444.800,00	814,93
8.1.08.01.06.0026	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Antena UHF	1.145.000,00	1.076.250,00	68.750,00	6,39
8.1.08.01.06.0027	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Antena SHF/Parabola	5.055.434,00	70.621.268,00	(65.565.834,00)	(92,84)



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode Rek	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
8.1.08.01. 06.0029	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Translator UHF/UHF	132.004,00	132.004,00	0,00	0,00
8.1.08.01. 06.0036	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar-Switcher Antena	50.000,00	318.815,00	(268.815,00)	(84,32)
8.1.08.01. 06.0037	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar-Switcher/Menara Antena	0,00	89.605,00	(89.605,00)	(100,00)
8.1.08.01. 06.0039	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar-Humidity Control	5.405.184,00	5.405.184,00	0,00	0,00
8.1.08.01. 06.0040	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar-Program Input Equipment	940.800,00	445.800,00	495.000,00	111,04
8.1.08.01. 06.0041	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Penerima VHF	439.600,00	34.533.614,00	(34.094.014,00)	(98,73)
8.1.08.01. 06.0056	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Antena Pemancar dan Penerima MF+HF	312.500,00	0,00	312.500,00	100,00
8.1.08.01. 06.0064	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar-Sumber Tenaga	20.321.330,00	13.578.986,00	6.742.344,00	49,65
8.1.08.01. 06.0065	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar Lainnya	14.520.000,00	14.520.000,00	0,00	0,00
8.1.08.01. 06.0069	Beban Penyusutan Peralatan Komunikasi Navigasi-Radar	1.325.000,00	0,00	1.325.000,00	100,00
8.1.08.01. 06.0072	Beban Penyusutan Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi Navigasi Lainnya	10.494.849,00	0,00	10.494.849,00	100,00
Jumlah		1.328.145.085,00	1.517.341.804,00	(189.196.719,00)	(12,47)

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2023

8.1.08.01.07 Beban Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan

Beban Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan tahun 2023 sebesar Rp11.833.185.511,00 mengalami peningkatan sebesar Rp7.874.078.230,00 atau 198,89% dari beban penyusutan alat kedokteran dan kesehatan tahun 2022 sebesar Rp3.959.107.281,00 yang disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.1.4. 64 Rincian Beban Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan TA 2023 dan 2022

Kode Rek	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
8.1.08.01. 07.0001	Beban Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	3.386.809.621,00	0,00	3.386.809.621,00	100,00
8.1.08.01. 07.0002	Beban Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gigi	229.951.375,00	0,00	229.951.375,00	100,00
8.1.08.01. 07.0003	Beban Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Keluarga Berencana	6.448.706,00	0,00	6.448.706,00	100,00
8.1.08.01. 07.0004	Beban Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah	821.664.891,00	0,00	821.664.891,00	100,00
8.1.08.01. 07.0005	Beban Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	885.071.696,00	0,00	885.071.696,00	100,00
8.1.08.01.	Beban Penyusutan Alat	28.164.639,00	0,00	28.164.639,00	100,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode Rek	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
07.0006	Kedokteran-Alat Kedokteran THT				
8.1.08.01. 07.0007	Beban Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Mata	35.106.985,00	0,00	35.106.985,00	100,00
8.1.08.01. 07.0008	Beban Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	1.450.512.404,00	11.279.140,00	1.439.233.264,00	12.760,13
8.1.08.01. 07.0009	Beban Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Kamar Jenazah/Mortuary	219.700.000,00	0,00	219.700.000,00	100,00
8.1.08.01. 07.0010	Beban Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Anak	232.597.611,00	0,00	232.597.611,00	100,00
8.1.08.01. 07.0011	Beban Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Poliklinik	6.952.783,00	48.100,00	6.904.683,00	14.354,85
8.1.08.01. 07.0012	Beban Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	77.985.213,00	20.683.873,00	57.301.340,00	277,03
8.1.08.01. 07.0013	Beban Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Neurologi (Saraf)	769.679.871,00	764.078.057,00	5.601.814,00	0,73
8.1.08.01. 07.0014	Beban Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Jantung	223.265.601,00	831.217.122,00	(607.951.521,00)	(73,14)
8.1.08.01. 07.0015	Beban Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Radiodiagnostic	295.860.165,00	608.597.460,00	(312.737.295,00)	(51,39)
8.1.08.01. 07.0016	Beban Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Patalogi Anatomy	1.502.545,00	0,00	1.502.545,00	100,00
8.1.08.01. 07.0017	Beban Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Transfusi Darah	21.006.980,00	21.761.418,00	(754.438,00)	(3,47)
8.1.08.01. 07.0019	Beban Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Nuklir	213.199.519,00	260.177.160,00	(46.977.641,00)	(18,06)
8.1.08.01. 07.0021	Beban Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gawat Darurat	1.385.939.622,00	1.394.029.954,00	(8.090.332,00)	(0,58)
8.1.08.01. 07.0024	Beban Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran ICU	84.416.036,00	0,00	84.416.036,00	100,00
8.1.08.01. 07.0025	Beban Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran ICCU	117.040,00	60.000,00	57.040,00	95,07
8.1.08.01. 07.0026	Beban Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah Jantung	728.700,00	530.050,00	198.650,00	37,48
8.1.08.01. 07.0029	Beban Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Lainnya	311.389.416,00	46.644.947,00	264.744.469,00	567,57
8.1.08.01. 07.0030	Beban Penyusutan Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Matra Laut	11.565.000,00	0,00	11.565.000,00	100,00
8.1.08.01. 07.0032	Beban Penyusutan Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Kepolisian	441.950,00	0,00	441.950,00	100,00
8.1.08.01. 07.0034	Beban Penyusutan Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	1.133.107.142,00	0,00	1.133.107.142,00	100,00
Jumlah		11.833.185.511,00	3.959.107.281,00	7.874.078.230,00	198,89

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2023



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

8.1.08.01.08 Beban Penyusutan Alat Laboratorium

Beban Penyusutan Alat Laboratorium tahun 2023 sebesar Rp4.849.474.999,00 mengalami peningkatan sebesar Rp915.153.000,00 atau 23,26% dari beban penyusutan alat laboratorium tahun 2022 sebesar Rp3.934.321.999,00 yang disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.1.4. 65 Rincian Beban Penyusutan Alat Laboratorium TA 2023 dan 2022

Kode Rek	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
8.1.08.01.08.0001	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan	47.846.351,00	0,00	47.846.351,00	100,00
8.1.08.01.08.0002	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mikrobiologi Teknik Penyehatan	186.832.449,00	4.050.000,00	182.782.449,00	4.513,15
8.1.08.01.08.0003	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hidrokimia	768.750,00	0,00	768.750,00	100,00
8.1.08.01.08.0006	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	11.991.250,00	0,00	11.991.250,00	100,00
8.1.08.01.08.0007	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Aspal, Cat, dan Kimia	5.032.500,00	0,00	5.032.500,00	100,00
8.1.08.01.08.0008	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan	18.620.111,00	8.136.517,00	10.483.594,00	128,85
8.1.08.01.08.0010	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Logam, Mesin, dan Listrik	88.640.440,00	62.447.540,00	26.192.900,00	41,94
8.1.08.01.08.0011	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum	240.183.401,00	4.437.500,00	235.745.901,00	5.312,58
8.1.08.01.08.0012	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mikrobiologi	26.186.744,00	3.517.801,00	22.668.943,00	644,41
8.1.08.01.08.0013	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia	16.807.945,00	8.788.300,00	8.019.645,00	91,25
8.1.08.01.08.0014	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Patologi	287.118.122,00	7.816.537,00	279.301.585,00	3.573,21
8.1.08.01.08.0015	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Immunologi	1.682.085,00	4.021.717,00	(2.339.632,00)	(58,17)
8.1.08.01.08.0016	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hematologi	2.769.674,00	5.319.532,00	(2.549.858,00)	(47,93)
8.1.08.01.08.0017	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Film	22.341.597,00	25.431.013,00	(3.089.416,00)	(12,15)
8.1.08.01.08.0018	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Makanan	14.442.045,00	13.538.775,00	903.270,00	6,67
8.1.08.01.08.0019	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Farmasi	5.070.392,00	2.037.918,00	3.032.474,00	148,80
8.1.08.01.08.0020	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika	76.387.886,00	79.598.457,00	(3.210.571,00)	(4,03)
8.1.08.01.08.0024	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pasir	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode Rek	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
8.1.08.01.08.0026	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pembuatan Pola	2.015.000,00	2.042.500,00	(27.500,00)	(1,35)
8.1.08.01.08.0028	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pengelasan	0,00	1.833.333,00	(1.833.333,00)	(100,00)
8.1.08.01.08.0033	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas	1.796.539,00	932.018,00	864.521,00	92,76
8.1.08.01.08.0034	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Tekstil	34.875.000,00	34.875.000,00	0,00	0,00
8.1.08.01.08.0037	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Kulit, Karet, dan Plastik	1.233.088,00	10.213.134,00	(8.980.046,00)	(87,93)
8.1.08.01.08.0040	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Selulosa	3.850.000,00	3.850.000,00	0,00	0,00
8.1.08.01.08.0041	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pertanian	62.009.204,00	1.499.505.743,00	(1.437.496.539,00)	(95,86)
8.1.08.01.08.0042	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Elektronika dan Daya	1.571.625,00	1.571.625,00	0,00	0,00
8.1.08.01.08.0043	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Energi Surya	1.622.500,00	1.622.500,00	0,00	0,00
8.1.08.01.08.0045	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Oseanografi	3.200.000,00	2.970.833,00	229.167,00	7,71
8.1.08.01.08.0046	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Perairan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
8.1.08.01.08.0047	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Biologi Perairan	21.818.233,00	67.414.373,00	(45.596.140,00)	(67,64)
8.1.08.01.08.0048	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Biologi	51.018.876,00	53.773.855,00	(2.754.979,00)	(5,12)
8.1.08.01.08.0049	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Geofisika	6.618.125,00	6.280.677,00	337.448,00	5,37
8.1.08.01.08.0051	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia	6.421.250,00	6.421.250,00	0,00	0,00
8.1.08.01.08.0052	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Industri	150.000,00	64.063,00	85.937,00	134,14
8.1.08.01.08.0053	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kesehatan Kerja	187.562,00	15.630,00	171.932,00	1.100,01
8.1.08.01.08.0054	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Laboratorium Kearsipan	118.748.036,00	118.168.229,00	579.807,00	0,49
8.1.08.01.08.0055	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Laboratorium Hematologi dan Urinalisis	490.892.484,00	450.377.260,00	40.515.224,00	9,00
8.1.08.01.08.0056	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lain	487.653.913,00	501.526.876,00	(13.872.963,00)	(2,77)
8.1.08.01.08.	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium	53.125,00	4.427,00	48.698,00	1.100,02



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode Rek	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
0064	Lainnya				
8.1.08.01.08.0065	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium Nuklir-Analytical Instrument	2.166.658,00	0,00	2.166.658,00	100,00
8.1.08.01.08.0066	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium Nuklir-Instrument Probe/Sensor	12.333.332,00	0,00	12.333.332,00	100,00
8.1.08.01.08.0067	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium Nuklir-General Laboratory Tool	274.258,00	0,00	274.258,00	100,00
8.1.08.01.08.0068	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium Nuklir-Glassware Plastic/Utensils	439.000,00	0,00	439.000,00	100,00
8.1.08.01.08.0069	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium Nuklir-Laboratory Safety Equipment	1.326.666,00	0,00	1.326.666,00	100,00
8.1.08.01.08.0071	Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Bahasa Indonesia	91.772.071,00	0,00	91.772.071,00	100,00
8.1.08.01.08.0072	Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Matematika	420.987.145,00	0,00	420.987.145,00	100,00
8.1.08.01.08.0073	Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: IPA Dasar	326.375.808,00	0,00	326.375.808,00	100,00
8.1.08.01.08.0074	Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: IPA Lanjutan	74.990.990,00	0,00	74.990.990,00	100,00
8.1.08.01.08.0075	Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: IPA Menengah	266.648.808,00	0,00	266.648.808,00	100,00
8.1.08.01.08.0076	Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: IPA Atas	977.379,00	0,00	977.379,00	100,00
8.1.08.01.08.0077	Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: IPS	116.406.059,00	0,00	116.406.059,00	100,00
8.1.08.01.08.0078	Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Agama	172.779.890,00	169.613.510,00	3.166.380,00	1,87
8.1.08.01.08.0079	Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Keterampilan	2.712.696,00	3.770.414,00	(1.057.718,00)	(28,05)
8.1.08.01.08.0080	Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Kesenian	373.037.295,00	324.975.774,00	48.061.521,00	14,79
8.1.08.01.08.0081	Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Olahraga	284.726.368,00	382.702.247,00	(97.975.879,00)	(25,60)
8.1.08.01.08.0082	Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: PKN	3.176.875,00	3.273.125,00	(96.250,00)	(2,94)
8.1.08.01.08.0084	Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Kejuruan	29.844.613,00	31.730.110,00	(1.885.497,00)	(5,94)
8.1.08.01.08.0085	Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga PAUD/TK	5.832.721,00	1.119.113,00	4.713.608,00	421,19
8.1.08.01.08.0086	Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	13.097.060,00	10.199.440,00	2.897.620,00	28,41
8.1.08.	Beban Penyusutan Alat Laboratorium	5.499.226,00	0,00	5.499.226,00	100,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode Rek	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
01.08.0088	Fisika Nuklir/Elektronika-Modular Counting And Scientific Electronic				
8.1.08.01.08.0090	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Recorder Display	4.992.613,00	0,00	4.992.613,00	100,00
8.1.08.01.08.0091	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-System/Power Supply	619.279,00	0,00	619.279,00	100,00
8.1.08.01.08.0092	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Measuring/Testing Device	241.614,00	0,00	241.614,00	100,00
8.1.08.01.08.0097	Beban Penyusutan Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Ukur Fisika Kesehatan	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	100,00
8.1.08.01.08.0098	Beban Penyusutan Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Kesehatan Kerja	117.736.686,00	0,00	117.736.686,00	100,00
8.1.08.01.08.0099	Beban Penyusutan Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Proteksi Lingkungan	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
8.1.08.01.08.0100	Beban Penyusutan Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Meteorological Equipment	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
8.1.08.01.08.0107	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah	21.317.801,00	0,00	21.317.801,00	100,00
8.1.08.01.08.0108	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Udara	17.542.171,00	0,00	17.542.171,00	100,00
8.1.08.01.08.0109	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kebisingan dan Getaran	1.965.310,00	0,00	1.965.310,00	100,00
8.1.08.01.08.0110	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Laboratorium Lingkungan	17.332.623,00	0,00	17.332.623,00	100,00
8.1.08.01.08.0111	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Penunjang	23.101.816,00	0,00	23.101.816,00	100,00
8.1.08.01.08.0112	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya	607.428,00	0,00	607.428,00	100,00
8.1.08.01.08.0115	Beban Penyusutan Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Data Acquisition and Analyzing System	25.172.298,00	0,00	25.172.298,00	100,00
8.1.08.01.08.0116	Beban Penyusutan Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Cavitation Tunnel	7.850.000,00	0,00	7.850.000,00	100,00
8.1.08.01.08.0118	Beban Penyusutan Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Peralatan Umum	7.097.372,00	0,00	7.097.372,00	100,00
8.1.08.01.08.0119	Beban Penyusutan Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Pemesinan:Model Ship Workshop	7.857.779,00	0,00	7.857.779,00	100,00
8.1.08.01.08.0120	Beban Penyusutan Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Pemesinan:Propeller Model Workshop	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
8.1.08.01.08.0126	Beban Penyusutan Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-MOB	10.145.999,00	8.733.333,00	1.412.666,00	16,18
8.1.08.01.08.0127	Beban Penyusutan Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Photo and Film Equipment	2.522.990,00	0,00	2.522.990,00	100,00
8.1.08.	Beban Penyusutan Alat Laboratorium	577.500,00	0,00	577.500,00	100,00



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

Kode Rek	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
01.08.0132	Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Listrik dan Mekanik				
8.1.08.0134	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lain	20.332.500,00	0,00	20.332.500,00	100,00
Jumlah		4.849.474.999,00	3.934.321.999,00	915.153.000,00	23,26

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2023

8.1.08.01.09 Beban Penyusutan

Beban Penyusutan tahun 2023 sebesar Rp79.142.038,00 mengalami peningkatan sebesar Rp76.182.038,00 atau 2.573,72% dari beban penyusutan komputer tahun 2022 sebesar Rp2.960.000,00 yang disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.1.4. 66 Rincian Beban Penyusutan TA 2023 dan 2022

Kode Rek	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
8.1.08.01.09.0010	Beban Penyusutan Senjata Api-Senjata Lain-Lain	4.605.250,00	2.960.000,00	1.645.250,00	55,58
8.1.08.01.09.0011	Beban Penyusutan Persenjataan Non Senjata Api-Alat Keamanan	65.259.183,00	0,00	65.259.183,00	100,00
8.1.08.01.09.0012	Beban Penyusutan Persenjataan Non Senjata Api-Non Senjata Api	1.297.292,00	0,00	1.297.292,00	100,00
8.1.08.01.09.0014	Beban Penyusutan Persenjataan Non Senjata Api-Alat Nuklir, Biologi Dan Kimia	7.980.313,00	0,00	7.980.313,00	100,00
Jumlah		79.142.038,00	2.960.000,00	76.182.038,00	2.573,72

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2023

8.1.08.01.10 Beban Penyusutan Komputer

Beban Penyusutan Komputer tahun 2023 sebesar Rp8.422.442.543,00 mengalami peningkatan sebesar Rp5.988.206.800,00 atau 246,00% dari beban penyusutan komputer tahun 2022 sebesar Rp2.434.235.743,00 yang disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.1.4. 67 Rincian Beban Penyusutan Komputer TA 2023 dan 2022

Kode Rek	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
8.1.08.01.10.0001	Beban Penyusutan Komputer Unit-Komputer Jaringan	63.000.925,00	0,00	63.000.925,00	100,00
8.1.08.01.10.0002	Beban Penyusutan Komputer Unit-Personal Computer	6.832.095.730,00	2.244.532.327,00	4.587.563.403,00	204,39
8.1.08.01.10.0003	Beban Penyusutan Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	9.615.625,00	0,00	9.615.625,00	100,00
8.1.08.01.10.0004	Beban Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe	81.573.236,00	0,00	81.573.236,00	100,00



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

Kode Rek	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
8.1.08.01. 10.0005	Beban Penyusutan Peralatan Komputer- Peralatan Mini Computer	37.450.047,00	0,00	37.450.047,00	100,00
8.1.08.01. 10.0006	Beban Penyusutan Peralatan Komputer- Peralatan Personal Computer	1.018.674.105,00	189.703.416,00	828.970.689,00	436,98
8.1.08.01. 10.0007	Beban Penyusutan Peralatan Komputer- Peralatan Jaringan	364.541.400,00	0,00	364.541.400,00	100,00
8.1.08.01. 10.0008	Beban Penyusutan Peralatan Komputer- Peralatan Komputer Lainnya	15.491.475,00	0,00	15.491.475,00	100,00
Jumlah		8.422.442.543,00	2.434.235.743,00	5.988.206.800,00	246,00

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2023

8.1.08.01.13 Beban Penyusutan Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian

Beban Penyusutan alat produksi, pengolahan dan pemurnian tahun 2023 sebesar Rp11.560.220,00 mengalami peningkatan 100,00% dari beban penyusutan alat produksi, pengolahan dan pemurnian tahun 2022 yang disajikan pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 5.1.4. 68 Rincian Beban Penyusutan Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian
TA 2023 dan 2022**

Kode Rek	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
8.1.08.01 .13.0002	Beban Penyusutan Sumur-Sumur Pemboran	3.531.500,00	0,00	3.531.500,00	100,00
8.1.08.01 .13.0003	Beban Penyusutan Sumur-Sumur Lainnya	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	100,00
8.1.08.01 .13.0005	Beban Penyusutan Produksi-Produksi Lainnya	6.828.720,00	0,00	6.828.720,00	100,00
Jumlah		11.560.220,00	0,00	11.560.220,00	100,00

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2023

8.1.08.01.14 Beban Penyusutan Alat Bantu Eksplorasi

Beban Penyusutan dengan kode rekening 8.1.08.01.14.0003 merupakan beban penyusutan alat bantu eksplorasi-alat bantu eksplorasi lainnya terealisasi sebesar Rp8.143.963,00 pada tahun 2023.

8.1.08.01.15 Beban Penyusutan Alat Keselamatan Kerja

Beban Penyusutan alat keselamatan kerja tahun 2023 sebesar Rp433.080.196,00 mengalami peningkatan 100,00% dari beban penyusutan alat keselamatan kerja tahun 2022 yang disajikan pada tabel sebagai berikut:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Tabel 5.1.4. 69 Rincian Beban Penyusutan Alat Keselamatan Kerja TA 2023 dan 2022

Kode Rek	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
8.1.08.01.15.0004	Beban Penyusutan Alat Pelindung-Baju Pengaman	11.735.400,00	0,00	11.735.400,00	100,00
8.1.08.01.15.0006	Beban Penyusutan Alat Pelindung-Topi Kerja	460.000,00	0,00	460.000,00	100,00
8.1.08.01.15.0007	Beban Penyusutan Alat Pelindung-Sabuk Pengaman	822.800,00	0,00	822.800,00	100,00
8.1.08.01.15.0008	Beban Penyusutan Alat Pelindung-Sepatu Lapangan	2.101.000,00	0,00	2.101.000,00	100,00
8.1.08.01.15.0009	Beban Penyusutan Alat Pelindung-Alat Pelindung Lainnya	15.718.201,00	0,00	15.718.201,00	100,00
8.1.08.01.15.0011	Beban Penyusutan Alat SAR-Alat Pendukung Pencarian	372.639.287,00	0,00	372.639.287,00	100,00
8.1.08.01.15.0012	Beban Penyusutan Alat SAR-Alat Kerja Bawah Air	5.809.960,00	0,00	5.809.960,00	100,00
8.1.08.01.15.0017	Beban Penyusutan Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Bantu Pelayanan dan Pengamanan Bandar Udara	194.752,00	0,00	194.752,00	100,00
8.1.08.01.15.0018	Beban Penyusutan Alat Kerja Penerbangan-Peralatan Fasilitas Listrik Bandar Udara	23.598.796,00	0,00	23.598.796,00	100,00
Jumlah		433.080.196,00	0,00	433.080.196,00	100,00

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2023

8.1.08.01.16 Beban Penyusutan Alat Peraga

Beban Penyusutan alat peraga tahun 2023 sebesar Rp18.188.600,00 mengalami peningkatan 100,00% dari beban penyusutan alat peraga tahun 2022 yang disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.1.4. 70 Rincian Beban Penyusutan Alat Peraga TA 2023 dan 2022

Kode Rek	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
8.1.08.01.16.0002	Beban Penyusutan Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Percontohan	438.600,00	0,00	438.600,00	100,00
8.1.08.01.16.0003	Beban Penyusutan Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya	17.750.000,00	0,00	17.750.000,00	100,00
Jumlah		18.188.600,00	0,00	18.188.600,00	100,00

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2023

8.1.08.01.17 Beban Penyusutan Alat Proses/Produksi

Beban Penyusutan Alat Proses/Produksi tahun 2023 sebesar Rp3.134.932,00 mengalami peningkatan sebesar Rp2.371.182,00 atau 310,47% dari beban penyusutan



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

alat proses/produksi tahun 2022 sebesar Rp763.750,00 yang disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.1.4. 71 Rincian Beban Penyusutan Alat Proses/Produksi TA 2023 dan 2022

Kode Rek	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
8.1.08.01.17.0013	Beban Penyusutan Unit Peralatan Proses/Produksi-Gas-Solid Drying Equipment	700.000,00	670.834,00	29.166,00	4,35
8.1.08.01.17.0019	Beban Penyusutan Unit Peralatan Proses/Produksi-Transport and Storage Equipment For Liquid	1.320.000,00	0,00	1.320.000,00	100,00
8.1.08.01.17.0020	Beban Penyusutan Unit Peralatan Proses/Produksi-Solid Material Handling Equipment	1.114.932,00	92.916,00	1.022.016,00	1.099,94
Jumlah		3.134.932,00	763.750,00	2.371.182,00	310,47

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2023

8.1.08.01.18 Beban Penyusutan Rambu-Rambu

Beban Penyusutan rambu-rambu tahun 2023 sebesar Rp308.775.727,00 mengalami peningkatan 100,00% dari beban penyusutan rambu-rambu tahun 2022 yang disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.1.4. 72 Rincian Beban Penyusutan Rambu-Rambu TA 2023 dan 2022

Kode Rek	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
8.1.08.01.18.0002	Beban Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar	288.818.642,00	0,00	288.818.642,00	100,00
8.1.08.01.18.0003	Beban Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	5.150.000,00	0,00	5.150.000,00	100,00
8.1.08.01.18.0009	Beban Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara-Flood Lights	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00
8.1.08.01.18.0011	Beban Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut-Rambu Lalu Lintas Laut	13.307.085,00	0,00	13.307.085,00	100,00
Jumlah		308.775.727,00	0,00	308.775.727,00	100,00

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2023

8.1.08.01.19 Beban Penyusutan Peralatan Olahraga

Beban Penyusutan Peralatan Olahraga tahun 2023 sebesar Rp144.024.216,00 mengalami peningkatan sebesar Rp131.497.105,00 atau 1.049,70% dari beban penyusutan peralatan olahraga tahun 2022 sebesar Rp12.527.111,00 yang disajikan pada tabel sebagai berikut:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

Tabel 5.1.4. 73 Rincian Beban Penyusutan Peralatan Olahraga TA 2023 dan 2022

Kode Rek	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
8.1.08.01.19.0001	Beban Penyusutan Peralatan Olahraga- Peralatan Olahraga Atletik	4.194.446,00	0,00	4.194.446,00	100,00
8.1.08.01.19.0002	Beban Penyusutan Peralatan Olahraga- Peralatan Permainan	80.453.502,00	12.527.111,00	67.926.391,00	542,24
8.1.08.01.19.0003	Beban Penyusutan Peralatan Olahraga- Peralatan Senam	47.548.631,00	0,00	47.548.631,00	100,00
8.1.08.01.19.0006	Beban Penyusutan Peralatan Olahraga- Peralatan Olahraga Lainnya	11.827.637,00	0,00	11.827.637,00	100,00
Jumlah		144.024.216,00	12.527.111,00	131.497.105,00	1.049,70

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2023

8.1.08.02 Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan

Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan tahun 2023 sebesar Rp18.408.771.593,00 mengalami penurunan sebesar Rp146.335.114,00 atau 0,79% dari beban penyusutan gedung dan bangunan tahun 2022 sebesar Rp18.555.106.707,00 yang disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.1.4. 74 Rincian Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan TA 2023 dan 2022

Kode Rek	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
8.1.08.02.01	Beban Penyusutan Bangunan Gedung	18.070.757.084,00	18.272.063.424,00	(201.306.340,00)	(1,10)
8.1.08.02.02	Beban Penyusutan Monumen	52.579.064,00	142.627.261,00	(90.048.197,00)	(63,14)
8.1.08.02.03	Beban Penyusutan Bangunan Menara	8.605.750,00	4.930.750,00	3.675.000,00	74,53
8.1.08.02.04	Beban Penyusutan Tugu Titik Kontrol/Pasti	276.829.695,00	135.485.272,00	141.344.423,00	104,32
Jumlah		18.408.771.593,00	18.555.106.707,00	(146.335.114,00)	(0,79)

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2023

8.1.08.02.01 Beban Penyusutan Bangunan Gedung

Beban Penyusutan Bangunan Gedung tahun 2023 sebesar Rp18.070.757.084,00 mengalami penurunan sebesar Rp201.306.340,00 atau 1,10% dari beban penyusutan bangunan gedung tahun 2022 sebesar Rp18.272.063.424,00 yang disajikan pada tabel sebagai berikut:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Tabel 5.1.4. 75 Rincian Beban Penyusutan Bangunan Gedung TA 2023 dan 2022

Kode Rek	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
8.1.08.02.01.0001	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	2.961.616.627,00	3.252.809.258,00	(291.192.631,00)	(8,95)
8.1.08.02.01.0002	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	859.817.649,00	514.902.938,00	344.914.711,00	66,99
8.1.08.02.01.0003	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Untuk Bengkel/Hanggar	808.000,00	0,00	808.000,00	100,00
8.1.08.02.01.0004	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Instalasi	340.470.910,00	311.808.945,00	28.661.965,00	9,19
8.1.08.02.01.0005	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Laboratorium	599.167.150,00	451.626.625,00	147.540.525,00	32,67
8.1.08.02.01.0006	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	3.187.616.009,00	4.315.009.123,00	(1.127.393.114,00)	(26,13)
8.1.08.02.01.0008	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah	96.013.674,00	114.845.186,00	(18.831.512,00)	(16,40)
8.1.08.02.01.0009	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	281.731.485,00	279.352.987,00	2.378.498,00	0,85
8.1.08.02.01.0010	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	4.582.912.012,00	4.303.881.968,00	279.030.044,00	6,48
8.1.08.02.01.0011	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga	89.864.954,00	85.933.749,00	3.931.205,00	4,57
8.1.08.02.01.0012	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	1.282.771.664,00	1.304.490.364,00	(21.718.700,00)	(1,66)
8.1.08.02.01.0013	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	80.698.567,00	76.104.981,00	4.593.586,00	6,04
8.1.08.02.01.0014	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Garasi/Pool	131.822.884,00	132.276.017,00	(453.133,00)	(0,34)
8.1.08.02.01.0015	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pematong Hewan	26.467.706,00	26.467.706,00	0,00	0,00
8.1.08.02.01.0016	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Perpustakaan	587.337.894,00	577.436.512,00	9.901.382,00	1,71
8.1.08.02.01.0018	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	5.382.894,00	5.382.894,00	0,00	0,00
8.1.08.02.01.	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-	1.265.518,00	200.000,00	1.065.518,00	532,76



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode Rek	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
0025	Bangunan Terbuka				
8.1.08.02.01.0029	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peternakan/Perikanan	13.311.354,00	12.829.588,00	481.766,00	3,76
8.1.08.02.01.0030	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	191.493.398,00	199.620.879,00	(8.127.481,00)	(4,07)
8.1.08.02.01.0032	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	54.007.983,00	74.807.316,00	(20.799.333,00)	(27,80)
8.1.08.02.01.0034	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pabrik	172.214.980,00	182.849.736,00	(10.634.756,00)	(5,82)
8.1.08.02.01.0035	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Stasiun Bus	8.918.936,00	8.918.936,00	0,00	0,00
8.1.08.02.01.0036	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	2.379.167,00	2.129.500,00	249.667,00	11,72
8.1.08.02.01.0037	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	664.649.335,00	633.325.931,00	31.323.404,00	4,95
8.1.08.02.01.0038	Beban Penyusutan Bangunan Gudang Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I	190.174.498,00	0,00	190.174.498,00	100,00
8.1.08.02.01.0039	Beban Penyusutan Bangunan Gudang Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II	166.882.706,00	5.422.896,00	161.459.810,00	2.977,37
8.1.08.02.01.0040	Beban Penyusutan Bangunan Gudang Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III	1.167.818.097,00	1.030.489.033,00	137.329.064,00	13,33
8.1.08.02.01.0041	Beban Penyusutan Bangunan Gudang Tempat Tinggal-Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	74.710.617,00	36.787.082,00	37.923.535,00	103,09
8.1.08.02.01.0042	Beban Penyusutan Bangunan Gudang Tempat Tinggal-Asrama	145.058.223,00	75.786.770,00	69.271.453,00	91,40
8.1.08.02.01.0043	Beban Penyusutan Bangunan Gudang Tempat Tinggal-Hotel	15.672.679,00	23.289.334,00	(7.616.655,00)	(32,70)
8.1.08.02.01.0044	Beban Penyusutan Bangunan Gudang Tempat Tinggal-Motel	20.569.864,00	54.844.145,00	(34.274.281,00)	(62,49)
8.1.08.02.01.0045	Beban Penyusutan Bangunan Gudang Tempat Tinggal-Flat/Rumah Susun	9.259.500,00	0,00	9.259.500,00	100,00
8.1.08.02.01.0049	Beban Penyusutan Bangunan Gudang Tempat Tinggal-Rumah Tidak Bersusun	57.870.150,00	178.433.025,00	(120.562.875,00)	(67,57)
	Jumlah	18.070.757.084,00	18.272.063.424,00	(201.306.340,00)	(1,10)

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2023

8.1.08.02.02 Beban Penyusutan Monumen

Beban Penyusutan Monumen tahun 2023 sebesar Rp52.579.064,00 mengalami penurunan sebesar Rp90.048.197,00 atau 63,14% dari beban penyusutan monumen tahun 2022 sebesar Rp142.627.261,00 yang disajikan pada tabel sebagai berikut:



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

Tabel 5.1.4. 76 Rincian Beban Penyusutan Monumen TA 2023 dan 2022

Kode Rek	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
8.1.08.02.02.0002	Beban Penyusutan Candi/Tugu Peringatan/ Prasasti-Tugu	20.417.109,00	8.808.429,00	11.608.680,00	131,79
8.1.08.02.02.0003	Beban Penyusutan Candi/Tugu Peringatan/ Prasasti-Bangunan Peninggalan	32.161.955,00	133.818.832,00	(101.656.877,00)	(75,97)
Jumlah		52.579.064,00	142.627.261,00	(90.048.197,00)	(63,14)

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2023

8.1.08.02.03 Beban Penyusutan Bangunan Menara

Beban Penyusutan Bangunan Menara tahun 2023 sebesar Rp8.605.750,00 mengalami peningkatan sebesar Rp3.675.000,00 atau 74,53% dari beban penyusutan bangunan menara tahun 2022 sebesar Rp4.930.750,00 yang disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.1.4. 77 Rincian Beban Penyusutan Bangunan Menara TA 2023 dan 2022

Kode Rek	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
8.1.08.02.03.0002	Beban Penyusutan Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Perambuan Penerangan Pantai	3.675.000,00	0,00	3.675.000,00	100,00
8.1.08.02.03.0003	Beban Penyusutan Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Telekomunikasi	4.930.750,00	4.930.750,00	0,00	0,00
Jumlah		8.605.750,00	4.930.750,00	3.675.000,00	74,53

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2023

8.1.08.02.04 Beban Penyusutan Tugu Titik Kontrol/Pasti

Beban Penyusutan Tugu Titik Kontrol/Pasti tahun 2023 sebesar Rp276.829.695,00 mengalami peningkatan sebesar Rp141.344.423,00 atau 104,32% dari beban penyusutan tugu titik kontrol/pasti tahun 2022 sebesar Rp135.485.272,00 yang disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.1.4. 78 Rincian Beban Penyusutan Tugu Titik Kontrol/Pasti TA 2023 dan 2022

Kode Rek	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
8.1.08.02.04.0001	Beban Penyusutan Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Batas Administrasi	14.312.434,00	0,00	14.312.434,00	100,00
8.1.08.02.04.0003	Beban Penyusutan Tugu/Tanda Batas-Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	796.271,00	0,00	796.271,00	100,00
8.1.08.02.04.0004	Beban Penyusutan Tugu/Tanda Batas-Pagar	256.894.587,00	134.784.306,00	122.110.281,00	90,60
8.1.08.02.04.0005	Beban Penyusutan Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Batas Lainnya	4.826.403,00	700.966,00	4.125.437,00	588,54
Jumlah		276.829.695,00	135.485.272,00	141.344.423,00	104,32

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2023



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

8.1.08.03 Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi

Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi tahun 2023 sebesar Rp72.130.696.141,00 mengalami penurunan sebesar Rp4.316.612.332,00 atau 5,65% dari beban penyusutan jalan, jaringan dan jaringan tahun 2022 sebesar Rp76.447.308.473,00 yang disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.1.4. 79 Realisasi Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi TA 2023 dan 2022

Kode Rek	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
8.1.08.03.01	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	54.431.878.724,00	66.005.289.811,00	(11.573.411.087,00)	(17,53)
8.1.08.03.02	Beban Penyusutan Bangunan Air	12.971.084.416,00	9.545.460.272,00	3.425.624.144,00	35,89
8.1.08.03.03	Beban Penyusutan Instalasi	934.977.400,00	688.698.302,00	246.279.098,00	35,76
8.1.08.03.04	Beban Penyusutan Jaringan	3.792.755.601,00	207.860.088,00	3.584.895.513,00	1.724,67
Jumlah		72.130.696.141,00	76.447.308.473,00	(4.316.612.332,00)	(5,65)

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2022

8.1.08.03.01 Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan

Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan tahun 2023 sebesar Rp54.431.878.724,00 mengalami penurunan sebesar Rp11.573.411.087,00 atau 17,53% dari beban penyusutan jalan dan jembatan tahun 2022 sebesar Rp66.005.289.811,00 yang disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.1.4. 80 Rincian Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan TA 2023 dan 2022

Kode Rek	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
8.1.08.03.01.0003	Beban Penyusutan Jalan-Jalan Kabupaten	12.355.504.867,00	20.203.573.999,00	(7.848.069.132,00)	(38,84)
8.1.08.03.01.0005	Beban Penyusutan Jalan-Jalan Desa	37.256.816.135,00	43.245.821.353,00	(5.989.005.218,00)	(13,85)
8.1.08.03.01.0009	Beban Penyusutan Jalan-Jalan Khusus	2.197.366.235,00	2.157.799.521,00	39.566.714,00	1,83
8.1.08.03.01.0010	Beban Penyusutan Jalan-Jalan Lainnya	247.382.976,00	147.980.953,00	99.402.023,00	67,17
8.1.08.03.01.0013	Beban Penyusutan Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten	382.265.545,00	794.000,00	381.471.545,00	48.044,28
8.1.08.03.01.0015	Beban Penyusutan Jembatan-Jembatan pada Jalan Desa	1.534.418.114,00	81.994.919,00	1.452.423.195,00	1.771,36
8.1.08.03.01.0019	Beban Penyusutan Jembatan-Jembatan pada Jalan Khusus	103.011.027,00	0,00	103.011.027,00	100,00
8.1.08.03.01.0020	Beban Penyusutan Jembatan-Jembatan Penyeberangan	18.555.929,00	15.809.180,00	2.746.749,00	17,37
8.1.08.03.01.0021	Beban Penyusutan Jembatan-Jembatan Labuh/Sandar pada Terminal	193.609.049,00	1.682.358,00	191.926.691,00	11.408,20
8.1.08.03.01.0023	Beban Penyusutan Jembatan-Jembatan Lainnya	142.948.847,00	149.833.528,00	(6.884.681,00)	(4,59)
Jumlah		54.431.878.724,00	66.005.289.811,00	(11.573.411.087,00)	(17,53)

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2023



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

8.1.08.03.02 Beban Penyusutan Bangunan Air

Beban Penyusutan Bangunan Air tahun 2023 sebesar Rp12.971.084.416,00 mengalami peningkatan sebesar Rp3.425.624.144,00 atau 35,89% dari beban penyusutan bangunan air tahun 2022 sebesar Rp9.545.460.272,00 yang disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.1.4. 81 Rincian Beban Penyusutan Bangunan Air TA 2023 dan 2022

Kode Rek	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
8.1.08.03.02 .0001	Beban Penyusutan Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	17.555.200,00	28.675.609,00	(11.120.409,00)	(38,78)
8.1.08.03.02 .0002	Beban Penyusutan Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengambilan Irigasi	750.292.390,00	818.462.892,00	(68.170.502,00)	(8,33)
8.1.08.03.02 .0003	Beban Penyusutan Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi	1.411.758.606,00	28.107.860,00	1.383.650.746,00	4.922,65
8.1.08.03.02 .0004	Beban Penyusutan Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembuang Irigasi	2.492.200,00	716.187.247,00	(713.695.047,00)	(99,65)
8.1.08.03.02 .0005	Beban Penyusutan Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengaman Irigasi	140.641.601,00	109.069.010,00	31.572.591,00	28,95
8.1.08.03.02 .0006	Beban Penyusutan Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pelengkap Irigasi	57.308.086,00	56.919.065,00	389.021,00	0,68
8.1.08.03.02 .0008	Beban Penyusutan Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya	37.125.910,00	37.125.910,00	0,00	0,00
8.1.08.03.02 .0011	Beban Penyusutan Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pembawa Pasang Surut	1.095.067,00	20.000,00	1.075.067,00	5.375,34
8.1.08.03.02 .0012	Beban Penyusutan Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut	399.800,00	4.326.232,00	(3.926.432,00)	(90,76)
8.1.08.03.02 .0013	Beban Penyusutan Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengaman Pasang Surut	5.301.020,00	83.595.422,00	(78.294.402,00)	(93,66)
8.1.08.03.02 .0018	Beban Penyusutan Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pengambilan Pengembangan Rawa	8.785.200,00	0,00	8.785.200,00	100,00
8.1.08.03.02 .0020	Beban Penyusutan Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pembuang Pengembangan Rawa	1.280.000,00	1.280.000,00	0,00	0,00
8.1.08.03.02 .0025	Beban Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	2.468.952.754,00	3.513.059.815,00	(1.044.107.061,00)	(29,72)
8.1.08.03.02 .0026	Beban Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengambilan Pengaman Sungai/Pantai	20.970.000,00	0,00	20.970.000,00	100,00
8.1.08.03.02 .0027	Beban Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan	1.779.000,00	0,00	1.779.000,00	100,00



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode Rek	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
	Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembawa Pengaman Sungai/Pantai				
8.1.08.03.02 .0028	Beban Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	1.409.610.403,00	776.043.513,00	633.566.890,00	81,64
8.1.08.03.02 .0029	Beban Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	2.615.235.019,00	47.827.859,00	2.567.407.160,00	5.368,02
8.1.08.03.02 .0030	Beban Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai	112.549.209,00	357.747.244,00	(245.198.035,00)	(68,54)
8.1.08.03.02 .0031	Beban Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya	282.409.627,00	98.949.803,00	183.459.824,00	185,41
8.1.08.03.02 .0033	Beban Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air	15.948.628,00	41.887.434,00	(25.938.806,00)	(61,93)
8.1.08.03.02 .0036	Beban Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air	10.067.758,00	0,00	10.067.758,00	100,00
8.1.08.03.02 .0040	Beban Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku	1.119.800,00	112.330.179,00	(111.210.379,00)	(99,00)
8.1.08.03.02 .0041	Beban Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku	39.117.250,00	47.587.860,00	(8.470.610,00)	(17,80)
8.1.08.03.02 .0042	Beban Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku	21.811.978,00	5.372.000,00	16.439.978,00	306,03
8.1.08.03.02 .0044	Beban Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	687.289.219,00	488.254.762,00	199.034.457,00	40,76
8.1.08.03.02 .0045	Beban Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	2.001.138.879,00	1.793.412.357,00	207.726.522,00	11,58
8.1.08.03.02 .0046	Beban Penyusutan Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembawa Air Kotor	826.309.416,00	0,00	826.309.416,00	100,00
8.1.08.03.02 .0047	Beban Penyusutan Bangunan Air Kotor-Bangunan Waduk Air Kotor	245.875,00	379.100.742,00	(378.854.867,00)	(99,94)
8.1.08.03.02 .0048	Beban Penyusutan Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembuang Air Kotor	4.997.000,00	0,00	4.997.000,00	100,00
8.1.08.03.02 .0050	Beban Penyusutan Bangunan Air Kotor-Bangunan Pelengkap Air Kotor	17.497.521,00	117.457,00	17.380.064,00	14.796,96
	Jumlah	12.971.084.416,00	9.545.460.272,00	3.425.624.144,00	35,89

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2023



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

8.1.08.03.03 Beban Penyusutan Instalasi

Beban Penyusutan Instalasi tahun 2023 sebesar Rp934.977.400,00 mengalami peningkatan sebesar Rp246.279.098,00 atau 35,76% dari beban penyusutan instalasi tahun 2022 sebesar Rp688.698.302,00 yang disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.1.4. 82 Rincian Beban Penyusutan Instalasi TA 2023 dan 2022

Kode Rek	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
8.1.08.03.03.0001	Beban Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Permukaan	17.365.306,00	100.408.356,00	(83.043.050,00)	(82,71)
8.1.08.03.03.0002	Beban Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Sumber/Mata Air	119.666,00	66.666,00	53.000,00	79,50
8.1.08.03.03.0003	Beban Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Tanah Dalam	7.983.334,00	0,00	7.983.334,00	100,00
8.1.08.03.03.0004	Beban Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Tanah Dangkal	166.666,00	166.666,00	0,00	0,00
8.1.08.03.03.0005	Beban Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	228.422.020,00	9.598.364,00	218.823.656,00	2.279,80
8.1.08.03.03.0006	Beban Penyusutan Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Domestik	216.795.474,00	89.209.128,00	127.586.346,00	143,02
8.1.08.03.03.0009	Beban Penyusutan Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Kotor Lainnya	236.283.142,00	39.333.332,00	196.949.810,00	500,72
8.1.08.03.03.0010	Beban Penyusutan Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Organik	280.000,00	1.246.625,00	(966.625,00)	(77,54)
8.1.08.03.03.0012	Beban Penyusutan Instalasi Pengolahan Sampah-Bangunan Penampung Sampah	8.318.333,00	415.833,00	7.902.500,00	1.900,40
8.1.08.03.03.0018	Beban Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Air	1.075.105,00	766.014,00	309.091,00	40,35
8.1.08.03.03.0019	Beban Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel	5.966.152,00	7.310.493,00	(1.344.341,00)	(18,39)
8.1.08.03.03.0023	Beban Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir	24.543.682,00	75.000,00	24.468.682,00	32.624,91
8.1.08.03.03.0026	Beban Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya	106.123.572,00	43.812.803,00	62.310.769,00	142,22
8.1.08.03.03.0030	Beban Penyusutan Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Induk	34.468.266,00	378.694.880,00	(344.226.614,00)	(90,90)
8.1.08.03.03.0031	Beban Penyusutan Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Distribusi	30.236.589,00	1.171.750,00	29.064.839,00	2.480,46
8.1.08.03.03.0032	Beban Penyusutan Instalasi Gardu-Instalasi Pusat Pengatur Listrik	15.262.227,00	15.503.685,00	(241.458,00)	(1,56)
8.1.08.03.03.0033	Beban Penyusutan Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Lainnya	650.906,00	685.375,00	(34.469,00)	(5,03)
8.1.08.03.03.0034	Beban Penyusutan Instalasi Pertahanan-Instalasi Pertahanan di Darat	316.960,00	233.332,00	83.628,00	35,84
8.1.08.03.03.0040	Beban Penyusutan Instalasi Pengaman-Instalasi Pengaman Penangkal Petir	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00
	Jumlah	934.977.400,00	688.698.302,00	246.279.098,00	35,76

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2023



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

8.1.08.03.04 Beban Penyusutan Jaringan

Beban Penyusutan Jaringan tahun 2023 sebesar Rp3.792.755.601,00 mengalami peningkatan sebesar Rp3.584.895.513,00 atau 1.724,67% dari beban penyusutan jaringan tahun 2022 sebesar Rp207.860.088,00 yang disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.1.4. 83 Rincian Beban Penyusutan Jaringan TA 2023 dan 2022

Kode Rek	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
8.1.08.03. 04.0001	Beban Penyusutan Jaringan Air Minum-Jaringan Pembawa	2.259.965.528,00	46.168.460,00	2.213.797.068,00	4.795,04
8.1.08.03. 04.0002	Beban Penyusutan Jaringan Air Minum-Jaringan Induk Distribusi	24.633.766,00	0,00	24.633.766,00	100,00
8.1.08.03. 04.0003	Beban Penyusutan Jaringan Air Minum-Jaringan Cabang Distribusi	6.956.756,00	7.378.256,00	(421.500,00)	(5,71)
8.1.08.03. 04.0004	Beban Penyusutan Jaringan Air Minum-Jaringan Sambungan ke Rumah	12.168.800,00	2.755.836,00	9.412.964,00	341,56
8.1.08.03. 04.0005	Beban Penyusutan Jaringan Air Minum-Jaringan Air Minum Lainnya	448.798.630,00	0,00	448.798.630,00	100,00
8.1.08.03. 04.0006	Beban Penyusutan Jaringan Listrik-Jaringan Transmisi	418.176.719,00	10.752.117,00	407.424.602,00	3.789,25
8.1.08.03. 04.0007	Beban Penyusutan Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi	537.226.968,00	100.642.197,00	436.584.771,00	433,80
8.1.08.03. 04.0008	Beban Penyusutan Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	65.541.733,00	21.297.441,00	44.244.292,00	207,74
8.1.08.03. 04.0009	Beban Penyusutan Jaringan Telepon-Jaringan Telepon diatas Tanah	16.268.561,00	16.047.641,00	220.920,00	1,38
8.1.08.03. 04.0010	Beban Penyusutan Jaringan Telepon-Jaringan Telepon dibawah Tanah	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
8.1.08.03. 04.0016	Beban Penyusutan Jaringan Gas-Jaringan Pipa Dinas	2.818.140,00	2.818.140,00	0,00	0,00
Jumlah		3.792.755.601,00	207.860.088,00	3.584.895.513,00	1.724,67

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2023

8.1.08.04 Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya

Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya dengan kode rekening 8.1.08.04.01.0001 merupakan beban penyusutan barang bercorak kesenian-alat musik tahun 2023 sebesar Rp5.852.125,00 mengalami peningkatan sebesar Rp2.179.870,00 atau 59,36% dari beban penyusutan barang bercorak kesenian-alat musik tahun 2022 sebesar Rp3.672.255,00.

8.1.08.06 Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud

Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud tahun 2023 sebesar Rp138.507.396,00 mengalami peningkatan sebesar Rp651.194,17 atau 0,47% dari



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

beban amortisasi aset lainnya-aset tidak berwujud tahun 2022 sebesar Rp137.856.201,83 yang disajikan pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 5.1.4. 84 Rincian Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset tidak Berwujud
TA 2023 dan 2022**

Kode Rek	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
8.1.08.06.01.0001	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Frenchise	8.240.000,00	8.240.000,00	0,00	0,00
8.1.08.06.01.0004	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Software	130.267.396,00	129.616.201,83	651.194,17	0,50
Jumlah		138.507.396,00	137.856.201,83	651.194,17	0,47

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2023

5.1.4.2.2 Beban Tidak Terduga

Beban tidak terduga terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan atau sering/rutin terjadi, dan berada diluar pengaruh entitas yang bersangkutan. Beban Tidak Terduga tahun 2023 sebesar Rp23.000.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp879.699.886,00 atau 97,45% dari beban tidak terduga tahun 2022 sebesar Rp902.699.886,00.

Perubahan nilai Beban Tidak Terduga Tahun 2023 dari Tahun 2022 disebabkan adanya pengembalian sisa dana hibah dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi paska bencana tahun anggaran 2021, penerimaan pemotongan penyaluran dana alokasi umum atau dana bagi hasil tahun anggaran 2022 tahap pertama dalam rangka penggantian dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atas dukungan terhadap penanganan dampak pandemik Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), penerimaan pemotongan dana alokasi umum tahun anggaran 2022 tahap pertama atas sisa dana alokasi khusus non fisik di rekening kas umum daerah sampai dengan tahun 2021, dan penerimaan pemotongan dana bagi hasil umum dan/atau dana bagi hasil tahun anggaran 2022 tahap kedua atas sisa dana alokasi khusus non fisik di rekening kas umum daerah.

Perbandingan beban tidak terduga dan belanja tidak terduga tahun 2023 sebagai berikut:

**Tabel 5.1.4. 85 Perbandingan Beban Tidak Terduga dan Belanja Tidak Terduga
Tahun 2023**

Kode Rekening	Uraian	LO	LRA	Selisih
8.2.01.01	Beban Tidak Terduga	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00
Jumlah		23.000.000,00	23.000.000,00	0,00

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2023

5.1.4.2.3 Beban Transfer

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Transfer Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Beban Transfer yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Tabel 5.1.4. 86 Realisasi Beban Transfer TA 2023 dan 2022

Kode Rek	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
8.3.01	Beban Bagi Hasil	1.500.000.000,00	1.510.000.000,00	(10.000.000,00)	(0,66)
8.3.02	Beban Bantuan Keuangan	68.293.644.200,00	59.500.000.000,00	8.793.644.200,00	14,78
Jumlah		69.793.644.200,00	61.010.000.000,00	8.783.644.200,00	14,40

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2023

5.1.4.2.3.1 Beban Bagi Hasil

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Bagi Hasil Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Beban Bagi Hasil yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.4. 87 Rincian Beban Bagi Hasil TA 2023 dan 2022

Kode Rek	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
8.3.01.01	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	899.999.878,00	1.159.100.486,00	(259.100.608,00)	(22,35)
8.3.01.02	Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	600.000.122,00	350.899.514,00	249.100.608,00	70,99
Jumlah		1.500.000.000,00	1.510.000.000,00	(10.000.000,00)	(0,66)

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2023

Perubahan nilai Beban Bagi Hasil Tahun 2023 dari Tahun 2022 disebabkan adanya kesalahan penganggaran belanja bagi hasil pajak Tahun Anggaran 2022 yang seharusnya sebagai belanja bagi hasil retribusi.

Perbandingan beban bagi hasil dan belanja bagi hasil tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 5.1.4. 88 Perbandingan Beban Bagi Hasil dan Belanja Bagi Hasil Tahun 2023

Kode Rek	Uraian	LO	LRA	Selisih
8.3.01.01	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	899.999.878,00	899.999.878,00	0,00
8.3.01.02	Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	600.000.122,00	600.000.122,00	0,00
Jumlah		1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2023

Pengakuan Beban Bagi Hasil dalam LO Tahun 2023 sama dengan saldo Belanja Bagi Hasil dalam LRA TA 2023 sebesar Rp1.500.000.000,00.



8.3.01.01 Beban Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa

Beban bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa tahun 2023 sebesar Rp899.999.878,00 mengalami penurunan sebesar Rp259.100.608,00 atau 22,35% dari beban bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa tahun 2022 sebesar Rp1.159.100.486,00 yang disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.1.4. 89 Rincian Beban Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa TA 2023 dan 2022

Kode Rek	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
8.3.01.01.01.0001	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten	6.716.417,00	0,00	6.716.417,00	100,00
8.3.01.01.03.0001	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	893.283.461,00	1.159.100.486,00	(265.817.025,00)	(22,93)
Jumlah		899.999.878,00	1.159.100.486,00	(259.100.608,00)	(22,35)

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2023

8.3.01.02 Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa

Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa dengan kode rekening 8.3.01.02.01.0001 merupakan beban bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa tahun 2023 sebesar Rp600.000.122,00 mengalami peningkatan sebesar Rp249.100.608,00 atau 70,99% dari beban bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa tahun 2022 sebesar Rp350.899.514,00.

5.1.4.2.3.2 Beban Bantuan Keuangan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Bantuan Keuangan Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Beban Bantuan Keuangan yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.4. 90 Rincian Beban Bantuan Keuangan TA 2023 dan 2022

Kode Rek	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
8.3.02.05	Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa	68.293.644.200,00	59.500.000.000,00	8.793.644.200,00	14,78
Jumlah		68.293.644.200,00	59.500.000.000,00	8.793.644.200,00	14,78

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2023



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

Perubahan nilai Beban Bantuan Keuangan Tahun 2023 dari Tahun 2022 disebabkan adanya kenaikan dana transfer umum (DAU).

Perbandingan beban bantuan keuangan dan belanja bantuan keuangan tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 5.1.4. 91 Perbandingan Beban Bantuan Keuangan dan Belanja Bantuan Keuangan Tahun 2023

Kode Rekening	Uraian	LO	LRA	Selisih
8.3.02.05	Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa	68.293.644.200,00	183.003.894.200,00	114.710.250.000,00
Jumlah		68.293.644.200,00	183.003.894.200,00	114.710.250.000,00

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2023

Pengakuan Beban Bantuan Keuangan dalam LO Tahun 2023 *lebih kecil* dari saldo Belanja Bantuan Keuangan dalam LRA TA 2023 sebesar Rp114.710.250.000,00 (Rp68.293.644.200,00–Rp183.003.894.200,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Beban Bantuan Keuangan dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Selisih LO-LRA		Rp 114.710.250.000,00	
Penambah :			
1. Penambahan Beban	Rp	000	
Jumlah Penambah	Rp	0,00	
Pengurang :			
1. Penerapan Bultek 21 (beban transfer dana desa (non provinsi) tidak diakui dalam LO	Rp	114.710.250.000,00	
Jumlah Pengurang	Rp	114.710.250.000,00	
Jumlah Penjelasan Selisih		Rp 114.710.250.000,00	

Berdasarkan Bultek 21 tentang Akuntansi Transfer Berbasis Akrua, Beban Transfer Dana Desa dalam penyajian LO tidak diakui sebagai beban dikarenakan pengukuran kinerja atas pemanfaatan dana desa terletak pada desa bukan pemerintah daerah. Hal ini berbeda dengan yang disajikan dalam LRA yang berbasis kas.

5.1.4.2.4 Defisit Non Operasional

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Defisit Non Operasional Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Defisit Non Operasional yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

**Tabel 5.1.4. 92 Perhitungan Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional
TA 2023 dan 2022**

Kode Rekening	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
8.4.01.03.02.0001	Defisit Pelepasan Penyertaan Modal-LO	0,00	4.341.813.863,14
8.4.01.04.02.0117	Defisit Penghapusan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya-LO	0,00	171.138.574,00
8.4.01.04.02.0122	Defisit Penghapusan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur-LO	0,00	104.464.000,00
8.4.01.04.02.0123	Defisit Penghapusan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)-LO	0,00	20.770.500,00
8.4.01.04.02.0132	Defisit Penghapusan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio-LO	0,00	1.800.000,00
8.4.01.04.02.0237	Defisit Penghapusan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya-LO	0,00	41.498.348,00
8.4.01.04.02.0243	Defisit Penghapusan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi-LO	0,00	1.410.000,00
8.4.01.04.02.0439	Defisit Penghapusan Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Eksplorasi-Alat Bantu Ekplorasi Lainnya-LO	0,00	7.700.000,00
8.4.01.04.06.0001	Defisit Penghapusan Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud-Goodwill-LO	0,00	218.659.362,00
8.4.01.04.07.0001	Defisit Penghapusan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang-LO	3.363.319.275,00	3.197.422.860,00
8.4.01.04.07.0002	Defisit Penghapusan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah-LO	20.897.770.726,00	3.221.867.213,00
8.4.03.01.01.0001	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	809.664.304,00	0,00
Jumlah		25.070.754.305,00	11.328.544.720,14

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2023

Perubahan nilai Defisit Non Operasional Tahun 2023 dari Tahun 2022 disebabkan adanya peningkatan penghapusan aset lain-lain berupa aset tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah.

5.1.4.2.5 Beban Luar Biasa

Beban luar biasa adalah beban yang terjadi karena kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi apada awal tahun anggaran, tidak diharapkan berulang-ulang, dan kejadian diluar kendali entitas pemerintah. Beban luar biasa tahun 2023 sebesar Rp334.380.699,00 merupakan beban dari pengadaan aset tetap dibawah minimum kapitalisasi.

5.1.4.2.6 Surplus/(Defisit)-LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Surplus/ (Defisit)-LO Tahun 2023 dan 2022 yang dihitung dari:



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

Tabel 5.1.4. 93 Surplus/Defisit-LO TA 2023 dan 2022

Kode Rek	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/penurunan (Rp)	%
7	Pendapatan	1.180.577.859.172,74	995.860.432.814,61	184.717.426.358,13	18,55
7.1	Pendapatan Asli Daerah(PAD) -LO	102.640.169.447,74	89.990.469.267,82	12.649.700.179,92	14,06
7.2	Pendapatan Transfer-LO	1.060.727.703.622,00	881.019.924.862,00	179.707.778.760,00	20,40
7.3	Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO	17.209.986.103,00	24.850.038.684,79	(7.640.052.581,79)	(30,74)
8	Beban	973.634.312.101,44	936.302.384.478,06	37.331.927.623,38	3,99
8.1	Beban Operasi	767.767.540.687,44	733.954.867.151,23	33.812.673.536,21	4,61
8.1	Belanja Penyusutan dan Amortisasi	136.050.127.214,00	140.434.817.440,83	(4.384.690.226,83)	(3,12)
8.2	Beban Tidak Terduga	23.000.000,00	902.699.886,00	(879.699.886,00)	(97,45)
8.3	Beban Transfer	69.793.644.200,00	61.010.000.000,00	8.783.644.200,00	14,40
	Surplus/Defisit dari Operasi	206.943.547.071,30	59.558.048.336,55	147.385.498.734,75	247,47
	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	(25.070.754.305,00)	(11.328.544.720,14)	(13.742.209.584,86)	121,31
	Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa	181.872.792.766,30	48.229.503.616,41	133.643.289.149,89	277,10
	Pos Luar Biasa	(334.380.699,00)	0,00	(334.380.699,00)	100,00
	Pendapatan Luar Biasa	0,00	0,00	0,00	
	Beban Luar Biasa	334.380.699,00	0,00	334.380.699,00	100,00
	SURPLUS/DEFISIT-LO	181.538.412.067,30	48.229.503.616,41	133.308.908.450,89	276,41

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2023

Jumlah saldo Surplus/(Defisit)-LO di atas juga sama dengan saldo Surplus/(Defisit)-LO yang diungkapkan dalam CaLK terkait Penjelasan atas Pos-Pos LPE pada *point 5.1.6*.

5.1.5 Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan Kas dan Setara Kas selama satu periode akuntansi, dan saldo Kas dan Setara Kas pada tanggal pelaporan. Terdapat empat aktivitas yang mempengaruhi perubahan Kas dan Setara Kas selama satu periode akuntansi yaitu aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris.

Penjelasan atas Pos-Pos LAK Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 (dalam satuan mata uang Rupiah) diungkapkan dan disajikan sebagai berikut:

5.1.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Aktivitas operasi menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasi Pemerintah. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi meliputi arus masuk kas dan arus keluar kas, yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu tahun anggaran. Nilai Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una selama Tahun 2023 dan 2022, yaitu sebagai berikut:



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

Tabel 5.1.5. 1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi TA 2023 dan 2022

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi	1.213.864.205.577,91	1.074.201.379.064,12
2. Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi	959.660.290.704,70	905.051.822.545,00
3. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	254.203.914.873,21	169.149.556.519,12

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2023

Jumlah tersebut merupakan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi yaitu Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi dikurangi dengan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi. Rincian Arus Kas dari Aktivitas Operasi yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Kas dari Aktivitas Operasi sebagai berikut:

5.1.5.1.1 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi sebagai berikut:

Tabel 5.1.5. 2 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi TA 2023 dan 2022

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
➤ Penerimaan Pajak Daerah		
✓ Pajak Hotel	409.523.220,00	183.409.435,00
✓ Pajak Restoran	1.975.925.622,00	1.917.451.349,08
✓ Pajak Hiburan	2.500.000,00	1.725.000,00
✓ Pajak Reklame	447.425.910,00	411.271.808,00
✓ Pajak Penerangan Jalan	4.868.653.463,00	4.503.078.358,00
✓ Pajak Parkir	107.568.000,00	109.475.333,00
✓ Pajak Air Tanah	4.811.675,00	0,00
✓ Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2.043.627.259,00	1.586.801.946,00
✓ Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	1.746.846.685,00	1.588.888.161,00
✓ Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	2.029.270.845,00	1.110.884.073,00
➤ Penerimaan Retribusi Daerah		
✓ Retribusi Jasa Umum		
• Retribusi Pelayanan Kesehatan	4.724.737.900,00	3.814.355.644,00
• Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	85.843.000,00	90.502.000,00
• Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	28.150.000,00	30.325.000,00
✓ Retribusi Jasa Usaha		
• Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	406.048.000,00	193.745.000,00
• Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	118.672.500,00	121.628.500,00
• Retribusi Tempat Pelelangan	139.521.250,00	110.950.125,00
• Retribusi Terminal	0,00	3.450.000,00
• Retribusi Tempat Khusus Parkir	56.200.000,00	52.100.000,00
• Retribusi Rumah Potong Hewan	35.190.000,00	39.865.000,00
• Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	211.658.470,00	246.521.501,00
• Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	172.040.000,00	98.500.000,00
• Retribusi Penyeberangan di Air	0,00	37.075.000,00
✓ Retribusi Perizinan Tertentu		
• Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	148.125.000,00	110.293.000,00
• Retribusi Izin Usaha Perikanan	2.000.000,00	7.000.000,00
➤ Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		
✓ Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas	4.165.684.360,00	2.888.444.941,71



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Penyertaan Modal pada BUMN		
➤ Penerimaan Lain-Lain PAD yang Sah		
✓ Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	18.475.000,00	27.820.000,00
✓ Hasil Kerja Sama Daerah	18.100.000,00	20.285.000,00
✓ Jasa Giro	206.450.372,96	1.128.565.942,04
✓ Pendapatan Bunga	1.930.204.611,91	751.617.289,89
✓ Pendapatan Denda Retribusi Daerah	0,00	5.648.000,00
✓ Pendapatan dari Pengembalian	5.269.889.969,19	2.321.332.741,00
✓ Pendapatan BLUD	67.280.179.423,85	51.114.270.778,40
✓ Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	9.022.354.578,00	7.681.491.833,00
➤ Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat		
✓ Dana Perimbangan	898.145.207.443,00	835.619.223.783,00
✓ Dana Insentif Daerah (DID)	49.620.369.000,00	5.259.510.000,00
✓ Dana Desa	114.710.250.000,00	111.594.110.000,00
➤ Penerimaan Transfer Antar Daerah		
✓ Pendapatan Bagi Hasil Pajak		
• Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	5.862.653.884,00	4.503.467.869,00
• Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	6.180.389.249,00	5.496.455.192,00
• Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	15.460.082.684,00	14.777.774.056,00
• Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	775.671.523,00	82.933.041,00
• Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	10.060.572.838,00	10.209.232.364,00
✓ Bantuan Keuangan		
• Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	2.680.000.000,00	4.000.000.000,00
➤ Penerimaan Pendapatan Hibah		
✓ Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	2.693.331.842,00	349.900.000,00
Jumlah	1.213.864.205.577,91	1.074.201.379.064,12

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2023

5.1.5.1.2 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi sebagai berikut:

Tabel 5.1.5. 3 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi TA 2023 dan 2022

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
➤ Pembayaran Belanja Pegawai		
✓ Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	264.776.463.894,00	260.769.138.929,00
✓ Belanja Tambahan Penghasilan ASN	39.058.117.123,00	39.237.721.645,00
✓ Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	53.284.972.112,00	49.874.520.900,00
✓ Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	9.923.863.864,00	9.890.599.399,00
✓ Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	162.711.680,00	162.407.880,00
✓ Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	582.600.000,00	601.400.000,00
✓ Belanja Pegawai BLUD	5.829.459.513,00	0,00
➤ Pembayaran Belanja Barang dan Jasa		
✓ Belanja Barang	61.423.690.250,00	48.316.208.876,00
✓ Belanja Jasa	138.399.857.244,70	131.897.777.631,00
✓ Belanja Pemeliharaan	20.736.256.073,00	14.020.533.092,00
✓ Belanja Perjalanan Dinas	58.890.549.414,00	57.242.547.727,00
✓ Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.352.260.106,00	571.545.500,00



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
✓ Belanja Barang dan Jasa BOS	20.892.483.563,00	21.464.668.860,00
✓ Belanja Barang dan Jasa BLUD	55.555.645.432,00	64.118.830.495,00
➤ Pembayaran Belanja Subsidi		
✓ Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	550.000.000,00	639.110.500,00
➤ Pembayaran Belanja Hibah		
✓ Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	0,00	250.000.000,00
✓ Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	34.392.741.080,00	7.807.964.000,00
✓ Belanja Hibah Dana BOS	741.419.845,00	6.283.082.650,00
✓ Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	844.194.105,00	844.193.175,00
➤ Pembayaran Belanja Bantuan Sosial		
✓ Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	1.544.410.000,00	257.200.000,00
✓ Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	2.080.000.000,00	599.600.000,00
✓ Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	3.988.489.206,00	15.819.881.780,00
✓ Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	123.212.000,00	382.177.620,00
➤ Pembayaran Belanja Tidak Terduga		
✓ Belanja Tidak Terduga	23.000.000,00	1.396.601.886,00
➤ Pembayaran Belanja Bagi Hasil		
✓ Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	899.999.878,00	1.159.100.486,00
✓ Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	600.000.122,00	350.899.514,00
➤ Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan		
✓ Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	183.003.894.200,00	171.094.110.000,00
Jumlah	959.660.290.704,70	905.051.822.545,00

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2023

5.1.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Realisasi Kas Bersih dari Aktivitas Investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan perolehan dan pelepasan sumber daya yang bertujuan untuk meningkatkan operasi Pemerintah dan menghasilkan pendapatan dimasa yang akan datang. Nilai Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una selama tahun 2023 dan 2022, yaitu sebagai berikut:

Tabel 5.1.5. 4 Arus Kas dari Aktivitas Investasi TA 2023 dan 2022

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi	0,00	0,00
2. Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi	254.632.245.844,00	195.694.719.732,00
3. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(254.632.245.844,00)	(195.694.719.732,00)

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2023

Jumlah tersebut merupakan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi yaitu Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi dikurangi dengan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi. Rincian Arus Kas dari Aktivitas Investasi yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Kas dari Aktivitas Investasi sebagai berikut:

5.1.5.2.1 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Kas Masuk dari Aktivitas



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

Investasi. Pada Tahun 2023 tidak terdapat arus kas masuk yang berasal dari aktivitas investasi.

5.1.5.2.2 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi sebagai berikut:

Tabel 5.1.5. 5 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi TA 2023 dan 2022

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
➤ Perolehan Tanah		
✓ Belanja Modal Tanah Persil	700.000.000,00	643.928.000,00
✓ Belanja Modal Lapangan	210.595.000,00	1.258.480.200,00
➤ Perolehan Peralatan dan Mesin		
✓ Belanja Modal Alat Besar	8.220.180.000,00	2.289.594.433,00
✓ Belanja Modal Alat Angkutan	15.586.859.000,00	1.805.835.600,00
✓ Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	16.271.100,00	0,00
✓ Belanja Modal Alat Pertanian	2.712.000,00	2.500.000,00
✓ Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	6.256.050.583,00	3.340.196.147,00
✓ Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	440.700.818,00	465.527.517,00
✓ Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	6.031.959.817,00	10.268.589.125,00
✓ Belanja Modal Alat Laboratorium	854.857.000,00	724.108.000,00
✓ Belanja Modal Komputer	5.263.119.899,00	12.490.413.035,00
✓ Belanja Modal Alat Eksplorasi	0,00	147.119.850,00
✓ Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	0,00	38.000.000,00
✓ Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi	0,00	29.000.000,00
✓ Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	61.896.000,00	12.000.000,00
✓ Belanja Modal Alat Peraga	355.000.000,00	790.425.000,00
✓ Belanja Modal Rambu-Rambu	264.850.000,00	191.250.000,00
✓ Belanja Modal Peralatan Olahraga	11.000.000,00	1.000.000,00
✓ Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	2.222.561.597,00	2.544.476.054,00
➤ Perolehan Gedung dan Bangunan		
✓ Belanja Modal Bangunan Gedung	48.115.746.899,00	52.480.438.064,00
✓ Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	5.018.096.600,00	1.168.167.000,00
➤ Perolehan Jalan, Jaringan dan Irigasi		
✓ Belanja Modal Jalan dan Jembatan	93.352.817.900,00	52.775.886.047,00
✓ Belanja Modal Bangunan Air	45.736.407.100,00	35.192.683.835,00
✓ Belanja Modal Instalasi	35.000.000,00	0,00
✓ Belanja Modal Jaringan	10.632.583.488,00	12.619.104.000,00
➤ Perolehan Aset Tetap Lainnya		
✓ Belanja Modal Bahan Perpustakaan	11.610.000,00	0,00
✓ Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	5.500.000,00	22.033.500,00
✓ Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	433.900.000,00	2.165.139.000,00
✓ Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	6.000.000,00	7.992.000,00
✓ Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	1.485.971.043,00	220.833.325,00
➤ Penyertaan Modal Daerah		
✓ Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	3.300.000.000,00	2.000.000.000,00
Jumlah	254.632.245.844,00	195.694.719.732,00

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2023

5.1.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas pemerintah dan klaim pemerintah terhadap pihak lain di masa yang akan datang.



Tahun 2023 tidak terdapat nilai Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una.

5.1.5.3.1 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pendanaan

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pendanaan yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pendanaan. Pada Tahun 2023 tidak terdapat arus kas masuk yang berasal dari aktivitas pendanaan.

5.1.5.3.2 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pendanaan

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pendanaan yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pendanaan. Pada Tahun 2023 tidak terdapat arus kas keluar untuk aktivitas pendanaan.

5.1.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus Kas dari Aktivitas Transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban dan pendanaan Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una untuk TA 2023. Nilai Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una selama tahun 2023 dan 2022, yaitu sebagai berikut:

Tabel 5.1.5. 6 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan TA 2023 dan 2022

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris	84.468.587.759,00	72.919.250.740,00
2. Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris	84.663.062.716,00	72.533.012.294,00
3. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	(194.474.957,00)	386.238.446,00

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2023

Jumlah tersebut merupakan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris yaitu Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris dikurangi dengan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris. Rincian Arus Kas dari Aktivitas Transitoris yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Kas dari Aktivitas Transitoris sebagai berikut:

5.1.5.4.1 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris sebagai berikut:

Tabel 5.1.5. 7 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris TA 2023 dan 2022

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
➤ Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		
✓ luran Jaminan Kecelakaan Kerja	413.014.498,00	403.103.400,00
✓ luran Jaminan Kematian	1.239.042.859,00	1.209.309.055,00
✓ luran Jaminan Kesehatan	17.164.579.842,00	15.806.012.972,00
✓ luran Wajib Pegawai	18.757.902.167,00	18.480.084.338,00
✓ Pajak Penghasilan	17.815.454.989,00	13.967.853.466,00
✓ Pajak Pertambahan Nilai	29.078.593.404,00	23.052.887.509,00
Jumlah	84.468.587.759,00	72.919.250.740,00

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2023



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

Untuk Tahun 2023, Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga yang disajikan oleh Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una telah termasuk dengan Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga yang dilakukan oleh sekolah-sekolah pengelola dana BOSP. Rincian Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga pada masing-masing unit kerja dapat dilihat pada *lampiran 53*.

5.1.5.4.2 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris yang merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris sebagai berikut:

Tabel 5.1.5. 8 Arus Kas keluar dari Aktivitas Transitoris TA 2023 dan 2022

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
➤ Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		
✓ luran Jaminan Kecelakaan Kerja	413.014.498,00	403.103.400,00
✓ luran Jaminan Kematian	1.239.042.859,00	1.209.309.055,00
✓ luran Jaminan Kesehatan	17.163.810.514,00	15.776.181.714,00
✓ luran Wajib Pegawai	18.770.651.996,00	18.447.274.526,00
✓ Pajak Penghasilan	17.809.149.968,01	13.872.370.187,00
✓ Pajak Pertambahan Nilai	29.267.392.880,99	22.824.773.412,00
Jumlah	84.663.062.716,00	72.533.012.294,00

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2023

Untuk Tahun 2023, Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga yang disajikan oleh Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una telah termasuk dengan Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga yang dilakukan oleh sekolah-sekolah pengelola dana BOSP. Rincian Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga pada masing-masing unit kerja dapat dilihat pada *lampiran 53*.

5.1.5.5 Kenaikan/(Penurunan) Kas

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas LAK untuk Pos Kenaikan/(Penurunan) Kas yang disebabkan keempat aktivitas yang dijabarkan di atas dengan diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1.5. 9 Kenaikan/(Penurunan) Kas TA 2023 dan 2022

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	254.203.914.873,21	169.149.556.519,12
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(254.632.245.844,00)	(195.694.719.732,00)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	(194.474.957,00)	386.238.446,00
Jumlah	(622.805.927,79)	(26.158.924.766,88)

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2023

5.1.5.6 Saldo Awal Kas

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Saldo Awal Kas Tahun 2023 dan 2022 yang terdiri dari:



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

Tabel 5.1.5. 10 Nilai Saldo Awal Kas Tahun 2023 dan 2022

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Kas di Kas Daerah	35.197.426.273,21	77.274.221.708,89
Kas di Bendahara Penerimaan	11.596.000,00	187.723.564,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Kas di BLUD	3.658.343.740,93	16.662.903.457,53
Kas Dana BOS	40.995.740,00	412.872.233,00
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	76.771.462,25	84.599.617,25
Kas Lainnya	657.470.084,83	416.314.910,43
Setara Kas	29.237.107.423,00	0,00
Jumlah	68.879.710.724,22	95.038.635.491,10

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2023

5.1.5.7 Koreksi SiLPA Tahun Lalu

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Koreksi SiLPA tahun lalu pada Tahun 2023 dan 2022 yang terdiri dari:

Tabel 5.1.5. 11 Nilai Koreksi SiLPA Tahun 2023 dan 2022

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Koreksi Kesalahan Pengakuan Pendapatan LRA Jasa Giro Dana BOK di Puskesmas Dataran Bulan dan Puskesmas Lebiti	59.092,00	0,00
Jumlah	59.092,00	0,00

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2023

Koreksi SiLPA Tahun Lalu yang disajikan di atas juga telah dijelaskan dan diungkapkan dalam Penjelasan atas Pos-Pos LP-SAL pada *point 5.1.2* di atas.

5.1.5.8 Saldo Akhir Kas

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Saldo Akhir Kas Tahun 2023 dan 2022 yang terdiri dari:

Tabel 5.1.5. 12 Nilai Saldo Akhir Kas Tahun 2023 dan 2022

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Kas di Kas Daerah	55.920.049.657,26	35.197.426.273,21
Kas di Bendahara Penerimaan	186.663.624,00	11.596.000,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Kas di BLUD	9.553.418.219,78	3.658.343.740,93
Kas Dana BOS	29.360.170,00	40.995.740,00
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	142.895.487,55	76.771.462,25
Kas Lainnya	2.424.458.545,84	657.470.084,83
Setara Kas	0,00	29.237.107.423,00
Jumlah	68.256.845.704,43	68.879.710.724,22

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2023

Pada Tahun 2023 dan 2022 Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una telah menyajikan Kas Lainnya di Bendahara (Selain BUD) atas utang yang disajikan sebagai utang PFK, jasa giro pada kas bendahara, saldo akhir kas BOK dan saldo akhir dana CSR. Terdapat perbedaan saldo akhir kas pada laporan arus kas dengan akun kas setara kas pada neraca, disebabkan adanya penerimaan dana CSR tahun berjalan yang tidak disajikan dalam APBD. Dalam Dana Saldo Akhir Kas tersebut di atas terdapat Dana SiLPA Terikat dan SiLPA Non-Terikat yang dapat digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una untuk pelaksanaan aktivitas-aktivitas arus kas



di tahun mendatang. Rincian Dana SiLPA Terikat dan SiLPA Non-Terikat telah diungkapkan dalam Penjelasan atas Pos-Pos LRA pada *point 5.1.1* di atas.

5.1.6 Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari Laporan Perubahan Ekuitas (dalam satuan mata uang Rupiah) dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.1.6.1 Ekuitas Awal

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas saldo Ekuitas Awal Tahun 2023 dan 2022 yang hanya terdiri dari:

Tabel 5.1.6. 1 Nilai Saldo Ekuitas Awal Tahun 2023 dan 2022

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Ekuitas Awal	2.117.999.271.759,59	2.042.919.829.974,18
Jumlah	2.117.999.271.759,59	2.042.919.829.974,18

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2023

Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una menyajikan saldo Ekuitas Awal Tahun 2023 dan 2022 yang merupakan Saldo Ekuitas Akhir tahun 2022 dan 2021 pada Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una yang disajikan dalam LPE pada masing-masing tahun berkenaan.

5.1.6.2 Surplus/(Defisit)-LO

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Surplus/(Defisit)-LO Tahun 2023 dan 2022 yang hanya terdiri dari:

Tabel 5.1.6. 2 Nilai Surplus/(Defisit)-LO Tahun 2023 dan 2022

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Surplus/(Defisit)-LO	181.538.412.067,30	48.229.503.616,41
Jumlah	181.538.412.067,30	48.229.503.616,41

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2023

Saldo Surplus/(Defisit)-LO yang disajikan di atas sama dengan nilai saldo Surplus/(Defisit)-LO yang disajikan dalam LO sebagaimana telah diungkapkan dalam Penjelasan atas Pos-Pos LO pada *point 5.1.4*.

5.1.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Tahun 2023 dan 2022 yang terdiri dari:

Tabel 5.1.6. 3 Nilai Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Tahun 2023 dan 2022

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Koreksi Ekuitas atas Aset Lancar	(23.681.886.061,20)	21.291.239.985,00
Koreksi Ekuitas atas Aset Tetap	(4.427.841.957,00)	49.758.500,00
Koreksi Ekuitas atas Aset Lainnya	(6,89)	0,00
Koreksi Ekuitas atas Kewajiban	6.832.894.036,48	5.508.939.684,00
Koreksi Ekuitas atas Lainnya	(59.092,00)	0,00
Jumlah	(21.276.893.080,61)	26.849.938.169,00

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2023

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar yang merupakan transaksi penyesuaian aset dan kewajiban yang disebabkan oleh adanya koreksi baik lebih catat maupun kurang catat dari tahun-tahun sebelumnya sehingga pada Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una melakukan penyesuaian. Berikut kejadian Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar yang signifikan mempengaruhi nilai koreksi penyajian Aset dan Kewajiban diantaranya yaitu:

1. Koreksi Ekuitas atas Aset Lancar yang disebabkan adanya pemutakhiran piutang PBB, pengakuan kurang bayar transfer pemerintah pusat-dana perimbangan sesuai KMK Nomor 38/KM.7/2023 dan berkurang penyisihan BLUD atas pelunasan piutang BLUD;
2. Koreksi Ekuitas atas Aset Tetap yang disebabkan adanya koreksi saldo awal akumulasi penyusutan aset tetap hibah tahun-tahun sebelumnya;
3. Koreksi Ekuitas atas Aset Lainnya yang disebabkan adanya kelebihan pencatatan tuntutan ganti kerugian daerah dan koreksi saldo awal amortisasi aset tidak berwujud;
4. Koreksi Ekuitas atas Kewajiban yang disebabkan adanya pengakuan lebih bayar transfer pemerintah pusat-dana perimbangan sesuai KMK Nomor 38/KM.7/2023 dan pengurangan utang jangka pendek lainnya tahun-tahun sebelumnya; dan
5. Koreksi Ekuitas Lainnya yang disebabkan adanya koreksi kesalahan pengakuan pendapatan LRA jasa giro dana BOK di Puskesmas.

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Terhadap Kelompok Akun dalam Laporan Neraca Per 31 Desember 2023 digambarkan dalam diagram di bawah ini.



Grafik 5. 4 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Tahun 2023



5.1.6.4 Ekuitas Akhir

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas saldo Ekuitas Akhir milik Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una per 31 Desember 2023 dan 2022.

Tabel 5.1.6. 4 Nilai Saldo Ekuitas Akhir Tahun 2023 dan 2022

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Ekuitas Akhir	2.278.260.790.746,28	2.117.999.271.759,59
Jumlah	2.278.260.790.746,28	2.117.999.271.759,59

Sumber : BPKAD/SIPD AKLAP TA 2023

Saldo ekuitas akhir yang tersaji dalam Laporan Ekuitas ini sama besarnya dengan nilai ekuitas yang tersaji di Neraca per 31 Desember 2023 dan 2022 sebagaimana dijelaskan pada penjelasan atas pos-pos Neraca pada *point 5.1.3*.

5.2 Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada pemerintah daerah

- A. Berdasarkan hasil pemantauan terhadap penyelesaian ganti kerugian daerah, BPK menyimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una telah menetapkan pembentukan MPPKD sesuai Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/14/BPKAD/2023 tentang Manjelis Pertimbangan Penyelesaian Keuangan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2023 tanggal 2 Januari 2023 dan pembentukan TPKD sesuai Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/3.C/BPKAD/2023 tentang Tim Penyelesaian Kerugian Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2023 tanggal 2 Januari 2023 untuk mendukung proses penyelesaian kerugian daerah sesuai tupoksi masing-masing.
- B. Sampai dengan Semester II TA.2023, kasus kerugian daerah sebanyak 1.245 kasus sebesar Rp.30.611.532.668,07. Dari Jumlah tersebut, sebanyak 381 kasus sebesar Rp.2.040.375.818,25 telah mendapatkan pembebasan, sebanyak 524 kasus sebesar Rp.4.102.674.228,97 telah dilunasi, serta sebanyak 172 kasus sebesar Rp.14.836.047.633,82 telah diangsur sehingga sisa kerugian yang belum dipulihkan sebesar Rp.9.632.434.987,03 dengan rincian sebagai berikut:
 1. Kasus kerugian daerah yang telah ditetapkan sebanyak 422 kasus sebesar Rp.2.653.058.397,75. Dari jumlah tersebut, 381 kasus sebesar Rp.2.040.375.818,25 telah mendapatkan pembebasan, 3 kasus sebesar Rp.2.263.205,00 telah dilunasi dan 34 kasus sebesar Rp.374.563.390,50 telah diangsur, sehingga sisa kerugian yang belum dipulihkan sebesar Rp.233.855.984,00;
 1. Kasus kerugian daerah dalam proses penetapan sebanyak 24 kasus sebesar Rp.689.590.937,00. Dari jumlah tersebut, 6 kasus sebesar Rp.11.088.600,00 telah dilunasi dan 7 kasus sebesar Rp.91.833.357,00 telah diangsur, sehingga sisa kerugian yang belum dipulihkan sebesar Rp.586.668.980,00; dan
 2. Proses penyelesaian kerugian daerah yang masi berupa informasi sebanyak 799 kasus sebesar Rp.27.270.883.333,32. Dari jumlah tersebut, 515 kasus sebesar Rp.4.089.322.423,97 telah dilunasi dan 131 kasus sebesar



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

Rp.14.369.650.886,32 telah diangsur, sehingga sisa kerugian yang belum di pulihkan sebesar Rp.8.811.910.023,03.

- C. Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una memiliki aset dalam bentuk situs dan benda bersejarah yang merupakan cagar budaya yang disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5.2.1. 1 Cagar Budaya Kabupaten Tojo Una-Una

No	Uraian	Lokasi
1	Makam Raja Srimanurung	Desa Benteng Kec. Togean
2	Makam Suami Raja Srimanurung bernama Lologani	Desa Benteng Kec. Togean
3	Makam Kapitalau atau Manjawali	Desa Benteng Kec. Togean
4	Batu Senjata Masa Kerajaan Raja Srimanurung	Desa Benteng Kec. Togean
5	Tempat Permandian Raja Sri Manurung	Desa Benteng Kec. Togean
6	Makam Pimpinan Ketua Adat Suku Bobongko	Desa Benteng Kec. Togean
7	Makam Saribuah Anak dari Raja Srimanurung	Desa Benteng Kec. Togean
8	Makam Pasau dan Laborahima	Desa Binanguna Kec. Una-Una
9	Rumah Adat	Desa Binanguna Kec. Una-Una
10	Mesjid Tua Una-Una	Desa Binanguna Kec. Una-Una
11	Kubah Mesjid Tua Una-Una	Desa Binanguna Kec. Una-Una
12	Batu Lungkong Tempat Jatuhnya Pesawat Bomber Wreck B24	Desa Lebiti Kec. Togean
13	Goa Tua Lolangke	Desa Tombiano Kec. Tojo Barat
14	Tiang Jembatan Masolongi Buatan Belanda	Desa Tojo Kec. Tojo
15	Raja Makam Tanjumbulu	Kel. Ampana Kec. Ampana Kota

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan



BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Kabupaten Tojo Una-Una awalnya merupakan bagian dari Kabupaten Poso. Kabupaten ini terbentuk pada tanggal 18 Desember 2003 berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una. Wilayah Kabupaten Tojo Una-Una terletak pada $121^{\circ} 05' 25'' - 123^{\circ} 06' 17''$ BT dan $0^{\circ} 06' 56'' - 2^{\circ} 01' 41''$ LS. Wilayah Kabupaten Tojo Una-Una meliputi dataran dan kepulauan. Secara administratif, batas wilayah Kabupaten Tojo Una-Una yaitu :

Utara : Provinsi Sulawesi Utara
Selatan : Kabupaten Morowali
Barat : Kabupaten Banggai
Timur : Kabupaten Poso

Ditinjau dari posisinya dipermukaan bumi, wilayah Kabupaten Tojo Una-Una terletak dipesisir pantai dan perairan teluk tomini. Kawasan meliputi daratan, hutan dan lembah pegunungan. Sebagian besar wilayah Kabupaten Tojo Una-Una merupakan pegunungan dan perbukitan dengan ketinggian pada umumnya berada 500m dari permukaan laut. Secara geologis wilayah Kabupaten Tojo Una-Una terletak pada lipatan Fennema dan Tineba yang terbentang dibagian barat pegunungan Tokolekaju dibagian barat daya, deretan pegunungan verbeek dibagian tenggara, dan pegunungan lumut dibagian timur laut.

Kabupaten Tojo Una-Una memiliki luas wilayah sebesar 5.721,51 km². Kabupaten Tojo Una-Una terbagi kedalam 12 kecamatan dengan pusat pemerintahan terletak dikota Ampaña. 12 kecamatan pada Kabupaten Tojo Una-Una terdiri atas:

Tabel 6. 1 Daftar Kecamatan di Kabupaten Tojo Una-Una

Kecamatan District	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tojo Barat	13	13	13	13	13
Tojo	16	16	16	16	16
Ulubongka	18	18	18	18	18
Ampaña Tete	20	20	20	20	20
Ampaña Kota	10	10	10	10	10
Ratolindo	10	10	10	10	10
Una-Una	11	11	11	11	11
Batudaka	9	9	9	9	9
Togean	16	16	16	16	16
Walea Kepulauan	9	9	9	9	9
Walea Besar	8	8	8	8	8
Talatako	6	6	6	6	6
Tojo Una-Una	146	146	146	146	146

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Tojo Una-una



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

Sebagian besar wilayah Kabupaten Tojo Una-Una merupakan daratan luas. Kecamatan yang terletak didaratan mencapai 4.958,18 km² sedangkan kecamatan yang terletak dikepulauan hanya 13.34 persen dari total wilayah Kabupaten Tojo Una-Una.

Salah satu yang menjadi daya tarik wisata Kabupaten Tojo Una-Una yaitu keindahan Kepulauan Togean. Kawasan wisata dikepulauan Togean memiliki keanekaragaman biota laut yang indah dan sangat terkenal hingga ke mancanegara. Dikawasan ini para wisatawan dapat menikmati indahnya pemandangan bawah laut yang menakjubkan dan sebagainya.

Susunan Lembaga Eksekutif dan Lembaga Legislatif Kabupaten Tojo Una-Una saat ini adalah sebagai berikut:

Lembaga Eksekutif

1. Bupati : **MOHAMMAD LAHAY, SE.,MM**
2. Wakil Bupati : **ILHAM LAWIDU, SH**
3. Sekretaris Daerah : **Dr. SOVIANUR KURE, SE.,M.Si**

Lembaga Legislatif

- Ketua DPRD : **Dr. MAHMUD LAHAY, SE.,M.Si**
Wakil Ketua DPRD : **1. GUSNAR A. SULEMAN, SE.,MM**
2. MOH. SALIM MAKARURU,SS

Jumlah pegawai per 31 Desember 2023 sebanyak 3808 orang yang disajikan berikut:

Tabel 6. 2 Jumlah Pegawai per 31 Desember 2023

Golongan	Eselon					Tenaga Fungsional			Staf	Jumlah
	I	II	III	IV	V	Pendidikan	Kesehatan	Lainnya		
Golongan IV/E	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Golongan IV/D	0	1	0	0	0	0	1	0	0	2
Golongan IV/C	0	22	0	0	0	1	5	0	1	29
Golongan IV/B	0	1	30	0	0	130	10	1	2	174
Golongan IV/A	0	0	81	23	0	171	27	8	13	323
SUB JUMLAH	2	24	111	23	0	302	43	9	16	530
Golongan III/D	0	0	21	264	0	315	139	21	58	818
Golongan III/C	0	0	4	130	0	354	123	12	70	693
Golongan III/B	0	0	0	60	0	317	96	33	133	639
Golongan III/A	0	0	0	2	0	172	114	13	228	529
SUB JUMLAH	0	0	25	456	0	1158	472	79	489	2679
Golongan II/D	0	0	0	0	0	30	96	3	156	285
Golongan II/C	0	0	0	0	0	18	9	0	79	106
Golongan II/B	0	0	0	0	0	3	10	3	144	160
Golongan II/A	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31
SUB JUMLAH	0	0	0	0	0	51	115	6	410	582
Golongan I/D	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9
Golongan I/C	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7
Golongan I/B	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Golongan I/A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUB JUMLAH	0	0	0	0	0	0	0	0	17	17
TOTAL	2	24	136	479	0	1511	630	94	932	3808

Catatan : Pejabat negara masuk dalam kolom Golongan IV/E Eselon I



BAB VII PENUTUP

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun Anggaran 2023 merupakan bentuk pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan dan peraturan terkait lainnya, untuk memberikan informasi yang lengkap dan andal kepada pemangku kepentingan (*stakeholder*) guna meningkatkan *good governance*.

Demikian beberapa catatan penting yang dituangkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun Anggaran 2023 secara keseluruhan, semoga CaLK ini membantu mempermudah dan memperjelas pemahaman pembaca laporan keuangan dalam mengevaluasi pencapaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun Anggaran 2023.

BUPATI TOJO UNA-UNA

MOHAMMAD LAHAY